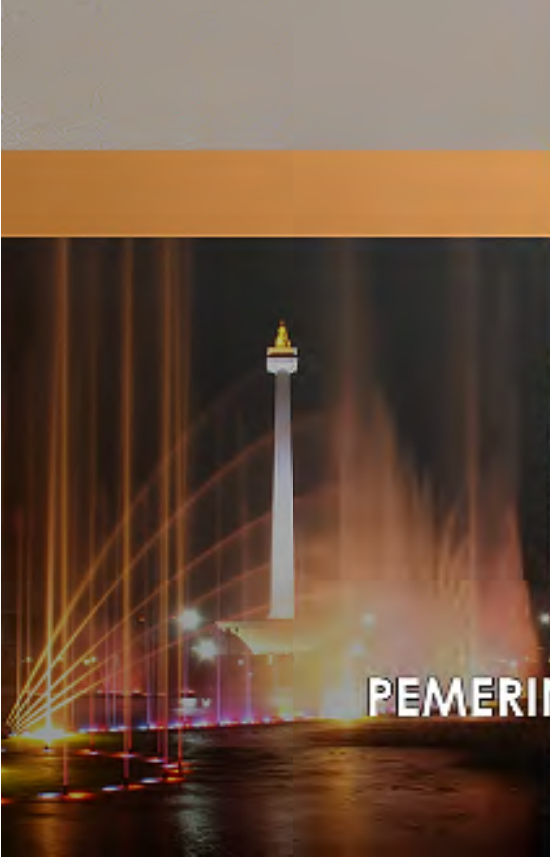




LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 (AUDITED)



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013



LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013**



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

Nomor : 646/-1.93
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Representasi Manajemen

Jakarta, 23 Mei 2013

Kepada

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, Neraca per 31 Desember 2012 dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun juga menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.
2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan :
 - a. laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
 - b. telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI;
 - c. seluruh transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
 - d. rekening atas nama Pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan semuanya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
 - e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
 - f. adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, sejauh ini sedang diteliti;
 - g. pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

- h. tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
 - i. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi semua aspek Perjanjian Kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
 - j. tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2012 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
 - k. tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan
 - l. saya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal penilaian :
- a. keandalan laporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
4. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.

Identifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga saya bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.

Demikian surat representasi ini saya sampaikan sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Widodo



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Catatan	Anggaran 2012	Realisasi 2012 Audited	(%)	Realisasi 2011 Audited
1	2	3	4	5	6=5:4	7
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	16.525.000.000.000,00	17.721.493.016.509,32	107,24	15.221.249.152.689,46
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	901.224.604.600,00	1.820.435.447.667,00	202,00	609.349.051.004,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	360.000.000.000,00	351.823.210.568,54	97,73	278.789.767.934,40
1.1.4	Lain-lain PAD	5.1.1.1.4	2.737.208.765.751,00	2.147.049.773.179,17	78,44	1.716.599.322.802,96
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		20.523.433.370.351,00	22.040.801.447.924,03	107,39	17.825.987.294.430,82
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	9.350.000.000.000,00	10.984.787.699.665,00	117,48	8.747.636.169.886,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	151.550.000.000,00	294.849.251.139,00	194,56	192.163.351.403,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	275.327.857.000,00	275.327.857.000,00	100,00	209.909.442.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		9.776.877.857.000,00	11.554.964.807.804,00	118,19	9.149.708.963.289,00
	Dana Perimbangan					
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	1.816.564.063.000,00	1.779.682.463.000,00	97,97	1.313.254.447.360,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		1.816.564.063.000,00	1.779.682.463.000,00	97,97	1.313.254.447.360,00
	Total Pendapatan Transfer		11.593.441.920.000,00	13.334.647.270.804,00	115,02	10.462.963.410.649,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	1.533.136.668.266,00	3.731.333.261,00	0,24	8.410.777.790,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		1.533.136.668.266,00	3.731.333.261,00	0,24	8.410.777.790,00
	JUMLAH PENDAPATAN		33.650.011.958.617,00	35.379.180.051.989,03	105,14	28.297.361.482.869,82
2	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi					
2.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	11.896.841.165.160,00	11.085.950.169.778,00	93,18	9.895.560.039.177,00
2.1.2	Belanja Barang	5.1.2.1.1.1.b	11.383.664.759.250,00	9.703.452.918.759,00	85,24	8.341.831.218.443,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	4.353.828.000,00	3.172.974.470,00	72,88	4.353.524.981,00
2.1.4	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.d	2.089.282.239.330,00	1.933.097.203.700,00	92,52	825.595.987.217,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.e	29.470.000.000,00	15.993.940.302,00	54,27	38.587.205.558,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.1.1.f	46.350.000.000,00	30.186.258.790,00	65,13	1.338.583.170,00
	Jumlah Belanja Operasi		25.449.961.991.740,00	22.771.853.465.799,00	89,48	19.107.266.558.546,00
2.2	Belanja Modal					
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	2.189.409.817.529,00	493.714.536.473,00	22,55	836.875.205.034,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	4.022.430.078.390,00	3.262.969.992.000,00	81,12	2.230.836.678.548,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	3.119.395.559.863,00	2.527.761.153.328,00	81,03	2.178.504.183.603,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	2.815.865.912.275,00	1.961.671.907.869,00	69,66	1.661.022.855.743,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	672.627.883.235,00	538.248.170.756,00	80,02	409.094.411.823,00
	Jumlah Belanja Modal		12.819.729.251.292,00	8.784.365.760.426,00	68,52	7.316.333.334.751,00
2.3	Belanja Tak Terduga					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.1.1.3	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
2.4	Transfer					
2.4.1	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00	82,26	26.423.599.893.297,00
	SURPLUS/DEFISIT		(4.716.668.115.224,00)	3.820.473.153.064,03	(81,00)	1.873.761.589.572,82

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Catatan	Anggaran 2012	Realisasi 2012 Audited	(%)	Realisasi 2011 Audited
1	2	3	4	5	6=5:4	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.1.3.1				
3.1.1	Penggunaan SILPA		6.470.618.490.508,00	6.470.618.490.508,20	100,00	4.911.196.018.129,38
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	4.933.521.975,00	0,00	14.882.248.025,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		1.232.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan		7.703.218.490.508,00	6.475.552.012.483,20	84,06	4.926.078.266.154,38
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.3.2				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	49.061.900.213,00	0,00	54.556.325.705,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		2.781.684.906.912,00	618.477.833.261,00	22,23	136.780.777.790,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		11.228.300.000,00	8.169.288.822,00	72,75	11.227.980.806,00
3.2.6	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		35.045.236.858,00	34.653.506.454,00	98,88	120.985.101.023,00
3.2.7	Pembayaran Utang Kepada Pegawai		410.340.499,00	112.920.178,00	27,52	1.346.657.473,00
3.2.8	Pembayaran Utang Biaya Pemungutan		4.183.175.979,00	4.077.107.793,00	97,46	0,00
3.2.9	Pembayaran Utang Suku Cadang		2.365.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Pembayaran Utang Perpanjangan STNK		4.642.500,00	3.629.500,00	78,18	0,00
3.2.11	Pembayaran Utang Pajak		100.591.407.536,00	62.307.448.512,00	61,94	0,00
3.2.12	Pemberian Pinjaman Daerah		53.400.000.000,00	55.440.000.000,00	103,82	4.324.522.622,00
	Jumlah Pengeluaran		2.986.550.375.284,00	832.303.634.733,00	27,87	329.221.365.219,00
	PEMBIAYAAN NETO		4.716.668.115.224,00	5.643.248.377.750,20	119,64	4.596.856.900.935,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			9.463.721.530.814,23		6.470.618.490.508,20

Jakarta, Mei 2013
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO WIDODO



NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013**

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.1.4.1.1	9.457.673.627.660,23	6.604.170.595.035,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.4.1.2	58.812.066.657,00	63.322.260.315,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.4.1.3	2.260.860,00	471.150.214.490,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.1.4.1.4	424.844.726.091,00	-
Piutang Pajak	5.1.4.1.5	365.651.751.132,00	318.360.404.837,00
Piutang Retribusi	5.1.4.1.6	75.814.361.784,00	52.164.511.797,00
Piutang BLUD	5.1.4.1.7	67.883.800.527,00	-
Piutang Dana Perimbangan	5.1.4.1.8	40.510.071.353,00	-
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.1.4.1.9	1.705.415.742,00	647.865.846,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.1.4.1.10	14.799.266.672,00	6.010.554.773,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.1.4.1.11	19.129.947.636,00	17.433.576.963,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	5.1.4.1.12	96.373.461.207,00	-
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.1.4.1.13	68.002.646.550,00	82.806.023.066,00
Piutang Penjualan Saham	5.1.4.1.14	-	47.871.975,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	5.1.4.1.15	2.366.309.441,00	-
Piutang Lainnya	5.1.4.1.16	10.492.265.788,00	360.736.484.563,00
Aset Lancar Lainnya	5.1.4.1.17	14.923.237.564,00	-
Persediaan	5.1.4.1.18	437.576.910.348,00	530.477.129.539,00
Jumlah Aset Lancar		11.156.562.127.012,23	8.507.327.493.199,20
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.1.4.2.1	449.259.739.803,00	836.797.591.237,00
Investasi Dalam Dana Bergulir		889.968.530.527,00	836.797.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(440.708.790.724,00)	-
Investasi Permanen	5.1.4.2.2	6.742.245.841.011,00	5.187.158.099.549,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		7.191.505.580.814,00	6.023.955.690.786,00
Aset tetap	5.1.4.3		
Tanah		279.151.046.794.830,00	280.270.515.025.054,00
Peralatan dan Mesin		14.464.442.456.567,00	11.292.005.795.458,00
Gedung dan Bangunan		21.566.584.083.436,00	17.708.599.595.514,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		23.831.416.473.846,00	21.875.489.499.979,00
Aset Tetap Lainnya		1.859.808.199.687,00	1.326.742.286.822,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.406.049.946.404,00	2.597.885.783.289,00
Jumlah Aset tetap		342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00
Dana Cadangan	5.1.4.4	840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.1.4.5.1	68.109.789.672,00	37.890.238.255,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.4.5.2	3.317.851.376.057,00	3.160.513.773.625,00
Aset Tidak Berwujud	5.1.4.5.3	41.639.162.110,00	13.192.113.229,00
Aset di BP THR Lokasari	5.1.4.5.4	12.593.785.847,00	12.571.834.631,00
Aset lain-lain	5.1.4.5.5	22.395.346.157.345,00	22.127.615.873.627,00
Jumlah Aset Lainnya		25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00
JUMLAH ASET		387.303.033.097.835,23	375.745.320.267.463,20

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.1.5.1.1	45.609.595.424,00	190.512.449.471,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	5.1.5.1.2.a	919.895.960,00	1.287.854.344,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	5.1.5.1.2.b	8.169.288.822,00	8.169.288.822,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.5.1.3	14.790.800.740,00	13.412.097.456,00
Utang Belanja	5.1.5.1.4	577.640.915.543,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.5.1.5	244.490.883.599,00	481.631.794.979,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		891.621.380.088,00	695.013.485.072,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.1.5.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		12.253.933.233,00	20.423.222.055,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		12.253.933.233,00	20.423.222.055,00
JUMLAH KEWAJIBAN		903.875.313.321,00	715.436.707.127,00
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	5.1.6.1		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		9.463.721.530.814,23	6.470.618.490.508,20
Pendapatan Ditangguhkan		421.696.539.452,00	468.833.033.411,00
Cadangan Piutang		762.729.297.832,00	838.207.293.820,00
Cadangan Persediaan		437.576.910.348,00	530.477.129.539,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		(835.706.769.086,00)	(495.821.939.151,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya		14.923.237.564,00	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		10.264.940.746.924,23	7.812.314.008.127,20
Ekuitas Dana Investasi	5.1.6.2		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		7.191.505.580.814,00	6.023.955.690.786,00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		(12.253.933.233,00)	(20.423.222.055,00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		375.294.139.873.382,00	366.426.554.288.214,00
Ekuitas Dana Cadangan	5.1.6.3		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
JUMLAH EKUITAS DANA		386.399.157.784.514,23	375.029.883.560.336,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		387.303.033.097.835,23	375.745.320.267.463,20

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


JOKO WIDODO

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	9.941.332.681.268,23	7.138.643.069.840,20
Kas di Kas Daerah	9.457.673.627.660,23	6.604.170.595.035,20
Kas Daerah	9.412.305.325.601,23	6.415.285.572.576,20
Potongan Pajak dan Jamsostek	35.679.588.189,00	180.324.484.427,00
Kas Non Anggaran	9.688.713.870,00	8.560.538.032,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	58.812.066.657,00	63.322.260.315,00
Sisa Uang Persediaan	51.416.205.213,00	55.332.917.932,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	19.203.717,00	1.589.554,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	4.296.293.333,00	7.987.752.829,00
Uang Titipan	3.080.364.394,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	2.260.860,00	471.150.214.490,00
Pendapatan yang Belum Disetor	2.260.860,00	62.176.350,00
Kas BLUD (Unit Swadana)	-	468.769.267.507,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	-	1.958.141.015,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	-	360.629.618,00
Kas dan Setara Kas BLUD	424.844.726.091,00	-
Kas Tunai	9.180.359.503,00	-
Kas di Bank	342.898.883.894,00	-
Kas Transito	69.581.431.478,00	-
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	2.325.678.308,00	-
Uang Muka Pasien RSUD/K	858.372.908,00	-
Piutang	762.729.297.832,00	838.207.293.820,00
Piutang Pajak	365.651.751.132,00	318.360.404.837,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	6.843.100.410,00	3.733.637.146,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	259.643.510,00	1.217.038.410,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.409.997.492,00	-
Piutang Pajak Hotel	17.557.342.727,00	16.653.392.552,00
Piutang Pajak Restoran	99.549.745.298,00	107.130.290.458,00
Piutang Pajak Hiburan	42.537.429.230,00	43.735.944.732,00
Piutang Pajak Reklame	114.425.673.410,00	63.148.211.222,00
Piutang Pajak Parkir	2.833.064.117,00	3.335.167.612,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.566.025.260,00	24.869.294.530,00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah	57.669.729.678,00	54.537.428.175,00
Piutang Retribusi	75.814.361.784,00	52.164.511.797,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	1.310.114.824,00	-
Piutang Retribusi Jasa Usaha	15.131.157.156,00	-
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	54.304.022.867,00	-
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	5.069.066.937,00	-
Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan	-	35.999.305.209,00
Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah	-	4.424.686.924,00
Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan	-	1.387.577.166,00
Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan	-	5.754.756.255,00
Piutang Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan	-	1.200.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan	-	4.041.985.000,00
Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker	-	40.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan	-	150.150.000,00
Piutang Retribusi Administrasi Perizinan Pembangunan	-	593.760,00
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	394.766.983,00
Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	-	3.003.000,00
Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan	-	6.447.500,00

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
Piutang BLUD	67.883.800.527,00	-
Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	39.139.638.216,00	-
Piutang BLUD Pelayanan Transportasi	584.801.830,00	-
Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi	374.971.720,00	-
Piutang BLUD Lainnya	27.784.388.761,00	-
Piutang Dana Perimbangan	40.510.071.353,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	40.510.071.353,00	-
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	1.705.415.742,00	647.865.846,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	14.799.266.672,00	6.010.554.773,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	19.129.947.636,00	17.433.576.963,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	96.373.461.207,00	-
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	68.002.646.550,00	82.806.023.066,00
Piutang Penjualan Saham	-	47.871.975,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	2.366.309.441,00	-
Piutang Lainnya	10.492.265.788,00	360.736.484.563,00
Piutang Dividen/Kontribusi	338.957.600,00	-
Piutang Bunga Deposito	1.972.602.740,00	2.902.739.726,00
Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Piutang Tagihan Listrik dan Air	3.073.330.416,00	2.246.287.675,00
Piutang Sewa	-	7.099.814.420,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	688.235.032,00	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	-	2.817.730.006,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	-	97.531.776.717,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	-	2.515.206.855,00
Piutang di BLUD	-	55.638.874.076,00
Piutang Pelayanan Kesehatan	-	27.864.559.387,00
Piutang Lainnya di BLUD	-	27.774.314.689,00
Piutang Lain-lain	-	185.564.915.088,00
Asuransi Dibayar di Muka	-	16.575.490.628,00
Uang Muka Kerja - SKPD	-	168.989.424.460,00
Aset Lancar Lainnya	14.923.237.564,00	-
Belanja Dibayar di Muka	14.844.237.564,00	-
Asuransi Dibayar di muka	14.844.237.564,00	-
Uang Muka Kerja	79.000.000,00	-
Uang Muka Kerja di BLUD	79.000.000,00	-
Persediaan	437.576.910.348,00	530.477.129.539,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.156.562.127.012,23	8.507.327.493.199,20
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	449.259.739.803,00	836.797.591.237,00
Investasi Dalam Dana Bergulir	449.259.739.803,00	836.797.591.237,00
Investasi Dalam Dana Bergulir	889.968.530.527,00	-
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(440.708.790.724,00)	-
Investasi Permanen	6.742.245.841.011,00	5.187.158.099.549,00
Penyertaan Modal pada BUMD	635.164.676.849,00	635.177.963.517,00
Penyertaan Modal PD Dharma Jaya	33.148.897.467,00	37.425.012.275,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	100.858.261.189,00	89.961.884.886,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	376.135.756.773,00	387.248.131.582,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	125.021.761.420,00	120.542.934.774,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	6.107.081.164.162,00	4.551.980.136.032,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	1.194.073.167.632,00	609.828.914.716,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	13.292.586.656,00	11.995.198.013,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	112.156.667.409,00	104.573.943.127,00

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	154.000.248.575,00	145.586.286.563,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	904.219.206.868,00	821.255.307.513,00
Penyertaan Modal PT Ratax Armada	364.099.431,00	455.043.277,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Alakasa Industrindo Tbk	-	4.885.650.000,00
Penyertaan Modal PT Cermani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	815.081.100.620,00	683.192.751.178,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	1.934.697.119.531,00	1.246.854.835.200,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	476.581.488.104,00	466.835.609.931,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	161.354.302.336,00	115.255.419.514,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	7.191.505.580.814,00	6.023.955.690.786,00
ASET TETAP		
Tanah	279.151.046.794.830,00	280.270.515.025.054,00
Peralatan dan Mesin	14.464.442.456.567,00	11.292.005.795.458,00
Gedung dan Bangunan	21.566.584.083.436,00	17.708.599.595.514,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.831.416.473.846,00	21.875.489.499.979,00
Aset Tetap Lainnya	1.859.808.199.687,00	1.326.742.286.822,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.406.049.946.404,00	2.597.885.783.289,00
JUMLAH ASET TETAP	342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
JUMLAH DANA CADANGAN	840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	68.109.789.672,00	37.890.238.255,00
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	68.109.789.672,00	37.890.238.255,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.317.851.376.057,00	3.160.513.773.625,00
Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	339.015.103.572,00	339.015.103.572,00
Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.021.276.911.132,00	1.008.667.348.780,00
Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.689.204.485.353,00	1.544.476.445.273,00
Aset Tidak Berwujud	41.639.162.110,00	13.192.113.229,00
Aset di BP THR Lokasari	12.593.785.847,00	12.571.834.631,00
Aset Lain-Lain	22.395.346.157.345,00	22.127.615.873.627,00
Aset Tetap Rusak Berat	360.123.826.749,00	286.840.762.551,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	570.557.400,00	-
Aset Lain-Lain BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	119.024.219.062,00	110.739.341.062,00
Aset Fasos dan Fasum	21.896.215.686.592,00	21.710.623.902.472,00
Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	15.754.944.225,00	15.754.944.225,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
JUMLAH ASET LAINNYA	25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00
JUMLAH ASET	387.303.033.097.835,23	375.745.320.267.463,20

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	45.609.595.424,00	190.512.449.471,00
Utang PFK di PPKD	35.679.588.189,00	180.324.484.427,00
Utang PFK di SKPD	9.930.007.235,00	10.187.965.044,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9.089.184.782,00	9.457.143.166,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	919.895.960,00	1.287.854.344,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	8.169.288.822,00	8.169.288.822,00
Pendapatan Diterima Dimuka	14.790.800.740,00	13.412.097.456,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh Pihak III	7.289.309.120,00	5.909.398.723,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	6.643.118.712,00	7.142.069.115,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	858.372.908,00	360.629.618,00
Utang Belanja	577.640.915.543,00	-
BYMHD - BLUD	137.955.722.329,00	-
BYMHD - TALI	1.860.020.461,00	-
Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	437.825.172.753,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	244.490.883.599,00	481.631.794.979,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	196.518.210.705,00	198.563.875.452,00
Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD	154.769.970.863,00	39.645.760.836,00
Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD	41.748.239.842,00	58.326.707.080,00
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	-	100.591.407.536,00
Utang Jaminan	9.688.713.870,00	8.560.538.032,00
Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	38.283.959.024,00	-
Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)	-	66.877.303.126,00
BYMHD - BLUD	-	61.726.666.062,00
BYMHD - TAL	-	5.150.637.064,00
Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	-	207.630.078.369,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	891.621.380.088,00	695.013.485.072,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	12.253.933.233,00	20.423.222.055,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	12.253.933.233,00	20.423.222.055,00
JUMLAH KEWAJIBAN	903.875.313.321,00	715.436.707.127,00
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	9.463.721.530.814,23	6.470.618.490.508,20
Pendapatan Ditangguhkan	421.696.539.452,00	468.833.033.411,00
Cadangan Piutang	762.729.297.832,00	838.207.293.820,00
Cadangan Persediaan	437.576.910.348,00	530.477.129.539,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(835.706.769.086,00)	(495.821.939.151,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya	14.923.237.564,00	-
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	10.264.940.746.924,23	7.812.314.008.127,20

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2012 (AUDITED)	31 DESEMBER 2011 (AUDITED)
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	7.191.505.580.814,00	6.023.955.690.786,00
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(12.253.933.233,00)	(20.423.222.055,00)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	375.294.139.873.382,00	366.426.554.288.214,00
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	840.077.164.208,00	791.015.263.995,00
JUMLAH EKUITAS DANA	386.399.157.784.514,23	375.029.883.560.336,20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	387.303.033.097.835,23	375.745.320.267.463,20

Jakarta, Mei 2013

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**


JOKO WIDODO



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2012

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013**

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2012 Audited	2011 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Pajak Daerah	5.1.7.1.1.a	17.721.493.016.509,30	15.221.249.152.689,40
Retribusi daerah	5.1.7.1.1.b	1.820.435.447.667,00	609.349.051.004,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.7.1.1.c	351.823.210.568,54	278.789.767.934,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.1.7.1.1.d	2.128.745.654.965,95	1.708.621.029.835,96
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.7.1.1.e	10.984.787.699.665,00	8.747.636.169.886,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.7.1.1.f	294.849.251.139,00	192.163.351.403,00
Dana Alokasi Umum	5.1.7.1.1.g	275.327.857.000,00	209.909.442.000,00
Dana Penyesuaian	5.1.7.1.1.h	1.779.682.463.000,00	1.313.254.447.360,00
Pendapatan Hibah	5.1.7.1.1.i	3.731.333.261,00	8.410.777.790,00
Jumlah Arus Kas Masuk		35.360.875.933.775,80	28.289.383.189.902,80
Arus Kas Keluar :			
Belanja Pegawai	5.1.7.1.2.a	11.085.950.169.778,00	9.895.560.039.177,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.7.1.2.b	9.703.452.918.759,00	8.341.831.218.443,00
Belanja Bunga	5.1.7.1.2.c	3.172.974.470,00	4.353.524.981,00
Belanja Hibah	5.1.7.1.2.d	1.933.097.203.700,00	825.595.987.217,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.7.1.2.e	15.993.940.302,00	38.587.205.558,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.7.1.2.f	30.186.258.790,00	1.338.583.170,00
Belanja Tidak Terduga		2.487.672.700,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		22.774.341.138.499,00	19.107.266.558.546,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		12.586.534.795.276,80	9.182.116.631.356,76
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
Arus Kas Masuk :	5.1.7.2.1		
Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah		11.914.359.150,00	3.425.839.360,00
Pendapatan Brandgang		596.400.000,00	-
Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor		48.520.000,00	96.050.000,00
Pendapatan Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai		577.685.000,00	
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		2.879.288.189,22	2.544.090.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		1.925.449.978,00	1.877.313.607,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		7.600.000,00	35.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		17.949.302.317,22	7.978.292.967,00
Arus Kas Keluar :	5.1.7.2.2		
Belanja Tanah		493.714.536.473,00	836.875.205.034,00
Belanja Peralatan dan Mesin		3.262.969.992.000,00	2.230.836.678.548,00
Belanja Gedung dan Bangunan		2.527.761.153.328,00	2.178.504.183.603,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.961.671.907.869,00	1.661.022.855.743,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		538.248.170.756,00	409.094.411.823,00
Jumlah Arus Kas Keluar		8.784.365.760.426,00	7.316.333.334.751,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(8.766.416.458.108,78)	(7.308.355.041.784,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
Arus Kas Masuk :			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.7.3.1.a	4.933.521.975,00	14.882.248.025,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2011)	5.1.7.3.1.b	55.332.917.932,00	39.372.286.912,00
Jumlah Arus Kas Masuk		60.266.439.907,00	54.254.534.937,00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.7.3.2.a	49.061.900.213,00	54.556.325.705,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.7.3.2.b	618.477.833.261,00	136.780.777.790,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	5.1.7.3.2.c	8.169.288.822,00	11.227.980.606,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	5.1.7.3.2.d	101.041.692.259,00	120.985.101.023,00
Pembayaran Utang Kepada Pegawai		112.920.178,00	1.346.657.473,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.3.2.e	55.440.000.000,00	4.324.522.622,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2012)	5.1.7.3.2.f	51.416.205.213,00	55.332.917.932,00
Jumlah Arus Kas Keluar		883.719.839.946,00	384.554.283.151,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</i>		(823.453.400.039,00)	(330.299.748.214,00)

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2012 Audited	2011 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.1.7.4.1	1.128.175.838,00	995.484.806,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		354.815.896,00	323.165.720,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	1.923.624.936.565,00	1.759.665.947.862,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.925.107.928.299,00	1.760.984.598.388,00
Arus Kas Keluar :			
Pengeluaran Transfer ke Rekening Kas Daerah		0,00	323.165.720,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.1.7.4.3	2.068.269.832.803,00	1.849.363.370.620,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.068.269.832.803,00	1.849.686.536.340,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</i>		(143.161.904.504,00)	(88.701.937.952,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	4.1.7.5	2.853.503.032.625,03	1.454.759.903.406,81
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		6.604.170.595.035,20	5.149.410.691.628,38
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		9.457.673.627.660,23	6.604.170.595.035,20
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		2.260.860,00	471.150.214.490,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		58.812.066.657,00	63.322.260.315,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		424.844.726.091,00	0,00
Saldo Akhir Kas		9.941.332.681.268,23	7.138.643.069.840,20

Jakarta, Mei 2013

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


JOKO WIDODO



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2013**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
 BAB I Pendahuluan.....	 I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 6
 BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	
Target Kinerja APBD.....	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan.....	II - 16
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	II - 22
 BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	 III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	III - 6
 BAB IV Kebijakan Akuntansi.....	 IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 3
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 4
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 22

BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012.....	V	-	1
5.1	Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan.....	V	-	1
5.1.1	Pendapatan Daerah.....	V	-	1
5.1.2	Belanja Daerah.....	V	-	125
5.1.3	Pembiayaan Daerah.....	V	-	215
5.1.4	Aset.....	V	-	216
5.1.5	Kewajiban.....	V	-	297
5.1.6	Ekuitas Dana.....	V	-	321
5.1.7	Komponen-Komponen Laporan Arus Kas.....	V	-	322
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	VI	-	1
BAB VII	Penutup.....	VII	-	1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000	II - 8
2.	Tabel 2.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	II - 10
3.	Tabel 2.3	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	II - 12
4.	Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	II - 12
5.	Tabel 2.5	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000	II - 13
6.	Tabel 2.6	Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Respon Time di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari s/d Desember 2012	II - 36
7.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012	III - 5
8.	Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 2
9.	Tabel 5.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 4
10.	Tabel 5.3	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 5
11.	Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 23
12.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012	V - 24
13.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012	V - 44
14.	Tabel 5.7	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012	V - 60
15.	Tabel 5.8	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012	V - 92
16.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 93
17.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2012	V - 94
18.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Tahun Anggaran 2012	V - 96

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
19.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 96
20.	Tabel 5.13	Realisasi Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 98
21.	Tabel 5.14	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2012	V - 99
22.	Tabel 5.15	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2012	V - 101
23.	Tabel 5.16	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012	V - 109
24.	Tabel 5.17	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012	V - 112
25.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	V - 126
26.	Tabel 5.19	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2012	V - 169
27.	Tabel 5.20	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012	V - 213
28.	Tabel 5.21	Kas di Bank per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 217
29.	Tabel 5.22	Perhitungan Akrua Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2012	V - 242
30.	Tabel 5.23	Perhitungan Akrua Bunga Deposito Per 31 Desember 2012	V - 244
31.	Tabel 5.24	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2011	V - 252
32.	Tabel 5.25	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2012	V - 255
33.	Tabel 5.26	Rincian Nilai Investasi Bina Ekonomi PPMK di BPMPKB Periode 2001 sampai dengan 2007 setelah Pengalihan ke UPDB Per 31 Desember 2012	V - 256
34.	Tabel 5.27	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2012	V - 259
35.	Tabel 5.28	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 260
36.	Tabel 5.29	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 265
37.	Tabel 5.30	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2012	V - 284
38.	Tabel 5.31	Aset Lainnya Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 285
39.	Tabel 5.32	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 290

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
40.	Tabel 5.33	Kewajiban Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 297
41.	Tabel 5.34	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 298
42.	Tabel 5.35	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 300
43.	Tabel 5.36	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 300
44.	Tabel 5.37	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2012	V - 301
45.	Tabel 5.38	Perhitungan Utang Bunga (Akrual) Per 31 Desember 2012	V - 302
46.	Tabel 5.39	Utang Belanja Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 304
47.	Tabel 5.40	Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 305
48.	Tabel 5.41	Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2012 dan 2011	V - 306
49.	Tabel 5.42	Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2012	V - 308
50.	Tabel 5.43	Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2012	V - 333
51.	Tabel 5.44	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2012	V - 336

DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Keterangan	Halaman
1.	Grafik 2.1	Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta	II - 3
2.	Grafik 2.2	Impor DKI Jakarta	II - 4
3.	Grafik 2.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta	II - 5
4.	Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional	II - 6
5.	Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan (%) dari Tahun 2007-2012	II - 7
6.	Grafik 2.6	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	II - 11
7.	Grafik 2.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000	II - 13
8.	Grafik 2.8	Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%)	II - 14
9.	Grafik 2.9	Inflasi DKI Jakarta Selama Tahun 2012	II - 15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012
Lampiran	2	Daftar saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2012
Lampiran	3	Daftar posisi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2012
Lampiran	4	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2012
Lampiran	5	Daftar <i>Stock Opname</i> Persediaan di SKPD per 31 Desember 2012
Lampiran	6	Ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal pemerintah (PMP) per 31 Desember 2012
Lampiran	7	Daftar mutasi Aset Tetap Daerah per 31 Desember 2012
Lampiran	8	Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2012
Lampiran	9	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO per 31 Desember 2012
Lampiran	10	Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2012
Lampiran	11	Pendapatan Diterima Dimuka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2012
Lampiran	12	Pendapatan Diterima Dimuka atas kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2012
Lampiran	13	Daftar Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dan Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012
Lampiran	14	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2012
Lampiran	15	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2012



BAB I

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 adalah berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2010 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012);
26. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012, dan perubahan kedua dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2012.
29. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

30. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
31. Keputusan Gubernur Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .
- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.



BAB II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2012 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2012 mencapai 48.136 juta dollar Amerika, meningkat 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 46.476.

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun 2012 mencapai 11.806 juta dollar Amerika, lebih tinggi 6,46% bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta sebesar 11.043 juta dollar Amerika.

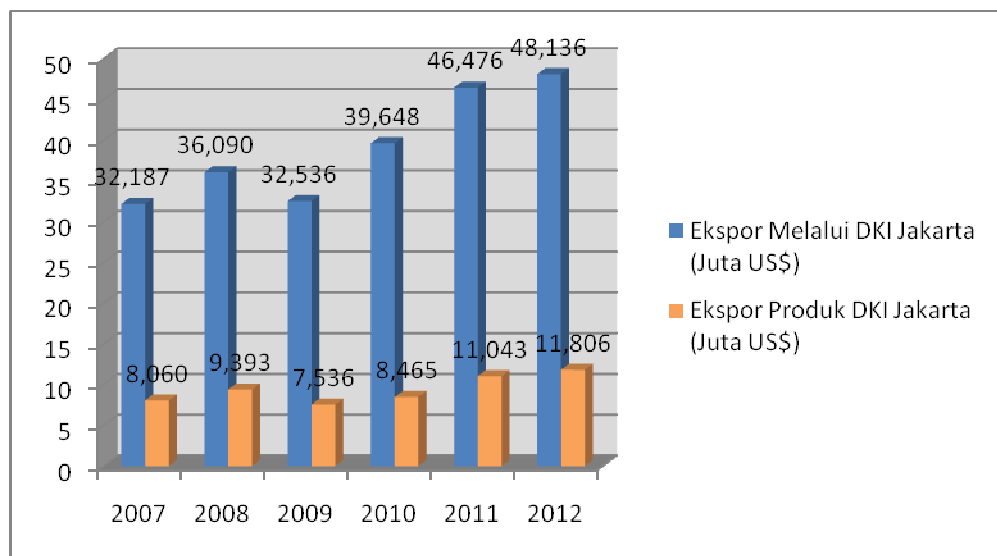
Ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun ekspor produk DKI Jakarta yang diekspor melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain.

Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan *men-generate income* di DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2012, lima negara yang menjadi pasar utama hasil produk Jakarta adalah Amerika Serikat dengan nilai 1.168,76 juta dollar Amerika (9,9%), Singapura sebesar 1.023,32 juta dollar Amerika (8,67%), Thailand sebesar 1.021,02 juta dollar Amerika (8,65%), Australia sebesar 965,93 juta dollar Amerika (8,18%) dan Malaysia sebesar 765,65 juta dollar Amerika.

Jika ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar selama periode tahun 2012 adalah, kendaraan dan bagiannya yakni sebesar 2.744,15 juta dollar Amerika atau sekitar

23,24% dari total ekspor produk DKI Jakarta. Perhiasan/permata menempati peringkat selanjutnya sebesar 1.230,59 juta dollar Amerika atau sekitar 10,42% dari total ekspor.

Grafik 2.1
Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

3) Impor

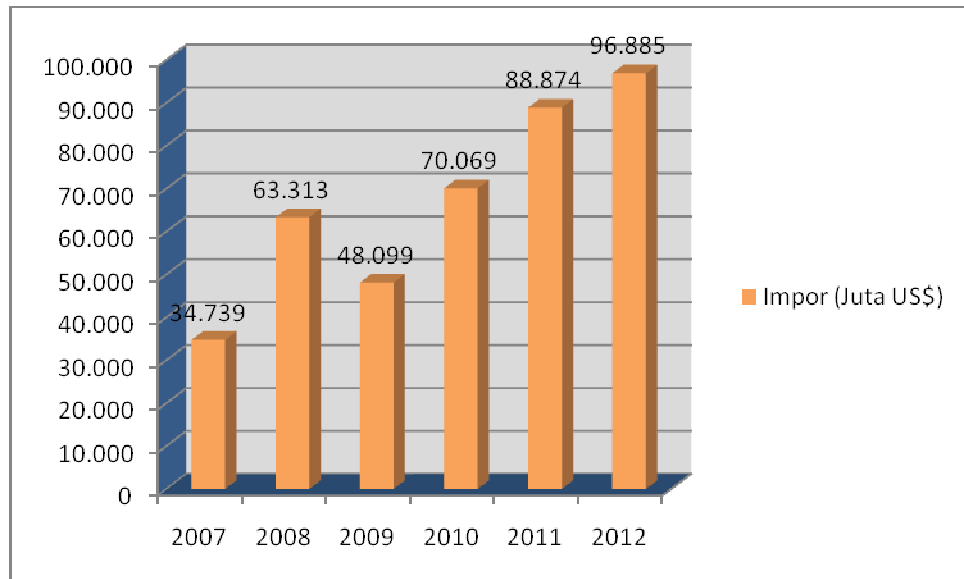
Berdasarkan negara asal utama barang, sampai dengan bulan Desember 2012 nilai impor DKI Jakarta mencapai 96.885 juta dollar Amerika, meningkat 9,01% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 88.874 juta dollar Amerika.

Sepanjang tahun 2012, impor dari Jepang merupakan yang terbesar yaitu sebesar 18.873 juta dollar Amerika atau 20,05% dari keseluruhan nilai impor melalui DKI Jakarta; diikuti Cina sebesar 18.764 juta dollar Amerika (19,25%). Posisi ketiga terbesar adalah Thailand dengan nilai impor 8.539 juta dollar Amerika (8,71%).

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau *Broad Economic Category*, nilai impor selama periode Januari-Desember 2012 mengalami peningkatan dibandingkan Januari-Desember 2011 kecuali golongan penggunaan barang, untuk barang konsumsi mengalami penurunan. Nilai impor bahan baku dan penolong

meningkat sebesar 6,87%, dan nilai impor barang modal meningkat sebesar 16,86%.

Grafik 2.2
Impor DKI Jakarta

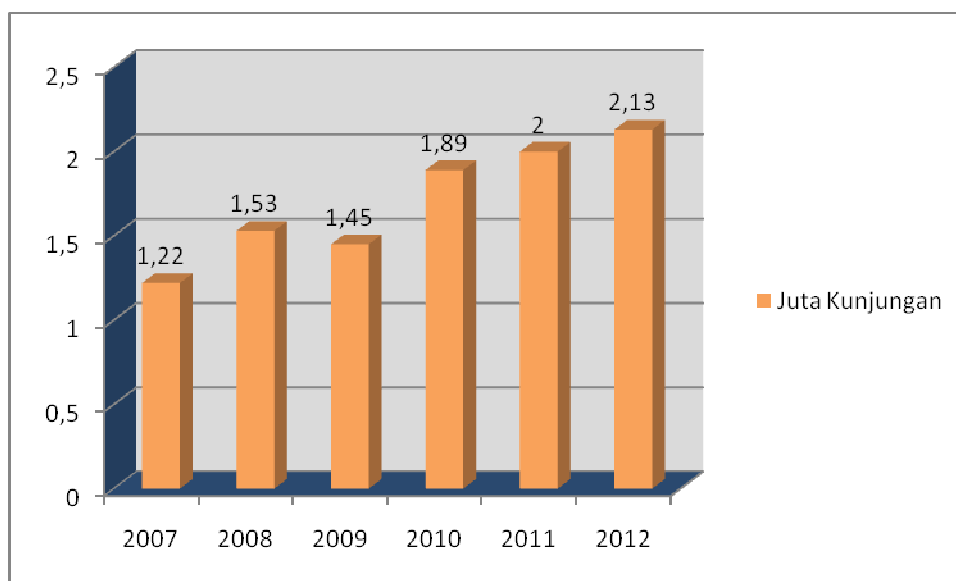


Sumber : BPS Provinsi DKI

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat pembelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu *event-event* nasional-internasional seperti konferensi dan pameran turut mendorong tingginya wisman yang datang ke DKI Jakarta.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar 2,13 juta kunjungan mengalami kenaikan sebesar 6,1% jika dibandingkan pada tahun 2011.

Grafik 2.3
Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung
ke DKI Jakarta (Juta Kunjungan)



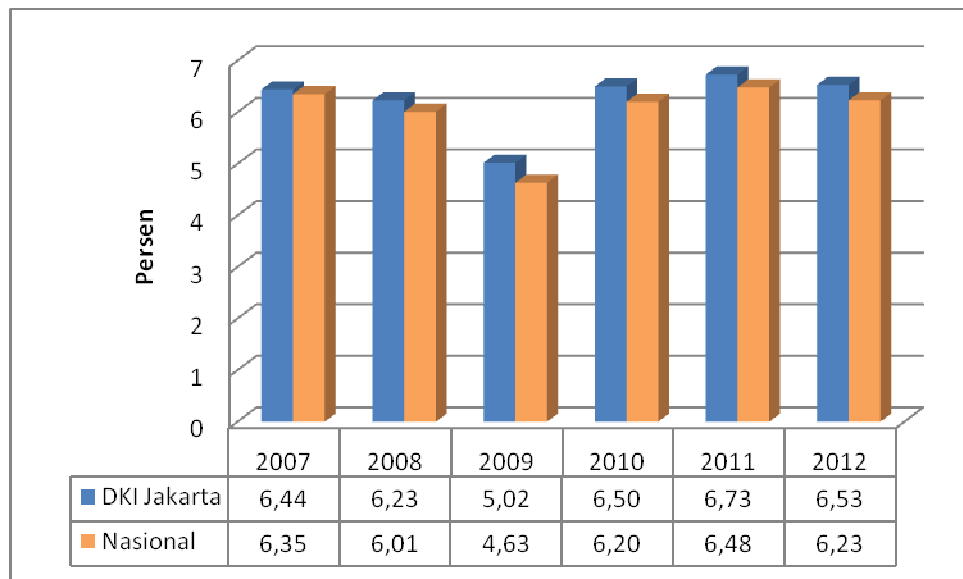
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta naik sebesar 6,5%. Angka ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2012, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 sebesar 6,23% sedikit turun dibanding pertumbuhan ekonomi nasional 2011 sebesar 6,5%. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% sudah mencapai target yang ditentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Target pertumbuhan ekonomi Jakarta yang telah ditetapkan yakni 6,5 hingga 7%. Ini menandakan perekonomian di Jakarta sudah semakin bergerak positif dari tahun ke tahun.

Selain kondisi politik dan keamanan yang kondusif sepanjang tahun 2012, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat tiga sektor utama penyebab pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang melampaui rata-rata nasional yaitu tingginya aktifitas di sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan sektor keuangan.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional

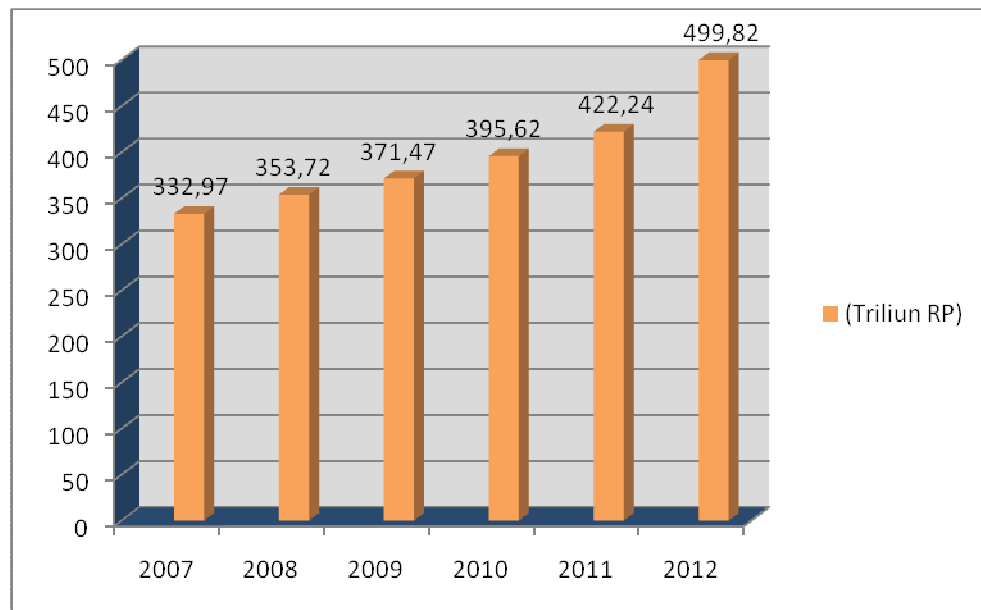


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada triwulan pertama 2012 pola perekonomian cenderung lebih lambat dari triwulan lainnya, beberapa peristiwa turut mewarnai perekonomian Jakarta. Adanya kebijakan baru mengenai harga dan subsidi BBM turut menahan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Namun, sejumlah event berskala internasional dan momen pergantian tahun masih mampu mendorong pertumbuhan di sektor jasa.

Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2012 atas dasar harga konstan mencapai 499,8 triliun rupiah naik 27,6 triliun rupiah dibandingkan tahun 2011 (sebesar 422,2 triliun rupiah), sehingga secara total pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,5% sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,7%. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2012, merupakan capaian pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan (%) 2007-2012



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Selama tahun 2012 kondisi perekonomian global berjalan lebih baik dari tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya perekonomian Amerika dan negara-negara Eropa, meskipun belum sepenuhnya pulih dari krisis. Sebagai dampaknya, kondisi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia, termasuk Jakarta. Pulihnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor mendorong kegiatan sektor industri di Jakarta kembali bergerak sehingga selanjutnya mampu menstimulus sektor lainnya untuk ikut bergerak dinamis.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi ini didorong pula oleh investasi yang cukup baik dan cenderung mengalami akselerasi sejak awal tahun, disertai pengeluaran konsumsi yang tetap kuat. Dari sisi internal, kondisi keamanan yang relatif stabil telah mampu menciptakan kondisi investasi dan penyaluran kredit yang lebih baik pula. Selain itu, konsumsi domestik masih menjadi faktor penggerak utama perekonomian Jakarta seiring dengan membaiknya perekonomian DKI Jakarta.

Pertumbuhan positif PDRB DKI Jakarta tahun 2012 terjadi di seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. sektor pengangkutan-komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,8%. Dengan pertumbuhan yang tinggi (diatas 10%) sektor ini mampu menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Sektor jasa-jasa pada urutan kedua tumbuh sebesar 7,6%. Sementara sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,2%. Meningkatnya ekspor-impor menjadi pendorong tingginya pertumbuhan sektor perdagangan-hotel-restoran di tahun 2012.

Sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebagai sektor dominan di Jakarta tumbuh sebesar 5,4%. Sementara sektor konstruksi dan sektor listrik-gas-air bersih yang masing-masing tumbuh sebesar 6,9% dan 4,9%.

Sektor industri pengolahan, sebagai salah satu sektor andalan hanya tumbuh sebesar 2,4%. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor pertambangan-penggalian menyumbang kontribusi terhadap PDRB dibawah 1%.

Tabel 2.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

Lapangan Usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan Tahun 2012
	2008	2009	2010	2011	2012	%
Pertanian	300.7	301.7	304.3	306.7	309.2	0.8
Pertambangan dan penggalian	937.9	936.0	950.0	991.1	982.3	-0.9
Industri pengolahan	58,367.3	58,447.6	60,567.5	62,100.8	63,604.8	2.4
Listrik-gas-air bersih	2,343.5	2,450.8	2,589.0	2,677.0	2,797.3	4.5
Konstruksi	36,178.8	38,422.4	41,143.3	44,104.3	47,125.5	6.9
Perdagangan-hotel-restoran	77,064.4	80,154.1	85,980.6	92,345.1	99,005.7	7.2
Pengangkutan-komunikasi	35,258.6	40,769.7	46,776.6	53,233.3	59,509.4	11.8
Keuangan-real estate-jasa perusahaan	102,707.6	106,788.4	111,280.0	117,190.3	123,461.0	5.4

Lapangan Usaha	Tahun					Laju Pertumbuhan Tahun 2012
	2008	2009	2010	2011	2012	%
Jasa-jasa	40,564.3	43,198.5	46,042.4	49,288.7	53,025.6	7.6
PDRB	353,723.1	371,469.2	395,633.7	422,237.3	449,820.8	6.5
PDRB Tanpa Migas	352,785.2	370,533.2	394,683.6	421,246.2	448,838.5	6.5

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 982,52 triliun, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 121,2 triliun atau sebesar 12,33%. Peranan tiga sektor utama yakni sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, serta sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2012 sekitar 64%.

Dalam tahun 2012, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar adalah sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar Rp 305,6 triliun (27,2%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan-hotel restoran sebesar Rp 228,0 triliun (20,7%), dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 172,4 triliun (15,6%).

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 71,5% PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 28% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,5% dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					Struktur (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2012
Pertanian	687.8	762.9	849.6	918.8	968.4	0.1
Pertambangan dan penggalian	3,178.7	3,155.7	3,704.3	4,934.4	5,182.1	0.5
Industri pengolahan	106,418.7	118,163.2	135,643.2	153,633.5	172,371.2	15.6
Listrik gas-air bersih	7,525.8	8,294.3	9,012.3	9,588.0	10,244.2	0.9
Konstruksi	76,502.8	86,646.9	98,425.0	112,026.8	126,272.4	11.4
Perdagangan-hotel-restoran	140,420.0	156,084.3	178,357.4	204,474.1	228,042.6	20.7
Pengangkutan-komunikasi	63,430.7	74,970.9	87,688.4	101,102.3	114,228.5	10.3
Keuangan-real estate-jasa perusahaan	193,513.7	213,437.9	239,156.0	271,632.3	305,617.6	27.7
Jasa-jasa	85,366.3	96,180.2	109,253.6	124,211.2	140,810.5	12.8
PDRB	677,044.5	757,696.3	862,089.8	982,521.4	1,103,737.5	100.0
PDRB Tanpa Migas	673,865.8	754,540.6	858,385.5	977,587.0	1,098,555.4	100.0

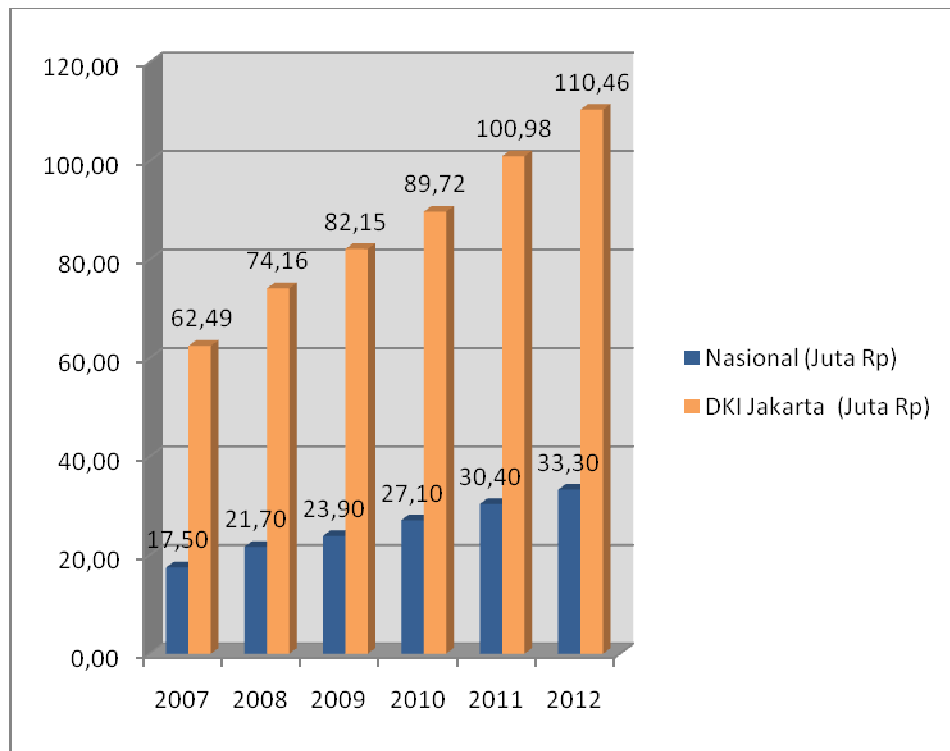
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

2) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan nilai PDRB per kapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah.

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai 110,46 juta rupiah atau meningkat 9,4% dibanding tahun 2011 (100,98 juta rupiah).

Grafik 2.6
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2012 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 56,9%, relatif stabil bila dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 57% (2011), komponen ini pun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 55,02% (2010). Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen konsumsi pemerintah yang hanya 9,6% selama tahun 2012.

Tabel 2.3
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

No	Pengeluaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Konsumsi Rumah Tangga	316,280.43	376,831.10	430,346.01	488,283.46	560,065.20	627,777.30
2	Konsumsi Pemerintah	35,061.26	47,544.44	62,646.86	80,888.21	97,222.30	106,134.90
3	PMTB+Perubahan Stok	212,338.11	259,393.58	273,217.21	310,788.70	375,238.30	426,857.10
4	Ekspor	316,819.86	366,022.12	407,218.29	452,123.46	540,935.50	620,131.70
5	Minus Impor	300,017.17	372,746.51	415,727.80	469,994.10	590,921.20	677,163.40
PDRB		566,449.36	677,044.74	757,700.57	862,089.73	982,540.10	1,103,737.60

Sumber : Pendapatan Regional DKI Jakarta 2007-2012

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (%)

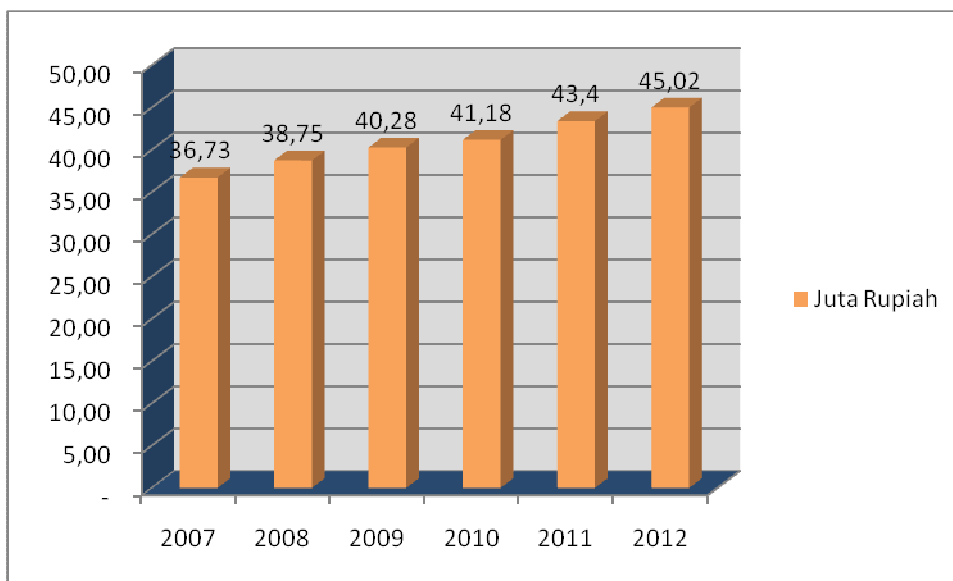
Jenis Pengeluaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,63	54,38	55,32	55,02	57,0	56,9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,19	7,02	8,27	9,38	9,9	9,6
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	37,49	35,81	34,77	34,70	38,2	38,7
Ekspor Barang dan Jasa	55,93	54,06	53,74	52,45	55,1	56,2
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	52,96	55,05	54,87	54,52	60,2	61,4

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2012 PDRB per kapita meningkat 3,7%, yaitu dari Rp 43,4 juta di tahun 2011 menjadi Rp 45,02 juta di tahun 2012.

Grafik 2.7
PDRB – Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

5) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum perekonomian di tahun 2012 tumbuh sebesar 6,5%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) yang naik sebesar 9,0%. Terbesar kedua adalah komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang naik sebesar 6,3%. Sedangkan yang terkecil kenaikannya adalah konsumsi pemerintah yang hanya 1,1%.

Tabel 2.5
PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan		Nilai (Miliar Rp)	
	2011	2012	2011	2012
Konsumsi Rumah Tangga	6,24	6,29	222,878.8	236,905.3
Konsumsi Pemerintah	3,74	1,08	20,953.7	21,179.9
PMTB	7,99	9,02	154,321.4	168,240.8
Ekspor	12,16	6,27	297,778.2	316,460.1
Minus Impor	12,73	7,04	273,694.9	292,965.3
PDRB	6,73	6,53	422,237.2	422,890.8

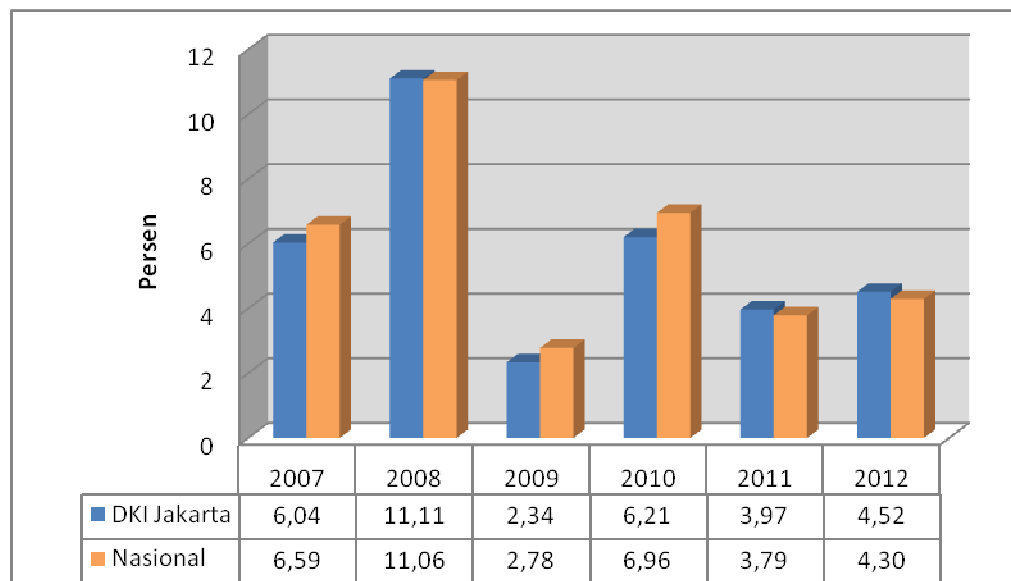
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2012 adalah sebesar 4,52%, sedikit lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 yaitu 3,97%. Tahun 2012 ini inflasi DKI Jakarta kembali lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,31%.

Grafik 2.8
Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%)

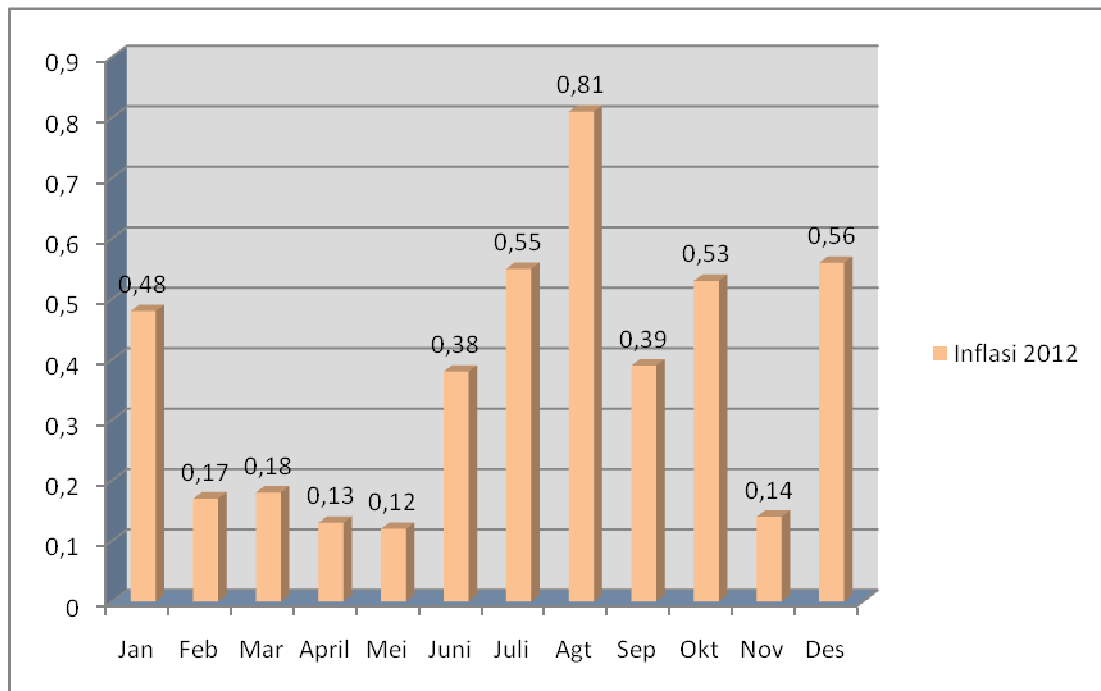


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Inflasi di DKI Jakarta sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia karena Jakarta adalah barometer perekonomian Indonesia, dikarenakan jumlah uang yang beredar di Jakarta lebih dari separuh uang yang beredar di Indonesia. Karena Jakarta bukan daerah penghasil melainkan daerah jasa. Sementara

sektor jasa relatif sensitif dibandingkan sektor produksi. Inflasi yang rendah ini menguntungkan bagi Jakarta, sehingga ke depan perkembangan perekonomian Jakarta diprediksi masih bagus.

Grafik 2.9
Inflasi DKI Jakarta selama tahun 2012



Sumber : BPS Provinsi DKI

Inflasi DKI Jakarta sepanjang tahun 2012 lebih berpatok kepada kelompok pengeluaran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah bahan makanan sebesar 7,43%, diikuti oleh sandang sebesar 6,74%, dan makanan serta minuman termasuk rokok dan tembakau sebesar 6,03%. Di sisi lain yang paling minim menyumbang besaran inflasi di DKI Jakarta tercatat pada bidang pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,08%. Inflasi terendah terjadi pada bulan Mei 2013 sebesar 0,12% sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar 0,81%.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007-2012
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dimana APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Untuk tahun 2012, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2012 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain :

- a. meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih rasional dan proporsional;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2012. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli daerah akan dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti pada perolehan pendapatan. Kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Mengimplementasikan Peraturan-Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- b) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah antara lain melalui operasionalisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) ;
- c) Melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d) Melakukan optimalisasi Retribusi Daerah;

- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - d) Mengkoordinasikan bagi hasil pengelolaan aset pusat di daerah.
- b. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemerolehan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU).
- c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian

seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud. Arah kebijakan umum Belanja Daerah pada tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengacu pada Penetapan Kinerja SKPD dan pemenuhan SPM Urusan Pemerintahan;
2. Memenuhi belanja mengikat, yaitu TALI, *Tipping Fee*, Rekening Listrik PJU, Pembayaran Hutang Pinjaman + Bunga, Bantuan dan hibah serta Belanja Tak Terduga;
3. Menjamin alokasi belanja *dedicated* program, program obligasi dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap **percepatan** penyelesaian target strategis RPJMD 2007-2012 antara lain penyelesaian koridor Busway, Terminal Pulogebang dan RSUD Jakarta Selatan;
4. Mendukung Kebijakan 11 Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Program *Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment* dan Percepatan pencapaian MDG's;
5. Memenuhi proporsi anggaran Pendidikan lebih dari 20% dari total belanja dan anggaran Kesehatan lebih dari 8% dari belanja daerah (amanah Perda maksimal 15%);
6. Mencukupi anggaran untuk JPKM-Gakin;
7. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota/Kabupaten, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
8. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi DPRD;
9. Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011, dan rencana pinjaman daerah melalui Obligasi Daerah.

SILPA Tahun 2011 diproyeksikan dengan menggunakan asumsi bahwa tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2011. Dengan asumsi tersebut, maka SiLPA Tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp3.680,60 Miliar. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari Obligasi Daerah, direncanakan sebesar Rp1.700,00 Miliar.

2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

Untuk pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah, serta Pemberian Pinjaman Daerah.

Pada tahun 2012, direncanakan untuk mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.MRT Jakarta sebesar Rp1.578,68 Miliar, PT. Bank DKI sebesar 250,00 Miliar, PT. Jakpro (Jalan Tol) sebesar Rp50,00 Miliar, PD PAL Jaya sebesar Rp253,00 Miliar (yang bersumber dari Obligasi Daerah), untuk PPMK LKM Bina Ekonomi sebesar Rp53,40 Miliar, dan untuk pembayaran Utang Pokok sebesar Rp11,23 Miliar.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Dedicated

1. Pengendalian Banjir

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program *dedicated*, antara lain :

1) Program Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT).

Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT) seluas 46.404 m² yang seluruhnya merupakan koridor kering.

2) Program Normalisasi Sungai dan Saluran

- a) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Sunter
- b) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan
- c) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Angke Hulu
- d) Normalisasi Kali Mookervart (melalui pembangunan *sheetpile* sepanjang 1.250 m'

3) Program Penataan dan Pembangunan Situ, Waduk dan Polder

Pembebasan tanah Waduk Marunda beserta sarana prasarananya seluas 96.175 m².

b. Permasalahan dan Solusi

Proses pembebasan lahan KBT dan Waduk Marunda terkendala oleh beberapa faktor antara lain : belum adanya kesepakatan harga dengan pemilik lahan terkait dengan permintaan harga tanah yang lebih tinggi daripada NJOP, adanya tanah sengketa dan masalah lain yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya pembayaran. Diperlukan proses konsinyasi di pengadilan dan percepatan dalam pelaksanaan kelengkapan administrasi pembebasan lahan.

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program *dedicated*, antara lain :

1) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang

- a) Dimulainya pembangunan *flyover* akses Terminal Pulo Gebang
- b) Pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang seluas 29.694 M2, terdiri dari lahan milik Perumnas seluas 28.324 M2 dan milik masyarakat seluas 1.370 m2.

- c) Pembentukan Kelembagaan Terminal Bus Pulo Gebang berupa Unit Pengelola (UP) Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang.
- d) Pembangunan :
 - *Park and Ride* vertikal 3 lantai seluas 1.267 M² dengan kapasitas tampung 120 mobil
 - Papan nama terminal dan rambu lalu lintas di kawasan Terminal Bus Pulo Gebang
 - Sarana operasional Terminal Bus Pulo Gebang berupa Meubelair dan Perlengkapan Kantor
 - Sistem Operasional Terminal Bus Pulo Gebang berupa *Closed Circuit Television* (CCTV), *Video Messaging Service* (VMS), *Control Room*, *Barrier Gate* dan Jaringan *Information Technology* (IT).
- e) Pengecatan marka jalan di Terminal Bus Pulo Gebang
- f) Pemeliharaan Terminal Bus Pulo Gebang.

2) Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu

Pembangunan Dermaga Terapung di 6 (enam) lokasi sebagai berikut :

- Di Pelabuhan Muara Angke sepanjang 156,5 m dengan kapasitas tambat/labuh 10 kapal (Lumba-lumba)
- Di Pulau Untung Jawa sepanjang 40 m dengan kapasitas tambat/labuh 2 kapal (Kerapu)
- Di Pulau Pari sepanjang 24 m dengan kapasitas tambat/labuh 2 kapal (Kerapu)
- Di Pulau Payung sepanjang 32 m dengan kapasitas tambat/labuh 3 kapal (Kerapu)
- Di Pulau Tidung sepanjang 40 m dengan kapasitas tambat/labuh 2 kapal (Lumba-lumba)
- Di Pulau Lancang sepanjang 40 m dengan kapasitas tambat/labuh 3 kapal (Kerapu)

3) Pembangunan Koridor Baru Busway

- a) Pembangunan jalan Koridor XII (Pluit – Tanjung Priok) sepanjang 23,75 km
- b) Pembangunan jalur Busway Ekstension koridor Kalideres-Tangerang sepanjang 2,5 km.
- c) Pembangunan halte busway sebanyak 13 Unit dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebanyak 8 Unit pada jalur Busway Koridor XII (Pluit – Tanjung Priok)

4) Peningkatan Pengelolaan Busway

- a) Pengadaan :
 - Bus *articulated* = 36 Unit (oleh Pemprov DKI Jakarta)
 - Bus *articulated* = 66 Unit (oleh Investasi Operator)
- b) Sterilisasi jalur *busway* di 10 (sepuluh) koridor dengan jumlah objek penertiban sebanyak 27.873 kendaraan

5) Program Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)

Pembebasan lahan MRT untuk Depo Lebak Bulus = 1.894 m²

Dengan total progres pembebasan lahan sejak tahun 2011 hingga 2012 seluas 19.059 m² atau 77,63% dari total kebutuhan lahan 24.549 m² yang harus dibebaskan

6) Program pembangunan fly-over dan underpass (FO/UP).

- Pembangunan akses terminal pulogebang

7) Program Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan

- a) Pembangunan jalan layang non tol Kampung Melayu – Tanah Abang.
- b) Pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari – Blok M.
- c) Pembangunan on/off ramp barat jalan layang non tol Kampung Melayu – Tanah Abang
- d) Pembangunan jalan sejajar KBT

- e) Pembebasan tanah jalan tembus dan *missing link* Jl. Joglo Raya dan Jl. Kembangan Selatan seluas 2.701 m².
- f) pelebaran jalan Kembangan Raya seluas 741,67 m² (Rigid), Jl. Joglo Raya seluas 8.000 m², Jl. TB. Angke, Jl. Perintis Kemerdekaan (Bermis – Pulo Gadung) seluas 11.156,56 m², Jl. Panjang seluas 2.600 m²

b. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu belum dapat direalisasikan sepenuhnya, disebabkan adanya komponen/perlengkapan kapal yang harus diimpor dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Untuk itu pada tahun 2013 telah dianggarkan kembali pada APBD untuk penyelesaian pengadaan kapal dimaksud.
- 2) Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Depo MRT dan Terminal Bus Pulo Gebang, pembangunan jalan tembus (*missing link*) masih terkendala, antara lain disebabkan oleh :
 - Masih terdapat warga yang tidak setuju dengan harga tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Adanya ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah;
 - Tidak mencukupinya waktu untuk melaksanakan proses pembayaran, hingga berakhirnya tahun anggaran.

Untuk itu dilakukan negosiasi harga tanah kembali dengan warga dan anggaran untuk kegiatan lanjutan tersebut telah dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2013.

3. Penanggulangan Polusi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1. Program pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- a) Pembangunan 8 taman interaktif dengan total luas 43.443 m² yang terletak di : (1) Gg. Majelis Kebon Pala, Jakarta Timur, seluas 528 m² ; (2) Jl. Gebang Sari Dalam RT002/RW005 Kec. Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.648 m² ;

- (3) Jl. Lampiri RT/RW 007/005 Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 2.126 m² ; (4) Jl. Swakarsa II RT012/RW003 Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 268 m² ; (5) Kel. Cakung Barat RT006/RW004 Kec. Cakung, Jakarta Timur seluas 1.770 m² ; (6) Jl. Cilangkap RW004, Jakarta Timur - Lanjutan seluas 17.134 m² ; (7) Jl. Kampung Karang Kendal, Kel. Rorotan, Jakarta Utara – Lanjutan seluas 6.445 m² ; (8) Jl. Kebagusan, Jakarta Selatan – Lanjutan seluas 10.524 m².
- b) Pembangunan taman hutan kota Kebun Pisang di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara – lanjutan seluas 9.390 m²
- c) Pembangunan taman kota di 7 lokasi dengan total luas 59.059 m² yakni terletak di: (1) Jl.Kebagusan Dalam I RT 008 RW 04 Kel.Kebagusan Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 16.212 m² ;(2) Jl. Ketapang RT007/RW002 Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 1.966 m² ;(3) Jl. Poncol II Kec. Cilandak, Jakarta Selatan seluas 891 m² ;(4) Jl. Salemba Bluntas Gg. III RT008/RW005 Kec. Senen, Jakarta Pusat seluas 199 m² ;(5) Jl. Raya PKP Kec. Ciracas, Jakarta Timur seluas 4.576 m² ;(6) Jl. Moh. Kahfi I RT 01/02, Jakarta Selatan – Lanjutan seluas 7.806 m² ;(7) Jl. Mufakat Kel. Pondok Rangon Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 27.409 m² ;
- d) Pembangunan taman eks SPBU di 5 lokasi dengan total luas 5771 m² yakni terletak di : (1) Jl. Dr. Wahidin (ABRI), Jakarta Pusat seluas 1.000 m² ; (2) Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara seluas 2.000 m² ; (3) Jl. Mataram (sisi Timur), Jakarta Selatan seluas 1.285 m² ; (4) Jl. Tanah Abang Timur (ABRI), Jakarta Pusat seluas 700 m² ; (5) Jl. Tanah Abang Timur Jakarta Pusat seluas 786 m².

2. Program Pengendalian Pencemaran Udara

Pemeliharaan dan operasionalisasi 5 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) otomatis.

b. Permasalahan dan Solusi

Pembebasan lahan untuk RTH belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena tidak tercapainya kesepakatan harga pembebasan lahan, lokasi lahan dikelilingi lahan lain dan tidak ada akses jalan masuk dan adanya ketidaksesuaian data permohonan yang disampaikan masyarakat dengan kondisi riil di lapangan, seperti perbedaan luas lahan, status kepemilikan.

Pembebasan lahan RTH diprioritaskan pada lahan-lahan yang terkena peruntukan hijau, serta dilakukan identifikasi terhadap lahan-lahan yang memenuhi kriteria RTH dan percepatan pemenuhan persyaratan yang diperlukan agar proses pembebasan dapat dilakukan dengan baik.

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Pelayanan Pendidikan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

- a) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didikSDN/MIN dengan *unit cost* sebesar Rp 60.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 750.473 peserta didik dengan total anggaran Rp540.340.560.000,00
- b) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk peserta didik SDS/MIS dengan *unit cost* sebesar Rp 60.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 213.661 peserta didik dengan total anggaran Rp76.917.960.000,00 mulai bulan Juli s.d Desember 2012
- c) Pemberian BOP untuk peserta didik SMPN/MTsN dengan *unit cost* sebesar Rp110.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 265.219 peserta didik dengan total anggaran Rp350.089.080.000,00

- d) Pemberian BOP untuk peserta didik SMPS/MTsS dengan *unit cost* sebesar Rp110.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 152.336peserta didik dengan total anggaran Rp100.541.760.000,00 mulai bulan Juli s.d Desember 2012
- e) Pemberian BOP untuk peserta didik SMAN/MAN
 - Dengan *unit cost* sebesar Rp75.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 114.410 peserta didik dengan total anggaran Rp51.484.500.000,00 (Januari 2012 s.d Juni 2012)
 - Dengan *unit cost* sebesar Rp400.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 114.410 peserta didik dengan total anggaran Rp274.584.000.000,00 (Juli 2012 s.d Desember 2012)
- f) Pemberian BOP untuk peserta didik SMAS/MAS dengan unit cost sebesar Rp400.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 9.334 peserta didik dengan total anggaran Rp22.401.600.000,00 (Juli 2012 s.d Desember 2012)
- g) Pemberian BOP untuk peserta didik SMKN
 - Dengan *unit cost* sebesar Rp150.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 44.867 peserta didik dengan total anggaran Rp40.380.300.000,00 (Januari 2012 s.d Juni 2012)
 - Dengan *unit cost* untuk Jurusan Bisnis Manajemen sebesar Rp400.000,00 Jurusan Pariwisata/Seni sebesar Rp500.000,00 dan, Jurusan Teknologi/Pertanian sebesar Rp600.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 44.867 peserta didik dengan total anggaran Rp80.760.600.000,00 (Juli 2012 s.d Desember 2012)
- h) Pemberian BOP untuk peserta didik SMKS dengan *unit cost* untuk Jurusan Bisnis Manajemen sebesar Rp400.000,00 Jurusan Pariwisata/Seni sebesar Rp500.000,00 dan, Jurusan Teknologi/Pertanian sebesar Rp600.000,00 per

peserta didik per bulan, kepada 42.961 peserta didik dengan total anggaran Rp118.857.600.000,00 (Juli 2012 s.d Desember 2012)

- i) Pemberian tambahan penghasilan untuk 11.751 guru honorer sebesar Rp400.000,00 per guru selama 4 bulan mulai September s.d Desember 2012.
- j) Pemberian Kartu Jakarta Pintar pada 3.000 peserta didik yang didistribusikan pada bulan November 2012

2) Pelayanan Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain:

- a) Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan bencana dalam pelayanan kesehatan pada tahun 2012 pada 92 RS dan 44 Puskesmas;
- b) Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan Kartu Gakin pada Puskesmas sebanyak 2.988.575 kasus
- c) Pelayanan JPK dengan kartu Gakin pada Rumah Sakit sebanyak 328.652 kasus;
- d) Pelayanan JPK dengan SKTM pada Rumah Sakit sebanyak 498.840 kasus;
- e) Pelayanan JPK kasus bencana atau Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Rumah Sakit sebanyak 6.098 kasus;
- f) Penyerapan anggaran JPK Gakin meningkat sebesar 0,1%, hal ini menunjukkan semakin baiknya proses administrasi *reimbursement claim* pelayanan kesehatan.
- g) Peningkatan pelayanan kasus yang ditangani melalui pelayanan Gakin, SKTM dan bencana dari 2.705.509 kasus tahun 2011 menjadi 3.822.165 kasus tahun 2012
- h) Pelayanan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat sebanyak 649.459 kasus

b. Permasalahan dan Solusi

1) Pelayanan Pendidikan

- a) Terdapat SD/MI dan SMP/MTs swasta tidak mau menerima BOP, untuk itu sekolah tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan tidak bersedia menerima BOP;
- b) Alokasi BOP untuk SMA/MA/SMK Swasta baru mencapai 20%, sehingga belum semua Sekolah/ Peserta didik mendapatkan BOP. Untuk itu penentuan pemberian BOP diutamakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu.
- c) Pendistribusian Kartu Jakarta Pintar masih terkendala pada proses verifikasi peserta didik, sehingga dari sejumlahpeserta didik yang ditargetkan belum seluruhnya mendapatkan kartu tersebut. Untuk itu guna mengoptimalkan proses verifikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan melibatkan pihak sekolah dalam melakukan verifikasi terhadap peserta didik dengan mengacu pada data PPLS 2011.

2) Pelayanan Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB

Permasalahan yang dihadapi dalam Program Jaminan Kesehatan selama tahun 2012 antara lain (terutama diakhir tahun):

- a) Kurangnya tenaga verifikator di UP. Jamkesda dalam memproses administrasi *reimbursement claim* sehingga menghambat pembayaran klaim kepada RS. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan kerjasama dengan PT. Askes serta merevisi Pergub Nomor 87 Tahun 2012 tentang Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dengan menaikkan uang muka klaim pada RS dari 50% menjadi 75%;

- b) Jumlah Kartu Jakarta Sehat yang tercetak masih belum memenuhi target dikarenakan keterbatasan mesin cetak yang belum dapat mencetak dalam jumlah besar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kerjasama dengan PT. Askes dalam hal pengelolaan Program Kartu Jakarta Sehat, termasuk pencetakan kartu.

5. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di 267 Kelurahan dengan rincian:

- PPMK Bina Sosial sebanyak 1.630 kegiatan senilai Rp25.980.675.000,00
- PPMK Bina Fisik sebanyak 6.084 kegiatan senilai Rp25.980.675.000,00
- Dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) kepada 109.911 pemanfaat yang tersebar di 251 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) senilai Rp290.371.800.000,00

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK tidak tepat waktu, sehingga penyusunan data base di tingkat provinsi mengalami hambatan. Untuk itu dilakukan peningkatan fungsi pengawasan, serta pendampingan kepada pengelola PPMK di tingkat RW dan Kelurahan.
- 2) Tingkat partisipasi masyarakat dandunia usaha (CSR) dalam kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial masih rendah. Untuk itu dilakukan peningkatan sosialisasi dan publikasi kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di berbagai forum maupun media lokal.

6. Pengembangan Budaya Keragaman

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program *dedicated* antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) di lokasi eks Kodim Jakarta Timur (Tahap I), yaitu : pembongkaran bangunan yang sudah tidak terpakai, pengadaan *meubelair*, pemasangan *retaining wall* dan tiang pancang.
- 2) Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Situ Babakan (lanjutan), antara lain pembangunan : museum sejarah dan purbakala, *amphitheatre*, rumah adat, pembangunan rumah kuliner, pematangan lahan.
- 3) Perbaikan atap gedung Museum Sejarah Kota Tua
- 4) Penyusunan *Master Plan* Komprehensif Perkampungan Budaya Betawi untuk kawasan PBB di Situ Babakan seluas 289 Ha.

7. Penerapan Kaidah Good Governance

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program *dedicated*, antara lain :

- 1) Integrasi sistem informasi perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD dan pengawasan pelaksanaan APBD**
 - a. Pencetakan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 sebanyak 3.257 eksemplar
 - b. Sosialisasi RTRW Jakarta 2030
 - c. Penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
 - d. Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.
 - e. Pengoperasian sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis internet (*e-monev*) dan dapat diakses melalui *mobile device* (M-Gov)

- f. Tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi sebanyak 6.521 saran serta 3.706 rekomendasi BPK untuk Pemprov DKI Jakarta

2) e-Procurement

Jumlah total pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui sistem e-procurement nasional senilai Rp12.318.895.968.207,00 melampaui target dari pemerintah pusat yang menginstruksikan dalam APBD tahun 2012 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE. Jumlah total pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui sistem e-procurement nasional senilai Rp12.318.895.968.207,00 melampaui target dari pemerintah pusat yang menginstruksikan dalam APBD tahun 2012 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE.

3) Komunikasi langsung dengan masyarakat secara tatap muka maupun elektronik

Peningkatan jumlah pengunjung www.beritajakarta.com dari 2.391.997 pada Tahun 2011 menjadi 4.849.045 pada Tahun 2012 dan www.jakarta.go.id dari 3.467.963 pada Tahun 2011 menjadi 4.735.432 pada Tahun 2012

4) Peningkatan kualitas layanan

- a) Pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan wawasan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 5 wilayah Kota Administrasi
- b) Penerbitan akta kelahiran sebanyak 37.727 akta yang berkontribusi terhadap pencapaian tingkat kepemilikan akta kelahiran (usia 1-5 thn) menjadi sebesar 919 jiwa/ 1000 penduduk
- c) Peningkatan kepemilikan KK berbasis nomor KK Nasional meningkat dari 2.370.489 KK (75,21%) pada Tahun 2011 menjadi 2.773.700 KK (88,00%) pada Tahun 2012

- d) Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP (92,14%) dari target Kementerian Dalam Negeri yakni 6.372.951 wajib KTP

b. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya publikasi data APBD Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan publikasi data APBD melalui penyediaan informasi pada media elektronik serta mewajibkan SKPD/UKPD termasuk Kelurahan dan Kecamatan untuk mempublikasikan kepada masyarakat.

8. Pengelolaan Bencana

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan pada Pengelolaan Bencana, antara lain :

1) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

- a) Penanganan 1.039 kejadian kebakaran dengan rincian sebagai berikut :

- Kejadian kebakaran berjumlah 1.039, naik dari tahun 2011 yang berjumlah 953
- Kerugian akibat kebakaran Rp298,500,580,000,00 naik dari Tahun 2011 yaitu Rp219.595.337.000,00
- Korban jiwa masyarakat 35 orang meningkat dari tahun 2011 (13 orang)
- Korban luka masyarakat 96 orang meningkat dari tahun 2011 (87 orang)
- Penyebab kebakaran antara lain karena arus pendek listrik sebanyak 684 kasus, kompor gas sebanyak 91 kasus, rokok sebanyak 48 kasus, lampu sebanyak 1 kasus dan penyebab lainnya sebanyak 215 kasus.
- Lokasi kejadian sebagai berikut:
 - Jakarta Pusat : 125 Kali = 12,03 %
 - Jakarta Utara : 203 Kali = 19,54 %
 - Jakarta Barat : 224 Kali = 21,56 %

- Jakarta Selatan : 223 Kali = 21,46 %
- Jakarta Timur : 264 Kali = 25,41 %
- Kepulauan Seribu : 0 Kali = 0,00 %

Tabel 2.6
Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Respon Time di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta pada bulan Januari s/d Desember 2012

Bulan	Jumlah Kebakaran	<i>Respon Time</i>
Januari	71	00:06
Pebruari	66	00:06
Maret	83	00:05
April	62	00:06
Mei	74	00:05
Juni	70	00:05
Juli	115	00:06
Agustus	153	00:06
September	135	00:05
Oktober	80	00:06
Nopember	78	00:06
Desember	52	00:06
Jumlah	1039	00:06

Sumber :
Laporan Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

- b) Peningkatan rata-rata *Respon Time* pada Tahun 2012 menjadi 00:06 dari kondisi sebelumnya 00:08 pada Tahun 2011 sedangkan Standar Pelayanan Minimal *respon time* pemadaman kebakaran adalah 15 menit.
- c) Berfungsinya alarm kota/smart alarm kebakaran dengan baik sebanyak 2.066 buah
- d) Sosialisasi Peraturan Tentang Pencegahan Kebakaran bagi 100 orang

- e) Pengadaan sarana dan prasarana:
 - Pembangunan 1 gedung Kantor Sektor Ciganjur
 - Pengadaan 5 (lima) unit *Ground Water Tank Fibre-reinforced plastic Volume 10 m³*
 - Pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobil Pompa 4000 L (*medium pressure*)
- f) Pencetakan 4.910 buku panduan pencegahan kebakaran dan bencana untuk anak-anak.
- g) Pemeriksaan sewaktu-waktu secara berkala terhadap 220 gedung

2) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

- a) Sosialisasi Potensi Masyarakat dalam Penyelamatan dan Evakuasi Daerah Rawan Bencana Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi 550 orang
- b) Pembinaan Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa bagi 480 orang

3) Program Diklat dan Evakuasi Bencana

- a) Penyelenggaraan Diklat Pemadam Kebakaran bagi 454 orang
- b) Penyelenggaraan Diklat Kepala Regu bagi 30 orang
- c) Penyelenggaraan Diklat Kepala Peleton bagi 50 orang
- d) Penyelenggaraan Diklat pemeriksaan/penyelidikan kebakaran bagi 28 orang

4) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Pengamanan siaga antisipasi bencana
- b) Operasionalisasi *Closed Circuit Television (CCTV) crisis center* sebanyak 160 titik

5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesehjateraan sosial

- a) Penyediaan sarana prasarana dapur umum mandiri sebanyak 40 set di 20 titik
- b) Penyediaan makanan bagi korban bencana sebanyak 1.400.000 box bagi 70.000 orang

- c) Pelaksanaan pelatihan 100 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana)

b. Permasalahan dan solusi

Meningkatnya frekuensi kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik. Untuk itu pada Tahun 2013 akan dilaksanakan pengadaan hidran kering di sejumlah lokasi rawan kebakaran

9. Antisipasi Perubahan Iklim

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1) Program Penelitian Antisipasi terhadap Dampak Perubahan Iklim di Jakarta

- a) Pelaksanaan Inventory Gas Rumah Kaca di 4 sektor yaitu sektor energi (konsumsi bahan bakar fosil), sektor *Industrial Process and Product Used* (IPTU) yakni dalam proses produksi dan penggunaan produk-produk, sektor *Agriculture, Forest, and Other Land Use* (AFOLU) atau ruang terbuka hijau, sektor limbah (limbah padat dan limbah cair).
- b) Pelaksanaan *Carbon Finance Capacity Building* (CFCB).

2) Program Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah terhadap Perubahan Iklim

- a) Pengendalian Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menggunakan Bahan Perusak Ozon (BPO) terhadap 50 kegiatan usaha.
- b) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum lengkapnya pedoman-pedoman dari Pemerintah Pusat yang dibutuhkan untuk penyusunan *baseline* Rencana Aksi Daerah (RAD), dan inventory gas rumah kaca. Untuk itu, DKI Jakarta menyusun *baseline* Rencana Aksi Daerah (RAD), dan inventory gas rumah kaca secara mandiri dengan melibatkan pakar-pakar perubahan iklim, yang pada gilirannya DKI Jakarta menjadi acuan bagi daerah lain.

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp10.464.665.084.551,00 dengan total penyerapan sebesar Rp9.562.236.801.231,00 atau 91,38%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program wajib belajar 12 tahun

- a) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012 untuk 1.181.959 peserta didik di 3904 sekolah negeri dan swasta (SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka termasuk SD-SMP Satu Atap / Satap)
- b) Pemberian BOP untuk 1.176.570 peserta didik baik untuk TK Negeri, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMKN dan SMAN/MAN.
- c) Pemberian BOP untuk 418.292 peserta didik untuk SDS/MIS, SMPs/MTsS, SMKS dan SMAS/MAS
- d) Penyaluran Beasiswa peserta didik Rawan Putus Sekolah untuk 12.289 peserta didik miskin pada periode Januari s.d Juni 2012.
- e) Penyempurnaan sistem penyaluran beasiswa peserta didik Rawan Putus Sekolah menjadi Biaya Personal Peserta didik Miskin (BPSM) melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar pada 12.737 peserta didik miskin
- f) Penerimaan Peserta Didik Baru secara online tingkat SDN, SMPN, SMAN dan SMKN.

2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- a) Pemberian Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SMP Negeri sebanyak 241.642 peserta didik;

- b) Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade Sains (Matematika dan IPA) Nasional tingkat SD dan SDLB;
- c) Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat SD dan SMP;
- d) Pelaksanaan Ujian Nasional(UN) tingkat SMA dan SMK;
- e) Pembinaan manajemen bagi 340 orang pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan SLB
- f) Pelaksanaan Tes kemampuan bagi 300 orang calon Kepala Sekolah
- g) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui tugas belajar Strata Satu (S1) dan sertifikasi bagi 41.168 orang
- h) Pemberian dana pendamping bagi sekolah RSBI/SBI sebanyak 8 SD dan 9 SMP.
- i) Pemberian biaya operasional bagi SMA unggulan MH.Thamrin
- j) Pemberian dana pendamping bagi sekolah SSN sebanyak 109 SD.

3) Program pendidikan non formal dan informal,

- a) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan, yaitu paket A bagi 6.980 orang, paket B bagi 8.872 orang, dan paket C bagi 9.875 orang;
- b) Pelatihan keterampilan tingkat dasar/terampil di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 380 orang;
- c) Pemberantasan buta aksara dasar bagi 500 orang;
- d) Pemberian bantuan Alat Pembelajaran Edukatif (APE) pada 350 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

4) Program pendidikan luar biasa

- a) Lomba seni, olah raga dan sains guru dan peserta didik berkebutuhan khusus SLB sebanyak 40 orang (20 peserta didik, 20 guru pendamping);
- b) Pelayanan dan pemberian dana pendamping bagi sekolah Pusat Sumber Pendidikan inklusi sebanyak 18 sekolah;

- c) Pembinaan dan pemberian dana pendamping kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sebanyak 150 sekolah;
- d) Penyediaan peralatan media pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus (inklusi).

5) Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

- a) Penyelesaian rehab total, terdiri dari 49 gedung SDN, 28 gedung SMPN, dan 4 gedung SMAN dan 5 gedung SMKN;
- b) Pelaksanaan rehab total 16 gedung SDN;
- c) Pelaksanaan rehab total Tahap I untuk 16 gedung SDN dan 5 gedung SMPN, dan 3 gedung SMAN;
- d) Pelaksanaan rehab berat 258 gedung sekolah untuk tingkat SDN hingga SMAN;
- e) Pengadaan meubelair Unit Gedung Baru (UGB)/Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMAN sebanyak 25 unit.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan pendidikan, antara lain :

- 1) Dipertahankannya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD diatas 100% yaitu sebesar 109,83%,
- 2) Meningkatnya APK SMP/MTs dari 109,63% pada tahun 2011 menjadi 110,62% ditahun 2012;
- 3) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK meningkat dari 87,16% pada tahun 2011 menjadi 87,25 % pada tahun 2012
- 4) Menurunnya Angka Putus Sekolah
 - Tingkat SD yang semula sejumlah 347peserta didik pada tahun 2011 menjadi 282 peserta didik pada tahun 2012;
 - Tingkat SMP yang semula 1.176 peserta didik pada tahun 2011 menjadi 800 peserta didik pada tahun 2012;
 - Tingkat SMA/SMK yang semula 3.114 peserta didik pada tahun 2011 menjadi 2.821 peserta didik pada tahun 2012.

- 5) Meningkatnya angka kelulusan peserta didik
 - Tingkat SD berhasil dipertahankan sebesar 100%
 - Tingkat SMP berhasil dipertahankan sebesar 99,99%
 - Tingkat SMK meningkat dari 99,82% pada tahun 2011 menjadi 99,92% pada tahun 2012
- 6) Meningkatnya rata-rata nilai UN di atas standar nasional
 - Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SD di atas 7,00, yaitu 7,47 pada tahun 2012.
 - Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMP dari 6,94 pada tahun 2011 menjadi 7,65 pada tahun 2012;
 - Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SMA di atas 7,00, yaitu 7,23 pada tahun 2012;
 - Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMK dari 7,38 pada tahun 2011 menjadi 7,78 pada tahun 2012;
- 7) Dicapainya rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 selama 10,93 tahun
- 8) Menurunnya angka buta aksara dari 0,65% pada tahun 2011 menjadi 0,60% pada tahun 2012;
- 9) Jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 pada jenjang:
 - SD berhasil dipertahankan sebanyak 3 SD pada tahun 2012
 - SMP berhasil dipertahankan sebanyak 9 SMP pada tahun 2012
 - SMA berhasil dipertahankan sebanyak 20 SMP pada tahun 2012
 - SMK berhasil dipertahankan sebanyak 60 SMK pada tahun 2012.
- 10) Prestasi yang diraih pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu :
 - Juara II Tingkat SD
 - Juara II Tingkat SMP
 - Juara II Tingkat SMA

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan beserta solusinya pada Urusan Pendidikan antara lain :

- 1) SDM pengawas konstruksi sehingga dikhawatirkan terjadi keterlambatan penyelesaian rehab sekolah. Untuk itu dalam pengawasan rehab melibatkan konsultan pengawas.
- 2) Masih terhambatnya pelaksanaan *test diagnostic online* dalam rangka peningkatan kompetensi guru, dikarenakan masih terdapat guru yang belum lancar menggunakan internet. Untuk itu *test diagnostic* guru secara *online*, terlebih dahulu diutamakan bagi guru yang sudah menguasai penggunaan internet.
- 3) Adanya hambatan dalam proses alih fungsi guru bidang studi, karena terdapat beberapa bidang studi yang tidak dapat dipelajari secara cepat. Untuk itu proses alih fungsi guru bidang studi dilakukan terhadap bidang studi yang satu rumpun.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp3.205.354.122.391,75 dengan total penyerapan sebesar Rp2.881.150.513.179,00 atau 89,89%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program pencapaian dan penanggulangan penyakit menular**
 - a) Antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Pemantauan penderita malaria import, *re and new diseases* dan *neglected disease*, yang dapat ditangani 100%;
 - c) *Surveilence* penyakit menular berbasis puskesmas, rumah sakit dan laboratorium;
 - d) Pengendalian penyakit menular Rabies;

- e) Penanganan penyakit Tuberculosis;
- f) Penyediaan obat penyakit menular (untuk penyakit Tuberculosis, Kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Atas, Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, Flu Burung dan Filariasis);
- g) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan;
- h) Pengendalian dan pemantauan *cold chain* (terjaganya rantai dingin vaksin);
- i) Manajemen pengelolaan vaksin (vaksin meningitis bagi jemaah haji, vaksin rutin untuk bayi dan vaksin untuk anak usia sekolah tersedia 100% sesuai jumlah sasaran);
- j) Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko DBD;
- k) Pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA);
- l) Monitoring jumlah kasus AIDS baru yang dilaporkan pada tahun 2011 sebanyak 1.122 kasus, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 1.034 kasus;
- m) Pengendalian penyakit pneumonia;
- n) Pengendalian penyakit diare.

2) Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

- a) Peningkatan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) pada 44 Puskesmas Kecamatan dan Sudin Kesehatan;
- b) Bimbingan, pengawasan dan pengendalian manajemen program kesehatan ibu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- c) Monitoring dan evaluasi program KIBBLA pada 44 Puskesmas Kecamatan;
- d) Supervisi Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
- e) Pelatihan kelompok pendukung Ibu;
- f) Pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan dengan cakupan mencapai 96%;

- g) Pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) pada kunjungan Neonatus dengan cakupan mencapai 91,3%;
- h) Pelayanan kesehatan pada bayi (29 hari – 12 bulan) dengan cakupan mencapai 88,3% (November 2012).

3) Program peningkatan kesehatan anak balita

- a) Perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Centre* (TFC)/Panti Pemulihan Gizi di Puskesmas, dengan jumlah TFC 6 buah yang terletak di Puskesmas Kecamatan Kalideres, Tambora, Cilincing, Koja, Jagakarsa dan Tebet;
- b) Pemberian kapsul vitamin A untuk anak balita sebanyak 2 kali di seluruh DKI Jakarta dengan total cakupan 76,6%;
- c) *Universal Child Immunization* (UCI) di seluruh kelurahan yang ada di DKI Jakarta;
- d) Imunisasi dasar bayi lengkap dengan cakupan 93%;
- e) Pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sesuai dengan standar dengan cakupan mencapai 90,27% (Desember 2012);
- f) Pelayanan kesehatan anak balita (12 – 59 bulan) sakit yang berobat ke Puskesmas dan mendapat pelayanan manajemen terpadu Balita sakit dengan cakupan mencapai 89,38%.

4) Program pengembangan lingkungan sehat

- a) Pengendalian vektor penyakit;
- b) Evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
- c) Pembinaan kota sehat pada tingkat kelurahan;
- d) Pemantauan kualitas air bersih pada 5 wilayah kota;
- e) Pembinaan kawasan dilarang merokok disarana kesehatan;
- f) Hygiene sanitasi tempat – tempat umum.

5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- a) Penerbitan Kebijakan Publik yang mendukung peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) Pendataan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja PHBS;
- c) Rumah Tangga ber- PHBS tercapai 64,84%;
- d) Penilaian Kinerja PHBS kategori Kota dan kabupaten;
- e) Promosi kesehatan melalui berbagai media, seperti melalui event PRJ, media massa seperti cetak leaflet, spanduk, poster, banner serta media elektronik seperti radio dan televisi berupa talk show dan radio spot;
- f) Pembentukan jejaring kemitraan dengan Lintas Sektor, Lintas program, LSM dan dunia usaha;
- g) Pembinaan UKBM berupa Kegiatan penilaian kinerja Posyandu tingkat Provinsi;
- h) Penambahan cakupan RW siaga aktif sebanyak 88,70%.

6) Program pencegahan penyakit tidak menular

- a) Pelayanan deteksi dini gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah di 44 Puskesmas, 5 RSUD dan 1 RSKD;
- b) Pengembangan kelompok peduli penyakit tidak menular dan Posbindu di masyarakat;
- c) Pelayanan deteksi dini dan tata laksana penyakit Diabetes Mellitus di 44 Puskesmas Kecamatan, 5 RSUD dan 1 RSKD;
- d) Pelayanan deteksi dini Penyakit Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara di 42 Puskesmas Kecamatan dari 44 Puskesmas Kecamatan dan di 292 Puskesmas Kelurahan dari 296 Puskesmas Kelurahan di DKI Jakarta;
- e) Pelayanan dasar Penyakit Paru Obstruktif Kronis di 44 Puskesmas Kecamatan, 5 RSUD dan 1 RSKD.

7) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

- a) Peningkatan mutu dan layanan RSUD, AGD, Balai Kesehatan Karyawan, Laboratorium Kesehatan Daerah

dan Akademi Keperawatan Jakarta;

b) Pelayanan kesehatan yang telah mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu:

→ Dari 6 RSUD yang ada, sebanyak 5 RSUD atau 83% sudah tersertifikasi, dan dari 6 UPT yang ada di bawah Dinas Kesehatan, sebanyak 4 UPT atau 66,66% sudah tersertifikasi;

→ Puskesmas Kecamatan sebanyak 44 puskesmas atau 100%;

→ Puskesmas Kelurahan sebanyak 197 puskesmas atau 66,55% dari 296 Puskesmas Kelurahan.

c) Sertifikasi Akreditasi sebesar 54,14% atau sebanyak 85 RS dengan rincian 5 RSUD dan 80 RS vertikal dan RS swasta.

8) Program pengawasan obat dan makanan,

a) Penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang diproses sesuai ketentuan telah mencapai 100%

b) Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di wilayah mencapai 100%

c) Fasilitasi pada 150 sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan.

9) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Pelayanan JPK Gakin lebih dari 3.822.165 juta kasus pada 44 puskesmas kecamatan, 296 puskesmas kelurahan dan 92 RS di Jakarta.

10) Program peningkatan gizi masyarakat

a) Perawatan Balita Gizi buruk di RS dan *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) sebanyak 3.145 kasus (100% dapat dirawat);

b) Perawatan balita gizi buruk melalui TFC di 6 Puskesmas Kecamatan (Kalideres, Jagakarsa, Tambora, Cilincing, Koja

dan Tebet).

11) Program kesehatan jiwa masyarakat

- a) Pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas Kecamatan;
- b) Advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik;
- c) Pelayanan Pertukaran Jarum Suntik Steril (PJSS) di 42 Puskesmas dan pelayanan metadon di 12 Puskesmas Kecamatan dan 2 Rumah Sakit serta 4 Lembaga Pemasyarakatan;
- d) Pelayanan institusi wajib lapor pecandu narkoba di 8 Puskesmas Kecamatan dan 4 Rumah Sakit.

12) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

- a) Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSKD Duren Sawit, RSUD Cengkareng dan RSUD Koja;
- b) Peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD dari 1.711 tempat tidur Tahun 2011 menjadi 2.029 tempat tidur pada Tahun 2012.

13) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- a) Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas melalui penambahan jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun sebanyak 7 Puskesmas pada Tahun 2012;
- b) *Quality Assurance* (QA) guna memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada Puskesmas Kecamatan mencapai 100%, sedangkan untuk tingkat Puskesmas Kelurahan mencapai 60%;
- c) Sertifikasi Puskesmas Kelurahan sebanyak 197 Puskesmas atau 66,55% dari target sebesar 60%.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan kesehatan pada tahun 2012 antara lain :

- 1) Berkurangnya angka kesakitan DBD dari 70,35/100.000 penduduk pada tahun 2011 menjadi 68,47 /100.000 penduduk pada tahun 2012;
- 2) Meningkatnya pencapaian *Case Detection Rate* TB dari 83,9% pada Tahun 2011 menjadi 86,50% pada Tahun 2012;
- 3) Berkurangnya penemuan jumlah kasus penyakit ISPA (pneumonia) untuk usia < 5 tahun dari 45% pada Tahun 2011 turun menjadi 27,92% pada Tahun 2012;
- 4) Cakupan layanan pasien HIV/AIDS di fasilitas kesehatan adalah, sebagai berikut:
 - a) Pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 25.011 (Juni 2011) menjadi 21.025 (Desember tahun 2012);
 - b) Pasien yang memenuhi syarat Anti Retroviral Virus (ARV) sebesar 18.965 (Juni 2011) menjadi 14.002 (Desember 2012);
 - c) Pasien yang pernah menerima ARV sebesar 13.664 (Juni 2011) menjadi 10.187 (Des 2012);
 - d) Pasien yang masih menerima ARV sebesar 8.311 (Juni 2011) menjadi 5 564. (Des 2012).
- 5) Beroperasinya pelayanan metadon di 12 Puskesmas dan 2 RS bagi 1.149 pasien pada Tahun 2011 dan 1.099 pada Tahun 2012;
- 6) Angka Kematian Ibu pada Tahun 2012 sebesar 64,33/100.000 kelahiran hidup (97 kasus). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target MDGs 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup;
- 7) Angka Kematian Bayi pada Tahun 2012 sebesar 7,53/1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dari target MDGs 2015 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup;
- 8) Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan pemulihan untuk balita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding*

Center (TFC) dari 4 puskesmas pada tahun 2011 menjadi 6 puskesmas pada Tahun 2012;

- 9) Dipertahankannya *response time* kurang dari 24 jam penanganan kasus penyakit menular sebesar 100% pada Tahun 2012;
- 10) Bertambahnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001: 2008 dari 142 Puskesmas pada tahun 2011 menjadi 197 Puskesmas pada tahun 2012.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Urusan Kesehatan antara lain belum terlaksananya pembangunan RSUD Pasar Minggu dikarenakan belum diterbitkannya Pergub Tahun Jamak RSUD Pasar Minggu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan percepatan penyelesaian administrasi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan pekerjaan umum pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.606.042.719.099,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.797.786.442.188,00 atau 72.63%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program pengendalian banjir

- 1) Penyelesaian pembangunan pompa Duri sebanyak 2 unit;
- 2) Pembangunan *sheet pile* Tanggul Kali Karang sepanjang 493 m²;
- 3) Pembangunan *sheet pile* saluran Tubagus Angke /Kampung Gusti sepanjang 163 m²;

- 4) Penyelesaian pembangunan rumah pompa Kali Banglio dan terpasangnya 3 unit pompa dengan kapasitas @4m³/det;
- 5) Penurapan kali sunter hilir KBT sepanjang 200 m, dan penurapan kali Cipinang Hilir di Muara KBT sepanjang 182 m²;
- 6) Penggantian dan pengadaan pompa untuk pengendali banjir sebanyak 7 unit pompa dan 6 unit panel.

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

- a) Normalisasi Kali Sekretaris sepanjang 428 m;
- b) Penurapan Kali Baru Timur sepanjang 186 m.

3) Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi

- a) Perbaikan sistem pompa, pintu air di wilayah kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di 10 lokasi;
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terprediksi di 76 lokasi;
- c) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir di 123 lokasi pompa, 42 lokasi pintu air;
- d) Perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta di 11 lokasi;
- e) Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendalian di Provinsi DKI Jakarta di 4 lokasi.

4) Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai

Pembersihan saluran/kali di 144 lokasi dan di Kanal Banjir Timur

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,

- a) Perbaikan jalan pada koridor *busway* seluas 52.820 m²;
- b) Pemeliharaan berkala jalan di 5 wilayah DKI Jakarta dengan perincian Jakarta Pusat seluas 181.123 m², Jakarta Utara seluas 81.252 m², Jakarta Barat seluas 170.563,18 m², Jakarta Selatan seluas 184.165,98 m² dan Jakarta Timur seluas 192.281 m²;

- c) Perbaikan sarana prasarana untuk penanggulangan kerusakan infrastruktur jalan di 56 lokasi Provinsi DKI Jakarta.

6) Program Penanggulangan Meningkatnya Permukaan Pasang Air Laut

Pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara Jakarta sepanjang 1.282 m.

7) Program pembangunan dan penataan bangunan gedung Pemda

- a) Pembangunan lanjutan Gedung DPRD dan Pengembangan Balaikota;
- b) Pembangunan atap lantai 11 Gedung DPRD Baru dan jembatan penghubung dengan Gedung DPRD Lama;
- c) Renovasi Gedung Blok G sebagai bangunan ramah lingkungan (*Green Building*), tahap III.

8) Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan

- a) Pengembangan wisma pada lokasi *Islamic Center* di Jl. Kramat Raya Jakarta Utara;
- b) Penyelesaian Pembangunan Gedung Wisma *Islamic Center*
- c) Pembangunan gedung Dinas Kesehatan;
- d) Rehab gedung PMI Jakarta Pusat.
- e) Pembangunan Gedung LBIQ (BAZIS) Prov. DKI Jakarta
- f) Pembangunan Gedung PKP (STIKES)

9) Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum

- a) Pengadaan 12 unit kendaraan *arm roll* besar
- b) Pengadaan 15 unit toilet kontainer besar dan 9 unit toilet kontainer kecil
- c) Pengadaan 381 unit gerobak motor

10) Program peningkatan kebersihan kota

Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di 5 (lima) wilayah kota melalui kerjasama dengan swasta.

11) Program penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

Pelaksanaan operasional penerapan sistem 3R di lokasi binaan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta.

12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

- a) Modifikasi instalasi pengolahan limbah *septic tank* Pulo Gebang dan Duri Kosambi
- b) Audit lingkungan di sekitar Unit Pengolahan Limbah *Septic Tank* (UPLS)
- c) Evaluasi pengelolaan air limbah *septic tank* di UPLS

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Terlaksananya pembebasan tanah KBT seluas total 2.835.916 m² atau 69,44% dari target sebesar 4.084.023 m².
2. Terlaksananya pembebasan lahan Waduk Marunda seluas sekitar 300.000 m² atau 53,57% dari target seluas 560.000 m².
3. Terbangunnya tanggul penahan air laut di kawasan rawan air laut pasang sepanjang 1200 m.
4. Beroperasinya sistem pengendali banjir dengan baik
5. Berfungsinya Kanal Banjir Timur sebagai pengendali banjir di wilayah timur Jakarta
6. Tertatanya kawasan Kanal Banjir Timur
7. Berfungsinya sistem drainase
8. Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali banjir, drainase kota, drainase lingkungan permukiman, dan irigasi; dan polder-polder yang ada berfungsi dengan efektif
9. Tertatanya, terbangunnya dan terpeliharanya 1 situ dan 2 waduk.
10. Meningkatnya kapasitas jaringan dan kualitas pada jalan arteri, kolektor dan lokal terutama pada wilayah Timur dan Barat Kota Jakarta
11. Terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan di DKI Jakarta

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Tidak terealisasinya pembangunan TPS di Kelurahan Gedong Jakarta Timur dikarenakan pembebasan lahan yang terkendala status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Untuk itu dilakukan pemetaan ulang lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai TPS.
- 2) Sampai tahun 2012 beban pengolahan sampah di Bantargebang masih cukup tinggi dikarenakan terhentinya kerjasama pengolahan sampah di *Intermediary Treatment Facility* (ITF) Cakung Cilincing dan menurunnya kemampuan SPA Sunter karena usang. Untuk itu diupayakan percepatan pelelangan dan pembangunan ITF dalam kota.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp686.376.921.397,30 dan telah direalisasikan sebesar Rp 366.578.301.709,00 atau 53,41% untuk belanja langsung.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

Program Penyediaan Perumahan Rakyat

- 1) Penyelesaian pembangunan Rusun Waduk Pluit sebanyak 2 blok (200 unit).
- 2) Penyelesaian pembangunan Rusun Dinas Kebakaran Boker sebanyak 1 blok (100 unit).
- 3) Penyelesaian pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan sebanyak 1 blok (100 unit).

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat antara lain :

- 1) Tersedianya 400 unit rusunawa di 3 lokasi.
- 2) Bertambahnya Rusunawa di DKI Jakarta dari 11.400 unit menjadi 11.800 unit.

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Penghunian Rusun yang terkendala dengan kesiapan calon warga penghuni rusun akibat kurang optimalnya pendampingan terhadap warga dan kesiapan infrastruktur pendukung di lokasi rusun. Untuk itu, dilakukan peningkatan upaya-upaya pendampingan warga calon penghuni rusun dan mempersiapkan infrastruktur pendukung rusun.
- 2) Belum selesainya proses serah terima aset rusun yang dibangun dengan APBN. Untuk itu, diupayakan percepatan penyelesaian proses melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Penataan Ruang pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp186.026.858.696,75 dan telah direalisasikan sebesar Rp148.900.970.178,00 atau 80,04%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain :

- 1) Program Penerapan Kaidah Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang**
 - a) Pembuatan mobil hias dalam rangka memeriahkan HUT DKI
 - b) Pameran ketataruangan, seperti pembuatan materi pameran, pameran di Pekan Raya Jakarta (PRJ), pameran Hari Tata Ruang , pameran pelayanan publik sedunia.

- c) Operasional dan pemeliharaan *Jakarta City Planning Gallery*.
- d) Pemeliharaan dan pengembangan *website*.
- e) Pembinaan teknis penataan ruang.
- f) Penyusunan *draft* Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
- g) Pembinaan teknis pengukuran spasial.
- h) Pelaksanaan kajian surveyor berlisensi.

2) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi penataan ruang

- a) Inventarisasi jenis-jenis kegiatan pada setiap penggunaan lahan/zona.
- b) Penyempurnaan penyusunan Peraturan Zonasi dan implementasinya dalam pelayanan perizinan di Provinsi DKI Jakarta.
- c) Perencanaan pola persebaran daerah tangkapan air dan pola persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
- d) Pelaksanaan kajian penyediaan ruang kota untuk kegiatan sektor informal serta mitigasi dan evakuasi bencana di Provinsi DKI Jakarta.
- e) Penyusunan *Masterplan Transit Oriented Development* (TOD) Manggarai.
- f) Pelaksanaan kajian evaluasi lokasi kawasan pemugaran Menteng.
- g) Evaluasi dan revisi *Masterplan* Kawasan Gelora Bung Karno Senayan.
- h) Sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan.
- i) Penyusunan Panduan Rancang Kota yang dikenal juga dengan istilah *Urban Design Guidelines* (UDGL) untuk:
 - Koridor *Mass Rapid Transit* (MRT) Tahap II (Dukuh atas - Kampung Bandan).

- Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis (KES) Marunda.
 - Kawasan Terminal Pulo Gebang.
 - Kawasan Situ Babakan.
- j) Pelaksanaan Revisi UDGL Kawasan Muara Angke.
- k) Pelaksanaan Kajian Perencanaan Kawasan di Sekitar Lebak Bulus.
- 3) Program peningkatan pelayanan ketatakotaan**
- a) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi Pelayanan Aplikasi Administrasi Layanan.
- b) Pembuatan Sistem Informasi media Luar Ruang.
- c) Pembuatan sistem data base jaringan utilitas.
- d) Pelaksanaan Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
- e) Registrasi, *Surveillance Audit* dan Resertifikasi.
- 4) Penataan dan pengawasan bangunan**
- a) Pelaksanaan 1.255 kegiatan penertiban pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan.
- b) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah 15.253 berkas, Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sejumlah 603 berkas.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang**
- a) Penyediaan peralatan bongkar 1 (satu) set terdiri dari: genset sebanyak 7 (tujuh) unit, *breaker* sebanyak 24 unit.
- b) Penyediaan 4 (empat) jenis alat ukur pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung.
- c) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pengukuran
- d) Pengembangan Aplikasi Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
- e) Pengadaan Software khusus *Geographic Information System* (GIS)

- f) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dinas Tata Ruang
- g) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman teknis Penyusunan UDGL serta kawasan vertikal terpadu dan kompak

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan penataan ruang antara lain :

- a. Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang pada *Jakarta City Planning Galery* yang dapat diakses melalui *website* www.tatakota-jakartaku.net
- b. Tersedianya bahan Evaluasi Lembar Rencana Kota (LRK) sebagai dasar pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas penataan ruang melalui penyusunan Panduan Rancang Kota (UDGL), penyusunan Peraturan Zonasi, dan sosialisasi RDTR.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan ketataruangan dengan bertambahnya 12 seksi DTR Kecamatan yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sehingga seluruhnya berjumlah 5 SDTR dan 32 seksi DTR Kecamatan.
- e. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tersusunnya Rencana Induk (*Masterplan*) dan Pedoman Teknis.
- f. Meningkatnya pelayanan perizinan bangunan di Dinas P2B, Suku Dinas dan Kecamatan dari 16 sertifikat di tahun 2011 menjadi 21 sertifikat di tahun 2012.
- g. Meningkatnya kompetensi Dinas P2B dengan terdaftar sebagai Lembaga Inspeksi sesuai ISO 17020.

c. Permasalahan dan Solusi

Tantangan penyusunan peraturan turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 antara lain adanya tuntutan masyarakat untuk semakin terlibat dalam proses penyusunannya.

Untuk itu, dilakukan penambahan cakupan maupun frekuensi konsultasi publik.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp118.329.851.173,80 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp86.373.680.272,00 atau 72,99%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program perencanaan pembangunan perekonomian

- a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi Bidang Perekonomian
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian
- c) Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
- d) Fasilitasi MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

2) Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

- a) Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dalam koordinasi Bidang Kesmas
- b) Koordinasi perencanaan Bidang Kesmas
- c) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta

3) Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota

- a) Koordinasi perencanaan sub bidang sarana prasarana kota
- b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang sarana prasarana kota
- c) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Ruang Bawah Tanah
- d) Penyempurnaan Naskah Akademis Kawasan Strategis Pantura

- e) Pencetakan buku RTRW 2030
- 4) Perencanaan pembangunan lingkungan hidup**
 - a) Koordinasi perencanaan sub bidang lingkungan hidup
 - b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang lingkungan hidup
 - c) Fasilitasi Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)
- 5) Perencanaan pembangunan tata praja**
 - a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang tata praja
 - b) Koordinasi perencanaan sub bidang tata praja
- 6) Perencanaan pembangunan aparatur**
 - a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang aparatur
 - b) Koordinasi perencanaan sub bidang aparatur
 - c) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi DKI Jakarta
- 7) Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah**
 - a) Penyusunan Dokumen Draft RPJMD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2012-2017
 - b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;
 - c) Pelaksanaan sosialisasi Rembuk RW kepada pengurus RT, RW dan LMK
 - d) Pendampingan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
 - e) Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
 - f) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan 2012 (KUA-P 2012);
 - g) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan 2012 (PPA-P 2012)
 - h) Penyusunan Dokumen Lampiran APBD-P Tahun 2012;
 - i) Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2013 (KUA-2013)

- j) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 2013 (PPA-2013);
 - k) Penyusunan Dokumen Lampiran APBD Tahun 2013
 - l) Musrenbang RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025
 - m) Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025
 - n) Pengoperasian Sistem Informasi Perencanaan berbasis internet (*e-planning*)
 - o) Pengoperasian sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis internet (*e-monev*) dan dapat diakses melalui *mobile device* (M-Gov)
- 8) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Perencanaan**
- a) Penyusunan LKPJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011;
 - b) Penyusunan LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012;
 - c) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
 - d) Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2013 – 2016

Adapun hasil penyelenggaraan program pada urusan perencanaan Tahun 2012, antara lain :

- 1) Disampaikannya LKPJ Tahun 2011 dan LKPJ AMJ 2007-2012 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2) Ditetapkannya RKPD Tahun 2013 sesuai ketentuan
- 3) Disampaikannya RAPBD-P Tahun 2012 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 4) Disampaikannya RAPBD Tahun 2013 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 5) Disosialisasikannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030

- 6) Ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025
- 7) Terselenggaranya Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan ketentuan.
- 8) Ditetapkannya Pergub Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah
- 9) Terseleksinya Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2013 - 2016

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terealisasinya pelaksanaan kegiatan *Management Consulting Service* (MCS) pada pembangunan MRT karena pihak konsultan sedang melakukan konsolidasi tim ahli dari beberapa disiplin ilmu dan persiapan administrasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan MCS dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka pada tahun anggaran 2013 dialokasikan kembali untuk membiayai kegiatan MCS dimaksud.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Perhubungan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.391.199.647.677,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.925.279.495.360,00 atau 80,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar kota

- a) Peningkatan *emplasement* terminal Bus Kampung Rambutan (100%), Terminal Bus Kampung Melayu (100%) dan Terminal Bus Tanjung Priok (30%)

- b) Pemeliharaan terminal meliputi saluran, bangunan, pagar dan peron.

2) Program peningkatan pengelolaan Busway

- a) Peningkatan dan Penyempurnaan Prasarana:
 - Halte *Busway* Koridor VII berupa 1 unit halte pada Halte *Busway* Cawang UKI
 - Halte *Busway* Koridor I berupa peningkatan 5 halte busway dan pembangunan 1 unit JPO
 - Prasarana penunjang *Feeder Busway* berupa 18 undakan dan 4 unit halte
- b) Perbaikan/perawatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada jalur busway koridor I s/d X sebagai berikut :
 - Koridor I = 4 unit
 - Koridor II = 6 unit
 - Koridor III = 7 unit
 - Koridor IV = 4 unit
 - Koridor V = 4 unit
 - Koridor VI = 4 unit
 - Koridor VII = 4 unit
 - Koridor VIII = 6 unit
 - Koridor IX = 4 unit
 - Koridor X = 3 unit
- c) Pemasangan pagar median jalan sepanjang 3.852 m sebagai penunjang keselamatan di koridor *busway*.
- d) Pembangunan Fasilitas penunjang *feeder busway* pada 18 halte dan 6 unit halte baru
- e) Perbaikan, penggantian dan pemasangan separator busway sepanjang 22.938 m, dengan rincian : Koridor II = 2.116 m, Koridor III = 5.446 m, Koridor V = 5.932 m, Koridor VI = 5.412 m dan Koridor VIII = 4.012 m

3) Program pembangunan fasilitas perhubungan

- a) Pengecatan Marka dan Tanda Jalan Rambu lalu lintas di DKI Jakarta, antara lain :

- Kawasan Pluit : Jl. Pluit Putri, Jl. Pluit Indah, Jl. Pluit Timur, Jl. Pluit Sakti.
 - Kawasan Martadinata : Jl. Laks. RE Martadinata
 - Kawasan Sunter : Jl. Danau Sunter Selatan
 - Kawasan Veteran : Jl. Veteran, Jl. Veteran III, Jl. Ir. H. Juanda
 - Kawasan Taman Mini : Jl. Taman Mini, Jl. Pondok Gede Raya Hankam
 - Kawasan Cideng : Flyover Cideng
 - Kawasan Halim : Jl. Permata, Jl. Halim Perdana Kusuma
 - Kawasan Gandaria : Jl. Gandaria, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Kramat Pela, Jl. Gandaria Tengah II, Jl. Kyai Maja
 - Kawasan Duren Sawit : Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl. H. Miran, Jl. H. Naman
 - Kawasan Kalimalang : Jl. Kalimalang
 - Kawasan Cibubur : Jl. PKP Raya, Jl. Jambore, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Kramat Bakti
 - Kawasan Pasar Minggu : Jl. Pasar Minggu
 - Kawasan Tb. Simatupang : Jl. Tb. Simatupang
 - Kawasan Cibubur : Jl. Bogor Raya
 - Koridor Kalideres-Tangerang : Jl. Daan Mogot
- b) Pembangunan marka jalan dan rambu lalu lintas dalam menunjang operasional busway pada koridor I s.d. XI.
- c) Penyusunan Kajian *Feeder Busway* Rute 8, 9, 10 yakni sebagai berikut :
- Rute 8A : Dadap – Bandara – Daan Mogot
 - Rute 8B : Graha – Pasar Bengkok – Ciledug –

Kebon Jeruk

- Rute 8C : Jombang – Ceger – Bintaro – Pd. Indah – Warung Jati
- Rute 9 : Muncul – Pamulang – Cipete – Lebak Bulus
- Rute 9A : Cinere - Lebak Bulus - Warung Jati
- Rute 9B : Sawangan – Pondok Labu – Warung Jati
- Rute 9C : Depok – Ps. Rebo - Ragunan
- Rute 10 : Pd. Rangan - Cawang
- Rute 10A : Pekayon – Jati Asih - Cawang
- Rute 10B : Kranji – Harapan Baru – Pd. Kopi – Kp. Melayu
- Rute 10C : Ancol – Sunter – Kelapa Gading

d) Pengadaan :

- Mobil patroli terbuka = 8 unit
- Mobil patroli tertutup = 3 unit
- Sepeda motor besar = 8 unit
- Sepeda motor kecil = 19 unit
- Kendaraan Operasional Lapangan-*Crane* = 2 unit
- Mobil derek besar otomatis = 3 unit
- Mobil derek kecil otomatis = 4 unit

4) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perhubungan

- a) Pengoperasian 44 bus sekolah dan 4 bus cadangan yang melayani 9 Rute, yaitu :
- Lapangan Banteng – Kemayoran – Pulogadung
 - Plumpang – Sunter – Kemayoran
 - Cilincing – Tanjung Priok – Pulogadung
 - Pulo Gadung – Pondok Kopi
 - Kampung Melayu – TMII
 - Pasar Minggu – Kebayoran
 - Pasar Minggu – Lenteng Agung

- Manggarai – Pasar Minggu
- Cawang – Plumpang
- b) Pengadaan armada bus angkutan sekolah sebanyak 30 unit.
- c) Penyusunan Evaluasi Pelayanan Angkutan Bus Sekolah
- d) Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Koridor Pengganti Monorail
- e) Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Daerah
- f) Penyusunan Kajian terhadap Terminal Pulogadung setelah pindah ke Pulo Gebang
- g) Penyusunan Kajian Penataan Sistem Perparkiran di Wilayah DKI Jakarta
- h) Penyusunan Kajian *Contra Flow Busway*
- 5) Program peningkatan pelayanan angkutan umum**
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Kapal Penyeberangan UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
 - b) Perbaikan Dermaga dan Fasilitas Penunjang Kepelabuhanan Angkutan Penyeberangan di Pulau Pramuka dan Pulau Tidung
 - c) *Docking* Kapal Patroli I, II, III, IV
 - d) *Docking* Kapal Penyeberangan KM Lumba I, II,
 - e) *Docking* Kapal Penyeberangan KM Kerapu I, II, III, IV, V, VI
 - f) Pergantian Genset KM Lumba-Lumba 1 dan KM Lumba-Lumba 2
 - g) Pergantian Mesin Kapal Kerja dan Kapal Patroli 4
 - h) Pengadaan Kursi Tunggu Terminal - Terminal di Terminal Kalideres, Kp. Rambutan, Lebak Bulus, Pulogadung, Rawamangun, Pasar Minggu dan Pinang Ranti
 - i) Pengadaan Fasilitas Penunjang Informasi Pelabuhan Muara Angke
- 6) Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas**
 - a) Perbaikan lampu lalu lintas di 12 Koridor Busway

- b) Pembangunan Lampu Lalu Lintas di 7 lokasi
 - Jl. Sukanto – Mawar (Jaktim)
 - Jl. Kemang Raya – Kemang Selatan (Jaksel)
 - Jl. Pondok Kopi – Robusta (Jaktim)
 - Jl. Percetakan Negara – Rutan salemba (Jakpus)
 - Jl. Kampung Gusti – Teluk Gong (Jakut)
 - Jl. Danau Sunter Barat – Danau Agung II (Jakbar)
 - Jl. Kembangan Raya – Puri kembangan (Jakbar)
 - c) Pengadaan Lampu Lalu Lintas *Light Emitting Dioda* (LED) = 3.735 unit (43 simpang dan 2 penyeberangan).
 - d) Pembangunan *Intelligent Transport System* (ITS) yang terhubung/terkoneksi dengan sistem operasional Busway di Koridor 1, 2, 3, 4,5 dan 6
- 7) **Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi**
- a) Pengujian dan pemberian sertifikasi kelayakan jalan kendaraan bermotor umum dan angkutan umum wajib uji sebanyak 475.586 kendaraan.
 - b) Penyediaan buku uji sebanyak 175.000 buah, plat uji sebanyak 345.600 unit dan tanda samping sebanyak 846.100 unit
- 8) **Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu**
- a) Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Muara Angke sebagai berikut :
 - *Shelter* (terbuka) = 3 Unit,
 - *Shelter* (tertutup) = 4 Unit,
 - Kantor Perwakilan dan Kantin 2 lantai,
 - Toilet 2 Unit (WC Umum 72 m² dan WC Shelter 36 m²),
 - Musholla 1 Unit,
 - Kanopi 1 Paket
 - Pos Jaga 2 Unit
 - b) Pematangan Lahan Pelabuhan Muara Angke seluas 9.400 m²

- c) Pengerukan Kolam Pelabuhan Muara Angke 42.451 m³
- d) Peningkatan *breakwater* Pelabuhan Muara Angke 1.960 unit *tetrapod*

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan antara lain :

- a. Bertambahnya jumlah koridor busway dari 11 koridor (2011) menjadi 12 koridor (2012)
- b. Bertambahnya jumlah armada busway dari 567 unit (2011) menjadi 669 unit (2012)
- c. Terlayannya jumlah penumpang busway 111.251.869 penumpang pada tahun 2012
- d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) :
 - Meningkatnya pelayanan di PKB Ujung Menteng dari 499 kendaraan per hari di tahun 2011 meningkat menjadi 699 kendaraan perhari di tahun 2012
 - Terlayannya uji kendaraan baru di PKB Pulogadung sebanyak 182 kendaraan perhari
 - Meningkatnya pelayanan di PKB Kedaung Angke dari 482 kendaraan per hari di tahun 2011 meningkat menjadi 560 kendaraan per hari di tahun 2012
- e. Terlaksananya partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Forum Transportasi Internasional di Tokyo 12 – 15 Juli 2011 (ANMC 21 Sektor Perhubungan)
- f. Berfungsinya sistem lampu lalu lintas di 11 koridor busway
- g. Meningkatnya jumlah armada angkutan bus sekolah dari 48 unit bus (2011) menjadi 78 unit bus (2012)
- h. Terlayannya 95.290 penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu dengan 8 (delapan) Kapal Dinas Perhubungan (6 Kapal Kerapu dan 2 Kapal Lumba-lumba) dari sebelumnya 64.379 penumpang pada tahun 2011.
- i. Terlayannya 2.110.812 orang pelajar oleh angkutan Bus Sekolah di tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan jalur *busway extension* Pulogadung – Bekasi gagal lelang akibat tidak ada penawaran yang masuk. Untuk itu pada tahun 2013 dianggarkan kembali melalui APBD untuk pembangunan jalur *busway* dimaksud.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Lingkungan hidup pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.836.305.133.904,65 dan telah direalisasikan sebesar Rp978.970.231.156,00 atau 53,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- a) Penilaian Teknis Kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah terhadap 100 kegiatan usaha.
- b) Penyediaan dokumen Penyusunan Strategi Sanitasi Provinsi dalam mendukung MDGs 2015.
- c) Pengendalian pencemaran limbah bersumber non instansional di 100 MCK.
- d) Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah pada 200 kegiatan usaha.
- e) Penerapan *Environmental Pollution Control Management* (EPCM) pada 40 kegiatan usaha.
- f) Penegakan hukum terhadap pelanggar baku mutu emisi gas buang pada kegiatan sumber tidak bergerak terhadap 15 kegiatan usaha.
- g) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. Sudirman – Thamrin dan 5 lokasi di masing-masing wilayah kota.

- h) Penyediaan dokumen kajian akademis kelayakan teknis sumber emisi tidak bergerak.
- i) Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak terhadap 100 industri.
- j) Penyediaan dokumen kajian penerapan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor.
- k) Pengendalian pencemaran udara dari kendaraan bermotor terhadap 1000 kendaraan.
- l) Pelaksanaan edukasi kewajiban uji emisi kendaraan bermotor roda 2 bagi pengguna di bengkel sepeda motor terhadap 750 orang.
- m) Pemantauan kualitas udara secara manual aktif di 9 stasiun.
- n) Pelaksanaan penilaian dokumen amdal / lingkungan terhadap 150 paket dokumen.
- o) Pengawasan dan pengendalian implementasi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) tahap operasi terhadap 250 kegiatan usaha.
- p) Pembinaan pelaksanaan implementasi RKL-RPL tahap konstruksi terhadap 75 kegiatan usaha.
- q) Pemantauan kualitas air sungai di 67 titik pantau sebanyak 5 periode.
- r) Pemantauan kualitas air tanah di 100 titik sebanyak 2 periode.
- s) Pemantauan kualitas laut dan muara Teluk Jakarta di 45 titik pantau sebanyak 3 periode.
- t) Pemantauan kualitas air situ/waduk di 40 situ.
- u) Penyediaan dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemar sungai Angke, sungai Grogol dan sungai Sunter.
- v) Pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang merokok terhadap 96 satuan kerja.

- w) Pelaksanaan penyidikan kasus lingkungan hidup sebanyak 4 kasus.
- x) Penegakan hukum lingkungan terhadap 40 kegiatan usaha.
- y) Penyediaan dokumen kajian pembentukan lembaga arbitrase penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- z) Penanganan kasus dan sengketa lingkungan hidup sebanyak 50 kasus.
- aa) Penilaian teknis kelayakan TPS B3 terhadap 50 TPS B3.
- bb) Pengendalian pencemaran limbah B3 terhadap 80 kegiatan usaha.
- cc) Pembinaan penilaian Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata Wilayah Kota Administrasi di 5 kota administrasi.
- dd) Pelaksanaan Pengamatan, Pemantauan, dan Pengendalian Lingkungan serta Evaluasi (P3LE) dalam rangka Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL) di 4 kawasan.
- ee) Penyediaan dokumen Penyusunan Rancangan Upaya Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Laut dan pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.

2) Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam

- a) Pembinaan penerapan resapan air pada 200 kegiatan usaha.
- b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan *dewatering* oleh kegiatan/usaha terhadap 50 kegiatan usaha.
- c) Pemasangan dan penggantian meter air di 191 titik pelanggan.
- d) Pencatatan meter air tanah terhadap 4142 pelanggan.
- e) Pengadaan meter air sebanyak 974 buah.
- f) Pengawasan kegiatan pemboran di 46 titik sumur.
- g) Pengawasan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah di 200 lokasi.

- h) Pembangunan *Break Water* / Pemecah Gelombang sepanjang 175 m' dan terpeliharanya *Break Water* sepanjang 100 m'
- i) Penanaman mangrove di kawasan Hutan Mangrove Angke Kapuk

3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- a) Pengendalian pencemaran limbah padat (sampah) berbasis 3R di 3 lokasi.
- b) Peningkatan SDM dalam pengendalian sanitasi lingkungan permukiman di 100 kelurahan.
- c) Pelaksanaan kegiatan "Stop Nyampah di Kali" di 6 kelurahan.
- d) Pengembangan Program *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan terhadap 25 pasar modern.
- e) Pelaksanaan edukasi kewajiban masyarakat dunia usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap 100 kegiatan usaha.
- f) Pelaksanaan program "SUPER (Surat Pernyataan)" dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha terhadap 75 kegiatan usaha.
- g) Sosialisasi Peraturan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan non apendik Convention on the International Trade in Endangered Species (Mitra Praja Utama) dan Peraturan Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan
- h) Pengembangan Agrowisata DKI Jakarta
- i) Perpanjangan :
 - Izin perusahaan penampung terdaftar di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 29 perusahaan
 - Izin industri primer hasil hutan kayu sebanyak 1 perusahaan

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota

- a) Pembangunan taman kota di 2 lokasi seluas 10.260,88 m² dan taman interaktif di 11 lokasi seluas 84.881 m².
- b) Pemeliharaan areal taman seluas 985.355,77 m² dan jalur hijau seluas 1.171.247,00 m².
- c) Pembangunan ornamen dan sarana keindahan kota di 2 lokasi, dan tertatanya ornamen dan sarana keindahan kota di 3 lokasi.
- d) Pemeliharaan ornamen dan sarana keindahan kota di 117 lokasi.
- e) Pengadaan lahan RTH makam dan taman di 19 lokasi seluas 74.069,62 m² antara lain:
 - 1) RTH Jl. Kebagusan Raya Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan seluas 1.559 m².
 - 2) RTH Jl. Gg. H.Saibun Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu - Jakarta Selatan seluas 2.947 m².
 - 3) RTH Jl. Bina Warga Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan seluas 4.663 m².
 - 4) RTH Jl. Jangkrik Ciganjur - Jakarta Selatan (Lanjutan) seluas 2.028 m².
 - 5) RTH Jl. Kebagusan Raya Kel. Jagakarsa Jakarta Selatan seluas 3.770 m².
 - 6) RTH Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 2.340 m².
 - 7) RTH Jl. Samping Kosambi Baru RW.09 dan RW.10 Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng - Jakarta Barat seluas 15.455 m².
 - 8) RTH Jl. Raya Bekasi RT 010/03 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur seluas 1.663 m².
 - 9) Taman Interaktif Kp. Joglo Kel. Joglo Kec. Kembangan, Jakarta Barat seluas 714,14 m².
 - 10) Taman Interaktif Jl. Lingkungan III, Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat seluas 648,95 m².

- 11) RTH Jl. Kalibaru Timur VI Gg 14 Rt 004/09, Kel.Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 506,03 m².
- 12) RTH Jl. Rawajaya Rt. 007/04 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 2.525 m².
- 13) RTH Jl. Timbul 3 RT.008/04 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 5.619 m².
- 14) RTH Jl. Pagelarang, Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 6.119 m².
- 15) RTH Jl. Kampung Baru RW.10 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat seluas 8.210 m².
- 16) RTH di Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara seluas 8.000 m².
- 17) RTH di Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara seluas 4.247 m².
- 18) RTH Jl. Mangga XIV RT.007/03 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat seluas 3.009 m².
- 19) TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 46,50 m².

5) Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

- a) Penanaman pohon pelindung sebanyak 4.260 pohon.
- b) Penataan taman kota di 2 lokasi seluas 1.363,09 m².
- c) Penataan areal jalur hijau tepian air di 2 lokasi seluas 739,22 m², pedestrian di 6 lokasi seluas 20.416,48 m², jalur hijau jalan eks SPBU di 3 lokasi seluas 1.898,37 m².
- d) Pemeliharaan sarana hutan kota dan pohon di Hutan Kota sebanyak 10.000 pohon, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan tanaman/pohon yang ada di dalam hutan kota
- e) Penyediaan bibit pohon (pelindung dan produktif) untuk kegiatan penghijauan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 50.000 pohon
- f) Pemeliharaan 17 lokasi kebun bibit dalam mendukung produksi benih/bibit tanaman

g) Pembangunan Sarana Hutan Kota, yaitu :

- Jalan setapak/track, shelter, gedung informasi, gapura, amphiteatre, toilet, lahan parkir, turap 278,83 m², gazebo/shelter 4 unit, taman 2.578 m², jalan kontrol di Hutan Kota Interaktif Pondok Labu Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Areal parkir 2.333,66 m², turap 951,45 m², pagar 475 m, gazebo/shelter 4 unit, gapura dan dermaga, jalan setapak/track, shelter, gedung informasi, kolam pemancingan, lahan parkir di Hutan Kota Interaktif Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur
- Jalan setapak/track, gedung informasi, mushola, toilet, shelter di Hutan Kota Interaktif Ujung Menteng
- Jalan setapak/track paving block Hutan Kota Interaktif Kopassus Cijantung Kota Administrasi Jakarta Timur sepanjang 892 m²
- Pemeliharaan 1100 pohon dan penanaman 380 pohon Hutan Kota Interaktif Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Pintu Gerbang dan Pagar 101 m' Hutan Kota Kembangan Utara
- Pagar 430 m', pintu gerbang, pondasi penahan tanah dan pos jaga 59 m² Hutan Kota Semper Jakarta Utara

6) Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

e) Penyediaan :

- Kendaraan penyiram tanaman (tangki air) sebanyak 2 unit
- Kendaraan operasional monitoring, pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan, hutan dan hutan kota minibus sebanyak 2 unit
- Kendaraan mobil patrol pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan sebanyak 1 unit
- Kendaraan operasional pengamanan dan pengawasan

peredaran hasil hutan roda 2 sebanyak 4 unit

f) Pengamanan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta

g) Pemagaran :

- Hutan kota Kembangan Utara sepanjang 100 m
- Hutan kota hasil pembebasan tahun 2011 di Jakarta Utara sepanjang 430 meter

7) Program peningkatan pengelolaan pemakaman

Penataan sarana dan prasarana di 15 lokasi TPU antara lain :TPU Wilayah Jakarta Pusat : (1) TPU Karet Bivak ; Wilayah Jakarta Utara : (2) TPU Semper, (3) TPU Rorotan, (4) TPU Tegal Kunir ; Wilayah Jakarta Barat : (5) TPU Tegal Alur ; Wilayah Jakarta Selatan : (6) TPU Kampung Kandang, (7) TPU Tanah Kusir Utara, (8) TPU Tanah Kusir Selatan, (9) TPU Menteng Pulo, (10) TPU Srengseng Sawah, (11) TPU Jeruk Purut ; Wilayah Jakarta Timur : (12) TPU Pondok Ranggon, (13) TPU Pondok Kelapa, (14) TPU Kalisari, (15) TPU Cijantung.

8) Program konservasi flora fauna

- a) Pembangunan jalan kontrol di *Arboretum Mangrove* sepanjang 200 m' areal parkir dan jalan masuk kawasan ekowisata mangrove Angke Kapuk
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana *Arboretum Mangrove*

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Terlaksananya pembangunan taman kota Kebun Pisang seluas total 147.218,11 m².
- 2) Bertambahnya lahan untuk RTH taman dan makam seluas 74.069,62 m² (7,41 ha) sehingga total RTH taman dan makam seluas 27.257.400 m² (2.725,74 ha).
- 3) Bertambahnya RTH Pertamanan yang dibangun dari 58 lokasi menjadi 77 lokasi dengan luas 352.787,84 m² menjadi 537.716,69 m².

- 4) Meningkatnya pembebasan lahan untuk RTH dari 91 lokasi dengan luas 1.040.133,50 m² (104,01 ha) menjadi 110 lokasi dengan luas 1.114.203,12 m² (111,42 ha).
- 5) Terpeliharanya RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Kota seluas 2.050.120 m² (205,01 ha).
- 6) Bertambahnya taman interaktif yang dibangun dari 90 lokasi dengan luas 155.532,77 m² menjadi 100 lokasi dengan luas 207.673,62 m².
- 7) Bertambahnya pohon yang ditanam oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dari total 3.704.621 pohon (2011) menjadi 3.708.881 pohon (2012).
- 8) Bertambahnya RTH Hutan Kota dan sentra buah unggul seluas 41.358,11 m² (4,1358 Ha) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) RTH Hutan Kota :
 - Hutan kota di Jl. Perdagangan RT. 002, RW 01 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 9.275 m²
 - Hutan kota di RT 008, RW 12 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 13.395,11 m²
 - Hutan Kota di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan 9.284 m²
 - b) Sentra Buah Unggul

Sentra buah unggul di Jalan Raya Pulau Gebang seluas 9.404 m².
- 9) Bertambahnya hutan kota interaktif yang terbangun yaitu sebanyak 4 lokasi (Hutan Kota Pondok Labu, Hutan Kota Munjul, Hutan Kota Ujung Menteng dan Hutan Kota Kopassus Cijantung)
- 10) Meningkatnya kualitas kawasan Kebun Agrowisata Cilangkap dan Kebun Bibit Cibubur Agrowisata melalui penataan berbagai sarana dan prasarana
- 11) Meningkatnya daerah resapan air dalam meningkatkan daya

resap air hujan sebagai salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta

- 12) Meningkatnya produksi oksigen dari pepohonan yang tertanam di dalam kawasan hutan kota, penghijauan buah-buahan.
- 13) Terwujudnya keamanan kawasan hutan mangrove dan hutan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 14) Meningkatnya kesadaran masyarakat Jakarta tentang arti pentingnya lingkungan hidup melalui penanaman pohon secara swadaya
- 15) Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung akan berdampak terhadap kelestarian hutan di daerah produsen / luas Provinsi DKI Jakarta
- 16) Terpenuhinya kebutuhan hasil hutan kayu dan non kayu bagi warga Jakarta
- 17) Menurunnya abrasi laut di Pulau Rambut
- 18) Terkendalinya serangan hama dan penyakit tanaman yang menyerang pepohonan baik pohon pelindung maupun produktif.

c. Permasalahan dan Solusi

Program Penanaman Satu Milyar Pohon masih belum optimal, antara lain karena terjadi hunian liar di beberapa lokasi milik pemerintah dan swasta yang berstatus peruntukan hijau. Untuk itu dilakukan peningkatan pengamanan dan penggalangan CSR pada BUMN dan BUMS untuk berpartisipasi mendukung penanaman pohon.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.248.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.447.574.700,00 atau 18,01%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

- a) Pelaksanaan otomasi P4T di 4 Kelurahan.
- b) Pendataan dan otomasi P4T di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
- c) Pelaksanaan merger data P4T tata ruang dan LRK tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pertanahan antara lain bertambahnya data P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang dapat diintegrasikan ke dalam Sistem P4T Tata Ruang dalam penataan dan pelayanan ketataruangan.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum diterapkannya teknologi informasi dalam melaksanakan program-program pelayanan ketatakotaan dan P4T sehingga pelayanan belum optimal. Untuk itu, diupayakan komputerisasi data ketataruangan tidak saja berbasis kelurahan tetapi telah dikembangkan menjadi berbasis kecamatan, wilayah dan Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan pelayanan yang baik.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp139.160.646.246,30 dan telah direalisasikan sebesar Rp114.418.847.976,00 atau 82,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain :

- 1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan**
 - a) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan
 - b) Pendataan dan Monitoring Arus Mudik Balik Tahun 2012
 - c) Kajian Model Perhitungan Arus Mudik/Balik
 - d) Monitoring Penerapan Pemasalan e-KTP
 - e) Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP (92,14%) dari target Kementerian Dalam Negeri yakni 6.372.951 wajib KTP
- 2) Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - a) Pembinaan Pelayanan e-Akta Kelahiran bagi Kasie Kecamatan
 - b) Survey Keberhasilan Jakarta Bebas Akta Kelahiran
- 3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan**
 - a) Pengembangan Data Statistik Vital Kelahiran dan Kematian
 - b) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari bidang Kependudukan di 5 Wilayah Kota
 - c) Pelaksanaan verifikasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Tahun 2012
- 4) Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**
 - a) Pemeliharaan Software dan Database
 - b) Penyediaan Sewa Jaringan / Software
 - c) Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
 - d) Penyajian Informasi Hasil Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - e) Pembangunan Aplikasi Sinkronisasi Database SIAK dengan e-KTP

- f) Pengadaan Server dan perangkat e-KTP Reguler serta pengadaan hardware dan software pendukung pelayanan kependudukan

Adapun hasil penyelenggaraan program pada urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2012, antara lain :

1. Terlaksananya penerbitan akta kelahiran sebanyak 37.727 akta yang berkontribusi terhadap pencapaian tingkat kepemilikan akta kelahiran (usia 1-5 thn) menjadi sebesar 919 jiwa/ 1000 penduduk
2. Tercapainya kepemilikan KK berbasis nomor KK Nasional sebesar 2.773.700 KK (88,00%) pada tahun 2012 yang berarti naik sebesar 12,79% dibandingkan tahun 2011 sebesar 2.370.489 KK (75,21%)
3. Pelanggaran terhadap peraturan kependudukan tercatat sebesar 2.245 pada Tahun 2012 yang berarti turun 11,12% dari 2.526 orang pada Tahun 2011
4. Pendatang baru pasca Idul Fitri tercatat sebesar 47.832 orang pada Tahun 2012 yang berarti turun 7,79% dari 51.857 orang pada Tahun 2011
5. Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP (92,14%) dari target Kementerian Dalam Negeri yakni 6.372.951 wajib KTP
6. Terlaksananya penyusunan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP disebabkan beberapa hal antara lain: bekerja, tugas belajar, sekolah/kuliah di luar kota, pindah tanpa melapor, masih berlakunya KTP non-elektronik. Untuk itu dilakukan peningkatan himbauan kepada masyarakat melalui Pemerintah Kelurahan, RT dan RW agar penduduk melakukan perekaman data e-KTP.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2012 dialokasikan APBD untuk Belanja Langsung sebesar Rp11.620.680.500,00 dengan total penyerapan sebesar Rp11.073.437.081,00 atau 95,29%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan

- a) Fasilitasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Advokasi dan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten;
- c) Persiapan pelaksanaan menuju Kota Layak Anak (KLA) di 3(tiga) Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan;
- d) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SKPD/UKPD Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten.

2) Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan

- a) Koordinasi Kerjasama Program Mitra Praja Utama (MPU) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang dengan 10 (sepuluh)Provinsi di Indonesia yaitu :Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- b) Sosialisasipencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 6 Kota/Kabupaten.

- c) Koordinasi pencegahan dan penanganan perdagangan manusia (*anti-trafficking*).
- 3) **Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**
 - a) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Peduli Perempuan dan Anak sebanyak 164 orang;
 - b) Penguatan Kelembagaan terhadap 63 Lembaga Peduli Perempuan dan Anak melalui koordinasi, pelatihan dan pemberian bantuan operasional.
- 4) **Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat,**
 - a) Lomba dan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota/Kabupaten.
 - b) Pelatihan peningkatan ekonomi perempuan melalui PPMK Bina Sosial kepada 456 orang;
 - c) Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 6 Kota/Kabupaten;
 - d) Penyelenggaraan gelar produk unggulan lintas Provinsi dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012 antara lain:

- a) Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan kasus tindak KDRT dari 1.381 kasus (2011) menjadi 1.429. kasus (2012);
- b) Dipertahankannya jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 63 organisasi;
- c) Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri pada 740 kelompok.

c. Permasalahan dan Solusi

Masih adanya SKPD/UKPD yang belum memiliki data terpilah sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum responsif gender. Untuk itu dilakukan sosialisasi dan advokasi akan pentingnya data terpilah dalam penyusunan perencanaan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS), pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp42.896.009.366,00 dengan total penyerapan sebesar Rp35.796.067.062,00 atau 83,45%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Keluarga Berencana,

- a) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan / Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 Sektor terkait;
- b) Pelayanan KB melalui mobil unit KB keliling dengan jumlah akseptor sebanyak 3.997 Akseptor;
- c) Pemantapan komitmen teknis medis pelayanan KB kepada 800 *provider* (Dokter dan Bidan Praktek Swasta);
- d) Pembinaan, Peningkatan dan Intensifikasi Program KB Pria kepada 267 Kelompok Paguyuban KB Pria;
- e) Penggalangan komitmen dan Lomba Kesatuan Gerak KB-Kesehatan di 6 Kota/Kabupaten;
- f) Peningkatan Pelayanan KB di DKI Jakarta melalui pelayanan KB gratis di Puskesmas Kecamatan/Kelurahan, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010;
- g) Penandatanganan MoU dengan Rumah Sakit dalam rangka pelayanan KB gratis di 26 Rumah Sakit;

- h) Pemantapan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 710 Orang;
- i) Advokasi dan KIE Program Kependudukan sebanyak 775 orang;
- j) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB sebanyak 1Unit di Jakarta Utara;
- k) Pengadaan Mobil Distribusi Alat Kontrasepsi sebanyak 2 Unit yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat;
- l) Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB sebanyak 2 Unit yaitu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat;
- m) Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh KB (roda dua) sebanyak 133 Unit.

2) Program kesehatan reproduksi remaja

- a) Peningkatan wawasan dan pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja kepada 500 remaja di Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- b) Gebyar kreativitas kesehatan reproduksi remaja di Tingkat Provinsi dan 5 Kota yang diikuti oleh 972 peserta;
- c) Advokasi dan KIE Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) sebanyak 889 orang;

3) Program pelayanan kontrasepsi

- a) Pemetaan Kebutuhan Alat Kontrasepsi.
- b) Distribusi alat kontrasepsi (alkon) dan non alkon di 5 wilayah kota administrasi dan 1 Kepulauan Seribu.
- c) Pengadaan Alat Kontrasepsi di 6 Kota/Kabupaten.

4) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja

- a) Peningkatan Kuantitas dan Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja baru sebanyak 39 PIK melalui Jalur Sekolah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- b) Peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit menular seksual;

- c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Dialog Interaktif pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit Menular seksual Ibu Hamil kepada Anaknya sebanyak 1.165ibu;

5) Program Pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita (BKB) – Posyandu.

- a) Kemitraan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu sebanyak 200 BKB – Posyandu.
- b) Gelar Kreatifitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Provinsi dan 5 Kota Administrasi dengan peserta sebanyak 1.350 orang;
- c) Pemilihan Pengelola dan Kelompok BKB terbaik sebanyak 6 Pengelola dan 6 Kelompok BKB.
- d) Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Kelompok BKB-Posyandu sebanyak 130BKB – Posyandu.

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- a) Pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/PPKB RW) terbaik sebanyak 6 PKB dan 6 PPKB RW.
- b) Pembinaan kepada Petugas Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.700;
- c) Temu Kader Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.700 PPKB RW.

7) Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- a) Pembinaan kepada 792 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- b) Penggalangan kemitraan dan gelar produk kelompok UPPKS bagi 100 Kelompok;
- c) Pemilihan pengelola kelompok UPPKS terbaik sebanyak 6pengelola.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2012 antara lain:

- 1) Dipertahankan kelangsungan pemakaian alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur sebesar 81,38% pada tahun 2012.
- 2) Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) dari 684.789 Akseptor pada tahun 2011 menjadi 710.830 Akseptor pada tahun 2012;
- 3) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 349.332 pada tahun 2011 dan menjadi 356.692 pada tahun 2012;
- 4) Meningkatnya jumlah Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja dalam pelaksanaan KIE bagi Peserta didik Sekolah dari 257 PIK Remaja di tahun 2011 menjadi 296 PIK Remaja pada tahun 2012;
- 5) Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu dari 45.048 Keluarga di tahun 2011 menjadi 51.022 Keluarga di tahun 2012;
- 6) Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB dari 1.280 Kelompok BKB pada Tahun 2011 menjadi 1.412 Kelompok BKB pada Tahun 2012;
- 7) Meningkatnya angka peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dari 60% di tahun 2011 menjadi 62,07% di tahun 2012;
- 8) Diterimanya Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2012, yaitu :
 - Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana kepada Walikota Administrasi Jakarta Utara Bapak H. Bambang Sugiyono, SE, M.Si.

- Diterimanya Penghargaan dari Kepala BKKBN tentang Temu Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Tingkat Nasional Tahun 2012 kepada Supini Maino S. Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Pemenang Lomba Bidan Praktek Swasta Regional Jawa Bali, Terbaik I Tingkat Nasional, atas nama Bidan Hj. Arliati, SS.
- Penghargaan dari BKKBN tentang Kelompok KB Pria Tingkat Nasional kepada Kelompok KB Pria Bahari, dalam rangka Hari Keluarga Tahun 2012.
- Penghargaan dari BKKBN dalam rangka Pemilihan PIK Remaja Unggulan Tahap Tegar kepada PIK Remaja Spirit SMKN 31 Jakarta, dengan predikat Juara Harapan I.
- Penghargaan dari BKKBN dalam rangka Pemilihan PIK Remaja Unggulan Tahap Tumbuh kepada PIK Remaja Cempaka SMA Perguruan Cikini Jakarta, dengan predikat Nominasi Tingkat Nasional.
- Pemenang Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Ketua TP PKK Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.
- Pemenang Lomba Temu Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Misri Hanah, Ketua Kelompok UPPKS Lestari Mandiri, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat.
- Pemenang Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Kelompok BKB PAUD Kemuning, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

- Pemenang Lomba Poster Generasi Berencana Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Elizabeth Eljhon, Mahapeserta didik Trisakti, Kota Jakarta Barat.
- Pemenang Pentas Komedi Generasi Berencana Terbaik II Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Manthong Cs.
- Pemenang Lomba Temu Kader Bina Keluarga Lansia Harapan III Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Neni Asnaeni, Kelompok BKL Cucak Hijau, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kegiatan-kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tidak terdapat kendala/hambatan/masalah yang berarti.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp469.786.133.284,25 dengan total penyerapan sebesar Rp441.247.560.802,00 atau 93,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- a) Pemberdayaan sosial keluarga miskin kepada 1.200 keluarga;
- b) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui KUBE, LKMS sebanyak 44 LKMS;
- c) Penertiban sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan sebanyak 9.066 orang;
- d) Pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan sebanyak 5.000 Orang ;

- e) Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa peralatan dapur umum mandiri sebanyak 40 set pada 20 titik rawan bencana;
- f) Pemberian makanan siap saji bagi korban bencana sebanyak 1.400.000 box/70.000 orang;
- g) Pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 100 orang;
- h) Perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 500 orang;
- i) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebanyak 3.157 orang;
- j) Penguatan kemandirian lansia sebanyak 250 orang;
- k) Kompetisi penyandang cacat tingkat provinsi sebanyak 100 orang;
- l) Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya sebanyak 1.600 orang;
- m) Silaturahmi gubernur dengan para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan pejuang lainnya sebanyak 264 orang;
- n) Pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) sebanyak 3.173 orang;
- o) Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat sebanyak 2.000 orang;
- p) Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang sebanyak 50 orang;
- q) Pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di 27 panti;
- r) Perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan sebanyak 5.211 orang;
- s) Penguatan kemandirian sosial dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bekas hukumandan eks narkoba sebanyak 100 orang;

- t) Pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 15.941 orang;
- u) Pembinaan keterampilan dan bantuan modal bagi PMKS sebanyak 2.290 orang;
- v) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 5.285 orang;
- w) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di rumah singgah atau Yayasan yang menangani anak jalanan sebanyak 927 anak.

2) Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan sosial

- a) Pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 395 lembaga;
- b) Pemberian operasional karang taruna kepada 135 karang taruna;
- c) Pembuatan dan penayangan tentang kesejahteraan sosial sebanyak 7 jenis tayangan melalui TV dan Radio;
- d) Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia sebanyak 80 orang;
- e) Pelatihan pekerja sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 319 orang;
- f) Pelayanan mobil penyuluhan sosial selama 24 lokasi di 5 wilayah kota administrasi.

3) Program pembinaan lembaga mental spiritual

Pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci sebanyak 7.713 orang jamaah dalam 17 Kloter.

4) Program peningkatan sarana dan prasarana sosial

- a) Perencanaan rehab panti sosial sebanyak 10 panti sosial 1 Rumah Perlindungan dan 1 LBK;

- b) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial Pemerintah bagi 17 panti sosial berupa alat kesenian;
- c) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial Pemerintah bagi 27 panti sosial berupa peralatan rumah tangga panti sosial;
- d) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial bagi 4 panti sosial dan 13 LBK berupa sarana pelatihan keterampilan;
- e) Rehab panti sosial sebanyak 10 panti sosial, 1 Rumah Perlindungan dan 1 LBK

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Sosial pada tahun 2012 antara lain:

1. Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar sebanyak 333 orang di tahun 2011 menjadi 443 orang di tahun 2012;
2. Menurunnya jumlah anak terlantar dari 3.394 orang di tahun 2011 menjadi 3.173 orang di tahun 2012 melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri sebanyak 950 keluarga di tahun 2011 menjadi 1.200 keluarga di tahun 2012;
4. Menurunnya jumlah lanjut usia terlantar dari 3.161 orang di tahun 2011 menjadi 3.157 orang di tahun 2012 melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Meningkatnya jumlah korban bencana yang dapat dilayani kebutuhan makannya selama di pengungsian sebanyak 135.455 orang di tahun 2011 menjadi 145.500 orang di tahun 2012;
6. Dipertahankannya *response time* dapur umum penanganan bencana di DKI Jakarta oleh Dinas Sosial dalam rata-rata waktu 3 jam;
7. Meningkatnya jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup mandiri setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti

sosial sebanyak 745 orang di tahun 2011 dan 845 orang di tahun 2012;

8. Meningkatnya jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sebanyak 1.683 orang di tahun 2011 dan 2082 orang di tahun 2012.
9. Meningkatnya jumlah Lembaga Kesos yang mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan lembaga kesos dalam memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat sebanyak 1.187 lembaga pada tahun 2011 menjadi 1.582 lembaga di tahun 2012;
10. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap WBS melalui rehabilitasi panti pada 27 panti sosial.
11. Berkurangnya populasi PMKS jalanan sebanyak 10.292 orang (2011) menjadi 9.066 orang (2012)

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terlaksananya kegiatan pemindahan dan penggantian panel *Medium Density Fiberboard* (MDF) dan *Automatic Main Failure* (AMF) dikarenakan lokasi penempatan panel keadaannya belum siap, untuk itu akan dilakukan rekondisi bangunan yang siap untuk penempatan panel dimaksud.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp398.675.093.060,00 dan direalisasikan sebesar Rp361.083.823.422,00,00 atau 90,57%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program peningkatan kesempatan kerja

- a) Peningkatan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran melalui :
- Pameran Ketenaga kerjaan Pada Pekan Raya Jakarta
 - Pameran Bursa Kerja Melalui *Job Fair*
 - Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Bidang Service HP dan Komputer
 - Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda Pelatihan HP dan Komputer
 - Pembentukan Wira Usaha Baru, Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri
- b) Penciptaan kesempatan kerja melalui :
- Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri 50 orang
 - Wira Usaha Baru di Kec Johar Baru Jakarta Pusat 50 orang
 - Wira Usaha Baru Kab. Kepulauan Seribu
 - Penerapan dan pendayaan Teknologi Tepat Guna 30 orang.
- c) Pengembangan sistem informasi Bursa Kerja *Online* (BKOL) sebagai sarana pelayanan untuk mempertemukan antara pencari kerja 12.082 orang dengan pemberi kerja 258 perusahaan, melalui sistem *online* (<http://www.bkol-dki.com>)
- d) Pameran Bursa Kerja/*Job Fair* 5 kali dengan mempertemukan pencari kerja 13.590 orang dengan pemberi kerja 4.671 perusahaan (dilakukan seleksi psikotes dan wawancara langsung oleh perusahaan pada saat bursa kerja berlangsung).
- e) Pameran Ketenagakerjaan pada Pekan Raya Jakarta yang isinya menginformasikan program-program, peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pelayanan bursa kerja *online* kepada 2.452 pengunjung, juga dilakukan pemberian Kartu Pendaftaran Pencari kerja (AK1)

sebanyak 1.020 orang, diikuti oleh 53 Perusahaan yang menyerap 328 pencari kerja.

- f) Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) melalui pembekalan orientasi prakeberangkatan sebanyak 46 orang.
- g) Penyerapan tenaga kerja melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat di bidang komputer, otomotif, dan service HP 150 orang
- h) Pembekalan dan penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 195 orang (Hongkong 4 orang, Singapura 42 orang, Malaysia 42 orang, Taiwan 6 orang, Qatar 105 orang) pada 11 perusahaan

2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- a) Pembinaan norma ketenagakerjaan kepada 100 perusahaan.
- b) Pemeriksaan obyek Keselamatan Kecelakaan Kerja (K3) Gedung Perkantoran di DKI Jakarta sebanyak 57 gedung.
- c) Pembinaan K3 pengguna bejana tekan bagi pekerja perusahaan sebanyak 100 orang
- d) Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013
- e) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 150 orang
- f) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 65 kasus
- g) Monitoring pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama perusahaan kepada 5.060 perusahaan.
- h) Pembinaan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja kepada 230 perusahaan

- i) Pembinaan prosedur pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada 50 orang.

3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- a) Pelatihan keterampilan kerja 20 kejuruan, antara lain : pelatihan las pipa, las plat, las bawah air, otomotif roda 2, otomotif roda 4, pelatihan teknik informatika kepada 4.468 orang
- b) Uji sertifikasi kompetensi lulusan Balai Latihan Kerja/ Pusat Pelatihan Kerja, di antaranya kejuruan las plat, otomotif, mesin logam, teknik pendingin, sebanyak 100 orang
- c) Pelatihan pra pemberangkatan bagi peserta (lulusan Teknik) program magang IMM (*association International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan*) ke Jepang sebanyak 250 orang
- d) Pemasaran dalam rangka penempatan lulusan Balai Latihan Kerja/Pusat Pelatihan Kerja sebanyak 4.468 orang pada Balai Latihan Kerja/ Pusat Pelatihan Kerja Daerah dan dapat ditempatkan sebanyak 3.120 orang
- e) Pemagangan *Sister City* Jakarta-Seoul sebanyak 15 orang (jurusan otomotif, *web program*, *web master*, *jewelry design*, *interior design*, *cooking*, *cosmetic*)

4) Program pengembangan wilayah transmigrasi

- a) Pendampingan Pemberangkatan Transmigran ke lokasi transmigrasi diikuti oleh 43 KK:
 - Desa Pagar Agung, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu (23 KK)
 - Desa Lembo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (5 KK)
 - UPT Dadahup C4 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (15 KK)
- b) Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian sebanyak 4 dokumen, dengan lokasi penempatan transmigrasi yaitu :

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- c) Pembinaan dan Pelatihan transmigran di lokasi transmigrasi yang diikuti oleh 99 KK di lokasi :
- Tabala Jaya Sp2, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (25 KK)
 - Desa Langkoroni, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (24 KK)
 - UPT Dadahup C3, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (25 KK)
 - Simpang Tiga SP2, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (25 KK)
- d) Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi.
- e) Promosi ketransmigrasian berupa sosialisasi klasikal, pembuatan *leaflet* dan brosur tentang transmigrasi di Suku Dinas Nakertrans 5 wilayah Kota Administrasi
- f) Penyediaan Sarana Ketransmigrasian berupa ; perkakas kerja, bibit tanaman / ternak, perlengkapan rumah tangga,
- g) Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi sebanyak 43 KK
- h) Penyediaan jaminan hidup berupa sembako
- i) Pelaksanaan forum Komunikasi Informasi dan edukasi yang diikuti oleh 60 peserta
- j) Penjajakan kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi di :
- Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
 - Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
 - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- k) Pembekalan kewirausahaan bagi calon transmigran yang diikuti oleh 62 KK
- l) Pematangan lahan lokasi di daerah transmigrasi seluas 250.000 m² :
 - Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
 - Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- m) Pembahasan dan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi oleh :
 - Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
 - Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
 - Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
- n) Penyusunan Petunjuk Operasional Penempatan Transmigrasi sebanyak 1 dokumen
- o) Pendaftaran dan Seleksi akhir calon transmigran yang diikuti oleh 200 KK
- p) Pembinaan dan Pembekalan Calon Transmigran di Transito yang diikuti oleh 62 KK

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Menurunnya tingkat penganggur terbuka (TPT) dari 10,80% pada tahun 2011 menjadi 9,87% pada tahun 2012
- 2) Tersalurkanannya 195 tenaga kerja ke luar negeri dengan tujuan : Hongkong sebanyak 4 orang, Singapura 42 orang, Malaysia 42 orang, Taiwan 6 orang, Qatar 105 orang yang terdiri atas 11 perusahaan
- 3) Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp1.529.150,00 pada tahun 2012 menjadi Rp2.200.000,00 pada tahun 2013

- 4) Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK/PPK) yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 4.468 orang pada tahun 2012 menjadi 5.100 orang pada tahun 2013

c. Permasalahan dan Solusi

1. Masih terdapatnya informasi kesempatan kerja yang tidak diketahui oleh pencari kerja. Untuk itu dilakukan peningkatan sosialisasi lowongan kerja dan informasi kesempatan kerja antara lain melalui acara *Job Fair* dan peluncuran Bursa Kerja online pada situs www.bkol-dkijakarta.com serta penerbitan leaflet, brosur, dan berita pasar kerja
2. Adanya lowongan kerja yang tidak terisi oleh pencari kerja karena kualitas pencari kerja tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk itu diupayakan peningkatan pelatihan di BLK/PPK/PPKD maupun melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp139.489.135.443,75 dan direalisasikan sebesar Rp112.861.922.433,00 atau 80,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Penyusunan pemeringkatan terhadap 415 Koperasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi
- b. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui Pekan Raya Koperasi dengan mengikutsertakan 100 koperasi.

- c. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebanyak 130 koperasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi
- d. Revitalisasi 18 koperasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.
- e. Peningkatan kinerja KJK PEMK sebanyak 205 koperasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

2) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Gelar pasar rakyat sebanyak 18 kali di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi.
- b. Peningkatan akses permodalan untuk 200 koperasi.
- c. Pemberdayaan usaha mikro di RW kumuh sebanyak 175 usaha mikro.

3) Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM

- a. Peningkatan wirausaha baru sebanyak 370 usaha kecil.
- b. Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok masyarakat sebanyak 400 orang.
- c. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 200 orang dan wirausaha sebanyak 200 orang.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- 1. Meningkatnya pemeringkatan Koperasi dari 285 pada tahun 2011 menjadi 415 koperasi pada tahun 2012
- 2. Adanya peningkatan wirausaha baru sebanyak 370 usaha kecil di tahun 2012.
- 3. Terselenggaranya peningkatan kinerja Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) sebanyak 205 koperasi di tahun 2012.

c. Permasalahan dan Solusi

Masih terdapat sebagian Koperasi dan UKM yang menghadapi kendala keterbatasan modal. Untuk itu dilakukan fasilitasi akses permodalan antara lain melalui pengembangan KJK PEMK ataupun pola kerjasama dengan bank syariah dan bank konvensional.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp50.471.493.103,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.040.399.859,00 atau 67,44%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program peningkatan investasi

Operasionalisasi pelayanan terpadu satu pintu

a. Program peningkatan promosi investasi

a) Forum bisnis investasi di 4 (empat) Negara, yaitu :

- *Business Forum* Investasi di Warsawa - Polandia, tanggal 14 Mei 2012,
- *Business Forum* Investasi di Turki, tanggal 27 Juni 2012,
- *Business Forum* Investasi di Singapura, tanggal 17 Juli 2012,
- *Business Forum* Investasi di Kyiv – Ukraina, tanggal 25 September 2012

b) Promosi investasi dalam negeri di 8 daerah Indonesia, yaitu :

- Pameran Indonesian *Product Expo* 2012, tanggal 28 Maret s/d 2 April 2012 di Nagoya – Batam,
- Pameran Nusantara *Expo* 2012, tanggal 11 s/d 15 April 2012 di Pontianak *Convention Center* – Pontianak,
- Pameran South Sumatera *Expo* 2012, tanggal 15 s/d 20 Mei 2012 di Jakabaring – Palembang,

- Pameran Otonomi *Expo & Forum* 2012, tanggal 24 s/d 27 Mei 2012 di Jakarta *Convention Center* – Jakarta,
 - Pameran Maluku *Expo* 2012, tanggal 8 s/d 13 Juni 2012 di Lapangan Galunggung – Maluku,
 - Pameran Banda Aceh *Expo* 2012, tanggal 4 s/d 8 Juli 2012 di Taman Sari – Banda Aceh,
 - Pameran The 4Th Bali *Trade Investment and Tourism Expo* (TITex) 2012, tanggal 12 s/d 15 Juli 2012 di Mall Bali Galeria, Kota Bali – Denpasar,
 - Pameran Gebyar Potensi Unggulan & Wisata Daerah, tanggal 11 s/d 14 Oktober 2012 di Mall Sumarecon – Banten
- c) Promosi investasi luar negeri di 4 negara, yaitu :
- *Annual Investment Meeting*, Tanggal 1 s/d 3 Mei 2012 di Dubai, UEA,
 - *Import Shop Berlin*, Tanggal 7 s/d 11 Nopember 2012 di Berlin – Jerman,
 - *The 10Th Vietnam Trade Fair* 2012, Tanggal 28 November s/d 1 Desember 2012 di Vietnam,
 - Investasi Halal International & Indonesian *Trade Fair* 2012, Tanggal 29 November s/d 2 Desember 2012 di Singapura.
- d) Partisipasi :
- BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta : antara lain PT. KBN, PT. Bank DKI, PT. MRT, PD. PAL Jaya serta Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada Pameran *Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition* (IIICE) 2012 pada tanggal 28 - 30 Agustus 2012 di Balai Sidang, Jakarta *Convention Center*.
 - BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain : PT. Bank DKI, PT. MRT, PT. Pembangunan Jaya, dan PT. Pulomas Jaya pada The 3rd *Muslim World Biz* 2012 pada tanggal 13 – 16 September 2012, di Jakarta *Convention Center*.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2012 selama 1 bulan dari tanggal 14 Juni sampai dengan 15 Juli 2012, di Hall B Arena Pekan Raya Jakarta yang diikuti oleh SKPD, UKPD, BUMD dan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dilengkapi sarana penunjang.
- e) Penyediaan informasi kepada masyarakat tentang peluang investasi melalui media bahan promosi dan media cetak
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal**
 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa mesin kepuasan pelanggan serta perlengkapan kantor UPT PTSP
- c. Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah**
 - a) Evaluasi RKAP BUMD
 - b) Monitoring, pembinaan, pengendalian dan pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap pengurus BUMD.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Penanaman Modal antara lain:

- 1) Realisasi PMDN di DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar Rp8,54 Triliun.
- 2) Realisasi PMA di DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar US\$4.107 Juta (Rp39,43 Triliun, kurs Rp9.600,00).
- 3) Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp275,5 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp345,78 milyar di tahun 2012
- 4) Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman modal paling lama 3 hari kerja.
- 5) Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan pengusaha di 4 negara, yaitu Polandia, Turki, Singapura, dan Ukraina.

c. Permasalahan dan Solusi

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang diperkirakan disebabkan antara lain melemahnya daya beli masyarakat Eropa akibat krisis hutang zona Euro dan belum pulihnya perekonomian Amerika. Untuk itu telah diupayakan peningkatan promosi investasi ke negara-negara yang tidak mengalami krisis dan meningkatkan kualitas pelayanan investasi.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp526.942.954.535,75 dan direalisasikan sebesar Rp453.239.659.908,00 atau 86,01%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan Kebudayaan

- a) Pelayanan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar budaya melalui Tim Sidang Pemugaran (TSP) sebanyak 51 kali sidang / rekomendasi sebanyak 51 kali sidang/rekomendasi.
- b) Pengawasan Bangunan Cagar budaya Kelas A di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 110 bangunan.

2) Program pengelolaan Keragaman Budaya

- a) Pelatihan Kesenian dilaksanakan di Balai Latihan Kesenian (5 Wilayah) sebanyak 40 pelatihan dengan jumlah peserta 1199 pelaku seni;
- b) Partisipasi pada Festival *Folklore* Internasional di Korea
- c) Pesta Seni Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada 8 jenis lomba seni

- d) Pagelaran seni di ruang publik di 16 Hotel dan 8 Mall, total materi kesenian yang ditampilkan sebanyak 690 pertunjukan
 - e) Festival seni dan kebudayaan betawi yang diikuti oleh 50 sanggar/budayawan/seniman betawi.
 - f) Gebyar Budaya Setu Babakan yang diikuti oleh 30 grup
 - g) Lomba Nasyid, Marawis dan Qasidah tingkat Provinsi DKI Jakarta
 - h) Pengiriman Duta Seni ke tingkat nasional sebanyak 38 penari dan 15 pemusik
- 3) Program pengelolaan kekayaan budaya**
- a) Penyempurnaan Gedung Teater Jakarta PKJ Tim
 - b) Pemeliharaan *Mechanical Electrical* (ME) Gedung Teater Jakarta PKJ TIM
- 4) Program Pengembangan Nilai Budaya**
- Pagelaran kesenian pada tingkat kecamatan dan kota yang diikuti oleh 30 grup.
- 5) Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan Budaya**
- Pemberdayaan lembaga-lembaga kesenian sejumlah 31 lembaga
- 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan**
- a) Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki
 - b) Konservasi Mapomdam Jaya
 - c) Pengadaan Meubelair Pusat Kebudayaan Betawi di eks-kodim Jakarta Timur
 - d) Pembuatan *storage* koleksi Museum Sejarah
 - e) Penataan kembali ruang tata pameran Museum Taman Prasasti
 - f) Konservasi Bunker dan air mancur di Taman Fatahillah Museum Sejarah Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Kebudayaan antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi terhadap masyarakat/pelaku seni budaya dalam partisipasi pentas seni di ruang publik, dari 152.000 orang pelaku seni (2011) menjadi 195.153 orang pelaku seni (2012), atau mengalami kenaikan 28,39%
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan sehingga pengunjung museum meningkat dari 2.468.507 orang (2011) menjadi 2.930.858 orang (2012) atau mengalami kenaikan 18,73%
- 3) Meningkatnya jumlah penonton pertunjukan seni budaya (di Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Pertunjukan Seni di Ruang Publik/ Hotel, Gedung Wayang Orang Bharata, Pusat Perkampungan Budaya Betawi, Balai Latihan Kesenian) dari 4.650.000 orang pada tahun 2011 menjadi 5.633.940 orang pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 21,16%.
- 4) Berfungsinya Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Sebagai Pusat Seni Budaya Betawi
- 5) Meningkatnya pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni budaya dari 200 sanggar (2011) menjadi 262 sanggar (2012), atau mengalami kenaikan 31,00%
- 6) Meningkatnya jumlah para pelaku seni budaya yang mengikuti pelatihan tingkat dasar dan madya dari 3.240 (2011) menjadi 3.300 orang (2012) atau mengalami kenaikan 1,85%

c. Permasalahan dan Solusi

Masih belum sesuai hasil pelatihan seni budaya dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan intensitas dan diversifikasi jenis pelatihan seni budaya dalam rangka meningkatkan kreativitas dan daya saing masyarakat dalam berkesenian.

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp759.191.243.824,55 dengan total penyerapan sebesar Rp485.193.050.387,00 atau 63,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- f) Pembinaan prestasi pada 18 cabang olahraga;
- g) Pemassalan 8 kegiatan olahraga;
- h) Pengiriman atlet pada 3 event olahraga tingkat Internasional dan 3 event olahraga tingkat nasional;
- i) Pelaksanaan 5 event olahraga tingkat Internasional di Jakarta;
- j) Pelayanan fasilitas lepas olahraga dengan kunjungan sebanyak 487.047 orang pada tahun 2011 dan sebanyak 487.200orang pada tahun 2012;
- k) Pelayanan 8 gelanggang olahraga untuk 1.437.272 orang pada tahun 2011 dan 1.540.136 Orang pada tahun 2012;
- l) Pelayanan 5 gelanggang remaja kota administrasi dan 32 gelanggang remaja kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dengan kunjungan sebanyak 2.215.815 pada tahun 2011 dan 2.559.516 orang pada tahun 2012.

2) Program pembinaan kepemudaan

- a) Pembinaan 170organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta;
- b) Pengiriman2orang putra putri utusan DKI Jakarta sebagai paskibraka tingkat nasional;
- c) Pemilihan30 Kelompok Usaha Pemuda Produktif sebagai perintis dan pengembang usaha pemuda kreatif di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan

Seribu.

3) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- a) Rehabilitasi 7 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI;
- b) Pembangunan/rehabilitasi total 4 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c) Penyelesaian *Detail Engineering Design* (DED) Gelanggang Olahraga Cendrawasih Jakarta Barat.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan olahraga dan pemuda, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah pengguna layanan gelanggang olahraga dari 1.437.272 orang (2011) menjadi 1.540.136 orang (2012), layanan gelanggang remaja kota administrasi & kecamatan dari 2.215.815 orang (2011) menjadi 2.559.516 orang (2012).
2. Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda:
 - a) Juara I Putra Kelompok 21 tahun World Golf Junior Tournamen
 - b) Juara I Putra Class A World Golf Junior Tournamen
 - c) Juara I Putri Team World Golf Junior Tournamen
 - d) Juara II Putra Team World Golf Junior Tournamen
 - e) Juara II Putri Class A World Golf Junior Tournamen
 - f) Best Golf Player World Golf Junior Tournamen
 - g) Juara I Ganda Putra kelompok 16 tahun Turnamen Tenis Junior Internasional Piala Thamrin
 - h) Juara I Ganda Putri kelompok 12 tahun Turnamen Tenis Junior Internasional Piala Thamrin
 - i) Juara III Tunggal Putra kelompok 14 tahun Turnamen Tenis Junior Internasional Piala Thamrin
 - j) Juara I Tim Putra Turnamen Polo Air Betawi Cup
 - k) Juara I Tim Putri Turnamen Polo Air Betawi Cup

- l) Juara I, II dan III kategori Pelajar Putri Lomba Lari 10K Jakarta Internasional
 - m) Juara III Enjoy Jakarta Anniversary Basket Ball Tournament
 - n) Juara II Bulutangkis Asia Junior Exchange Games
 - o) Juara IV Tokyo International Youth Football (U-14) Tournament
 - p) Peringkat VIII dari 25 negara The 7th Asia Pacific Deaf Games Korea Selatan
3. Meningkatnya kualitas 11 prasarana olahraga dan pemuda;
 4. Terpilihnya pemuda DKI Jakarta sebagai juara III bidang Kebaharian dan Kelautan serta juara Harapan I bidang Pendidikan pada pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional;

c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Belum terealisasinya pembebasan lahan pengganti Stadion Lebak Bulus dikarenakan belum terjadi kesepakatan harga dengan pemilik lahan. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan konsultan appraisal untuk menentukan harga pasar lahan di area tersebut.
- 2) Belum terlaksananya pembangunan Stadion Taman BMW karena permasalahan legalitas lahan yang belum selesai. Untuk itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian sertifikasi/legalitas lahan.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.702.792.658,80 serta telah direalisasikan sebesar Rp71.633.139.980,00 atau 91,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2012 telah dilakukan antara lain:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Aktualisasi Ketahanan Nasional dalam Perspektif Pertahanan Negara bagi 47 pengurus dan anggota Karang Taruna
- b) Fasilitasi Peningkatan Peran Tokoh Suku/ Etnis dalam rangka Menciptakan Situasi Kondusif di Wilayah DKI Jakarta menjelang Pemiluada bagi 9 ormas etnis
- c) Fasilitasi Peningkatan Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Kalangan Generasi Muda bagi 70 SLTA
- d) Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat, Pengurus Organisasi Agama, Pengurus Organisasi Suku/Etnis dengan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta bagi 10 ormas keagamaan dan 16 ormas etnis.

2) Program pencegahan dan penanggulangan konflik

- a) Sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kerawanan sosial bagi 40 RW dan 25 Karang Taruna
- b) Sarasehan Kerawanan Ideologi yang Berdampak Terhadap Stabilitas Politik di DKI Jakarta bagi 40 RW dan 20 Karang Taruna
- c) Antisipasi Potensi Konflik Menjelang dan Pasca Pemiluada 2012 bagi 40 RW dan 25 Karang Taruna
- d) Pelaksanaan pemantauan Ipoleksosbud
- e) Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- f) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

3) Program pendidikan politik masyarakat

- a) Sarasehan Manajemen Organisasi bagi 10 Ormas dan 20 LSM
- b) Sosialisasi dalam rangka peningkatan sadar politik dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi 10 Orsospol
- c) Forum Silaturahmi Ormas, LSM dengan Pimpinan Daerah yang diikuti 10 Ormas dan 20 LSM
- d) Forum Silaturahmi 10 Partai Politik dengan Pimpinan Daerah

- e) Sosialisasi HAM bagi Pelajar di 40 SLTA di Provinsi DKI Jakarta.
- f) Deklarasi Damai OKP, Ormas, Pelajar dan Mahasiswa untuk Berkomitmen dalam Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang Aman, Tertib dan Damai bagi 25 Organisasi Kepemudaan (OKP), 25 SLTA serta 10 Perguruan Tinggi
- g) Sarasehan Hak Politik Wanita dalam UU Partai Politik bagi 15 Organisasi sayap Partai Politik

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu :

- 1. Berpartisipasinya masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2012 sebesar 66,71%
- 2. Terpantaunya unjuk rasa di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 311 kali
- 3. Berlangsungnya Pemilukada secara demokratis, tertib dan aman

c. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya kemampuan SDM penyelenggara Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang intelijen. Untuk itu diupayakan peningkatan kemampuan Bidang Intelijen melalui kerja sama dengan instansi terkait serta usulan penambahan SDM yang mempunyai kemampuan intelijen

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.433.416.421.979,05 serta telah direalisasikan sebesar Rp7.144.110.013.385,00 atau 84,71%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain :

1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

- a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5 wilayah Kota Administrasi
- b) Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 5 wilayah Kota Administrasi
- c) Pengembangan wawasan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 5 wilayah Kota Administrasi
- d) Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota/Kabupaten Administrasi

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Pengadaan kapal untuk Pelayanan Terpadu Satu Kapal di Kab. Adm. Kepulauan Seribu

3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

- a) Pelaksanaan Operasional kecamatan
- b) Pelaksanaan 8 kewenangan dalam rangka penguatan Kecamatan sesuai dengan Pergub 146 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
- c) Fasilitasi Peningkatan Manajemen Layanan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bagi 88 orang Camat dan Wakil
- d) Fasilitasi Kapasitas Camat dan Lurah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta bagi 10 Camat

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan

- a) Pelaksanaan kegiatan operasional kelurahan

- b) Pelaksanaan 5 kewenangan dalam rangka penguatan kelurahan sesuai dengan Pergub 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
- c) Penyelenggaraan operasional kelembagaan masyarakat (RT, RW dan LMK)
- e) Fasilitasi Peningkatan Manajemen Layanan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan bagi 267 orang Lurah dan Wakil
- f) Fasilitasi Kapasitas Camat dan Lurah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta bagi 40 Lurah.

5) Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan

- a) Pemenuhan kelengkapan Penegasan Batas Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah Perbatasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 berupa Berita Acara Kelurahan Perbatasan Provinsi
- b) Silaturahmi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan 10.000 Pengurus RT-RW dan Lembaga Kemasyarakatan se Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
- c) Orientasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dewan Kota/ Dewan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta bagi 50 orang dengan menghadirkan 6 narasumber
- d) Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengurus RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan 6 RT dan 6 RW terbaik tingkat Kota/ Kabupaten

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a) Penyusunan Penyempurnaan/ Revisi Peraturan Kepegawaian yaitu sebanyak 12 (dua belas) Surat Keputusan (SK)/ Pergub
- b) Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS/CPNS dan PTT sebanyak 73 Surat Keputusan

- c) Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Program S1 dan S2 terhadap 160 orang
- d) Seleksi dan Pengiriman Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terhadap 340 orang.
- e) Proses kenaikan pangkat satu atap pada periode 1 April 2012 dan 1 Oktober 2012 sebanyak 9.958 berkas
- f) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.079 orang.
- g) Pengelolaan arsip dan *scanning* dokumen kepegawaian sebanyak 7.420 dokumen.
- h) Rekonsiliasi Data Pegawai dalam rangka proses kenaikan pangkat dan pensiun dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara *on line* sebanyak 9.078 data.
- i) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 5 (lima) jabatan fungsional yaitu penera, penguji kendaraan bermotor, perencana, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan penyuluh keluarga berencana dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang.
- j) Penyusunan draft SK Gubernur tentang Pedoman Pola Karir Pejabat Struktural PNS Provinsi DKI Jakarta.
- k) Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah/janji PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9.242 orang.

7) Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai

- a) Penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi CPNS, PNS dan pensiunan
- b) Proses penyelesaian pensiun terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.763 berkas
- c) Pemberian penghargaan kepada 46 pegawai berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- d) Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Masa Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 4.959 pegawai
- e) Pemberian penghargaan bagi 4.100 Pensiunan PNS, Janda/Duda PNS, Pejabat Struktural yang telah memasuki masa purna bhakti

8) Program Penetapan Dan Evaluasi Kinerja

Penetapan dan pelaksanaan dokumen kinerja 48 SKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta

9) Program Kaderisasi aparat Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Uji kompetensi pejabat/ pegawai potensial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 952 orang

10) Program Peningkatan Pengelolaan SDM SKPD

Penyelesaian 18 SK Gubernur kolektif tentang perpanjangan kembali perjanjian kerja PTT dan penandatanganan kembali Surat Perjanjian Kerjasama PTT Tahun Anggaran 2012 bagi 2.359 orang.

a) Program Pendidikan dan Pelatihan

- a) Penyelenggaraan diklat Prajabatan bagi 4.200 orang CPNS
- b) Penyelenggaraan diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV bagi 344 orang
- c) Penyelenggaraan diklat Peningkatan Kompetensi Camat bagi 44 orang
- d) Penyelenggaraan diklat Teknis Pemerintahan bagi Lurah yang diikuti 180 orang
- e) Penyelenggaraan program tugas belajar jenjang pendidikan S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 131 orang
- f) Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang daerah bagi 60 orang
- g) Penyelenggaraan diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat I dan Ujian Sertifikasi Barang dan Jasa sebanyak 180 orang

- h) Penyelenggaraan diklat pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah bagi 60 orang

b) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
- b) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
- c) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012
- d) Penyusunan Rapergub Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- e) Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)
- f) Evaluasi Unit Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD dalam rangka Citra Pelayanan Prima (CPP)
- g) Kajian Implementasi ISO dan Akreditasi terhadap Pelayanan Publik
- h) Standarisasi Peralatan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i) Standarisasi Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j) Penyusunan Masterplan Organisasi Perangkat Daerah 2012-2037
- k) Penyusunan Masterplan Organisasi Perangkat Daerah 2012-2037
- l) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rapergub tentang Perubahan Pergub Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- m) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan

Gubernur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja

- n) Penyusunan Rapergub tentang perubahan Pergub nomor 168 Tahun 2009 tentang OTK Sekretariat Daerah
- o) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor 171 Tahun 2009 tentang OTK Kabupaten Administrasi
- p) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor 222 Tahun 2009 tentang OTK Kota Administrasi
- q) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor 146 Tahun 2009 tentang OTK Kecamatan
- r) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor 147 Tahun 2009 tentang OTK Kelurahan
- s) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rapergub tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
- t) Penyusunan Analisis Jabatan pada 15 SKPD
- u) Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan
- v) Penyusunan Pedoman Analisa Jabatan
- w) Penyusunan Evaluasi dan Peringkat Jabatan
- x) Penyusunan Peringkat Jabatan

c) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

- a) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) terhadap Organisasi Wanita dan Karang Taruna serta penyuluhan hukum terpadu bagi aparat yang diikuti 230 peserta.
- b) Pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta bagi 250 anggota.

d) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum,

- a) Pengurusan 40 perkara di pengadilan
- b) Penyelesaian 75 masalah sengketa pertanahan di Provinsi DKI Jakarta

e) Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

- a) Penyusunan 441 LHP tepat waktu

- b) Tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi sebanyak 6.521 saran serta 3.706 rekomendasi BPK untuk Pemprov DKI Jakarta
- c) Penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat sebanyak 93 kasus
- d) Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI

f) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,

- a) Pembahasan 8 Rancangan Peraturan Daerah, LKPJ Tahun 2011 dan LKPJ AMJ Tahun 2007 - 2012. Raperda yang dibahas meliputi :
 - Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
 - Raperda tentang Retribusi Daerah
 - Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011
 - Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
 - Raperda tentang Perparkiran
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
 - Raperda tentang Prasarana, sarana dan utilitas umum
 - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta
- b) Fasilitasi panitia khusus sebanyak tiga Pansus yaitu:
 - Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai Penggunaan Asset Pemprov. Untuk pembangunan ITF Sunter
 - Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Reklame.

- Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap PT. Porta Nigra.
- c) Fasilitas reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 kali
- d) Fasilitas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017
- e) Penerimaan delegasi masyarakat sebanyak 19 kali

g) Program Keprotokolan Daerah

- a) Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan pimpinan daerah sebanyak 2.015 acara
- b) Penyelenggaraan jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 546 jamuan

h) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

- a) Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan *United Cities and Local Governments* (UCLG) Aspac, UCLG World, *The Asian Network of Major Cities* (ANMC 21) dan C40 Tahun 2012
- b) Penyelenggaraan Kongres UCLG Aspac di Jakarta Tahun 2012
- c) Partisipasi Jakarta pada event-event yang diselenggarakan oleh 5 kota sister city
- d) Fasilitas Kerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi yaitu Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Universitas Pertahanan Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Institut Pertanian Bogor.
- e) Fasilitas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 lembaga yaitu Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika Indonesia (DPP-ASPEKTI) DKI Jakarta, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita

Pengusaha Indonesia (DPP-IWAPI) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (DPD-ASPEKNAS) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (DPP-ASPANJI) DKI Jakarta, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi perusahaan Teknik Mekanikal dan Elektrikal (DPD-APTEK) Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD-HIPPI) Provinsi DKI Jakarta

- f) Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Antar Daerah bagi 100 orang
- g) Koordinasi dan Komunikasi Forum Kerjasama Pembangunan Ibukota Negara Antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Kementerian, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Bodetabekpunjur.

i) Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian

- a) Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Dinamis bagi Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 76 peserta
- b) Bimbingan Teknis Penilaian Aset Setda sebanyak 71 orang
- c) Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset di lingkungan Setda Provinsi DKI Jakarta sebanyak 101 peserta
- d) Pembekalan Pengetahuan Pengamanan bagi Anggota Satpamdal sebanyak 91 peserta
- e) Pembekalan Teknis Ketatausahaan Staf Tata Usaha Biro sebanyak 86 peserta
- f) Pembekalan Teknis bagi Staf CPNS Satminkal sebanyak 76 peserta
- g) Bimbingan Teknis Aplikasi Satminkal sebanyak 40 SKPD.
- h) Bimbingan Teknis Implementasi Prosedur Pengelolaan Surat Satminkal sebanyak 76 peserta

- i) Pelatihan Khusus Peningkatan Kemampuan Satpamdal terhadap Penjinakan Bahan Peledak dan Teror Bom sebanyak 155 peserta
- j) Pelatihan Pemadam Kebakaran Terhadap PNS Balaikota sebanyak 175 peserta
- k) Pelatihan Khusus Peningkatan Kemampuan Satpamdal Terhadap Penanganan Bencana Kebakaran sebanyak 155 peserta
- l) Penggantian *Wire Rope Lift High Zone* No. 7 dan 8 Gedung Balaikota sebanyak 2 unit
- m) Pengadaan *System Visual-Video* Lt. 22 dan 23 sebanyak 18 unit
- n) Pengadaan CCTV Kompleks Balaikota DKI Jakarta sebanyak 12 unit
- o) Pengadaan *Air Conditioner Variable Refrigerant Volume* (AC VRV) untuk Ruang Kerja Gubernur, Staf Gubernur, Ex. Ruang Kerja Sekda Provinsi DKI Jakarta sebanyak :
 - a. Ex. Sekda 4 unit
 - b. Ex. Ruang Kerja Gubernur 4 Unit
 - c. Ex. Ruang Staf Gubernur 4 unit
- p) Pengadaan AC *Split Inverter* Kapasitas 2 PK dan 1,5 PK Untuk Jakarta Islamic Center sebanyak 15 unit
- q) Operasional Lintas Sektor Obyek Vital Komplek Balaikota
 - a. Polisi Balaikota 10 orang
 - b. Polisi Rumah Dinas 4 orang
 - c. Pengamanan Unjuk Rasa sebanyak 54 kali dengan melibatkan TNI/POLRI.
- r) Penggantian Screen Proyektor Balai Agung Provinsi DKI Jakarta sebanyak :
 - a. 1 unit layar/screen
 - b. Program control 1 lot (terdiri dari beberapa sistem)
- s) Pengadaan Bak Sampah di Kompleks Balaikota DKI Jakarta sebanyak 36 unit

- t) Pengadaan *Wireless* sebanyak *Receiver* mikropon 6 unit dan *portable wireless* 6 unit.
- u) Penggantian Karpet Balai Agung sebanyak 1 unit dengan ukuran 8 m x 12 m
- v) Pengadaan Motor untuk Petugas Ekspedisi sebanyak 16 unit
- w) Pengadaan *Table Mic Conference* Ruang Rapat Tim Pertimbangan Urusan tanah (TPUT) Balaikota 27 unit terdiri dari:
 - a. *Mic* 27 buah
 - b. Kabel 6 rol
 - c. *Connector* 1 unit
- x) Pengadaan Lampu Ruang Kerja Pimpinan sebanyak 3032 unit
- y) Pekerjaan Pembuatan *Backdrop* untuk Acara Seremonial Pimpinan sebanyak 31 kegiatan
- z) Penyelenggaraan Kongres ke – 4 UCLG-ASPAC yang dihadiri oleh 500 peserta dari negara-negara anggota UCLG.

j) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

- a) Pelaksanaan 13 Kajian di bidang BUMD dan PMP, Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Perindustrian dan Energi
- b) Penyusunan 19 laporan di bidang BUMD dan PMP, Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Perindustrian dan Energi

k) Program peningkatan kinerja ketentraman dan ketertiban umum,

- a) Pelayanan perizinan Undang-Undang Gangguan (UUG) sebanyak 4.265 izin baru.

- b) Antisipasi dan pengendalian tawuran, demo anarkis dan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat lainnya di 6 titik lokasi bebas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 2 titik lokasi tawuran, 7 titik lokasi demo.
- c) Penyelenggaraan Diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar bagi 450 anggota Satpol PP
- d) Pembinaan Kelompok Siskamling yang aktif sebanyak 44 kelompok.
- e) Pemolisian Masyarakat tingkat RW bagi 95 RW

l) Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran,

- a) Sosialisasi Peraturan tentang Pencegahan Kebakaran bagi 100 orang
- b) Berfungsinya alarm kota/smart alarm kebakaran dengan baik sebanyak 2.066 buah
- c) Penyelenggaraan *Pilot Project* Pembangunan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) pada 2 lokasi Terpadu bagi 100 orang
- d) Pengadaan Sarana Prasarana :
 - Pembangunan 1 gedung Kantor Sektor Ciganjur
 - Pengadaan 5 (lima) unit *Ground Water Tank Fibre-reinforced plastic Volume* 10 m³
 - Pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobil Pompa 4000 L (*medium pressure*)
- e) Pemeriksaan sewaktu-waktu secara berkala sebanyak 220 gedung

m) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

- a) Sosialisasi tata cara Penyelamatan dan Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi 550 orang
- b) Pembinaan Teknis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jiwa bagi 480 orang

n) Program Diklat dan Evakuasi Bencana

- a) Penyelenggaraan Diklat Pemadam Kebakaran bagi 454 orang

- b) Penyelenggaraan Diklat Kepala Regu bagi 30 orang
- c) Penyelenggaraan Diklat Kepala Peleton bagi 50 orang
- d) Penyelenggaraan Diklat pemeriksaan/ penyelidikan kebakaran bagi 28 orang

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

- 1) Beroperasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 5 wilayah kota
- 2) Diselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 78,73%
- 3) Dipertahankannya *response time* pemadam kebakaran 15 menit
- 4) Ditetapkannya 8 Perda, yaitu :
 - Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
 - Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
 - Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011
 - Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
 - Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
 - Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
 - Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, sarana dan utilitas umum
 - Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta

- 5) Diterimanya rekomendasi atas LKPJ Tahun 2011 dan LKPJ AMJ 2007 – 2012 untuk perbaikan program pembangunan di tahun-tahun mendatang
- 6) Terselenggaranya penguatan kecamatan dan kelurahan sesuai Pergub 146 Tahun 2009 dan Pegub 147 Tahun 2009.
- 7) Diimplementasikannya reformasi birokrasi pada pelayanan SKPD
- 8) Terseleksinya pegawai yang lulus Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Program S1 dan S2 sebanyak 50 orang
- 9) Ditetapkannya 9.261 SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang terproses pada periode 1 April dan 1 Oktober 2012
- 10) Diterbitkannya 3.763 SK Pensiun
- 11) Terwujudnya koordinasi penanganan bencana daerah
- 12) Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada 9 Kota/ Kabupaten Bodetabekjur
- 13) Meningkatnya kapasitas 450 Satpol PP yang memenuhi ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 14) Terselenggaranya Kongres Ke-4 UCLG Aspac di Jakarta Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

Belum terbentuknya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan pedoman Pemerintah Pusat. Untuk itu, pada tahun 2013 direncanakan pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp44.394.759.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.202.904.408,00 atau 86,05%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

- a) Pelaksanaan pasar murah menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri untuk komoditi daging sapi sebanyak 18,89 ton dengan subsidi Rp10.000,00 per kilogram dan daging ayam sebanyak 3.418 ekor dengan subsidi Rp5.000,00 per ekor
- b) Penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2012
- c) Pemantauan harga pangan secara periodik sebanyak empat kali

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

- a) Pemberdayaan masyarakat rawan pangan sebanyak 240 Kepala Keluarga (KK) rawan pangan.
- b) Pelayanan terhadap 120 balita kurang gizi
- c) Pelatihan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil pertanian terhadap 100 orang
- d) Penyelenggaraan Agro dan *Food Expo* 2012 yang diikuti oleh 268 *stand*

3) Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan

- a) Penyediaan sarana *Small Processing Unit (SPU) Training Center* Klender
- b) Pemeliharaan Gedung dan Sarana SPU Klender
- c) Pembangunan Fisik Gedung Workshop Pasca Panen Pertanian Lantai 2
- d) Pengadaan Bahan Uji Coba Alat dan pemeliharaan Mesin Pertanian (Alsintan)
- e) Pengembangan Aplikasi Teknologi Emiter

4) Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan

- a) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Jakarta
- b) Rehab Gedung Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Jakarta
- c) Rehab Kantor Pelayanan Kehutanan Ujung Menteng
- d) Pembinaan Pola Makan 3B dan Aman di Konsumsi untuk Balita, SD/MI melalui Warung Sehat sebanyak 100 guru dan 100 anak sekolah
- e) Pembinaan petani pemakai air dengan terpeliharanya 4.122 meter saluran irigasi tersier
- f) Pelatihan teknis analisa Pola Konsumsi Pangan yang diikuti oleh 100 peserta
- g) Pelatihan Peramalan dan Pemetaan sebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk 20 petugas
- h) Pelatihan pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada 40 petani
- i) Pemberdayaan HATINYA PKK sebanyak 50 peserta
- j) Penyelenggaraan Lomba Intensifikasi Padi di 3 wilayah yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara
- k) Penerapan *Good and Agricultural Practice* pada Sentra Tanaman Buah dan Tanaman Sayuran yang diikuti oleh 140 peserta
- l) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan
- m) Pengendalian Mutu Produk Hasil Pertanian
- n) Pengembangan Diversifikasi Pangan di DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Ketahanan Pangan antara lain :

- 1) Tersedianya informasi harga kebutuhan pokok yang mudah diakses oleh masyarakat
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan selama Tahun 2012 (beras, sayur, buah, daging, telur, susu) bagi warga Jakarta

- Pasokan beras sebanyak 1.036.850 ton
 - Sayur-mayur sebanyak 621.212 ton
 - Buah-buahan sebanyak 527.495 ton
 - Susu sebanyak 247.274.284 kg
 - Pasokan daging sebanyak 127.459.176 ton
 - Pasokan telur sebanyak 88.135.059 kg
 - Pasokan minyak dan lemak (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) sebanyak 1.175.419 kg
- 3) Terwujudnya jaminan keamanan dan stabilitas harga pangan (beras, sayur, buah, daging, telur dan susu) bagi konsumsi pangan warga Jakarta
 - 4) Meningkatnya usaha pengolahan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta

c. Permasalahan dan Solusi

Banyaknya produk hasil pertanian dari luar negeri yang membanjiri pasar pangan Jakarta antara lain karena belum memadainya jumlah dan kualitas produk pangan domestik. Untuk itu diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian antara lain dengan cara melakukan kerjasama dengan daerah produsen melalui kerjasama Mitra Praja Utama (MPU).

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp153.865.030.958,50 dengan total penyerapan sebesar Rp144.859.356.404,00 atau 94,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan

dan regulasi Pemberdayaan Masyarakat

- a) Rapat Koordinasi TKPK di Tingkat Provinsi bagi 125 SKPD/UKPD dan pemangku kepentingan dan Rakortek TKPK di 5 kota dan 1 kabupaten.
- b) Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja (POKJA) TKPK di Tingkat Provinsi bagi 125 SKPD/UKPD dan pemangku kepentingan.
- c) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan program penanggulangan kemiskinan di 5 kota dan 1 kabupaten.

2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan,

- a) Pengembangan Posyantek Percontohan sebanyak 6 Posyantek se DKI Jakarta dari 38 Posyantek menjadi 44 Posyantek.
- b) Kerjasama Kajian Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebanyak 3 (tiga) Kegiatan Kajian yaitu :
 - 1) Pengelolaan Air Tanah menjadi bahan bakar pendingin Rumah/Ruangan ;
 - 2) Pengolahan Air menjadi Energi Api sebagai bahan Bakar Kompor ;
 - 3) Pengolahan Air menjadi Energi Api sebagai Bahan Bakar Las.
- c) Berpartisipasi dalam rangka Gelar/Pameran TTG di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- d) Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1.000 Kader.
- e) *Training Of Trainer* (TOT) TTG bagi Kader Posyantek bagi 400 Kader.
- f) Integrasi Perencanaan Partisipatif kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dengan PNPM Mandiri Perkotaan.
- g) Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK kepada 267 Kelurahan, dengan restrukturisasi Satgas Kelurahan setelah berakhirnya masa bhakti Dewan

Kelurahan berdasarkan SK Lurah masing-masing.

- h) Penyusunan model Pendampingan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK.
- i) Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Evaluasi dan Pelaporan PPMK Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial.
- k) Pemilihan 6 (enam) kelurahan terbaik dan sebagai juara pertamanya adalah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- l) Fasilitasi 267 kelurahan yang mendapatkan bantuan hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial PPMK.
- m) Fasilitasi 264 kelurahan yang mendapatkan bantuan hibah DDUB PNPM Mandiri Perkotaan.
- n) Bulan bakti gotong royong masyarakat di 267 kelurahan
- o) Optimalisasi Peran RW dalam Penataan Pemukiman Kumuh terhadap 50 RW kumuh.

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

- a) Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat kelurahan dalam mendukung Musrenbang kepada 267 Kelurahan.
- b) Pengintegrasian Perencanaan partisipatif PPMK Bina FisikLingkungan dan Bina Sosial dengan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 520 orang.
- c) Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat kelurahan (P3MK) sebanyak 75 orang
- d) Pemaduan Program adat dan sosial budaya masyarakat.
- e) Fasilitasi RT/RW dalam pelaksanaan Musrenbang sebanyak 435 orang

4) Program pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

- a) Monitoring dan evaluasi Lumbung Pangan Kelurahan di 5

(lima) wilayah kota dan 1 (satu) kabupaten.

- b) Penyusunan draft Revitalisasi Lumbung Pangan Kelurahan (LPK) dan penyusunan panduan penanggulangan kemiskinan bagi anggota TKPK.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) antara lain :

- 1) Bertambahnya jumlah Posyantek yang berfungsi dari 38 Posyantek pada Tahun 2011 menjadi 44 Posyantek Percontohan pada Tahun 2012.
- 2) Kerjasama Kajian Pengembangan TTG Tahun 2011 sebanyak 4 MoU yaitu Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Bengkel TTG Posyantek Makasar dan Posyantek Kec.Cempaka Putih, Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) MoU semuanya pada Universitas Nasional.
- 3) Dimanfaatkannya Balai Warga untuk kegiatan masyarakat oleh 261 orang warga.
- 4) Bertambahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat dari 1.006 kader pada Tahun 2010 menjadi 1.335 kader pada Tahun 2011 Tahun 2012 sebanyak 1.375 kader.
- 5) Lembaga Masyarakat yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 267 LMK.
- 6) Bertambahnya kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berperan aktif dari 300 Kader di tahun 2011 menjadi 700 Kader di tahun 2012.
- 7) Tersedianya SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2012 yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1003/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- 8) Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2012.
 - Juara Harapan I Gelar TTG Unggulan Provinsi Tingkat Nasional

- Juara Harapan I Lomba Posyantek Tk.Nasional

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik di Gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) karena biaya penawaran dari PLN terlalu tinggi dan anggaran yang dialokasikan dalam APBD 2012 tidak mencukupi. Untuk itu pada Tahun 2013 dialokasikan kembali sesuai dengan penawaran dari PLN.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.100.000.000,00 dengan total penyerapan sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

Program pengembangan Statistik Daerah

- a) Penyusunan Kota/Kab. Adm Dalam Angka (6 Wilayah)
- b) Penyusunan PDRB Kota/Kab. Adm Dalam Angka (6 Wilayah)
- c) Penyusunan Daerah Dalam Angka
- d) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat
- e) Penyusunan Indikator Ekonomi Semesteran
- f) Up Dating RW Kumuh

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2012 dialokasikan APBD untuk Belanja Langsung sebesar Rp35.597.972.406,00 dengan total penyerapan sebesar Rp26.419.242.755,00 atau 74,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah

- a) Bimbingan teknis kearsipan statis dan dinamis kepada 462 orang;
- b) Penyusutan, akuisisi dan penyelamatan arsip penting di 10 (sepuluh) SKPD;

2. Program Penyelamatan Arsip Daerah

- a) Penggalan arsip dan dokumen gubernur dalam rangka penyusunan memorial Gubernur;
- b) Fumigasi ruang penyimpanan arsip dengan volume 3624,60 m³;
- c) Liputan peristiwa daerah yang penting/fenomenal sebanyak 180 liputan/rekaman;
- d) Digitalisasi 4.600.000 halaman arsip.

3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan,

- a) Rehab Total Kantor Arsip Jayakarta menjadi Perpustakaan Umum modern Tingkat Provinsi;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan kearsipan berupa :
 - Gedung Depo Arsip di Provinsi dan Depo Transit Arsip tingkat Kota;
 - Jasa layanan Kearsipan: Penataan, Akuisisi dan Asistensi, serta Alihmedia/penggandaan arsip.
 - Penghancur dokumen berskala besar;
 - Mobil Kearsipan untuk penyelamatan arsip.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Kearsipan pada tahun 2012 antara lain:

- 1) Bertambahnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pemilahan arsip statis dan dinamis dari 324 orang (2011) menjadi 786orang (2012);

- 2) Meningkatnya upaya penyelamatan arsip daerah melalui Fumigasi ruang penyimpanan arsip 4.500m³ (2011) dan 4624.60m³ (2012);
- 3) Meningkatnya pendokumentasian peristiwa penting daerah dari 185 liputan/rekaman (2011) menjadi 365 liputan/rekaman (2012);
- 4) Meningkatnya kapasitas penyimpanan arsip daerah dengan bertambahnya sarana simpan arsip menjadi 95 Roll Opact, 33 Kardex, 29 Unit lemari arsip dan 237 rak arsip, tersedianya 3 (tiga) ruang simpan arsip tahan api,
- 5) Tersedianya *Data Center* untuk sarana metadata dan *interoperability system*.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pelaksanaan penyusutan/akuisisi dan penyelamatan arsip penting di SKPD dikarenakan kurangnya tenaga arsiparis untuk mengelola arsip. Oleh karena itu, telah dibuatkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Dokumen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengamanatkan agar di setiap SKPD melakukan penataan dan penyelamatan arsip.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp255.766.459.124,50 dan telah direalisasikan sebesar Rp190.041.770.183,00 atau 74,30%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain :

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah

- a) Penyelenggaraan dialog interaktif di 11 stasiun radio

- b) Publikasi kebijakan/statement Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan di 2 radio dengan 58 kali tayang dengan *live repost* 2 radio dengan 33 siar.
 - c) Publikasi Kebijakan dan Program Pemprov DKI Jakarta melalui media 2 TV swasta Nasional dan 1 TV lokal
 - d) Penyelenggaraan forum dialogis dengan media massa
 - e) Pertemuan/ diskusi dengan mitra kehumasan
 - f) Penyebarluasan informasi dan pesan tentang himbauan Pemprov. DKI Jakarta melalui PSA (Public Service Advertorial)
 - g) Pembuatan, Pendistribusian dan Sosialisasi Materi Booklet
 - h) Pemuatan advertorial aplikasi kebijakan, kegiatan dan program Pemprov. DKI Jakarta melalui media online
 - i) Penyiaran informasi pesan singkat terkini (running text) tentang program Pemprov DKI Jakarta
 - j) Pembuatan dan penayangan sosialisasi melalui media luar ruang (*billboard*) di 5 titik billboard
 - k) Pelaksanaan kegiatan tatap muka/ dialog publik dengan kelompok masyarakat dan majelis taklim
 - l) Penyediaan klipring berita tentang Pemprov. DKI Jakarta
- 2) Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa**
- a) Pelayanan informasi kegiatan Pemprov DKI Jakarta melalui *website* beritajakarta.com dalam bahasa Indonesia dan Inggris
 - b) Rekapitulasi monitoring jejak berita www.beritajakarta.com yang dikutip oleh media cetak/elektronik
 - c) Penyediaan informasi kepada masyarakat melalui situs resmi *website* “www.jakarta.go.id”
- 3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**
- Jumlah total pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui sistem e-procurement nasional senilai Rp **12.318.895.968.207,00** melampaui target dari pemerintah pusat

yang menginstruksikan dalam APBD tahun 2012 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

- a) Pelaksanaan sewa jaringan komunikasi Wide Area Network (WAN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b) Pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi *Fiber Optic* (FO) dan *Bandwidth Internet*
- c) Pelaksanaan sewa perangkat lunak *mainframe* dan dukungan pemeliharaan
- d) Berfungsinya sistem radio *trunking* hasil sinkronisasi antara sistem lama dengan sistem baru di lima wilayah
- e) penambahan jumlah unit alat komunikasi pendukung sistem radio *trunking* sebanyak 200 unit
- f) Pemeliharaan radio UHF
- g) Pelaksanaan sewa jaringan *Fiber Optic* (FO) untuk penghubung *Base Transceiver Station* (BTS) radio *trunking*
- h) Pelaksanaan Aktivitas Komisi Informasi Publik tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai standar layanan informasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah pengunjung www.beritajakarta.com sebesar 102,72% dari 2.391.997 pada Tahun 2011 menjadi 4.849.045 pada Tahun 2012 dan www.jakarta.go.id sebesar 36,55% dari 3.467.963 pada Tahun 2011 menjadi 4.735.432 pada Tahun 2012
2. Diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dalam mendukung penerapan

good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara lain berupa pelayanan samsat PKB, samsat *mobile*, *drive thru* pembayaran PKB, gerai pajak, *e-recruitment*, *KTP Mobile* dan *e-procurement*.
4. Jumlah SKPD yang melaksanakan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui internet (*e-announcement*) melalui portal LPSE sebanyak 735 SKPD.
5. Terkoneksinya jaringan *intranet/internet* Pemprov. DKI Jakarta pada 44 Kecamatan, 267 Kelurahan, 17 SKPD/UKPD dan 34 RSUD.
6. Terpasangnya Wi-Fi Pemprov. DKI Jakarta yang bebas diakses oleh masyarakat secara gratis pada 16 halte busway, 7 stasiun, 5 terminal dan 5 taman melalui kerjasama dengan swasta baik Corporate Social Responsibility maupun kompensasi dari jaringan Fiber Optik.
7. Berfungsinya lembaga Komite Informasi Publik Daerah (KIPD) dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi daerah sesuai Pergub 16 tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi dan Komunikasi. Untuk itu diupayakan peningkatan peran Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi daerah.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp152.270.873.565,30 dengan total penyerapan sebesar Rp132.600.660.545,00 atau 87,08%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program pengembangan perpustakaan Jakarta

- a) Pembangunan Perpustakaan Tingkat Provinsi di Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) Jl. Cikini Raya No.73, Jakarta Pusat.
- b) Pembangunan 2 (dua) Perpustakaan Tingkat Kota di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
- c) Pembangunan 1 (satu) Perpustakaan di Tingkat Kecamatan sebagai Perpustakaan Kecamatan Percontohan di wilayah kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- d) Penerapan 3 unit teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) untuk pelayanan akses cepat dan mudah dengan pelayanan pengembalian buku 24 Jam (*bookdrop*), di Jakarta Utara dan Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan Jakarta Selatan dan akan dilanjutkan di wilayah kota lainnya.
- e) Penambahan 23 Unit mobil Perpustakaan Keliling, 7 Unit Mobil Perpustakaan Internet dan 4 unit mobil perpustakaan layanan paket untuk menjangkau pelayanan perpustakaan bagi masyarakat yang jauh dari Perpustakaan *Stasioner* di wilayah provinsi dan kota.

2) Program pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan

- a) Penyediaan alat promosi dan publikasi sebanyak 13 jenis;

- b) Pemilihan Abang dan Nene Buku dan Hari Anak Jakarta Membaca yang diikuti oleh lebih dari 5.500 anak Jakarta, para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- a) Penyediaan bahan perpustakaan (siapa layanan) sebanyak 26.622 judul/33.736 eksemplar, koleksi bahan perpustakaan elektronik dalam bentuk Buku Naskah 4.402 Eksemplar, *e-book* sebanyak 507 judul, dan langganan *e-journal* (12 subyek) selama 1 tahun, 8.034 judul / 5.655 eksemplar dan 200 Spesies koleksi herbarium dan 6 set insektarium;
- b) Pemberian buku kepada 16 Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 12 PAUD, 4 Perpustakaan Kelurahan, 13 RW, 2 Tempat Ibadah, 1 Sekolah dan 3 Rumah multifungsi;
- c) Penyediaan 34 unit mobil layanan keliling untuk peningkatan jangkauan layanan perpustakaan umum;
- d) Pembangunan sistem pengelolaan dan pengamanan koleksi perpustakaan berbasis *RFID System*;
- e) Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan yang telah memenuhi syarat pertukaran data koleksi secara Internasional berbasis Indonesia *Machine Readable Cataloging* (IndoMARC).

4) Program pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) lain urusan perpustakaan

- a) Penambahan jam layanan perpustakaan;
- b) Layanan perpustakaan keliling di 423 lokasi di Provinsi DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan perpustakaan, antara lain:

1. Terealisasinya peningkatan dan pelayanan perpustakaan ditingkat Provinsi dan Kota serta di tingkat Kecamatan dalam

rangka memberikan pelayanan dan jangkauan seluas-luasnya kepada masyarakat dan terlayannya masyarakat yang jauh dari Kantor Perpustakaan melalui pelayanan unit mobil perpustakaan keliling sebanyak 423 titik layanan.

2. Tersedianya *e-LibraryOnline Public Access Catalogue* (OPAC) serta *e-Book* dan *e-Journal*.
3. Bertambahnya jumlah gedung perpustakaan yang berstandar nasional dari 2 gedung perpustakaan (2011) menjadi 7 gedung perpustakaan (2012);
4. Bertambahnya jumlah orang yang terbina dalam peningkatan wawasan perpustakaan dalam BinteK/Worshop dan seminar sebanyak 838 orang;
5. Tersedianya Lulusan Calon Pustakawan Tingkat ahli sebanyak 24 orang;
6. Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 673.733 orang pada tahun 2011, menjadi 1.088.013 orang pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 60% dan pengunjung *website* 1.065.764 kunjungan.
7. Bertambahnya jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dari 150 TBM tahun 2011, menjadi 155 TBM pada tahun 2012;
8. Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling dari 28 mobil (2011) menjadi 34 mobil (2012);
9. Terlaksananya perpanjangan jam layanan perpustakaan kepada masyarakat selama 7 Hari dalam seminggu selama 52 minggu (1 Tahun) dengan jumlah pengunjung 57.810 orang;
10. Diterapkannya sistem pengelolaan dan pengamanan koleksi perpustakaan berbasis RFID di 3 perpustakaan;
11. Beroperasinya Sistem Informasi Perpustakaan berbasis IndoMARC pada 3 perpustakaan;
12. Meningkatnya minat baca masyarakat, Pengelolaan perpustakaan yang berstandar dan Peningkatan wawasan dan skill Pustakawan.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pelaksanaan Perpustakaan di Kelurahan karena keterbatasan ruangan dan tenaga pustakawan. Untuk itu dilakukan peningkatan pelayanan melalui mobil perpustakaan keliling, penambahan Taman Bacaan Masyarakat serta pelatihan pengelolaan perpustakaan kepada pegawai Kelurahan dan masyarakat.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan

Urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp424.790.446.695,00 dan direalisasikan sebesar Rp373.574.877.630,00 atau 87,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Umum

a) Pembangunan Pencahayaan pada :

- Akses menuju Terminal Pulo Gebang sebanyak 167 Lampu
- Kawasan Terminal Pulo Gebang sebanyak 200 Lampu
- Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok) sebanyak 999

b) Normalisasi jaringan untuk meterisasi :

- Di Wilayah Jakarta Pusat sebanyak 17 Kwh Meter
- Di Wilayah Jakarta Utara sebanyak 10 Kwh Meter
- Di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 15 Kwh Meter
- Di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 20 Kwh Meter
- Di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 17 Kwh Meter

c) Pembangunan :

- Lampu *Tunnel* (Jl.Layang Non Tol Antasari -Blok M Jakarta Selatan) Seksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Area Pasar Cipete= 1844 Lampu

- PJU (Jl.Layang Non Tol Kp. Melayu-Tanah Abang Jakarta Selatan) = 920 Lampu
 - Lampu PJU pada JPO Jl.Raya Panjang, Jl.Daan Mogot Jakarta Barat, Jl. Raya Bekasi Jakarta Timur, Jl.Patimura Jakarta Selatan, Jl.Taman Mini I Jakarta Timur = 74 Lampu
 - Lampu PJU pada Prasarana Penunjang Feeder Busway Rute 1 - 3 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot, Tanah Abang-Balai Kota dan SCBD-Senayan) sebanyak 20 Lampu
 - Lampu PJU pada BKT Wilayah Kota Jakarta Utara, di Taman Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, TPU Jeruk Purut, TPU Kamal (Jl.Benda), TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru, TPU Kawi-kawi Jl.Sentiong, TPU Kemiri, TPU Kober, TPU Menteng Pulo, TPU Pejaten Barat, TPU Petamburan, TPU Pinang Ranti (Jl.Pondok Indah), TPU Pondok Kelapa, TPU Pondok Kopi, Pondok Labu, TPU Pulau Harapan, TPU Pulau Karya, TPU Pulau Lancang, TPU Pulau Pari, TPU Pulau Sabira, TPU Pulau Tidung, TPU Pulau Untung Jawa, TPU Semper, TPU Sungai Bambu, TPU Tanah Kusir , TPU Tegal Alur, TPU Tipar Cakung, TPU Ulujami (Swadana),
 - Lampu PJU pada Jembatan BKT Wilayah Kota Jakarta Timur sebanyak 16 Lampu
- d) Perapihan Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Selatan (luar) sebanyak 20 Lampu
- e) Pemasangan :
- Lampu PJU lokasi Kampung Apung Jakarta Barat sebanyak 20 Lampu
 - Lampu Sarana Umum (Lampu Sorot) pada Lokasi Patung Selamat Datang sebanyak 10 Lampu
 - Perapihan Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Selatan (luar) sebanyak 20 Lampu

- Lampu PJU lokasi Kampung Apung Jakarta Barat sebanyak 20 Lampu
- Lampu Sarana Umum (Lampu Sorot) pada Lokasi Patung Selamat Datang sebanyak 10 Lampu

2) Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota

a) Pengadaan :

- Komponen untuk pemeliharaan penerangan jalan arteri sebanyak 17.542 buah
- Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan Kolektor sebanyak 27.027 buah
- Komponen Penerangan Sarana Umum sebanyak 8.782 buah
- *Time Switch* dan *Contact* untuk pemeliharaan pada 5 (lima) Kota sebanyak 1.303 buah
- Komponen lampu hias *Flexi Light* (Non neon) untuk pemeliharaan pada 5 (lima) wilayah Kota sebanyak 2.900 buah

b) Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum sebanyak 12 bulan

c) Pemasangan lampu hias dalam rangka mendukung event nasional/keagamaan sebanyak 18 unit

d) Penambahan Daya Listrik sebanyak 13%

e) Peningkatan Kualitas Sarana Pencahayaan Kota Jalan Medan Merdeka Selatan sebanyak 75 buah

f) Relokasi dan penataan :

- Sarana pencahayaan kota pada lokasi jalan Merdeka Selatan sebanyak 10 buah
- Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan Jalan Pedestrian Jl.Gajah Mada (Gardu D.11 T) sisi Timur sebanyak Kegiatannya overlap dengan kegiatan yang sejenis

- Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan Jalan Pedestrian Jl.Gajah Mada (Gardu D.11 T) sisi Barat sebanyak 16 buah
 - Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan Jalan Pedestrian Jl.Cikini Raya (Gardu T.36) sebanyak 12 buah
 - Sarana PJU akibat Normalisasi Instansi lain pada 5 (Lima) Wilayah Kota sebanyak 60 buah
- g) Perbaikan Jaringan/Instalasi Sarana PJU sebanyak 32 kegiatan
- h) Perapihan :
- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Barat (Dalam) sebanyak 32 kegiatan
 - Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Barat (Luar) sebanyak 32 kegiatan
- i) Perbaikan :
- Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Utara 1 kegiatan
 - Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Selatan 1 kegiatan
 - Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Barat 1 kegiatan
 - Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Timur 1 kegiatan
- j) Perapihan :
- Sarana dan Prasarana PJU di Depan Balaikota 54 buah
 - Sarana dan Prasarana PJU (Pedestrian) di Jalan Sabang Utara 9 buah
 - Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Selatan (Dalam) 21 buah
 - Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Timur (Dalam) 17 buah
 - Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Utara (Dalam) 33 buah
 - Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi Utara (Luar) 32 buah

3) Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber daya Mineral

- a) Pengawasan Pembangunan dan renovasi Instalasi serta Kelayakan Operasional Usaha Hilir Migas sebanyak 80 Usaha Hilir Migas
- b) Pemeriksaan dan Evaluasi Kelayakan Instalasi Tenaga Listrik sebanyak 1 kegiatan
- c) Operasional untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Bidang Energi (Listrik dan Migas) sebanyak 4 kali
- d) Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala Pemegang Izin Bidang Energi (Listrik dan Migas) sebanyak 120 Pelayanan Perizinan
- e) Koordinasi Bidang PELM dengan Mitra Praja Utama (MPU) sebanyak 3 Kegiatan
- f) Pembahasan tim ahli di Bidang Energi (Listrik dan Migas) dengan instansi terkait sebanyak 60 kali pembahasan
- g) Partisipasi Pameran dengan Mitra Terkait Bidang Energi, Listrik, Migas sebanyak 1 Kegiatan
- h) Pengembangan Energi Alternatif di Pulau Sebir sebanyak 1 Kegiatan
- i) Penyusunan Kajian :
 - Kebutuhan dan Penyebaran SPBG di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 paket
 - Kajian Pengembangan SPBG di Kawasan Monas sebanyak 1 paket
 - Kajian Penyusunan awal *Road Map* ketahanan Energi sebanyak 1 paket
 - Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS di Banjir Kanal Timur sebanyak 1 paket
 - Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS di Kawasan Monas sebanyak 1 paket

- Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS pada *Fly Over* sebanyak 1 paket
 - Kajian Pencahayaan Kota pada di Wilayah Jalan Merdeka Selatan sebanyak 1 paket
 - Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Jalan Rasuna Said sebanyak 1 paket
 - Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Jalan Thamrin sebanyak 1 paket
 - Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Lapangan Banteng sebanyak 1 paket
 - Kajian Pencahayaan pada Ornamen Kota sebanyak 1 paket
- j) Operasional Peninjauan Lapangan Hasil Pembangunan Kabel Bawah Laut Tahap II dan Pencahayaan dengan Energi Alternatif di Kep. Seribu sebanyak 1 paket
- 4) Program peningkatan energi**
- a) Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan Kabel Laut Tahap II sebanyak 4 Laporan
 - b) Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sebanyak 30 kali rapat koordinasi
 - c) Implementasi Peralatan Konservasi dan Diversifikasi Energi di Gedung Dinas Perindustrian dan Energi
- 5) Program pengendalian air bawah tanah**
- a) Sosialisasi Konservasi Air Bawah Tanah sebanyak 1 Kegiatan
 - b) Pemutakhiran Peta Konservasi dan Potensi Air Tanah DKI Jakarta sebanyak 1 Kegiatan
 - c) Pembangunan Sumur Resapan sebanyak 150 Titik
- 6) Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia**
- a) Pembangunan Titik Monitoring Penurunan Tanah dengan Ekstensometer System di Jakarta Pusat (Lanjutan) sebanyak 1 Titik

- b) Monitoring dan Evaluasi Ekstensometer System Stasiun Pemantauan Amblesan Tanah di Daerah Tongkol, Perintis Kemerdekaan dan Jati baru sebanyak 1 Laporan
- c) Pengolahan Data Daya Dukung Tanah di Jakarta Barat
- d) Evaluasi dan operasional Sumur Injeksi sebanyak Sumur Injeksi
- e) Telaah Teknis dan Monitoring Kondisi Geologi Jakarta sebanyak 1 kegiatan
- f) Penyusunan Profil Batu Mulia Indonesia sebanyak 1 kegiatan
- g) Evaluasi penurunan tanah dengan 3 sumur dalam sebanyak 1 Paket

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Energi dan Sumber Daya antara lain

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem penerangan jalan lingkungan sebanyak 1.043 titik lampu di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
- 2) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat Kepulauan Seribu khususnya di malam hari, dengan adanya fasilitas listrik dari terbangunnya kabel listrik bawah laut
- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem penerangan jalan pada jalan MHT/lingkungan, sehingga dapat menambah keamanan dan kenyamanan masyarakat beraktivitas di malam hari

c. Permasalahan dan Solusi

Belum terintegrasinya pembangunan penerangan jalan dengan utilitas kota lainnya yang tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat. Untuk itu dilakukan upaya sinkronisasi antar penyelenggara pembangunan utilitas kota untuk menjamin kenyamanan masyarakat.

Belum diimplementasikannya Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan Sistem *Hybrid* pada Bangunan Gedung Pemda akibat tidak terlaksananya lelang karena tidak ada calon penyedia yang

memenuhi persyaratan. Untuk itu telah dianggarkan kembali pada APBD Tahun 2013 untuk pengadaan dimaksud.

28. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

Urusan Pariwisata pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp187.154.079.856,00 dan direalisasikan sebesar Rp167.554.022.200,00 atau 89,53%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan pariwisata

- a) Pengawasan Reguler Industri Pariwisata dan Kebudayaan terhadap 6.800 industri.
- b) Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada bulan suci Ramadhan 1433 H/ 1433 M terhadap 464 Industri.
- c) Penyusunan Rencana Strategi Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan 2012 - 2017.

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

- a) Penyelenggaraan :
 - Jakarta *International Dance Festival* yang diikuti oleh 10 Negara dengan 6.000 pengunjung
 - Jakarta *Fashion Week* yang diikuti oleh 18 Desainer Dalam dan Luar Negeri
 - Pemilihan Abang dan Nene Jakarta Tahun 2012 yang diikuti oleh 36 finalis/18 pasang, dengan jumlah 10.000 pengunjung dan pemirsa Televisi.
 - Jakarnaval yang diikuti oleh 60 grup dan jumlah pengunjung 10.000
 - Fasilitas penyelenggaraan *Jak Jazz* dan *Jakarta Music Festival*.

- Pemilihan Cici dan Koko Jakarta yang diikuti oleh 16 pasang terpilihnya duta wisata dari kalangan Tionghoa
- Penyelenggaraan Festival Wisata Pesisir, Festival Sentra Primer Timur dan Festival Jalan Jaksa.

3) Program pengembangan pemasaran pariwisata

- a) Partisipasi pada :
 - Tournament *Golf Enjoy* Jakarta Indonesia Open 2012 yang diikuti oleh 150 golfer profesional dari 14 negara diseluruh dunia.
 - Keikutsertaan pada promosi pariwisata pada *International Trade Berlin* (ITB) Berlin-Jerman yang diikuti 11.613 peserta dari 188 Negara di kunjungi 110.791 orang.
 - *Event Asia Golf Tourism Convention* di Malaysia yang diselenggarakan oleh *International Association of Golf Tour Operators* (IAGTO).
 - Event budaya Internasional di Turki, Korea dan Bali.
- b) Promosi budaya dalam rangka perayaan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman.
- c) Promosi pariwisata dan budaya Jakarta melalui *Roadshow* di 2 kota di Amerika Serikat.
- d) *Roadshow* pariwisata dan budaya di 4 kota di Australia.
- e) Penyelenggaraan Jakarta *Tourism Expo* (JTE) 2012
- f) *Roadshow* pariwisata dan budaya di 3 kota di China.
- g) Penyediaan bahan promosi Pariwisata dan Budaya.
- h) Pembuatan *Calender of Event*.
- i) Pemasangan Iklan Media Cetak Elektronik Luar Negeri sebanyak 7 TV Luar Negeri.
- j) Penayangan Iklan Media Cetak di Luar Negeri di 11 Majalah, 5 Koran jangkauan distribusi Asia Pasific, Eropa & Timur Tengah.

4) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pemberian Penghargaan Adhikarya Wisata bagi pelaku Kepariwisataan

5) Program Fasilitas Wisata *Meeting, Incentive, Convention Exhibition (MICE)*

Partisipasi promosi pariwisata pada event *International World Wide Exhibition for Incentive Travel, Meeting and Events (IMEX)* Frankfurt Jerman yang diikuti 3.500 peserta dari 150 negara.

6) Program Peningkatan Iklim Usaha Kepariwisata

Pelatihan Tenaga Kerja Profesi Kepariwisata dengan jumlah 11 pelatihan dan 660 peserta.

7) Program Pembinaan Keanggotaan pada Lembaga/Forum Kepariwisata Nasional dan Internasional

a) Partisipasi pada :

- *Asian Network of Major Cities (ANMC 21)* di Singapura
- *Pacific Asia Travel Association (PATA)* di Manila, Filipina
- *Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA)* di Hanoi, Vietnam
- *Tourism Promotion Organization (TPO)* di Penang, Malaysia.
- *International Congress and Convention Association (ICCA)* di San Juan, Puerto Rico.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pariwisata antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari 2.003.944 orang pada tahun 2011 menjadi 2.125.513 orang di tahun 2012, serta kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) dari 26.760.000 orang pada tahun 2011 menjadi 28.880.000 orang di tahun 2012.
- b. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisman dari 5 hari pada tahun 2011 menjadi 5,1 hari di tahun 2012.
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, dari Rp 2.179.615.634.823,00 pada tahun 2011 (terdiri dari pajak hotel Rp856.438.362.131, pajak restoran Rp1.015.104.829.065, pajak hiburan Rp295.948.646.002, retribusi Rp12.123.797.625);

menjadi Rp2.653.953.339.355,00 pada tahun 2012 atau mengalami kenaikan 17,91% (terdiri dari pajak hotel Rp1.013.110.947.174, pajak restoran Rp1.259.814.887.896, pajak hiburan Rp368.728.298.435 dan retribusi Rp12.299.205.850).

- d. Meningkatnya penerimaan devisa wisman dari US\$ 1.402.760.800 tahun 2011 menjadi US\$1.734.418.608 Tahun 2012 atau mengalami kenaikan 23,64%.
- e. Meningkatnya penerimaan pendapatan dari Wisnus Rp 16,97 triliun Tahun 2011 menjadi Rp36,82 triliun Tahun 2012 atau mengalami kenaikan 116,97.%.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya penyediaan informasi destinasi pariwisata dan kesiapan SDM kepariwisataan. Untuk itu dilakukan peningkatan promosi melalui berbagai media termasuk dengan menggunakan teknologi informasi kepariwisataan, serta peningkatan kualitas pelatihan SDM kepariwisataan.

29. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp389.958.806.176,50 dan direalisasikan sebesar Rp346.669.669.067,00 atau 88,90%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

- 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**
 - a) Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 350 orang, yang dicanangkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

- b) Pemantauan dan pengawasan produk hasil perikanan secara periodik dan terintegrasi
- 2) **Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan**
 - a) Pengawasan produk hasil perikanan dan produk hewan di pasar swalayan, pasar tradisional, sentra pemasaran perikanan, tempat pelelangan ikan/pusat pelelangan ikan dan jalur masuk produk hasil perikanan dan produk hewan.
 - b) Pembinaan SDM Nelayan dalam rangka sertifikasi ahli nautika kapal perikanan, ahli teknik kapal perikanan dan *basic safety training*
 - c) Pembinaan kelompok budidaya ikan konsumsi dan ikan hias di Provinsi DKI Jakarta
- 3) **Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan, kelautan dan peternakan**
 - a) Pembangunan Dermaga Barat Muara Angke seluas 812 m²
 - b) Pembangunan Dermaga Timur Muara Angke seluas 1.435 m²
 - c) Pembangunan *Dock* tradisional Muara Angke
 - d) Pembangunan Rambu Suar 2 unit
 - e) Pemeliharaan alur bagi tambat labuh kapal di TPI Muara Angke seluas 300 m²
- 4) **Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap**
 - a) Pembangunan 8 unit keramba jaring apung sebanyak 8 unit
 - b) Penyediaan benih kerapu sebanyak 15.400 ekor
 - c) Pelayanan perikanan berupa :
 - 268 SIUP
 - 746 Surat Ijin Penangkapan Ikan
 - 507 Tanda Daftar Usaha Perikanan
 - 14.125 Sertifikat Mutu Eksport
 - 143 Rekomendasi Import Hasil Perikanan
 - 39 Rekomendasi Surat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 - 20 Rekomendasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

- Rekomendasi cara pembenihan ikan yang baik
 - 1 Rekomendasi pendaftaran obat dan pakan ikan
 - 1.954.750 Pemberian DO benih ikan
 - 665 Perbaikan kapal perikanan (*docking*)
 - 117.971,52 ton Pelelangan hasil perikanan,
 - 2.854 kapal Tambat labuh kapal perikanan
- d) Pelayanan peternakan berupa :
- Ijin distributor daging 8 perusahaan
 - Ijin took daging/meat shop 66 perusahaan
 - Ijin usaha pengangkutan/kendaraan daging 308 kendaraan
 - Ijin pemasukan produk hewan dari luar provinsi DKI Jakarta 14 perusahaan
 - Ijin pengeluaran produk hewan ke luar provinsi DKI Jakarta 11 perusahaan
 - Ijin pengolahan produk hewan 4 perusahaan
 - 35 rekomendasi instalasi karantina produk hewan sementara
 - 217 rekomendasi pemasukan daging dan olahan dari luar negeri
 - 15 rekomendasi pemasukan produk hewan dari luar negeri (produk non daging),
 - 207 rekomendasi pemasukan susu dan olahan dari luar negeri, 4.060 surat keterangan kesehatan daging,
 - Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 79 perusahaan,
 - Rekomendasi ijin pembuatan pakan ternak 2 perusahaan
 - Rekomendasi ijin pembuatan bahan baku pakan ternak untuk 1 perusahaan,
 - Rekomendasi ijin pemasukan pakan hewan kesayangan untuk 20 perusahaan,
 - 7.670 surat sertifikat kesehatan unggas
 - Sweeping 31.942 ekor unggas pangan dipermukiman

- 37 surat Ijin praktek Dokter Hewan, Rekomendasi importer obat hewan untuk 9 perusahaan
- Ijin distributor obat hewan untuk 7 perusahaan, 696 surat Ijin pemasukan dan pengeluaran hewan
- 7.292 sampel pelayanan pengujian mutu produk peternakan kesmavet pasif,
- 6.911 sampel pelayanan pengujian kesehatan hewan,
- 1.544 dosis pelayanan pengujian kesehatan hewan,
- 1.544 dosis pelayanan insiminsi buatan,
- Pemeriksaan dan pengobatan puskesmas Ragunan untuk 1.319 ekor,
- Pemeriksaan dan pengobatan puskesmas Pondok Rangon 201 ekor,
- Pemeriksaan Postmortem 1.132 ekor hewan kurban
- Pemeriksaan Antemortem 9.375 ekor hewan kurban

5) Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan dan kelautan

Diversifikasi olahan produk hasil perikanan yang diikuti oleh 30 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan

6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- c) Pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan
- d) Pengendalian penyakit Avian Influenza (AI)
- e) Pengendalian Penyakit Hewan Menular
- f) Pelayanan kesehatan hewan di Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Babi Kapuk

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perikanan, kelautan dan peternakan antara lain :

1. Meningkatnya ekspor ikan sebesar 6,67% dari 56.719.563 kg dan nilai devisa Rp 442.217.080,00 Tahun 2011 menjadi 60.518.756 kg dengan nilai devisa Rp 462.362.414,00 pada Tahun 2012

2. Meningkatnya jumlah nelayan tetap sebesar 5% dari 13.188 Tahun 2011 menjadi 13.847 pada Tahun 2012.
3. Meningkatnya armada nelayan sebesar 22, 85% dari jumlah 4.109 kapal Tahun 2011 menjadi 5.048 pada Tahun 2012
4. Meningkatnya layanan tambat labuh kapal penangkap ikan di Muara Angke
5. Meningkatnya kualitas pengolahan hasil perikanan dan produk hewan
6. Jakarta bebas Rabies
7. Menurunnya resiko serangan *Avian Influenza* (AI) dan penyakit zoonosis lain bagi warga Jakarta, karena membaiknya pengawasan, pemeriksaan terhadap hewan – hewan piaraan dan kesayangan oleh petugas
8. Mewujudkan rasa aman bagi warga Jakarta pada saat peringatan Idul Adha hal ini disebabkan karena hewan yang akan dijadikan Qurban telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan
9. Memenuhi kebutuhan obat hewan dan pakan hewan di Provinsi DKI Jakarta
10. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Hewan, Pos Kesehatan Hewan dan Praktek Dokter Hewan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya penataan kawasan pangkalan pendaratan ikan di Muara Angke sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan pasar. Untuk itu perlu dilakukan Penataan Kawasan Pelabuhan Muara Angke secara terintegrasi dengan transportasi, baik transportasi darat maupun laut.

30. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2012 anggaran sebesar Rp142.880.703.167,50 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.459.900.015,00 atau 81,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- a) Pengawasan barang beredar sebanyak 20 kali ke 88 lokasi pasar swalayan dan pasar tradisioanal di 5 (lima) wilayah kota administrasi.
- b) Peningkatan pelayanan prima (*one day service*) sebanyak 26 kali di 5 (lima) wilayah kota administrasi.
- c) Pelaksanaan kemetrolagian secara periodik pada pasar-pasar tradisional di 5 wilayah kota administrasi

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- a) Bimbingan pengelolaan 20 pasar modern.
- b) Pemantauan harga kebutuhan pokok sebanyak 18 kali di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

3) Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Ekspor

- a) Partisipasi pada Pameran dan Promosi baik dalam dan luar daerah sebanyak 26 kali (dari 5 wilayah kota administrasi)
- b) Partisipasi pada Forum pameran di Eropa Timur dan Asia dengan mengikut sertakan 20 UKM ke Negara Hongkong, Jerman, dan Bahrain.

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan Menengah

- a) Penyelenggaraan *Workshop* Aplikasi Industri Software diikuti sebanyak 4 IKM.

- b) Pemilihan Nominasi Upakarti Tahun 2012 diikuti sebanyak 3 Calon Penerima Upakarti.
- c) Peningkatan *Design Meubel* diikuti 4 IKM.
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Bidang Industri Alat Transportasi, Telematika (IATT) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) diselenggarakan sebanyak 4 kali.
- e) Pengembangan Wawasan dalam rangka Peningkatan IATT dan IKM diikuti 18 peserta.
- f) Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Rangka Pengembangan IATT dan IKM diselenggarakan 3 kali
- g) Bimbingan Teknis Bengkel Kendaraan Bermotor diikuti 4 IKM.
- h) Penyelenggaraan Pameran Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2012 dengan menggunakan lahan seluas 3.800 m²
- i) Penyelenggaraan Gelar Produk IKM dan MPU pada Pekan Raya Jakarta Tahun 2012 dengan mengikut sertakan 4 IKM
- j) Partisipasi keikutsertaan pada Pekan Produk Kreatif Indonesia Tahun 2012 sebanyak 10 IKM
- k) Partisipasi :
 - Gelar Produk IKM di Makasar sebanyak 4 IKM
 - Gelar Produk pada Inacraft Tahun 2012 sebanyak 10 IKM
 - Gelar Produk IKM di Batam sebanyak 4 IKM
 - Gelar Produk IKM pada Jak Craft sebanyak 20 IKM
 - Gelar Produk pada IKM Expo sebanyak 20 IKM.
- l) Pembinaan bengkel kendaraan BBG

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri

- a) Sosialisasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengganti Formalin di 5 Wilayah Kota Administrasi.
- b) Pelatihan Penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi Industri Pangan bagi 25 Industri Pangan.
- c) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Auditor Pangan bagi 20 Orang.

- d) Partisipasi dan Koordinasi Bidang Industri Logam, Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) dan Industri Agro dan Kimia (IAK) dengan Instansi terkait
- e) Partisipasi :
 - Gelar Produk Industri ke Luar Provinsi
 - Kegiatan MPU Bidang Industri dan Energi
- f) Penyusunan Buku Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebanyak 1.000 buku.
- g) Pengawasan dan Pengendalian ILMTA dan IAK
- h) Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) pembinaan ILMTA dan IAK sebanyak 4 Kegiatan
- i) Pelatihan *Non-Destructive Test* (NDT) bagi SDM Industri Logam
- j) Pelaksanaan Kemitraan produk Bidang ILMTA dan IAK sebanyak 5 Kegiatan
- k) Pendampingan :
 - Teknis Eko Efisien pada Industri ILMTA dan IAK sebanyak 2 Industri
 - Teknis Manajemen Energi pada Proses Produksi sebanyak 2 Industri.
- l) Pemetaan Kondisi Industri di DKI Jakarta
- m) Partisipasi pada *Muslim World Biz* 2012

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan perdagangan antara lain :

- a. Meningkatnya pelayanan prima (*one day service*) dari 17 kali (2011) menjadi 26 kali (2012), di 5 (lima) wilayah kota administrasi
- b. Meningkatnya nilai ekspor berdasarkan penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dari US \$ 18.073.106.332,90 (2011) menjadi US \$ 24.851.840.608,39 (2012) atau mengalami kenaikan sebesar 37,5%.

- c. Penyelenggaraan Pameran Produk Kreatif Daerah (PPKD) dengan melibatkan 128 Industri Kreatif/Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Fasilitasi Pameran Regional maupun antar Daerah sebanyak 175 Pengusaha/Perajin Industri Kecil Menengah
- e. Bimbingan Teknis bagi Industri Kecil Menengah, sebanyak 190 orang (Teknis Jasa Perbengkelan, Teknis Industri Jasa Elektronik, Teknis Perajin Batu Aji, Teknis Industri Furniture/Meubel, Teknis Kemasan Aneka Produk IKM)

c. Permasalahan dan solusi

Belum optimalnya transaksi perdagangan di pasar tradisonal dibandingkan dengan di pasar moderen. Untuk itu dilakukan revitalisasi pasar tradisonal menjadi pasar yang lebih tertata rapih serta berdaya saing serta menggerakkan perekonomian warga. Bahkan ke depan direncanakan membangun mall khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.



BAB III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang semula ditargetkan sebesar Rp30.642.744.353.626,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Pendapatan Daerah naik sebesar Rp3.007.267.604.991,00 atau 9,81% menjadi Rp33.650.011.958.617,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp35.379.180.051.989,03 atau 105,14%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 melebihi target sebesar Rp1.729.168.093.372,03 atau 5,14%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp28.297.361.482.869,82, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp7.081.818.569.119,21 atau 20,00%.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp33.827.031.650.310,00. Setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Belanja Daerah naik sebesar Rp4.539.648.423.531,00 atau 13,42% menjadi sebesar Rp38.366.680.073.841,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.807.973.174.916,00 atau 17,74%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp26.423.599.893.297,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp5.135.107.005.628,00 atau 19,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 2011 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 mengalami surplus. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp35.379.180.051.989,03 sedangkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp31.558.706.898.925,00, sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami surplus sebesar Rp3.820.473.153.064,03.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp6.470.618.490.508,00 dan penerimaan pembiayaan dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.933.521.975,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.475.552.012.483,20 atau 84,06%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp832.303.634.733,00 atau 27,87%. Dengan demikian realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2012 melebihi target sebesar Rp926.580.262.526,20 atau 19,64%.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2012 sebesar Rp49.061.900.213,00 yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dari jasa giro.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp2.781.684.906.912,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp618.477.833.261,00 atau 22,23%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp11.228.300.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.169.288.822,00 atau 72,75%. Dengan demikian alokasi anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.059.011.178,00 atau 27,25%.

4. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp35.045.236.858,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp34.653.506.454,00 atau 98,88%.

5. Pembayaran Utang Kepada Pegawai

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Kepada Pegawai setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp410.340.499,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebesar Rp112.920.178,00 atau 27,52%.

6. Pembayaran Utang Biaya Pemungutan

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Biaya Pemungutan sebesar Rp4.183.175.979,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp4.077.107.793,00 atau 97,46%.

7. Pembayaran Utang Suku Cadang

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Suku Cadang setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp2.365.000,00, sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 tidak terealisasi.

8. Pembayaran Utang Perpanjangan STNK

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Perpanjangan STNK setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp4.642.500,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.629.500,00 atau 78,18%.

9. Pembayaran Utang Pajak

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Pajak setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp100.591.407.536,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp62.307.448.512,00 atau 61,94%.

10. Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran yang ditetapkan untuk Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp53.400.000.000,00 yang dialokasikan untuk pengelolaan dana bergulir yang digulirkan kepada masyarakat terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp55.440.000.000,00 yang terdiri dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp53.400.000.000,00 dan Hasil Jasa Pemanfaatan yang digulirkan Kembali sebesar Rp2.040.000.000,00 melalui UPT Dana Bergulir.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan yang melebihi target Rp 1.729.168.093.372,03 di Tahun Anggaran 2012
2. Sisa anggaran belanja yang tidak Rp 6.807.973.174.916,00 dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012
3. Pembiayaan yang melebihi target Rp 926.580.262.526,20

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp9.463.721.530.814,23.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam tabel 3.1.

TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012	Δ%	Realisasi 2011
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
1	PENDAPATAN	30.642.744.353.626,00	33.650.011.958.617,00	35.379.180.051.989,03	105,14	28.297.361.482.869,82
1.1	Pendapatan Asli Daerah	18.685.000.000.000,00	20.523.433.370.351,00	22.040.801.447.924,03	107,39	17.825.987.294.430,82
1.2	Pendapatan Transfer	10.424.607.685.360,00	11.593.441.920.000,00	13.334.647.270.804,00	115,02	10.462.963.410.649,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.533.136.668.266,00	1.533.136.668.266,00	3.731.333.261,00	0,24	8.410.777.790,00
2	BELANJA	33.827.031.650.310,00	38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00	82,26	26.423.599.893.297,00
2.1	Belanja Operasi	22.823.266.398.893,00	25.449.961.991.740,00	22.771.853.465.799,00	89,48	19.107.266.558.546,00
2.2	Belanja Modal	10.944.406.163.917,00	12.819.729.251.292,00	8.784.365.760.426,00	68,52	7.316.333.334.751,00
2.3	Belanja Tak Terduga	59.359.087.500,00	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
Surplus/Defisit		(3.184.287.296.684,00)	(4.716.668.115.224,00)	3.820.473.153.064,03	81,00	1.873.761.589.572,82
3	PEMBIAYAAN	3.184.287.296.684,00	4.716.668.115.224,00	5.643.248.377.750,20	119,64	4.596.856.900.935,38
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.380.600.503.596,00	7.703.218.490.508,00	6.475.552.012.483,20	84,06	4.926.078.266.154,38
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.196.313.206.912,00	2.986.550.375.284,00	832.303.634.733,00	27,87	329.221.365.219,00
4	SILPA			9.463.721.530.814,23		6.470.618.490.508,20
	Total APBD	36.023.344.857.222,00	41.353.231.049.125,00			

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan Daerah

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012 melebihi target yang direncanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Adanya mutasi Kendaraan Bermotor keluar daerah pada tahun 2012 yang jumlah dan nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan mutasi kendaraan bermotor yang masuk, dimana jumlah mutasi kendaraan bermotor keluar

daerah mencapai 233.185 unit dengan nilai pajak sebesar Rp148.804.944.580,00, sedangkan mutasi kendaraan bermotor yang masuk hanya 40.363 unit dengan nilai pajak sebesar Rp40.199.493.950,00.

- b. Akibat dari kondisi tersebut di atas, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami *potensial loss* sebesar Rp108.605.450.630,00.
- c. Adanya kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) sebanyak 2.577.770 kendaraan dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp664.325.222.907,00.
- d. Masih cukup banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau mendaftarkan ulang setiap tahun.
- e. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pelaksana pelayanan dan penelitian berkas Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baik roda dua maupun kendaraan roda empat atau lebih.

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Menerapkan Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Penghapusan Sanksi Administrasi selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan (28 September 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2012.
- b. Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan yang masih belum daftar ulang, khususnya terhadap kendaraan yang memiliki potensi piutang yang besar.

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikarenakan Penetapan Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 telah memperhitungkan Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang semula Rp4.500,00 per liter menjadi Rp6.000,00 per liter dalam rangka menekan subsidi BBM, sehingga tidak terealisasinya penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan *potensial loss* pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diperhitungkan mencapai Rp135.000.000.000,00 atau 30% dari pemakaian BBM Bersubsidi (Premium dan Solar) yang diperkirakan beralih ke BBM Non Subsidi (Pertamax).

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para penyalur bahan bakar yang melibatkan Tim dari BPKP dengan hasil temuan pemeriksaan sebesar Rp854.242.527,80 dan realisasi pembayaran sebesar Rp545.601.928,80.
- b. Menunjuk wajib pajak baru penyalur bahan bakar kendaraan bermotor sesuai rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana dari 21 perusahaan yang direkomendasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak telah ditindaklanjuti melalui penelitian lapangan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) 5 perusahaan telah dan dalam proses pengukuhan sebagai Wajib pajak Baru;
 - 2) 16 perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Baru.

3. Pajak Hiburan

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang mengabulkan permohonan para pemohon, bahwa objek Pajak Hiburan atas permainan Golf sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan menjadi objek PPN.

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan melalui Tim Gabungan yang melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan hasil pemeriksaan adanya pembayaran Pajak Hiburan sebesar Rp4.984.172.527,00 dari ketetapan pajak yang diterbitkan sebesar Rp19.104.218.054,00.
- b. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan unit terkait lainnya untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan hiburan incidental yang pada umumnya mengalami peningkatan di setiap akhir tahun.

4. Pajak Air tanah

- a. Pengelolaan air tanah dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah yang hanya dipergunakan untuk cadangan apabila kebutuhan air dari jaringan perpipaan (PAM) belum tercukupi atau tidak berfungsi. Oleh karena itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah bekerjasama dengan PAM Jaya (PT. Palyja dan PT. Aetra) melakukan program *Zero Deepwell Consumption* yaitu pemberian izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi air tanah dan jaringan perpipaan.

- b. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air, dimana tarif air tanah ditetapkan lebih besar jika dibandingkan dengan tarif air perpipaan (PDAM) dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan air tanah dan mendorong pemanfaatan air perpipaan.
- c. Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan PAM dan mitranya (PT. Palyja dan PT. Aetra) atas penerapan peraturan tersebut diperoleh data bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 terjadi penurunan pemakaian air tanah diikuti dengan kenaikan pemakaian air dan jaringan perpipaan seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tahun	Pemakaian	
	Air Tanah	Air Perpipaan (PDAM)
2007	22.512.599	252.017.908
2008	21.477.749	258.939.302
2009	17.315.049	265.778.851
2010	10.368.312	283.537.660
2011	8.166.834	296.954.648
2012	7.429.463	307.313.155

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur-sumur dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil seperti sumur cadangan dan sumur rusak yang melibatkan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

WILAYAH	JUMLAH OBJEK PEMERIKSAAN	KETERANGAN					
		AKTIF	CADANGAN	RUSAK	TIDAK DITEMUKAN	TUTUP	BELUM TERDAFTAR
PUSAT	399	129	151	58	29	23	9
SELATAN	426	50	162	56	158	0	0
BARAT	100	74	18	4	4	0	0
TIMUR	595	25	200	23	71	275	1
UTARA	196	126	0	40	0	30	0
TOTAL	1716	404	531	181	262	328	10

- b. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajaknya baik untuk tahun berjalan yaitu tahun 2012 atau tahun sebelumnya.

3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama Belanja Langsung yang relatif rendah antara lain:

- a. Adanya lahan yang batal dibebaskan karena beberapa alasan, diantaranya yaitu:
 - 1) Dokumen tidak lengkap;
 - 2) Lokasi masuk dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - 3) Belum seluruh luasan dibebaskan;
 - 4) Akses jalan tidak memenuhi syarat dan kondisi lahan banjir;
 - 5) Peta inventarisasi dari Badan Pertanahan Nasional belum selesai;
 - 6) Masih dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN oleh Pemilik Lahan.
- b. Kegiatan tidak dapat diselesaikan karena struktur bangunan yang tidak boleh dibongkar total, sebab jika dibongkar total, bangunan lama harus diusulkan untuk dihapus terlebih dahulu.
- c. Pihak ketiga tidak sanggup menyediakan barang sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak.
- d. Adanya kesalahan kode rekening sehingga tidak memungkinkan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan.

Langkah pemecahan dan upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen untuk pembebasan lahan dan melakukan survey pada lokasi-lokasi pembebasan lahan agar tidak terjadi pembatalan sebelum dialokasikan dalam usulan APBD.
- b. Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah serta lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan tanpa mengesampingkan unsur kehati-hatian.
- c. Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa.
- d. Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang yang tengah mengerjakan proyek fisik pembangunan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta, maupun dari rekanan pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment bagi seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan penyerapan anggaran.



BAB IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya

yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas, dan;
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal

transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 737 SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 47 entitas akuntansi penggabungan. Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari UKPD dibawahnya. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi / Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas – Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-dinas, sedangkan untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas – Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Penggabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan UKPD lainnya yang secara organisatoris berada di bawahnya tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi / Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas – Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-dinas, sedangkan untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas – Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar *cash towards accrual* yaitu merupakan berbasis kas menuju akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
- b. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	5.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	1.600.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	200.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	200.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	5.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.500.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	1.600.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Satuan (Rp)
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000
4.3	Instalasi	10.000.000
4.4	Jaringan	10.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	200.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	200.000

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.
- b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.5.2 Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dilakukan dengan penetapan umur investasi Non Permanen Dana Bergulir (*aging schedule*):

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%
 - Umur Investasi Dana Bergulir 1-2 tahun ditetapkan sebesar 10%
 - Umur Investasi Dana Bergulir 2-5 tahun ditetapkan sebesar 50%
 - Umur Investasi Dana Bergulir lebih dari 5 tahun ditetapkan sebesar 100%
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) pada perusahaan daerah, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

c. Metode Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya (*cost method*)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas (*equity method*)

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan ketiga metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

4.3.5.3 Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Aset tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Gedung dan Bangunan
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2012 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab ke II Inventarisasi pasal 27 untuk melakukan sensus barang daerah setiap 5 tahun, pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah dan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2013.

4.3.5.4 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan

Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset di BP THR Lokasari

- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- d. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

4.3.5.5 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

- a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.

- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja seperti utang telepon; air dan listrik (TAL), Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
 - 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
 - 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
 - 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
 - 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- f. Kewajiban kontinjensi
- Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas Dana

- a. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan.
- b. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari:
 - 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
 - 2) Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan.
 - 3) Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang.
 - 4) Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan.
 - 5) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.
- c. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi:

- 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset Tetap.
- 3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan dari Aset Lainnya.
- 4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

- d. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2012 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*”

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur ini juga menetapkan penyusutan akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2014, sebab pada tahun anggaran 2014 proses reinventarisasi dan appraisal diharapkan telah selesai dilaksanakan.

Kebijakan Akuntansi lainnya yang belum diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan karena kebijakan peraturan yang mengatur atas akun dimaksud sedang dalam proses penyusunan, yaitu penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih termasuk umur piutang yang dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2012 disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terdapat reklasifikasi penyajian atas akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2012 Perubahan susunan kode rekening tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Susunan Kode Rekening Tahun 2012	Susunan Kode Rekening Tahun 2011
1.	Kas Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang belum Disetor Kas dan Setara Kas BLUD Kas Tunai Kas di Bank Kas Transito Pajak di BLUD yang Belum Disetor Uang Muka Pasien RSUD/K	Kas Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang belum Disetor Kas BLUD (Unit Swadana) Pajak di BLUD yang Belum Disetor Uang Muka Pasien RSUD/K
2.	Piutang Piutang Retribusi Piutang Retribusi Jasa Umum Piutang Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Piutang Denda Jasa Umum Piutang Denda Jasa Usaha Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	Piutang Piutang Retribusi Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan Piutang Retribusi Izin pelaku Teknis Bangunan Piutang Retribusi Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan Piutang Retribusi Administrasi Perijinan Pembangunan Piutang Denda Retribusi Perijinan Tertentu Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan
3.	Piutang Piutang BLUD Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan Piutang BLUD Pelayanan Transportasi Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi Piutang BLUD Lainnya	Piutang Piutang Lainnya Piutang di BLUD Piutang Pelayanan Kesehatan Piutang Lainnya di BLUD
4.	Piutang Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	Piutang Piutang Lainnya Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan
5.	Aset Lancar Lainnya Belanja Dibayar di Muka Asuransi Dibayar di muka Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja di SKPD Uang Muka Kerja di BLUD	Piutang Piutang Lainnya Piutang Lain-lain Asuransi Dibayar di Muka Uang Muka Kerja - SKPD

No.	Susunan Kode Rekening Tahun 2012	Susunan Kode Rekening Tahun 2011
6.	Utang Belanja BYMHD - BLUD BYMHD - TALI Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	Utang Jangka Pendek Lainnya Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) BYMHD - BLUD BYMHD - TAL Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS
7.	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo



BAB V

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran II, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Penetapan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun Anggaran 2012.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp30.642.744.353.626,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp3.007.267.604.991,00 atau 9,81% menjadi Rp33.650.011.958.617,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp35.379.180.051.989,03 atau 105,14% dari anggarannya, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.729.168.093.372,03 atau 5,14%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22.040.801.447.924,03, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp13.334.647.270.804,00, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.731.333.261,00 dan apabila realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang mencapai sebesar Rp35.379.180.051.989,03 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp28.297.361.482.869,82, realisasi Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp7.081.818.569.119,21 atau 25,03%.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1. Pendapatan Asli Daerah	18.685.000.000.000,00	20.523.433.370.351,00	22.040.801.447.924,03	107,39	17.825.987.294.430,82
2. Dana Transfer	10.424.607.685.360,00	11.593.441.920.000,00	13.334.647.270.804,00	115,02	10.462.963.410.649,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.533.136.668.266,00	1.533.136.668.266,00	3.731.333.261,00	0,24	8.410.777.790,00
Jumlah	30.642.744.353.626,00	33.650.011.958.617,00	35.379.180.051.989,03	105,14	28.297.361.482.869,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp18.685.000.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik Rp1.838.433.370.351,00 atau 9,84% menjadi Rp20.523.433.370.351,00.

Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp22.040.801.447.924,03 atau 107,39%. Realisasi PAD tersebut melampaui target sebesar Rp1.517.368.077.573,03 atau 7,39%.

Apabila realisasi PAD tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2011 sebesar Rp17.825.987.294.430,82, pendapatan PAD di tahun 2012 menunjukkan peningkatan senilai Rp4.214.814.153.493,21 atau 23,64%.

Peningkatan realisasi PAD di tahun 2012 dapat dicapai karena dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal, yaitu:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
2. Peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi di lapangan untuk meningkatkan PAD;
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan kelengkapan dasar hukum pajak daerah;
4. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
5. Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut maupun masyarakat; dan
6. Peningkatan survei atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2012 tergambar pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1. Pajak Daerah	15.625.000.000.000,00	16.525.000.000.000,00	17.721.493.016.509,32	107,24	15.221.249.152.689,46
2. Retribusi Daerah	500.000.000.000,00	901.224.604.600,00	1.820.435.447.667,00	202,00	609.349.051.004,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	360.000.000.000,00	360.000.000.000,00	351.823.210.568,54	97,73	278.789.767.934,40
4. Lain-lain PAD	2.200.000.000.000,00	2.737.208.765.751,00	2.147.049.773.179,17	78,44	1.716.599.322.802,96
Jumlah	18.685.000.000.000,00	20.523.433.370.351,00	22.040.801.447.924,03	107,39	17.825.987.294.430,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi PAD diuraikan berikut ini.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp15.625.000.000.000,00 setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp900.000.000.000,00 atau 5,76% menjadi Rp16.525.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp17.721.493.016.509,32 atau 107,24%, dengan demikian

realisasi Pajak Daerah telah melampaui target anggaran sebesar Rp1.196.493.016.509,32 atau 7,24% dan apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2011 sebesar Rp15.221.249.152.689,46, menunjukkan peningkatan pendapatan pajak sebesar Rp2.500.243.863.819,86 atau 16,43%.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	4.100.000.000.000,00	4.150.000.000.000,00	4.106.968.370.530,00	98,96	3.664.400.165.006,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.350.000.000.000,00	4.660.000.000.000,00	5.507.710.354.550,00	118,19	4.582.084.588.660,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	950.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	882.558.921.963,00	88,26	848.569.568.929,00
4.	Pajak Air Tanah	190.000.000.000,00	170.000.000.000,00	102.046.137.531,32	60,03	114.442.293.835,54
5.	Pajak Hotel	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.028.521.564.463,00	102,85	858.337.282.672,60
6.	Pajak Restoran	1.100.000.000.000,00	1.175.000.000.000,00	1.238.573.704.151,00	105,41	1.031.995.530.296,00
7.	Pajak Hiburan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	369.152.834.149,00	92,29	296.519.831.376,32
8.	Pajak Reklame	360.000.000.000,00	410.000.000.000,00	483.178.532.223,00	117,85	269.666.970.840,00
9.	Pajak Penerangan Jalan	515.000.000.000,00	550.000.000.000,00	557.307.626.142,00	101,33	511.449.292.512,00
10.	Pajak Parkir	210.000.000.000,00	210.000.000.000,00	220.901.591.724,00	105,19	158.256.146.738,00
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.450.000.000.000,00	2.800.000.000.000,00	3.224.573.379.083,00	115,16	2.885.527.481.824,00
Jumlah		15.625.000.000.000,00	16.525.000.000.000,00	17.721.493.016.509,32	107,24	15.221.249.152.689,46

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp4.100.000.000.000,00 setelah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut menjadi

naik sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 1,22% menjadi sebesar Rp4.150.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp4.106.968.370.530,00 atau 98,96%, realisasi penerimaan pajak ini tidak melampaui target sebesar Rp43.031.629.470,00 atau 1,04% dan apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.664.400.165.006,00, menunjukkan peningkatan penerimaan PKB sebesar Rp442.568.205,524,00 atau 12,08%.

Tidak tercapainya target penerimaan PKB pada Tahun Anggaran 2012 senilai Rp43.031.629.470,00 disebabkan oleh:

- a. Adanya mutasi kendaraan bermotor “keluar daerah” pada tahun 2012 yang jumlah dan nilai pajaknya lebih besar jika dibandingkan dengan mutasi kendaraan bermotor “masuk daerah”, dimana jumlah mutasi kendaraan bermotor keluar daerah mencapai 233.185 unit dengan nilai pajak sebesar Rp148.804.944.580,00 sedangkan mutasi kendaraan bermotor masuk daerah hanya 40.343 unit dengan nilai pajak sebesar Rp40.199.493.950,00 sehingga mengalami *potential loss* sebesar Rp108.605.450.630,00.
- b. Terdapat kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) sebanyak 2.577.770 kendaraan dengan jumlah potensi pokok pajak sebesar Rp664.325.222.907,00.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 antara lain:

- a. Menerapkan insentif pengurangan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta penghapusan sanksi administrasi selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan (28 Sept 2012 s.d 28 Okt 2012)

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi.

- b. Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan yang masih belum daftar ulang, khususnya terhadap kendaraan yang memiliki potensi piutang yang besar.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain:
 - 1) *Drive Thru* di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
 - 2) Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk 5 (lima) wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
 - 3) 3 (tiga) Gerai Samsat berlokasi di Mal PGC Jakarta Timur, Mal Taman Palem Jakarta Barat dan Mal Artha Gading Jakarta Utara.
- d. Menerapkan pajak progresif yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB serta Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dimana untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama

dikenakan tarif pajak progresif sebesar 1,5% dari NJKB untuk kendaraan pertama, 2% dari NJKB untuk kendaraan kedua, 2,5% dari NJKB untuk kendaraan ketiga, dan 4% dari NJKB untuk kendaraan keempat dan seterusnya.

Dampak dari pemberlakuan pajak progresif tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh tarif pajak progresif terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor 2 (dua) atau lebih;
- 2) Terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan oleh pemiliknya akan dilakukan pemblokiran pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan usulan yang bersangkutan, sehingga mengharuskan orang yang menerima penyerahan kendaraan dimaksud akan melakukan Bea Balik Nama II pada saat proses pengesahan/perpanjangan pada tahun berikutnya;
- 3) Akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp4.350.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp310.000.000.000,00 atau 7,13% menjadi Rp4.660.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp5.507.710.354.550,00 atau 118,19%, dengan demikian penerimaan BBN-KB melampaui target sebesar Rp847.710.354.550,00 atau 18,19% dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.582.084.588.660,00,

menunjukkan peningkatan penerimaan BBN-KB di tahun 2012 sebesar Rp925.625.765.890,00 atau 20,20%.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan pada tahun 2012, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Peningkatan survey lapangan dan pengumpulan data dan hasilnya digunakan untuk menentukan harga pasaran umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan Instansi terkait maupun dengan pihak swasta seperti ATPM / pemilik showroom / Asosiasi Importir dan GAIKINDO.
- d. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembayaran BBN – I (kendaraan baru).

Pelampauan target penerimaan BBN-KB sebesar Rp847.710.354.550,00 juga disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 6,7% yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 6,5% dan adanya peningkatan penjualan mobil di tahun 2012 yang memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan BBN-KB.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp950.000.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 5,26% menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp882.558.921.963,00 atau 88,26%, dengan demikian realisasi pajak tidak melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp117.441.078.037,00 atau 11,74%.

Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp848.569.568.929,00 penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp33.989.353.034,00 atau 4,01%.

Alasan tidak tercapainya target penerimaan PBB-KB pada Tahun Anggaran 2012 dikarenakan penetapan target penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000.000 telah memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang semula Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter dalam rangka menekan subsidi BBM, sehingga tidak terealisasinya penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan *potential loss* pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diperhitungkan Rp135.000.000.000 atau 30 persen dari pemakaian BBM Bersubsidi (Premium dan Solar) yang diperkirakan beralih ke BBM Nonsubsidi (Pertamax).

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2012 antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para penyalur bahan bakar yang melibatkan Tim dari BPKP, dengan hasil temuan pemeriksaan sebesar Rp 854.242.527,80 dan realisasi pembayaran sebesar Rp 545.601.928,80.
- b. Menunjuk wajib pajak baru penyalur bahan bakar kendaraan bermotor sesuai rekomendasi BPK Perwakilan DKI Jakarta berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana dari 21 perusahaan yang direkomendasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak telah ditindaklanjuti melalui penelitian lapangan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) 5 perusahaan telah dan dalam proses pengukuhan sebagai Wajib Pajak Baru.
 - 2) 16 perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak baru.

4. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp190.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut turun sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 10.53% menjadi Rp170.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp102.046.137.531,32 atau 60,03%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak melampaui target sebesar Rp67.953.862.468,68 atau 39,97%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp114.442.293.835,54, maka terlihat penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2012 turun sebesar Rp12.396.156.304,22 atau 10,83%.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan:

- a. Badan Pengelola Lingkungan Hidup bekerjasama dengan PAM Jaya melakukan program *Zero Deepwell Consumption* yaitu pemberian izin pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi air tanah dan jaringan perpipaan.
- b. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2009 tentang nilai perolehan air, dimana tarif air tanah ditetapkan lebih besar jika dibandingkan dengan tarif air perpipaan (PDAM), dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan air tanah dan mendorong pemanfaatan air perpipaan.
- c. Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan PAM dan mitranya (PT Palyja dan PT Aetra) atas penerapan peraturan tersebut diperoleh data bahwa sejak tahun 2007 s.d. 2012 terjadi penurunan pemakaian air tanah diikuti dengan kenaikan pemakaian air dari jaringan perpipaan.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a. Membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur-sumur dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil seperti sumur cadangan dan sumur rusak yang melibatkan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- b. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajaknya baik untuk tahun berjalan (tahun 2012) atau tahun sebelumnya.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tetap sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.028.521.564.463,00 atau 102,85%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp28.521.564.463,00 atau 2,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp858.337.282.672,60 terlihat realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp170.184.281.790,40 atau 19,83%.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target diantaranya:

- a. Melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek Pajak Hotel;
- b. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hotel;
- c. Memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak hotel.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu :

- a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,2% (*Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).

- b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan daya beli masyarakat. (*Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp1.100.000.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 6,82% menjadi Rp1.175.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.238.573.704.151,00 atau 105,41%, dengan demikian, realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui target sebesar Rp63.573.704.151,00 atau 5,41%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya mencapai Rp1.031.995.530.296,00 maka terlihat kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp206.578.173.855,00 atau 20,02%.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya sebagai berikut:

- a. Melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi terhadap objek Pajak Restoran;
- b. Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD secara instensif melakukan pemantauan terhadap pembayaran setoran masa wajib pajak restoran.
- c. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak Restoran;

- d. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran khususnya untuk penerapan pembayaran pajak secara online.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:

- a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,2% (*Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).
- b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan daya beli masyarakat. (*Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).
- c. Adanya penambahan jumlah objek Pajak Restoran dimana pada tahun 2011 sebanyak 7.559 objek pajak dan pada tahun 2012 naik menjadi 9,019.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp400.000.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tetap sebesar Rp400.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp369.152.834.149,00 atau 92,29%, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar Rp30.847.165.851,00 atau 7,71%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp296.519.831.376,32, terlihat realisasi

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp72.633.002.772,68 atau 24,50%.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan pada Tahun Anggaran 2012, antara lain didorong oleh:

- a. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PPU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang mengabulkan permohonan para pemohon, bahwa obyek pajak hiburan atas permainan golf sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, menjadi obyek PPN
- b. Sementara itu, penetapan target penerimaan pajak hiburan tahun 2012 sebesar Rp400.000.000.000 telah memperhitungkan potensi penerimaan atas penyelenggaraan golf sebesar kurang lebih Rp60.000.000.000, berdasarkan informasi data pembayaran PPN tahun 2011 yang diterima dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun berikutnya antara lain:

- a. Melakukan pemeriksaan melalui Tim Gabungan yang melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan hasil pemeriksaan adanya pembayaran Pajak Hiburan sebesar Rp4.984.172.527,00 dari ketetapan pajak yang diterbitkan sebesar Rp19.104.218.054,00.
- b. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dari unit terkait lainnya untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan hiburan insidental yang pada umumnya mengalami peningkatan disetiap akhir tahun.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp360.000.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 13,89% menjadi sebesar Rp410.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp483.178.532.223,00 atau 117,85%, dengan demikian realisasi Pajak Reklame dapat melampaui target sebesar Rp73.178.532.223,00 atau 17,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp269.666.970.840,00, terlihat kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp213.511.561.383,00 atau 79,18%.

Pelampauan target penerimaan Pajak Reklame tersebut disebabkan optimalisasi peran Unit Pelayanan Pajak Daerah di setiap Kecamatan dalam rangka menggali potensi pajak yang berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Reklame.

9. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp515.000.000.000,00 setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp35.000.000.000,00 atau 6,80% menjadi sebesar Rp550.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp557.307.626.142,00 atau 101,33%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.307.626.142,00 atau 1,33%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp511.449.292.512,00 maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp45.858.333.630,00 atau 8,97%.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp210.000.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar Rp210.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp220.901.591.724,00 atau 105,19%, dengan demikian realisasi Pajak Parkir dapat melampaui target sebesar Rp210.000.000.000,00 atau 5,19%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp158.256.146.738,00 terlihat kontribusi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 terjadi kenaikan sebesar Rp62.645.444.986,00 atau 39,58%.

Pelampauan target penerimaan Pajak Parkir tersebut disebabkan optimalisasi peran Unit Pelayanan Pajak Daerah di setiap Kecamatan dalam rangka menggali potensi Pajak Parkir.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian distresi dalam penetapan tarif. Dalam hal perluasan objek pajak

daerah maka sejak tahun 2012 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut oleh pemerintah daerah.

Peralihan BPHTB menjadi pajak daerah yang pengelolaannya dan pemanfaatannya dikembalikan ke daerah seratus persen dituangkan dalam Keputusan Bersama Dua Menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK/2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 Pasal 2 (dua), disebutkan bahwa kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2012.

Adapun peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB

dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Pada tahun anggaran 2012 hanya terdapat 2 (dua) bank yang melanjutkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sampai dengan April 2013 dengan BPKD, yaitu Bank DKI dan Bank BRI. Sedangkan PKS dengan Bank Mandiri dan Bank BNI telah berakhir pada bulan April 2012.

BPHTB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.450.000.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar Rp2.800.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp3.224.573.379.083,00 atau 115,16%, dengan demikian realisasi BPHTB dapat melampaui target sebesar Rp424.573.379.083,00 atau 15,16%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp2.885.527.481.824,00 terlihat kontribusi BPHTB Tahun Anggaran 2012 terjadi kenaikan sebesar Rp339.045.897.259,00 atau 11,75%.

Dari realisasi Penerimaan BPHTB sebesar Rp3.224.573.379.083,00, terdapat Penerimaan BPHTB sebesar Rp487.237.195,00 yang harus direstitusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) dan SK Kepala Dinas Pelayanan Pajak. Atas keputusan restitusi tersebut, pembayarannya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dari alokasi Belanja Tak Terduga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan Peraturan Gubernur Nomor 53

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak daerah sebagaimana diatur dalam pasal 3.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:

1. Jika dilihat dari PDRB DKI Jakarta tahun 2012 tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2011, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan-komunikasi sebesar 11,8%, kemudian disusul oleh sektor konstruksi sebesar 6,9%. Meningkatnya pertumbuhan dari sektor konstruksi menunjukkan bahwa adanya penambahan bangunan di wilayah DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. (*Sumber Data : Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).
2. Laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta menurut komponen pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga tahun 2012 juga meningkat sebesar 6,1% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan daya beli masyarakat. (*Sumber Data : Data BPS Provinsi DKI Jakarta*).

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan

dan pengurangan kode rekening retribusi daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan Rp500.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp401.224.604.600,00 atau sebesar 80,24% menjadi Rp901.224.604.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.820.435.447.667,00 atau 202,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp919.210.843.067,00 atau 102,00%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang jumlahnya tercatat Rp609.349.051.004,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2012 meningkat sebesar Rp1.211.086.396.663,00 atau 198,75%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
4. Peningkatan pengawasan di lapangan;
5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tergambar pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
I	Retribusi Jasa Umum	110.609.050.000,00	113.468.850.000,00	83.912.417.037,00	73,95	92.079.333.783,00
II	Retribusi Jasa Usaha	75.434.728.933,00	76.235.557.600,00	59.958.339.854,00	78,65	52.126.699.597,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	313.956.221.067,00	711.520.197.000,00	1.676.564.690.776,00	235,63	465.143.017.624,00
Jumlah		500.000.000.000,00	901.224.604.600,00	1.820.435.447.667,00	202,00	609.349.051.004,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan Rp110.609.050.000,00 setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik Rp2.859.800.000,00 atau 2,59% menjadi Rp113.468.850.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp83.912.417.037,00 atau 73,95%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum

tidak mencapai target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp29.556.432.963,00 atau 26,05%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp92.079.333.783,00, terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2012 turun sebesar Rp8.166.916.746,00 atau 8,87%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 seperti tergambar pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
I	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	36.020.000.000,00	36.020.000.000,00	23.682.043.000,00	65,75	19.478.050.040,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	800.000.000,00	800.000.000,00	296.320.200,00	37,04	472.129.700,00
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.820.700.300,00	130,35	8.127.681.300,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	50.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa	10.720.050.000,00	10.569.850.000,00	7.045.475.000,00	66,66	9.633.491.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	609.657.563,00	59,48	310.978.000,00
7	Retribusi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.408.154.018,00	93,88	1.871.051.741,00
8	Retribusi Pemanfaatan Air Bersih	30.000.000,00	30.000.000,00	96.987.156,00	323,29	61.928.000,00
9	Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kep. Seribu	100.000.000,00	100.000.000,00	38.163.400,00	38,16	299.522.050,00
10	Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Persampahan/Kebersihan	17.839.000.000,00	17.839.000.000,00	10.175.566.350,00	57,04	10.622.964.550,00
12	Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman	8.650.000.000,00	8.650.000.000,00	8.933.635.000,00	103,28	8.639.295.000,00
13	Retribusi Pengukuran Situasi Tanah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.966.843.700,00	92,89	6.718.135.410,00
14	Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota	3.625.000.000,00	3.625.000.000,00	2.681.620.900,00	73,98	3.192.082.750,00
15	Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur	600.000.000,00	600.000.000,00	1.301.922.000,00	216,99	1.752.858.150,00
16	Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama & Sekunder	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	12.786.636.450,00	75,22	19.079.051.592,00

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
17	Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan	700.000.000,00	700.000.000,00	9.093.000,00	1,30	1.682.399.000,00
18	Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan	10.000.000,00	10.000.000,00	29.000,00	0,29	0,00
20	Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	0,00	0,00	120.000,00	~	0,00
21	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	150.000.000,00	59.450.000,00	39,63	137.715.500,00
22	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		110.609.050.000,00	113.468.850.000,00	83.912.417.037,00	73,95	92.079.333.783,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air, yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2012, dianggarkan sebesar Rp36.020.000.000 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasinya mencapai Rp23.682.043.000,00 atau 65,75% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat mencapai target sebesar Rp12.337.957.000,00 atau 34,25%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp19.478.050.040,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp4.203.992.960,00 atau 21,58%.

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus dan kendaraan khusus dan mobil berpenumpang umum. Penurunan tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak melakukan pengujian.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait.
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum.
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*.
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan yang memperhitungkan biaya pencetakan dan

pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp296.320.200,00 atau 37,04% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak dapat mencapai target sebesar Rp503.679.800,00 atau 62,96%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp472.129.700,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp175.809.500,00 atau 37,24%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2012 mencapai Rp7.820.700.300,00 atau 130,35% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah melampaui target sebesar Rp1.820.700.300,00 atau 30,35%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.127.681.300,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp306.981.000,00 atau 3,78%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi.
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran.

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diukur berdasarkan jumlah akta/salinan yang diterbitkan dan jasa yang diberikan dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan,

pemeliharaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp10.720.050.000,00 dan pada perubahan anggaran turun sebesar Rp150.200.000,00 atau 1,40% menjadi sebesar Rp10.569.850.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp7.045.475.000,00 atau 66,66% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.524.375.000,00 atau 33,34%.

Penerimaan retribusi ini utamanya diperoleh dari penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK), biaya pencatatan mutasi data, penggantian biaya cetak KTP dan Kartu Identitas Pendatang.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp9.633.491.000,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp2.588.016.000,00 atau 26,86%.

Hambatan tidak tercapainya target dari pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Kenaikan tarif retribusi belum diberlakukan pada saat penetapan target retribusi tahun 2012 karena Peraturan Daerah Retribusi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 .
- 2) Menurunnya keinginan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara sah.

- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pengesahan perjanjian perkawinan pada pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di daerah atau luar negeri.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa khususnya KTP antara lain:

- 1) Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai peraturan-peraturan kependudukan, sehingga dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kependudukan;
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi;
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan dilapangan kepada masyarakat melalui Operasi Yustisi Kependudukan.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran yang diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp1.025.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp609.657.563,00 atau 59,48% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp415.342.437,00 atau 40,52%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp310.978.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp298.679.563,00 atau 96,05%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain:

- 1) Retribusi yang menjadi kewajiban pemohon rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.
- 2) Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, bahwa untuk Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran tidak lagi dikenakan pemungutan retribusi daerah, namun diusulkan kembali sewaktu-waktu dan pemungutannya menunggu pengesahan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

f. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil

hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.408.154.018,00 atau 93,88% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp91.845.982,00 atau 6,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.871.051.741,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp462.897.723,00 atau 24,74%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut disebabkan berkurangnya kayu yang masuk ke Jakarta, karena terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

g. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur berdasarkan risiko, volume, dan kualitas air dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp96.987.156,00 atau 323,29% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp66.987.156,00 atau 223,29%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp61.928.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp35.059.156,00 atau 56,61%.

Tercapainya target tersebut karena pemanfaatan air bersih di Kepulauan Seribu tergantung dengan cuaca, di mana cuaca pada tahun 2012 cukup bagus. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut adalah melakukan perbaikan *Reverse Osmosis* (RO) sebanyak 9 (Sembilan) unit, sehingga terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat.

h. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan dan energi yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu dengan tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif PLN dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan,

biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp38.163.400,00 atau 38,16% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp61.836.600,00 atau 61,84%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp299.522.050,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp261.358.650,00 atau 87,26%.

Tidak tercapainya target tersebut karena sudah terpasangnya kabel laut di Kepulauan Seribu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih menunggak agar membayar tunggaknya berkaitan akan terjadinya pengalihan pemakaian listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

i. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke

lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar Rp17.839.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp10.175.566.350,00 atau 57,04% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp7.663.433.650,00 atau 42,96%.

Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari, pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah pedagang kaki lima dan penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.622.964.550,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp447.398.200,00 atau 4,21%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut antara lain:

- 1) Tidak ada kendaraan khusus untuk pengangkutan sampah industri.
- 2) Walau volume sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang meningkat tetapi beberapa perusahaan menggunakan kendaraan sendiri untuk mengangkut sampahnya setelah memperoleh izin dari Dinas Kebersihan.
- 3) Berkurangnya volume buang kendaraan penyedotan kakus milik perusahaan/badan/perorangan ke Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Buangan (LIPAB).
- 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memungut retribusi khususnya di tingkat kecamatan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain:

- 1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- 2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- 3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

j. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp8.650.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp8.933.635.000,00 atau 103,28% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp283.635.000,00 atau 3,28%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.639.295.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp294.340.000,00 atau 3,41%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

k. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00, sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.966.843.700,00 atau 92,89%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp533.156.300,00 atau 7,11%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengukuran Situasi Tanah di Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.718.135.410,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp248.708.290,00 atau 3,70%.

Oleh karena itu upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target retribusi ini yaitu dengan:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- 4) Pelaksanaan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

I. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur berdasarkan jenis peruntukan tanah rinci sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp3.625.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.681.620.900,00 atau 73,98% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp943.379.100,00 atau 26,02%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota di Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp3.192.082.750,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp510.461.850,00 atau 15,99%.

m. Retribusi Survey dan Perencanaan *Trace* Jalur Jalan, Jembatan, Saluran, dan Utilitas

Retribusi Survey dan Perencanaan *Trace* Jalur Jalan, Jembatan, Saluran, dan Utilitas merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Survey dan Perencanaan *Trace* Jalur Jalan, Jembatan, Saluran, dan Utilitas Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.301.922.000,00 atau 216,99% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp701.922.000,00 atau 116,99%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Survey dan Perencanaan *Trace* Jalur Jalan, Jembatan, Saluran, dan Utilitas di Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.752.858.150,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp450.936.150,00 atau 25,73%.

n. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas

tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan pada perubahan anggaran naik sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 13,33% menjadi sebesar Rp17.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp12.786.636.450,00 atau 75,22% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp4.213.363.550,00 atau 24,78%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp19.079.051.592,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp6.292.415.142,00 atau 32,98%.

Oleh karena itu upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target retribusi ini yaitu dengan:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 2) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

o. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan merupakan retribusi atas pelayanan pertanahan dan pemetaan yang diukur berdasarkan tingkat akurasi, lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis, pelaksanaan dan hari orang kerja (HOK) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp9.093.000,00 atau 1,30% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp690.907.000,00 atau 98,70%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp1.682.399.000,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp1.673.306.000,00 atau 99,46%.

p. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat

serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp59.450.000,00 atau 39,63% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp90.550.000,00 atau 60,37%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat Rp137.715.500,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp78.265.500,00 atau 56,83%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp75.434.728.933,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp800.828.667,00 atau 1,06% menjadi sebesar Rp76.235.557.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp59.958.339.854,00 atau 78,65%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp16.277.217.746,00 atau 21,35%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp52.126.699.597,00 terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp7.831.640.257,00 atau 15,02%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
II	Retribusi Jasa Usaha					
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.048.823.933,00	41.799.652.600,00	31.863.783.477,00	76,23	28,647.777.375,00
b	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	2.530.000.000,00	2.580.000.000,00	4.293.876.065,00	166,43	3,217,696,301,00
c	Retribusi Tempat Penginapan Nelayan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	22.000.000,00	22.000.000,00	22.941.000,00	104,28	21,852,000,00
e	Retribusi Tempat Rekreasi	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	8.255.793.350,00	121,41	6,578,026,375,00
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.335.020.000,00	4.335.020.000,00	3.463.504.000,00	79,90	3,048,082,075,00
g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	240.685.000,00	240.685.000,00	244.328.000,00	101,51	250.113.600,00
h	Retribusi Potong Hewan	930.000.000,00	930.000.000,00	948.603.307,00	102,00	961,187,884,00
i	Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	670.555.000,00	57,07	604,915,000,00
j	Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan	550.000.000,00	550.000.000,00	585.555.000,00	106,46	552,765,000,00
k	Retribusi Penyedotan Kakus	2.818.200.000,00	2.818.200.000,00	1.321.140.000,00	46,88	1,255,100,000,00
l	Retribusi Jasa Terminal	12.847.000.000,00	12.847.000.000,00	5.369.613.035,00	41,80	5,141,993,204,00
m	Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian	30.000.000,00	30.000.000,00	549.000,00	1,83	330,500,00
n	Retribusi Jasa Perhubungan Udara	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	2.918.098.620,00	138,43	1,846,860,283,00
	Jumlah	75.434.728.933,00	76.235.557.600,00	59.958.339.854,00	78,65	52.126.699.597,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi tersebut dipungut oleh dinas-dinas dan badan yang terkait antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Dinas Olah Raga dan Pemuda, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp41.048.823.933,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp750.828.667,00 atau 1,83% menjadi Rp41.799.652.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp31.863.783.477,00 atau 76,23% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp9.935.869.123,00 atau 23,77%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp28.647.777.375,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp3.216.006.102,00 atau 11,23%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Kendala yang dihadapi sehingga realisasi retribusi ini tidak mencapai target yang ditentukan antara lain:

- 1) Target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi penerimaan retribusi unit penyelidikan, pengukuran dan pengujian pada retribusi pemakaian peralatan laboratorium dan peralatan ukur mobilisasi di Dinas Pekerjaan Umum;
- 2) Harga satuan Pengukuran dan Pengujian Laboratorium terlalu rendah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;
- 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas;
- 5) Permohonan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) semakin lama semakin berkurang karena instansi pemilik jaringan utilitas sudah melakukan penempatan jaringan utilitas di sebagian besar jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta;

- 6) Untuk retribusi pemakaian peralatan ukur perangkat telekomunikasi tidak terdapat realisasinya karena dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Daerah yang diberlakukan mulai bulan Oktober 2012, mengingat *standard operating procedure* (SOP) masih dalam proses;
- 7) Sosialisasi kepada pengusaha yang tidak maksimal;
- 8) Kondisi peralatan pengujian yang tidak layak pakai dan sebagian sudah dihapus;

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan alat berat dan penunjangnya;
- 3) Optimalisasi jasa layanan penggunaan alat berat dan atau penunjangnya;
- 4) Optimalisasi koordinasi dengan unit satuan kerja terkait.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga

transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp2.530.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp50.000.000,00 atau 1,98% menjadi Rp2.580.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp4.293.876.065,00 atau 166,43% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp1.713.876.065,00 atau 66,43%.

Pelampauan target retribusi tersebut disebabkan terjadinya peningkatan produksi dan mutu sehingga terjadi peningkatan harga jual.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp3.217.696.301,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp1.076.179.764,00 atau 33,45%.

c. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pendaratan adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan

Kapal diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Tahun 2012, adalah sama antara anggaran semula dengan anggaran perubahan tahun 2012, yaitu sebesar Rp22.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp22.941.000,00 atau 104,28% dari target yang ditetapkan, realisasi penerimaan retribusi ini melebihi dari yang ditetapkan sebesar Rp941.000,00 atau 4,28%, sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kapal yang mendarat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi Tempat Pendaratan Kapal Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp21.852.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp1.089.000,00 atau 4,98%.

d. Retribusi Tempat Rekreasi

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman,

Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan Planetarium dan Observatorium.

Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2012, ditargetkan sebesar Rp6.800.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp8.255.793.350,00 atau 121,41% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.455.793.350,00 atau 21,41%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp6.578.026.375,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp1.677.766.975,00 atau 25,51%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi ini antara lain:

- 1) Melakukan promosi melalui media cetak.
- 2) Melakukan sosialisasi ke sekolah untuk wajib kunjung ke museum.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata.
- 4) Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap industri pariwisata.

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp4.335.020.000,00, dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp3.463.504.000,00 atau 79,90% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp871.516.000,00 atau 20,10%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan stadion olah raga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp3.048.082.075,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp415.421.925,00 atau 13,63%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi.

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya

perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2012, adalah sama antara anggaran yang semula ditargetkan dengan anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp240.685.000.00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp244.328.000,00 atau 101,51%, realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.643.000,00 atau 1,51%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp250.113.600,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp5.785.600,00 atau 2,31%.

Pelampauan target retribusi tersebut di antaranya karena peningkatan penjualan benih ikan sehingga produksi ikan ikut meningkat, dan meningkatnya produksi dan penjualan bibit sayuran. Selain hal tersebut adalah melakukan optimalisasi uji Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI), agar layak dikonsumsi masyarakat.

g. Retribusi Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun 2012, ditargetkan sebesar sebesar Rp930.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp948.603.307,00 atau 102,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp18.603.307,00 atau 2,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp961.187.884,00, maka penerimaan tahun 2012 turun sebesar Rp12.584.577,00 atau 1,31%.

h. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun 2012, ditargetkan sebesar Rp1.175.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp670.555.000,00 atau 57,07% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp504.445.000,00 atau 42,93%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp604.915.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp65.640.000,00 atau 10,85%.

i. Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemda

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis barang, volume, risiko, keahlian dan waktu. Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan, investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan dan pengendalian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp585.555.000,00 atau 106,46% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp35.555.000,00 atau 6,46%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp552.765.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp32.790.000,00 atau 5,93%.

Tercapainya target karena dilakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pengujian lingkungan kerja.

j. Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara

efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp2.818.200.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.321.140.000,00 atau 46,88% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.497.060.000,00 atau 53,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.255.100.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp66.040.000,00 atau 5,26%.

Tidak tercapainya target karena adanya kendaraan yang rusak berat dan sudah diusulkan untuk didum, sehingga permohonan penyedotan dari masyarakat yang bisa diproses menjadi berkurang, selain itu pelaksanaan pemungutan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

k. Jasa Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp12.847.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp5.369.613.035,00 atau 41,80% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp7.477.386.965,00 atau sebesar 58,20%.

Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antara lain pemakaian fasilitas di terminal penumpang, pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan pemakaian pangkalan taksi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp5.141.993.204,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp227.619.831,00 atau 4,43%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut antara lain:

- 1) Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal sehingga tidak membayar retribusi.
- 2) Berkurangnya jumlah penumpang bus karena beralih ke jenis angkutan lain.
- 3) Ada beberapa terminal bus di antaranya Terminal Cililitan dan Manggarai yang tidak dipungut retribusinya disebabkan pembangunan jalur busway.
- 4) Tidak dipungutnya retribusi pemakaian fasilitas terminal mobil barang yaitu penyimpanan barang/gudang di TMB Tanah Merdeka karena terkena pembangunan stasiun pengisian BBG.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal;
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

I. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp549.000,00 atau 1,83% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp29.451.000,00 atau 98,17%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp330.500,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp218.500,00 atau 66,11%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut karena untuk izin Pas Kapal yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta adalah kapal-kapal yang berbobot kurang dari 7 GT (*GrossTonnage*), selain itu izin Pas Kapal dapat dilakukan/diproses di luar DKI Jakarta.

m. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan

Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp2.108.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.918.098.620,00 atau 138,43% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp810.098.620,00 atau 38,43%. Pelampauan target terjadi karena adanya peningkatan permintaan terhadap jasa pelayanan ini. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.846.860.283,00, maka penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp1.071.238.337,00 atau 58,00%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp313.956.221.067,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp397.563.975.933,00 atau 126,63% menjadi Rp711.520.197.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp1.676.564.690.776,00 atau 235,63%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp965.044.493.776,00 atau 135,63%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp465.143.017.624,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp1.211.421.673.152,00 atau 260,44%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
III	Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Trayek	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	208.400.000,00	9,02	93.000.000,00
2	Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian	1.500.000.000,00	200.000.000,00	354.300.000,00	177,15	520.950.000,00
3	Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan	35.000.000,00	35.000.000,00	38.000.000,00	108,57	33.700.000,00

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
4	Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkut	33.987.000,00	33.987.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan	6.000.000.000,00	5.550.000.000,00	5.658.127.000,00	101,95	4.533.556.250,00
6	Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00	7.537.000.000,00	15.505.171.656,00	205,72	19.302.435.000,00
7	Retribusi Perizinan Bidang Peternakan	0,00	0,00	178.081.472,00	~	242.885.588,00
8	Retribusi Perizinan Bidang Perikanan	40.000.000,00	40.000.000,00	78.050.000	195,13	58.075.000,00
9	Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata	0,00	2.000.000.000,00	3.174.000.000,00	158,70	3.654.000.000,00
10	Retribusi Izin Ketenagalistrikan	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	140,00	16.000.000,00
11	Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi	0,00	113.000.000,00	275.500.000,00	243,81	411.500.000,00
12	Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air B	449.000.000,00	449.000.000,00	350.200.000,00	78,00	429.900.000,00
13	Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga	0,00	0,00	0,00	~	1.145.000,00
14	Retribusi Izin Pemakaian Mesin	0,00	0,00	8.400.000,00	~	6.750.000,00
15	Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya	0,00	0,00	1.431.347,00	~	3.967.350,00
16	Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur	0,00	0,00	0,00	~	300.000,00
17	Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja	0,00	0,00	2.200.000,00	~	8.800.000,00
18	Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman	350.210.000,00	350.210.000,00	256.485.000,00	73,24	321.915.000,00
19	Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.181.751.100,00	109,09	2.039.886.600,00
20	Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	13.698.324.030,00	76,10	19.606.132.158,00
21	Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci	38.500.000.000,00	89.506.000.000,00	135.287.115.000,00	151,15	93.527.759.000,00
22	Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan	38.956.978.067,00	362.600.000.000,00	1.314.540.134.383,00	362,53	160.950.335.957,00
23	Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah	33.890.046.000,00	50.000.000.000,00	52.801.949.790,00	105,60	37.596.771.240,00
24	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	160.000.000.000,00	167.000.000.000,00	127.230.819.182,00	76,19	112.204.616.872,00
25	Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan	5.000.000.000,00	500.000.000,00	500.738.306,00	100,15	5.243.161.535,00
26	Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan	0,00	50.000.000,00	56.200.000,00	112,40	95.700.000,00
27	Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan	2.600.000.000,00	100.000.000,00	267.587.430,00	267,59	371.516.530,00
28	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair	15.000.000,00	15.000.000,00	17.100.000,00	114,00	13.600.000,00
29	Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak	6.000.000,00	0,00	0,00	~	0,00
30	Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	925.680.080,00	92,57	1.289.889.928,00
31	Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung	120.000.000,00	120.000.000,00	73.075.000,00	60,90	72.300.000,00
32	Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan	2.550.000.000,00	2.000.000.000,00	2.882.870.000,00	144,14	2.492.468.616,00
33	Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Beracun (B3)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	313.956.221.067,00	711.520.197.000,00	1.676.564.690.776,00	235,63	465.143.017.624,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan

jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp2.310.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp208.400.000,00 atau 9,02%, dengan demikian tidak mencapai target sebesar Rp2.101.600.000,00 atau 90,98%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp93.000.000,00, terlihat mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar Rp115.400.000,00 atau 124,09%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut disebabkan di antaranya karena:

- 1) Adanya trayek bus besar dengan pelayanan bus non ekonomi yang berhimpitan dengan busway yang dicabut trayeknya.
- 2) Kecilnya realisasi angkutan umum yang beroperasi dengan izin.

b. Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan.

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 turun sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 86,67% menjadi Rp200.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp354.300.000,00 atau 177,15%, dengan demikian melampaui target sebesar Rp154.300.000,00 atau 77,15%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp520.950.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp166.650.000,00 atau 31,99%.

c. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran, dan jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp35.000.000,00 sama

dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp38.000.000,00 atau 108,57%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp3.000.000,00 atau 8,57%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp33.700.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar Rp4.300.000,00 atau 12,76%.

Meskipun dapat mencapai target, retribusi mengalami hambatan di antaranya karena berkembangnya perokonomian pelayanan jasa khususnya untuk pengiriman domestic, selain itu perusahaan yang sudah ada telah mencapai titik jenuh karena permintaan masyarakat untuk pelayanan ini sangat minim.

d. Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran, dan jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyebrangan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp33.987.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012. Tidak ada realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.

Tidak ada realisasi dari retribusi tersebut karena berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2007, semua rekomendasi yang dikeluarkan yang berdasarkan Peta Arahan Menara Telekomunikasi harus memenuhi kriteria Ingrid untuk mengurangi/membatasi jumlah menara di wilayah Jakarta maka pengeluaran Rekomendasi berlaku secara surut otomatis jumlah rekomendasi akan berkurang.

e. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Satpol PP.

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran turun sebesar Rp450.000.000,00 atau 7,50% menjadi Rp5.550.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.658.127.000,00 atau 101,95%, dengan demikian melampaui target sebesar Rp108.127.000,00 atau 1,95%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp4.533.556.250,00, terlihat mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar Rp1.124.570.750,00 atau 24,81%.

f. Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan yang diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jangka waktu dengan memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00 setelah perubahan anggaran naik sebesar Rp6.937.000.000,00 atau 1.156,17% menjadi Rp7.537.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp15.505.171.656,00 atau 205,72%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp7.968.171.656,00 atau 105,72%. Penerimaan retribusi ini utamanya diperoleh dari surat tanda daftar rekanan dan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp19.302.435.000,00, terlihat mengalami

penurunan di tahun 2012 sebesar Rp3.797.263.344,00 atau 19,67%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, antara lain:

- 1) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- 2) Mengajukan pengadaan mobil tangga;
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja terkait;
- 5) Melakukan pelayanan *One Day Service* di Mal dan Gedung Perkantoran.

g. Retribusi Perizinan Bidang Peternakan

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan merupakan retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi, volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak dan daging, izin perusahaan daging, izin usaha pemotongan ternak, izin usaha pengangkutan/kendaraan daging, izin/rekomendasi unggas, izin/usaha persusuan, dan izin/rekomendasi berdagang dan berusaha hewan kesayangan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp178.081.472,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang Peternakan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp242.885.588,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp64.804.116,00 atau 26,68%.

h. Retribusi Perizinan Bidang Perikanan

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan merupakan retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi, volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain perizinan usaha bidang perikanan bidang penangkapan ikan, pemberian tanda daftar usaha perikanan, pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan, rekomendasi pemasukan ikan/pakan/obat-obatan ikan, dan pemberian surat penangkapan ikan dengan alat. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp40.000.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp78.050.000,00 atau 195,13%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp38.050.000,00 atau 95,13%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp58.075.000,00, terlihat mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar Rp19.975.000,00 atau 34,40%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut antara lain:

- 1) Terdapat beberapa perusahaan ekspor/impor ikan hias yang beralih fungsi ke usaha lain.
- 2) Adanya Peraturan Kementerian KPP Nomor 17/2011 yang mengatur bahwa rekomendasi impor harus melalui dinas yang ditunjuk.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut di antaranya dengan melakukan alih fungsi lokasi pemasaran ikan hias.

i. Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata merupakan retribusi atas pelayanan kepariwisataan yang diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata serta jangka waktu. Izin yang diberikan antara lain izin usaha akomodasi, izin usaha penyediaan makanan dan minuman, izin usaha jasa pariwisata, izin usaha rekreasi dan hiburan, dan izin usaha kawasan pariwisata. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata Tahun Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan anggaran tahun 2012 menjadi Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.174.000.000,00 atau 158,70%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp1.174.000.000,00 atau 58,70%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp3.654.000.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp480.000.000,00 atau 13,14%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut di antaranya dengan melakukan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap industri pariwisata, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap industri wisata.

j. Retribusi Izin Ketenagalistrikan

Retribusi Izin Ketenagalistrikan merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan yang diukur berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, risiko, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain Izin usaha penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasional penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin operasional penyediaan tenaga listrik, tanda daftar penyediaan tenaga listrik, perpanjangan tanda daftar penyediaan tenaga listrik, izin usaha penunjang tenaga listrik, perpanjangan izin usaha penunjang tenaga listrik, dan pengesahan penanggung jawab teknik. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Izin Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan anggaran tahun 2012 menjadi Rp5.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.000.000,00 atau 140,00%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp2.000.000,00 atau 40,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Ketenagalistrikan

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp16.000.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp9.000.000,00 atau 56,25%.

k. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan yang diukur berdasarkan volume, risiko, dan waktu dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya analisa laboratorium, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data, biaya koordinasi, biaya konservasi dan penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan anggaran tahun 2012 menjadi Rp113.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp275.500.000,00 atau 243,81%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp162.500.000,00 atau 143,81%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp411.500.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar Rp136.000.000,00 atau 33,05%.

Hambatan dalam pencapaian terget retribusi tersebut di antaranya disebabkan pelayanan

perizinan sesuai dengan permohonan yang diajukan pihak ketiga.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target retribusi tersebut adalah dengan melakukan monitoring masa berlaku izin pengusahaan minyak dan gas bumi.

I. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan retribusi pelayanan pertambangan yang diukur berdasarkan kedalaman pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah, volume, risiko dan waktu dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan, biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp449.000.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp350.200.000,00 atau 78,00%, atau tidak mencapai target sebesar Rp98.800.000,00 atau 22,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran

2011 yang tercatat sebesar Rp429.900.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp79.700.000,00 atau 18,54%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut antara lain:

- 1) Adanya pembatasan pemberian izin pemboran air tanah, berkaitan dengan upaya perlindungan dan pelestarian air tanah sesuai dengan pola konservasi air tanah.
- 2) Adanya kebijakan untuk tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada perusahaan yang sudah berada dalam jangkauan PAM (sesuai dengan program *Zero Well*).
- 3) Hanya ada 1 (satu) penambahan perusahaan pemboran air bawah tanah selama tahun 2012.
- 4) Tidak ada penambahan maupun perpanjangan izin juru bor.

m. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga merupakan retribusi pelayanan keolahragaan yang diukur berdasarkan waktu, luas areal, lokasi, gangguan dan jenis usahadengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda.

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tidak ada realisasi.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.145.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp1.145.000,00 atau 100,00%.

n. Retribusi Izin Pemakaian Mesin

Retribusi Izin Pemakaian Mesin merupakan retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu dengan memperhatikan biaya penelitian gambar, perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-alat pengaman serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Retribusi Izin Pemakaian Mesin tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.400.000,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Mesin Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp6.750.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp1.650.000,00 atau 24,44%.

o. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya merupakan retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan jumlah dan risiko dengan memperhatikan biaya penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan

cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya tidak ditargetkan untuk Tahun Anggaran 2012. Namun, mencatat pendapatan atas retribusi sebesar Rp1.431.347,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp3.967.350,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp2.536.003,00 atau 63,92%

p. Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja merupakan retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.200.000,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp8.800.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp6.600.000,00 atau 75,00%.

q. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman merupakan retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan tersebut dengan memperhatikan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, serta biaya cetak formulir. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp350.210.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp256.485.000,00 atau 73,24%, atau tidak mencapai target sebesar Rp93.725.000,00 atau 26,76%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp321.915.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar Rp65.430.000,00 atau 20,33%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut antara lain:

- 1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah memfasilitasi dengan kegiatan plaketisasi
- 2) Kurangnya permintaan masyarakat untuk mengangkut jenazah ke luar wilayah maupun luar negeri.
- 3) Kurangnya permintaan masyarakat untuk mengabu jenazah.

r. Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan diperpetakan dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp2.181.751.100,00 atau 109,09%, atau melampaui target sebesar Rp181.751.100,00 atau 9,09%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp2.039.886.600,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp141.864.500,00 atau 6,95%.

s. Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana tata letak bangunan, biaya penataan diperpetakan, biaya konsultasi, biaya perencanaan Intensitas

ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp18.000.000.000,00 sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp13.698.324.030,00 atau 76,10%, atau tidak mencapai target sebesar Rp4.301.675.970,00 atau 23,90%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp19.606.132.158,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp5.907.808.128,00 atau 30,13%.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait;
- 4) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan.

t. Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur berdasarkan nilai manfaat dan zona dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan

tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp38.500.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp51.006.000.000,00 atau 132,48% menjadi Rp89.506.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp135.287.115.000,00 atau 151,15%, dengan demikian melampaui target sebesar Rp45.781.115.000,00 atau 51,15%. Penerimaan tersebut utamanya di peroleh dari Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp93.527.759.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp41.759.356.000,00 atau 44,65%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target realisasi penerimaan retribusi ini antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan;
- 4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja terkait.

u. Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan intensitas ruang dan zona dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan intensitas ruang dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp38.956.978.067,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp323.643.021.933,00 atau 830,77% menjadi Rp362.600.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.314.540.134.383,00 atau 362,53%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp951.940.134.383,00 atau 262,53%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp160.950.335.957,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar Rp1.153.589.798.426,00 atau 716,74%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi tersebut diantaranya:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib retribusi;
- 2) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait maupun wajib retribusi.

Faktor-faktor yang mendukung pelampauan target penerimaan retribusi perizinan persetujuan prinsip penyesuaian koefisien lantai bangunan diantaranya:

- 1) Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan di lokasi-lokasi TOD (Transit Oriented Development) sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota Koridor MRT Jakarta Tahap I (Satu).
- 2) Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan di lokasi-lokasi pembangunan kawasan superblok.

v. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan ruang, biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar Rp33.890.046.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp16.109.954.000,00 atau 47,54% menjadi Rp50.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp52.801.949.790,00 atau 105,60%, dengan demikian realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp2.801.949.790,00 atau 5,60%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp37.596.771.240,00, realisasi retribusi ini di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp15.205.178.550,00 atau 40,44%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib retribusi yang menunggak;
- 3) Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya;
- 4) Peningkatan Koordinasi dengan unit Satuan Kerja terkait.

w. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 4,38% menjadi Rp167.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp127.230.819.182,00 atau 76,19%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp39.769.180.818,00 atau 23,81%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp112.204.616.872,00, retribusi ini di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp15.026.202.310,00 atau 13,39%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di antaranya dengan:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang persyaratan permohonan IMB;

- 4) Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah kotamadya dan menindak tegas pemilik bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.
- 5) Meningkatkan pengawasan di lapangan dan melakukan pemeriksaan berkala untuk pelaksanaan pembangunan.
- 6) Melakukan pelayanan prima, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan taat pada ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pembangunan.

x. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 turun sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 90,00% menjadi Rp500.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp500.738.306,00 atau 100,15%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp738.306,00 atau 0,15%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp5.243.161.535,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp4.742.423.229,00 atau 90,45%.

Terlampauinya target retribusi ini disebabkan banyaknya permohonan KMB atas bangunan yang telah berdiri dan adanya sosialisasi petugas kepada masyarakat dengan keinginan sendiri mengajukan KMB. Namun, sesuai dengan peraturan terbaru tentang Sertifikat Layak Fungsi (SLF), tentunya retribusi kelayakan menggunakan bangunan untuk berikutnya sudah tidak ditargetkan lagi karena untuk proses SLF adalah nihil.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian target retribusi ini antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada Wajib Retribusi;
- 3) Peningkatan penyuluhan kepada petugas pemungut dan Wajib Retribusi;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan Kerja terkait.

y. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan klasifikasi dan penggolongan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan Tahun Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan anggaran tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp56.200.000,00 atau 112,40%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp6.200.000,00 atau 12,40%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp95.700.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp39.500.000,00 atau 41,27%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target retribusi tersebut di antaranya dengan memberikan sosialisasi kepada Asosiasi profesi dan pelaku teknis di bidang pembangunan tentang pentingnya Izin Pelaku Teknis Bangunan.

z. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi serta biaya pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan Tahun Anggaran 2012 semula sebesar Rp2.600.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 96,15% menjadi sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp267.587.430,00 atau 267,59%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp167.587.430,00 atau 167,59%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp371.516.530,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp103.929.100,00 atau 27,97%.

Untuk Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan berupa balik nama, pemecahan dan salinan seyogyanya tidak ditargetkan karena pelayanan perizinan ini sangat tergantung pada kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga agak sulit untuk pencapaiannya.

aa. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan retribusi atas pelayanan pengelolaan lingkungan hidup yang diukur berdasarkan volume, waktu, jenis usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengelolaan retribusi ini

dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp15.000.000,00, sama dengan anggaran perubahan.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp17.100.000,00 atau 114,00%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.100.000,00 atau 14,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp13.600.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000,00 atau 25,74%.

bb. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas merupakan retribusi atas pelayanan penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas yang diukur berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00, sama dengan anggaran perubahan.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp925.680.080,00 atau 92,57%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp74.319.920,00 atau 7,43%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.289.889.928,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp364.209.848,00 atau 28,24%.

cc. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung merupakan retribusi atas pelayanan pertamanan yang diukur berdasarkan diameter dan jumlah pohon dengan memperhatikan biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp120.000.000,00, sama dengan anggaran perubahan.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp73.075.000,00 atau 60,90%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp46.925.000,00 atau 39,10%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp72.300.000,00, terlihat penerimaan

retribusi ini di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp775.000,00 atau 1,07%.

Saat ini berkurang permintaan masyarakat untuk mengajukan izin penebangan pohon pelindung karena telah tumbuhnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pohon, sehingga berusaha ikut melestarikan lingkungan dengan seminimal mungkin melakukan penebangan pohon.

dd. Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota merupakan retribusi atas pelayanan pertanahan dan pemetaan yang diukur berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan jangka waktu dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012 dan tidak ada realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.

ee. Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan yang diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta

aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.550.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp550.000.000,00 atau 21,57% menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.882.870.000,00 atau 144,14%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp882.870.000,00 atau 44,14%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp2.492.468.616,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp390.401.384,00 atau 15,66%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012, semula ditetapkan sebesar Rp360.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar Rp360.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp351.823.210.568,54 atau 97,73%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp8.176.789.431,46 atau 2,27%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp278.789.767.934,40, terlihat pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp73.033.442.634,14 atau 26,20%.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6(5:4)	7
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	47.915.000.000,00	49.290.377.021,00	49.290.377.023,00	100,00	43.023.548.697,40
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	303.092.838.000,00	299.099.414.906,00	299.051.542.932,54	99,98	232.446.306.834,00
3	Badan Pengelola	3.433.662.000,00	433.662.000,00	110.000.000,00	25,37	381.922.000,00
4	Royalty	166.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Sewa Aset Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	85.500.000,00	8,14	81.000.000,00
6	Hasil Kerja sama Aset Daerah	4.342.000.000,00	10.126.546.073,00	3.285.790.613,00	32,45	2.856.990.403,00
Jumlah		360.000.000.000,00	360.000.000.000,00	351.823.210.568,54	97,73	278.789.767.934,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp47.915.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp1.375.377.021,00 atau 2,87% menjadi Rp49.290.377.021,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp49.290.377.023,00 atau 100,00%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp43.023.548.697,40 maka terlihat

pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp6.266.828.325,60 atau 14,57%.

Pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2012 target pendapatan dari PD Dharma Jaya yang semula senilai Rp385.000.000,00 menjadi Rp0,00 karena mengalami kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat digambarkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	PDAM Jaya	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00	8.600.000.000,00
2	PD Dharma Jaya	385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD Pasar Jaya	25.060.000.000,00	26.265.345.046,00	26.265.345.048,00	100,00	24.467.650.082,00
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	6.195.000.000,00	6.327.789.988,00	6.327.789.988,00	100,00	5.717.305.667,00
5	PD PAL Jaya	4.875.000.000,00	5.297.241.987,00	5.297.241.987,00	100,00	4.238.592.948,40
Jumlah		47.915.000.000,00	49.290.377.021,00	49.290.377.023,00	100,00	43.023.548.697,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp303.092.838.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 turun sebesar Rp3.993.423.094,00 atau 1,32% menjadi Rp299.099.414.906,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 Rp299.051.542.932,54 atau 99,98%, dengan demikian penyertaan modal tidak melampaui target sebesar Rp47.871.973,46 atau 0,02%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp232.446.306.834.00, terlihat pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp66.605.236.098,54 atau 28,65%.

Pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2012 target pendapatan dari PT Ratax Armada yang semula senilai Rp50.000.000,00 menjadi Rp0,00 karena mengalami kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2012 dapat di lihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	PT Pembangunan Jaya	9.600.000.000,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	100,00	8.000.000.000,00
2	PT Food Station Cipinang	3.045.200.000,00	3.624.885.131,00	3.624.885.131,00	100,00	2.647.996.087,00
3	PT JIEP	4.565.960.000,00	7.102.675.679,00	7.102.675.680,00	100,00	6.255.868.371,00
4	PT Delta Jakarta	54.204.467.830,00	46.244.154.000,00	46.244.154.000,00	100,00	44.142.147.000,00
5	PT Pembangunan Jaya Ancol	51.400.000.000,00	51.839.999.955,00	51.839.999.955,00	100,00	47.807.999.959,00
6	PT Ratax Armada	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PT Rheem Indonesia	0,00	47.871.975,00	0,00	0,00	0,00
8	PT Kawasan Berikat Nusantara	4.216.610.170,00	3.358.155.190,00	3.358.155.190,54	100,00	3.166.023.845,00
9	PT Asuransi Bangun Askrida	2.573.100.000,00	2.581.672.976,00	2.581.672.976,00	100,00	2.339.177.508,00
10	PT Jakarta Propertindo	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	14.962.094.064,00
11	PT Bank DKI	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
12	PT Jakarta Toursindo	3.437.500.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.125.000.000,00
Jumlah		303.092.838.000,00	299.099.414.906,00	299.051.542.932,54	99,98	232.446.306.834,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

3. Badan Pengelola (BP)

Badan Pengelola Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp3.433.662.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 turun sebesar

Rp3.000.000.000,00 atau 87,37% menjadi Rp433.662.000,00.

Perubahan anggaran pendapatan tersebut merupakan koreksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari target pendapatan BPLIP Pulogadung menjadi target pendapatan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung pada penetapan anggaran Tahun Anggaran 2012 yang dicatat sebagai anggaran dan realisasi pendapatan BLUD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 BPLIP Pulogadung berubah bentuk organisasi dari Badan Pengelola menjadi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung. Anggaran dan realisasi UPK PPUMKMP Pulogadung diatas sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.16.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp110.000.000,00 atau 25,37%, dengan demikian terlihat realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp323.662.000,00 atau 74,63%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp381.922.000,00, terlihat realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2012 turun sebesar Rp271.922.000,00 atau 71,20%.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Badan Pengelola Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Badan Pengelola
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	BP THR Lokasari	433.662.000,00	433.662.000,00	110.000.000,00	25,37	381.922.000,00
2	BPLIP Pulo Gadung	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.433.662.000,00	433.662.000,00	110.000.000,00	25,37	381.922.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

4. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp1.050.000.000,00, sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp85.500.000,00 atau 8,14%, dengan demikian terlihat realisasinya tidak mencapai target sebesar Rp964.500.000,00 atau 91,86%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp81.000.000,00, terlihat realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2012 naik sebesar Rp4.500.000,00 atau 5,56%.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Eks Komplek Unit Aloca	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eks Toko Tastra Jaya	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PD Undagi Klender	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
4	Tanah Kav Nomor I C2 (PT Jaya Nur Sukses)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanah Kav. Blok III A.A No 9 & 10	150.000.000,00	150.000.000,00	85.500.000,00	57,00	81.000.000,00
6	Eks Toko Pradipta	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	85.500.000,00	8,14	81.000.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penerimaan hasil sewa aset daerah merupakan realisasi penerimaan dari aset kerjasama pihak ketiga eks. Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya). Realisasi tersebut merupakan penerimaan dari PT Majuan Masitah Latif (MML) yang masih memanfaatkan aset kerjasama berupa tanah kav. Blok III AA No.9 dan 10, sedangkan untuk aset kerjasama pihak ketiga eks. BP IPM yang lainnya tidak ada realisasi penerimaannya pada TA 2012.

5. Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp4.342.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik Rp5.784.546.073,00 atau 133,22% menjadi Rp10.126.546.073,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.285.790.613,00 atau 32,45%, dengan demikian realisasi Hasil Kerja Sama Aset Daerah tidak mencapai target sebesar Rp6.840.755.460,00 atau 67,55%.

Apabila realisasi Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.856.990.403,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Aset Daerah di tahun 2012 naik sebesar Rp428.800.210,00 atau 15,01%.

Rincian penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dapat terlihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	PT Langgeng Ayom Lestari	300.000.000,00	160.000.000,00	250.000.000,00	156,25	160.000.000,00
2	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	50.000.000,00	70.600.000,00	49.873.000,00	70,64	70.600.000,00
3	PT Hotel Cikini Realty	100.000.000,00	332.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	PT Duta Pertiwi	0,00	0,00	332.000.000,00	~	275.190.000,00
5	PT Bakrie Investindo	958.000.000,00	6.685.788.626,00	150.000.000,00	2,24	120.000.000,00
6	PT Dharma Alumas Sakti	150.000.000,00	146.544.817,00	183.181.100,00	125,00	146.544.817,00
7	PT Jaya Real Propertindo	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	PT Rointa Eka Jaya	200.000.000,00	0,00	0,00	~	0,00
9	PT Perwita Margasakti	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	54.000.000,00
10	PT Wahana Cipta Sejahtera	600.000.000,00	0,00	0,00	~	0,00
11	PT AGB Tuna	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	PT Pasifik Prima Buana Mas	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	179.867.956,00
13	PT Pesona Marga Mandiri	250.000.000,00	269.500.000,00	269.500.000,00	100,00	269.500.000,00
14	Yayasan Dharma Bhakti Mahaka	600.000.000,00	70.600.000,00	0,00	0,00	0,00
15	PT Metropolitan Kencana Tbk	634.000.000,00	666.000.000,00	666.000.000,00	100,00	634.000.000,00
16	PT Gama Investa Lestari	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
17	PT Fajar Setia Mandiri	0,00	206.865.800,00	170.000.000,00	82,18	206.865.800,00
18	Yayasan Fatmos	0,00	55.000.000,00	60.500.000,00	110,00	55.000.000,00
19	Yayasan Tiara Kasih	0,00	0,00	22.500.000,00	~	22.500.000,00
20	Yayasan Tunas Muda	0,00	0,00	33.275.000,00	~	33.275.000,00
21	Yayasan Pelatihan E dan P	0,00	53.146.830,00	58.461.513,00	110,00	53.146.830,00
22	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
23	PT Grand Indonesia	0,00	166.500.000,00	216.500.000,00	130,03	166.500.000,00
24	Yayasan Bina Tugasku	0,00	150.000.000,00	600.000.000,00	400,00	150.000.000,00
25	PT Jaya Real Property	0,00	0,00	110.000.000,00	~	0,00
Jumlah		4.342.000.000,00	10.126.546.073,00	3.285.790.613,00	32,45	2.856.990.403,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp2.200.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp537.208.765.751,00 atau 24,42% menjadi Rp2.737.208.765.751,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.147.049.773.179,17 atau 78,44%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp590.158.992.571,83 atau 21,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp1.716.599.322.802,96, terlihat pendapatan di tahun 2012 naik sebesar Rp430.450.450.376,21 atau 25,08%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2012, digambarkan pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	71.050.000.000,00	113.050.000.000,00	17.949.302.317,22	15,88	7.978.292.967,00
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.085.129.350,00	100,85	8.205.774.318,00
3	Sewa	22.300.000.000,00	22.300.000.000,00	16.761.411.329,00	75,16	16.184.605.900,00
4	Hasil Lelang Titik Reklame	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	25.685.613.034,00	32,11	39.035.438.399,00
5	Klaim Asuransi Aset	0,00	0,00	0,78	~	0,00
6	Jasa Giro	270.000.000.000,00	270.000.000.000,00	202.836.932.540,92	75,12	230.378.876.863,92
7	Pendapatan Bunga	348.688.376.000,00	337.546.574.335,00	402.429.021.452,88	119,22	306.938.697.359,35
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	14.423.121.593,00	48,08	23.683.739.909,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	101.200.000.000,00	289.200.000.000,00	8.393.867.768,00	2,90	13.062.436.623,00
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	33.525.196.449,00	111,75	1.000.000.000,00
11	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjual	7.780.000.000,00	7.780.000.000,00	7.122.636.643,00	91,55	5.769.511.253,00
12	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	1.052.231.624.000,00	1.343.032.191.416,00	1.159.711.044.133,00	86,35	868.498.530.116,00
13	Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (premi)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.083.756.631,00	141,68	6.131.173.641,00
15	Sumbangan dari Perum Jasa Raharja	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	9.250.422.000,00	107,56	9.038.845.450,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6	7
16	Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca	0,00	0,00	0,00	~	1.780.000,00
17	Pemakaian rusun sederhana Marunda	250.000.000,00	250.000.000,00	536.937.000,00	214,77	780.354.000,00
18	Pemakaian rusun sederhana Kapuk	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.602.305.241,00	128,18	1.741.412.000,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup Anggaran	53.000.000.000,00	68.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Hasil Tagih Eks BPPN	0,00	0,00	14.803.376.516,00	~	4.025.767.485,00
21	Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	3.096.390.315,00	172,02	2.747.896.271,00
22	Nilai Strategis Reklame	0,00	0,00	32.389.273.291,00	~	30.474.201.942,00
23	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	41.386.197.970,37	~	29.339.482.470,60
24	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	6.926.130.308,00	~	31.104.755,00
25	Pendapatan Sanksi Pajak	101.350.000.000,00	107.150.000.000,00	112.482.457.068,00	104,98	93.018.588.563,09
26	Pendapatan Denda Retribusi	15.500.000.000,00	12.250.000.000,00	14.577.069.528,00	119,00	18.456.078.234,00
27	Pendapatan Denda Lain-Lain PAD	0,00	0,00	3.992.180.700,00	~	76.734.283,00
Jumlah		2.200.000.000.000,00	2.737.208.765.751,00	2.147.049.773.179,17	78,44	1.716.599.322.802,96

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2012, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp71.050.000.000,00, naik sebesar Rp42.000.000.000,00 atau 59,11% pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp113.050.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp17.949.302.317,22 atau 15,88%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak dapat melampaui target sebesar Rp95.100.697.682,78 atau 84,12%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp7.978.292.967,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2012 naik cukup signifikan sebesar Rp9.971.009.350,22 atau 124,98%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2012 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;
- c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada tabel 5.15.

Tabel 5.15
Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000.000,00	75.000.000.000,00	11.914.359.150,00	15,89	3.425.839.360,00
2	Penjualan Brandgang	8.000.000.000,00	25.000.000.000,00	596.400.000,00	2,39	0,00
3	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	48.520.000,00	4,04	96.050.000,00
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	300.000.000,00	300.000.000,00	577.685.000,00	192,56	218.450.000,00
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.879.288.189,22	57,59	2.544.090.000,00
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	28.278.554,00	2,83	49.764.157,00
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.882.871.424,00	37,66	1.609.099.450,00
8	Penjualan Drum Bekas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Penjualan Lampu Hias Bekas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai	10.000.000,00	10.000.000,00	7.600.000,00	76,00	0,00
13	Penjualan Hasil Sitaan	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Jumlah		71.050.000.000,00	113.050.000.000,00	17.949.302.317,22	15,88	7.978.292.967,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp10.000.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL mencapai Rp10.085.129.350,00 atau 100,85%. Realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar Rp85.129.350,00 atau 0,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp8.205.774.318,00, penerimaan di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp1.879.355.032,00 atau 22,90%.

Penerimaan Retribusi atas Rekomendasi HGB/HPL ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Sewa

Sewa Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp22.300.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar Rp22.300.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp16.761.411.329,00 atau 75,16%, realisasi penerimaan sewa tidak mencapai target sebesar Rp5.538.588.671,00 atau 24,84%.

Realisasi penerimaan sewa ini diperoleh dari:

- a. Hasil Sewa atas Tanah sebesar Rp8.358.631.287,00;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp8.352.780.042,00;
- c. Hasil Sewa Gudang sebesar Rp50.000.000,00.

Apabila realisasi sewa tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2011 sebesar Rp16.184.605.900,00, realisasi di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp576.805.429,00 atau 3,56%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00, sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp25.685.613.034,00 atau 32,11%, dengan demikian realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target sebesar Rp54.314.386.966,00 atau 67,89%.

Realisasi penerimaan ini diperoleh dari:

- a. Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp24.844.160.138,00.
- b. Hasil Lelang Titik Reklame atas Non Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp841.452.896,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp39.035.438.399,00, maka realisasi di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp13.349.825.365,00 atau 34,20%.

5. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar Rp270.000.000.000,00, sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp202.836.932.540,92 atau 75,12%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp67.163.067.459,08 atau 24,88%.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp230.378.876.863,92 terlihat realisasi di tahun 2012 terjadi penurunan sebesar Rp27.541.944.323,00 atau 11,96%.

Pencapaian realisasi penerimaan Jasa Giro tersebut disebabkan oleh besarnya saldo kas yang ada di Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dicatat sebagai SILPA tahun berjalan. Jasa Giro ini sangat bergantung kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan dan tersimpan di rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

6. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan Rp348.688.376.000,00 turun sebesar Rp11.141.801.665,00 atau 3,20% menjadi Rp337.546.574.335,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp402.429.021.452,88 atau 119,22%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melampaui target sebesar Rp64.882.447.117,88 atau 19,22%.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga tahun 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp306.938.697.359,35 terlihat realisasi di tahun

2012 terjadi kenaikan sebesar Rp95.490.324.093,53 atau 31,11%.

Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp353.367.121.240,00 dan penerimaan bunga deposito dana cadangan Rp49.061.900.213,00.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp49.061.900.213,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00, sama dengan target yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp14.423.121.593,00 atau 48,08%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp15.576.878.407,00 atau 51,92%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Kerugian Uang Daerah sebesar Rp5.932.907.247,00;
- b. Kerugian Barang Daerah sebesar Rp60.197.400,00;
- c. Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp8.430.016.946,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp2.070.723.855,00;
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Depdagri sebesar Rp10.255.925,00;
 - 3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp6.349.037.166,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp23.683.739.909,00 maka di Tahun 2012 terjadi penurunan sebesar Rp9.260.618.316,00 atau 39,10%.

8. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan Rp20.000.000.000,00 naik sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 50,00% menjadi Rp30.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp33.525.196.449,00 atau 111,75%, dengan demikian realisasi pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mencapai target sebesar Rp3.525.196.449,00 atau 11,75%.

Apabila realisasi pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp1.000.000.000,00 maka di Tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp32.525.196.449,00 atau 3.252,52%.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum merupakan pendapatan yang berasal dari pengembang pemilik SIPPT yang memiliki kewajiban menyerahkan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 pasal 13 ayat 3 bahwa kewajiban pengembang dapat dikompensasikan/dikonversi dalam bentuk dana. Perhitungan besaran nilai konversi kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1934 tahun 2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban Penyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang SIPPT.

Rincian penerimaan fasilitas sosial fasilitas umum pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengembang	Tanggal SIPPT	No. SIPPT	Nilai Penyetoran
1	PT Lahan Adya Bumi	30/10/2009	2142/-1.711.534	6.987.508.800
2	PT Chitateg Peni	23/04/2010	704/-1.711.534	2.598.183.000
3	PT Cakrawala Respati	17/09/2010	2122/-1.711.534	3.831.733.620
4	PT Indonesia Steel Tube Works	21/12/2010	3057/-1.711.534	777.584.640
5	KSO PT Alam Jaya Perkasa & PT Pelaksana Jaya Mulia	14/06/2011	112/-1.711.534	3.551.333.730
6	PT Palem Era Mandiri	16/02/2011	127/-1.711.534	401.098.080
7	PT Wika Realty	07/05/2007	865/-1.711.534	1.475.712.413
8	PT Rointa Eka Jaya	09/07/2009	1264/-1.711.534	2.286.096.000
9	Peter Sondakh & Ny. Evy Wijayanti M. Sondakh	12/09/2008	1927/-1.711.534	2.515.704.960
10	PT UNINDRA	04/06/2010	1280/-1.711.533	275.000.000
11	PT ARTA BOGA CEMERLANG	24/04/2010	783/-1.711.534	2.392.599.840
12	RACHMAN ISMAIL	15/06/2012	1359/-1.711.533	266.252.010
13	PT KARYADEKA GRAHA LESTARI	22/02/2010	1438/-1.711.533	1.833.023.338
14	PT MAHKOTA KEMAYORAN REALTY	19/03/2009	418/-1.711.534	2.241.707.640
15	UNINDRA	04/06/2010	1106/-1.711.534	179.736.430
16	PT GUDANG GARAM	18/10/2010	2332/-1.711.534	1.529.957.700
17	PT Wika Realty	07/05/201	863/-1,711,531	381.964.248
	JUMLAH			33.525.196.449,00

9. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp1.052.231.624.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target BLUD naik sebesar Rp290.800.567.416,00 atau 27,64% menjadi Rp1.343.032.191.416,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.159.711.044.133,00 atau 86,35%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2012 tidak mencapai target sebesar Rp183.321.147.283,00 atau 13,65%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp868.498.530.116,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp291.212.514.017,00 atau 33,53%.

Sumber realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, sebagaimana pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pendapatan dari BLUD Kesehatan Masyarakat	86.350.770.000,00	91.011.410.751,00	104.720.470.188,00	115,06	77.188.854.878,00
2	Pendapatan dari BLUD RSUD	472.291.000.000,00	529.682.801.665,00	510.368.858.616,00	96,35	435.865.610.116,00
3	Pendapatan dari BLUD Perhubungan	442.000.000.000,00	666.048.125.000,00	508.415.680.814,00	76,33	321.698.540.517,00
4	Pendapatan dari BLUD Olahraga dan Pemuda	2.858.862.000,00	2.858.862.000,00	1.716.592.630,00	60,04	2.534.898.342,00
5	Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi	22.500.000.000,00	26.000.000.000,00	22.993.168.551,00	88,44	18.661.770.770,00
6	Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan	1.740.500.000,00	1.740.500.000,00	1.444.043.679,00	82,97	1.044.277.937,00
7	Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat	15.990.492.000,00	16.690.492.000,00	1.039.375.122,00	6,23	0,00
8	Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	2.641.220.512,00	29,35	6.389.630.617,00
9	Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dan Simpan Pinjam	0,00	0,00	6.371.634.021,00	~	5.114.946.939,00
Jumlah		1.052.231.624.000,00	1.343.032.191.416,00	1.159.711.044.133,00	86,35	868.498.530.116,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Salah satu realisasi penerimaan BLUD merupakan realisasi pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp1.039.375.122,00 yang berasal dari BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung.

Pendapatan ini belum termasuk belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP Pulo Gadung yang belum di-SP2D nihilkan pada tahun 2010 dan 2011 serta periode masa peralihan, tanggal 1 Januari 2012 sampai 31

Maret 2012, dan periode 1 April sampai 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2010	Rp 7.279.997.651,00
b. Tahun 2011	Rp 5.043.896.285,00
c. Januari – Maret 2012	Rp 4.557.849.577,00
d. April – Desember 2012	<u>Rp 77.251.600,00</u>
Total	Rp 16.958.995.113,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 91 Tahun 2009, tanggal 3 Juni 2009 dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung. Peraturan Gubernur tersebut juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Surat Keputusan Gubernur Nomor 1058 Tahun 1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPLIP Pulo Gadung.

Pada 11 Juni 2009 UPK PPUMKMP Pulo Gadung ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPK PPUMKMP Pulo Gadung. Dengan demikian maka status BPLIP berubah dari Badan Pengelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

10. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp41.386.197.970,37. Penerimaan ini merupakan penampungan dari penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32

Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan lain-lain tersebut di antaranya sebesar Rp4.171.201.801,00 berasal dari pengembalian LS tahun sebelumnya dan pendapatan lain-lain sebesar Rp37.187.156.654,00 merupakan penerimaan kas yang belum bisa diatribusikan ke akun pendapatan dan belanja terkait.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp10.424.607.685.360,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 targetnya naik sebesar Rp1.168.834.234.640,00 atau 11,21% menjadi Rp11.593.441.920.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp13.334.647.270.804,00 atau 115,02%, dengan

demikian di tahun 2012 realisasi Pendapatan Transfer dapat melampaui target sebesar Rp1.741.205.350.804,00 atau 15,02%.

Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp10.462.963.410.649,00 realisasi Pendapatan Transfer tahun 2012 naik sebesar Rp2.871.683.860.155,00 atau 27,45%.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 disajikan pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2012

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	9.111.459.442.000,00	9.776.877.857.000,00	11.554.964.807.804,00	118,19	9.149.708.963.289,00
1.1	Bagi Hasil Pajak	8.750.000.000.000,00	9.350.000.000.000,00	10.984.787.699.665,00	117,48	8.747.636.169.886,00
a	Pajak Bumi dan Bangunan	2.550.000.000.000,00	2.750.000.000.000,00	2.784.405.876.435,00	101,25	2.705.955.836.226,00
b	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	2.407.346.155,00	~	0,00
c	Pajak Penghasilan	6.200.000.000.000,00	6.600.000.000.000,00	8.197.974.477.075,00	124,21	6.041.680.333.660,00
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	151.550.000.000,00	151.550.000.000,00	294.849.251.139,00	194,56	192.163.351.403,00
a	Pungutan Hasil Perikanan	1.448.692.228,00	1.448.692.228,00	2.063.918.153,00	142,47	1.566.290.097,00
b	Pertambangan Minyak Bumi	138.092.862.772,00	138.092.862.772,00	230.446.419.607,00	166,88	166.416.356.633,00
c	Pertambangan Gas Bumi	10.458.445.000,00	10.458.445.000,00	62.338.913.379,00	596,06	22.460.032.198,00
d	Cukai Hasil Tembakau	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	~	1.720.672.475,00
1.3	Dana Alokasi Umum	209.909.442.000,00	275.327.857.000,00	275.327.857.000,00	100,00	209.909.442.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.313.148.243.360,00	1.816.564.063.000,00	1.779.682.463.000,00	97,97	1.313.254.447.360,00
2.1	Dana Penyesuaian	1.313.148.243.360,00	1.816.564.063.000,00	1.779.682.463.000,00	97,97	1.313.254.447.360,00
Jumlah		10.424.607.685.360,00	11.593.441.920.000,00	13.334.647.270.804,00	115,02	10.462.963.410.649,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp8.750.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Bagi Hasil Pajak naik sebesar Rp600.000.000.000,00 atau 6,86% menjadi sebesar Rp9.350.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp10.984.787.699.665,00 atau 117,48%, dengan demikian tahun 2012 penerimaan Bagi Hasil Pajak melampaui target sebesar Rp1.634.787.699.665,00 atau 17,48%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2011 yang tercatat Rp8.747.636.169.886,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2012 naik sebesar Rp2.237.151.529.779,00 atau 25,57%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak

Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012, ditetapkan pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.023.104.123.154,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.550.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik sebesar Rp200.000.000.000,00 atau 7,84% menjadi sebesar Rp 2.750.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp2.784.405.876.435,00 atau 101,25%, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan melampaui target sebesar Rp34.405.876.435,00 atau 1,25%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan atas alokasi kurang bayar dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.158.557.950,00 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp2.705.955.836.226,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2012 naik sebesar Rp78.450.040.209,00 atau 2,90%.

Upaya intensif yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PBB antara lain:

- 1) Pemberitahuan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui pemasangan spanduk-spanduk dan leaflet Pajak Bumi dan Bangunan di setiap kantor pelayanan pajak dan kelurahan, kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Melaksanakan kegiatan Penyesuaian harga pasaran tanah di Provinsi DKI Jakarta melalui NJOP bersama Biro Tata Pemerintahan, untuk usulan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
- 3) Pelaksanaan penilaian terhadap objek PBB tertentu secara individual.
- 4) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dengan instansi terkait.
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat seperti Kanwil Direktorat Jenderal Pajak maupun Kota

Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

- 6) Melaksanakan Rekonsiliasi bersama Kanwil DJP, Kanwil Perbendaharaan serta Bank Operasional III (BO-III) setiap bulan, dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi.
- 7) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparat dan masyarakat wajib pajak.
- 8) Pemutakhiran data objek dan subjek PBB bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak.
- 9) Pelaksanaan Pekan Panutan Pembayaran PBB di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu guna percepatan penerimaan pembayaran PBB terutama bagi wajib pajak PBB potensial.
- 10) Pelaksanaan penagihan yang intensif, melalui kegiatan pencairan tunggakan PBB, kegiatan jemput bola dan operasi sisir.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pada tahun 2012 terdapat realisasi Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.407.346.155,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kekurangan transfer pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010, ditetapkan pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi bagi hasil dari Pemerintah Pusat dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp6.036.355.912.176,00.

Penerimaan PPh Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp6.200.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target penerimaan PPh naik sebesar

Rp400.000.000.000,00 atau 6,45% menjadi sebesar Rp6.600.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp8.197.974.477.075,00 atau 124,21%. Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2012 melampaui target sebesar Rp1.597.974.477.075,00 atau 24,21%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp681.634.436.838,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PML.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp6.041.680.333.660,00, realisasi PPh tahun 2012 naik sebesar Rp2.156.294.143.415,00 atau 35,69%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.
- 3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2012 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.07/2012 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, ditetapkan pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi bagi hasil dari Pemerintah Pusat dari Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar Rp155.542.013.320,00.

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp151.550.000.000,00, sama dengan target

yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai Rp294.849.251.139,00 atau 194,56%. Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) melampaui target sebesar Rp143.299.251.139,00 atau 94,56%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp.24.773.687.094,00 dan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp78.185.270,00.

Alokasi kurang bayar tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Realisasi penerimaan bagian daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA per 31 Desember 2012 bersumber dari:

- a. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp2.063.918.153,00;
- b. Pendapatan SDA Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp230.446.419.607,00;
- c. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp62.338.913.379,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp192.163.351.403,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2012 naik sebesar Rp102.685.899.736,00 atau 53,44%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima.
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi lifting migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.

- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan lifting produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah.
- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum semula ditargetkan sebesar Rp209.909.442.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target penerimaan Dana Alokasi Umum naik sebesar Rp65.418.415.000,00 atau 31,17% menjadi sebesar Rp275.327.857.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp275.327.857.000,00 atau 100,00%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp209.909.442.000,00, realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2012 naik sebesar Rp65.418.415.000,00 atau 31,17%.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula

dianggarkan sebesar Rp1.313.148.243.360,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 target penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik sebesar Rp503.415.819.640,00 atau 38,34% menjadi sebesar Rp1.816.564.063.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp1.779.682.463.000,00 atau 97,97%.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus per 31 Desember 2012 bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi sebesar Rp25.608.000.000,00;
2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi sebesar Rp1.026.844.433.000,00; dan
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp727.230.030.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah yang berasal dari pemerintah pusat dan badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2012 ditargetkan sebesar Rp1.533.136.668.266,00, sama dengan target yang telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi pendapatan hibah sampai dengan akhir 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp3.731.333.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah dari tim sukses pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebesar Rp253.500.000,00.
2. Hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan PT Mass Rapid Transit sebesar Rp3.477.833.261,00. Hibah tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008. Loan Agreement tersebut menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan atas sejumlah dana tersebut, Pemerintah Pusat menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Penerimaan hibah dari pemerintah pusat tersebut kemudian digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit yang penggunaannya dianggarkan dan dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan hibah sebesar Rp3.731.333.261,00 belum termasuk hibah non kas berupa aset tetap sebesar Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp 13.123.217.806,00
2. Gedung dan Bangunan	<u>Rp 17.574.826.713,00</u>
Jumlah	Rp 30.698.044.519,00

Hibah non kas tersebut berupa aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.123.217.806,00 di antaranya terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.987.038.100,00 berupa peralatan laboratorium dan peralatan pelatihan

Competency Based Training yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.556.610.882.00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.489.837.024.00. Selain itu, penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.574.826.713,00 seluruhnya terdapat di Dinas Olahraga dan Pemuda berupa gedung dan bangunan atas pelaksanaan SEA Games XXXVI/2011.

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp33.827.031.650.310,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target belanja daerah naik sebesar Rp4.539.648.423.531,00 atau 13,42% menjadi sebesar Rp38.366.680.073.841,00.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%, sehingga sisa anggaran di tahun 2012 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp6.807.973.174.916,00 atau 17,74%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp26.423.599.893.297,00, terlihat terjadi peningkatan realisasi belanja di tahun 2012 sebesar Rp5.135.107.005.628,00 atau 19,34%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tergambar pada tabel 5.18.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA					
I	Belanja Operasi	22.823.266.398.893,00	25.449.961.991.740,00	22.771.853.465.799,00	89,48	19.107.266.558.546,00
1	Belanja Pegawai	11.405.938.700.027,00	11.896.841.165.160,00	11.085.950.169.778,00	93,18	9.895.560.039.177,00
2	Belanja Barang dan Jasa	10.013.188.999.450,00	11.383.664.759.250,00	9.703.452.918.759,00	85,24	8.341.831.218.443,00
3	Belanja Bunga	4.353.828.000,00	4.353.828.000,00	3.172.974.470,00	72,88	4.353.524.981,00
4	Belanja Hibah	1.367.244.871.416,00	2.089.282.239.330,00	1.933.097.203.700,00	92,52	825.595.987.217,00
5	Belanja Bantuan Sosial	31.190.000.000,00	29.470.000.000,00	15.993.940.302,00	54,27	38.587.205.558,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	1.350.000.000,00	46.350.000.000,00	30.186.258.790,00	65,13	1.338.583.170,00
II	Belanja Modal	10.944.406.163.917,00	12.819.729.251.292,00	8.784.365.760.426,00	68,52	7.316.333.334.751,00
1	Belanja Tanah	1.481.737.200.000,00	2.189.409.817.529,00	493.714.536.473,00	22,55	836.875.205.034,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.151.669.084.442,00	4.022.430.078.390,00	3.262.969.992.000,00	81,12	2.230.836.678.548,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2012			%	Realisasi 2011
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
3	Belanja Gedung dan Bangunan	3.604.999.577.515,00	3.119.395.559.863,00	2.527.761.153.328,00	81,03	2.178.504.183.603,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.182.999.235.225,00	2.815.865.912.275,00	1.961.671.907.869,00	69,66	1.661.022.855.743,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	523.001.066.735,00	672.627.883.235,00	538.248.170.756,00	80,02	409.094.411.823,00
III	Belanja Tak Terduga	59.359.087.500,00	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
1	Belanja Tak Terduga	59.359.087.500,00	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
Jumlah (I,II dan III)		33.827.031.650.310,00	38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00	82,26	26.423.599.893.297 ,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan Rp22.823.266.398.893,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 alokasinya naik sebesar Rp2.626.695.592.847,00 atau 11,51% menjadi sebesar Rp25.449.961.991.740,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp22.771.853.465.799,00 atau 89,48%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.678.108.525.941,00 atau 10,52%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp11.405.938.700.027,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, belanja ini mendapat alokasi tambahan sebesar Rp490.902.465.133,00 atau 4,30% sehingga menjadi sebesar Rp11.896.841.165.160,00.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp11.085.950.169.778,00 atau 93,18%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp810.890.995.382,00 atau 6,82%. Rincian untuk belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 5.20 (halaman 212).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp10.013.188.999.450,00. Setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini naik sebesar Rp1.370.475.759.800,00 atau 13,69% menjadi sebesar Rp11.383.664.759.250,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp9.703.452.918.759,00 atau 85,24%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.680.211.840.491,00 atau 14,76%.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebesar Rp850.684.436.197,00 di antaranya adalah belanja perawatan pasien tidak mampu sebesar Rp768.996.820.320,00 dan belanja premi asuransi kesehatan sebesar Rp81.183.308.432,00.

Realisasi belanja perawatan pasien tidak mampu dilaksanakan melalui Program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program KJS merupakan kelanjutan dari program GAKIN/SKTM yang sebelumnya sudah berjalan. Program ini merupakan salah satu program prioritas dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang

Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Seluruh peserta KJS berhak mendapatkan pelayanan gratis di Puskemas (termasuk tidak bayar retribusi Rp 2000) dan RSUD/RS kelas III yang memiliki Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Transjakarta Busway sebesar Rp739.060.040.320,00 di antaranya adalah belanja jasa operator busway sebesar Rp251.139.820.000,00 dan belanja operasional layanan umum sebesar Rp487.920.220.320,00.
- 3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kebersihan sebesar Rp616.767.896.993,00 di antaranya adalah belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp240.474.475.336,00 dan belanja jasa penanganan/penanggulangan sampah sebesar Rp332.005.344.466,00.
- 4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp518.204.403.867,00 di antaranya adalah belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp291.979.590.224,00 dan belanja pemeliharaan jaringan air sebesar Rp134.174.992.160,00.
- 5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp241.144.091.653,00 di antaranya adalah belanja rekening penerangan jalan umum sebesar Rp206.968.580.862,00 dan belanja perlengkapan penerangan jalan umum sebesar Rp9.419.828.815,00.

Dari Belanja Barang dan Jasa di atas sebesar Rp542.644.441.069,00 dikapitalisasi menjadi aset tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rincian lebih lanjut belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah	Rp 3.157.389.400,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp 26.272.414.253,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp 363.816.610.944,00
4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 98.313.001.757,00
5) Aset tetap lainnya	Rp 3.504.922.825,00
6) Konstruksi dalam pengerjaan	<u>Rp 47.580.101.890,00</u>
Jumlah	Rp 542.644.441.069,00

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp4.353.828.000,00 sama dengan anggaran yang ditetapkan pada perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.172.974.470,00 atau 72,88%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp1.180.853.530,00 atau 27,12%.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembayaran bunga atas utang pada Lembaga Keuangan Bank Dunia untuk Proyek Kebersihan.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 bahwa, bantuan hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp1.367.244.871.416,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini naik sebesar Rp722.037.367.914,00 atau 52,81% menjadi sebesar Rp2.089.282.239.330,00.

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.933.097.203.700,00 atau 92,52%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp156.185.035.630,00 atau 7,48%.

Penetapan besaran nominal belanja bantuan hibah tahun 2012 diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1350 tahun 2012 tanggal 17 September 2012 tentang Penetapan hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk uang

kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah lain dan pemerintah serta partai politik pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2012 di antaranya direalisasikan untuk:

NO	URAIAN	Anggaran TA 2012 (Rp)	Realisasi Audited TA 2012 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD/SDLB	507.609.040.000,00	480.488.530.000,00	94,66
2	Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP	256.502.590.000,00	243.592.835.000,00	94,97
3	Belanja Hibah kepada BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta	352.122.720.000,00	296.361.620.000,00	84,16
4	Belanja Hibah kepada KPUD Prov. DKI Jakarta	278.403.898.800,00	258.403.898.800,00	92,82
5	Belanja Hibah kepada KONI	184.785.830.000,00	184.785.830.000,00	100,00

Dalam rangka memenuhi Pasal 34 ayat 2 UU No.23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan pendidikan yang dibiayai dalam bentuk belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang disalurkan ke sekolah – sekolah pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

1. BOS merupakan program pemerintah pusat melalui pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Pada Tahun Anggaran 2012 alokasi belanja hibah BOS SD/SDLB sebesar Rp507.609.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp480.488.530.000,00. Biaya

satuan BOS yang diterima oleh SD/SDLB Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan alokasi per siswa/tahun sebesar Rp580.000,00.

Alokasi belanja hibah BOS SMP/SMPLB/SMPT/SATAP sebesar Rp256.502.590.000 dan terealisasi sebesar Rp243.592.835.000. Biaya satuan BOS yang diterima oleh SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan alokasi per siswa/tahun sebesar Rp710.000,00.

2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Swasta adalah untuk membebaskan seluruh siswa miskin jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk pungutan termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler. Belanja hibah BOP pada sekolah swasta Tahun Anggaran 2012 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 118 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 tentang Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012. Sasaran penerima hibah BOP Swasta adalah sekolah-sekolah swasta baik di tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) maupun pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK).

Tahun Anggaran 2012 alokasi anggaran bantuan hibah BOP swasta sebesar Rp352.122.720.000,00 dan realisasi berdasarkan SP2D sebesar Rp339.319.440.000,00. Dalam pelaksanaan terdapat pengembalian atas dana BOP swasta tersebut sebesar Rp42.957.820.000,00 dan diakui sebagai pengurang belanja hibah sehingga realisasi belanja hibah BOP adalah sebesar Rp296.361.620.000,00.

Belanja hibah BOP tersebut sampai dengan maret 2013 diketahui terdapat dana di Bank DKI atas nama rekening sekolah penerima sebanyak 113 rekening senilai Rp13.484.280.000,00 yang belum dimanfaatkan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp31.190.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini turun sebesar Rp1.720.000.000,00 atau 5,51% menjadi Rp29.470.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp15.993.940.302,00 atau 54,27%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp13.476.059.698,00 atau 45,73%.

Belanja Bantuan Sosial yang tercatat pada laporan realisasi anggaran antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian	REALISASI
1.	Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dibawah koordinator Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Pemprov DKI Jakarta	10.083.500.000,00
2.	Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan (yayasan sosial) dibawah koordinator Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov DKI Jakarta	3.280.000.000,00

3.	Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan (yayasan keagamaan) dibawah koordinator Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta	1.180.500.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp1.350.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini naik sebesar Rp45.000.000.000,00 atau 3,33% menjadi Rp46.350.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp30.186.258.790,00 atau 65,13%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp16.163.741.210,00 atau 34,87%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp45.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.900.000.000,00 atau 64,22% dengan rincian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Kabupaten Bogor Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
2. Kota Bogor Jalan Ir.H.Juanda No.10 Kota Bogor	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
3. Kota Depok Jalan Margonda Raya No.54 Kota Depok	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4. Kabupaten Tangerang Jalan H.Somawinata No.1 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang	5.000.000.000,00	0,00
5. Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman No 2 Kota Tanggeran	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
6. Kota Tangerang Selatan Jalan Siliwangi No 1 Pamulang Tanggerang Selatan	5.000.000.000,00	0,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
7. Kabupaten Bekasi Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
8. Kota Bekasi Jalan Jendral Sudirman A.Yani No. 1 Kota Bekasi	12.200.000.000,00	9.600.000.000,00
9. Kabupaten Cianjur Jalan Siti Jenab No 1 Kabupaten Cianjur	3.500.000.000,00	0,00
Jumlah	45.000.000.000,00	28.900.000.000,00

b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp1.286.258.790,00 dari anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 atau 95,28%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp10.944.406.163.917,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini naik sebesar Rp1.875.323.087.375,00 atau 17,13% menjadi sebesar Rp12.819.729.251.292,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.784.365.760.426,00 atau 68,52%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp4.035.363.490.866,00 atau 31,48%.

Dari realisasi Belanja Modal tersebut terdapat belanja sebesar Rp99.224.776.019,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp1.481.737.200.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 belanja ini mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp707.672.617.529,00 atau 47,76% menjadi sebesar Rp2.189.409.817.529,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp493.714.536.473,00 atau 22,55% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.695.695.281.056,00 atau 77,45%.

Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat pada 3 SKPD, yaitu:

1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp652.817.959.400,00. Realisasinya adalah sebesar Rp126.897.538.694,00 atau 19,44% di antaranya terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman dalam rangka memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta melakukan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui pengadaan tanah sarana umum taman.

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp126.892.538.694,00 yang terbagi atas:

(1)	Wilayah Jakarta Pusat	Rp 2.195.947.300,00
(2)	Wilayah Jakarta Utara	Rp 21.780.996.830,00
(3)	Wilayah Jakarta Barat	Rp 58.972.652.314,00
(4)	Wilayah Jakarta Selatan	Rp 29.791.798.040,00
(5)	Wilayah Jakarta Timur	<u>Rp 14.151.144.210,00</u>
Jumlah		Rp126.892.538.694,00

Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- (1) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Kalibaru Timur VI Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.283.867.300,00 atau 98,76%.
- (2) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Mangga XIV Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp15.584.839.430,00 atau 97,41%.
- (3) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Samping Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp32.038.500.000,00 dan terealisasi senilai Rp30.199.643.000,00 atau 94,26%.
- (4) Pembebasan lahan untuk Taman Interaktif Kp. Joglo Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp1.900.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.726.749.727,00 atau 90,88%.
- (5) Pembebasan lahan untuk RTH di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.231.466.300,00 atau 90,39%.

- (6) Pembebasan lahan untuk RTH di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp17.500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp14.495.022.430,00 atau 82,83%.

2) Dinas Pekerjaan Umum

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp943.144.312.129,00. Realisasinya adalah sebesar Rp261.249.304.916,00 atau 27,70% yang terdiri dari:

a) Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk

Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp286.073.300.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp118.449.734.976,00 atau 41,41%

b) Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp7.150.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.736.055.000,00 atau 66,24%

c) Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air

Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar

Rp74.152.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp12.513.256.330,00 atau 16,88%

d) Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp572.769.012.129,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp125.540.838.910,00 atau 21,92%

e) Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan / Tempat Penimbunan Material Bahan Baku pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp9.419.700,00 atau 0,31%.

3) Dinas Perhubungan

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp90.000.000.000,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp50.982.827.188,00 atau 56,65%. Pengadaan tanah Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perhubungan adalah untuk:

- a) Pembayaran kekurangan atas pembebasan tanah pembangunan terminal Mass Rapid Transit (MRT) kawasan sekitar Lebak Bulus senilai Rp14.159.871.148,00.
- b) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus Pulo Gebang senilai Rp36.822.956.040,00.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp3.151.669.084.442,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini naik Rp870.760.993.948,00 atau 27,63% menjadi sebesar Rp4.022.430.078.390,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.262.969.992.000,00 atau 81,12% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp759.460.086.390,00 atau 18,88%.

Hampir seluruh SKPD menganggarkan belanja untuk peralatan dan mesin, adapun jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp72.450.548.000.00. Realisasinya adalah sebesar Rp54.991.503.194.00 atau 75,90%, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp18.281.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.246.680.000,00 atau 94,34%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp7.640.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.817.761.750,00 atau 89,23%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan *Dump Truck* pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp6.386.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.458.166.900,00 atau 85,46%.

- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp772.759.806.287.00. Realisasinya adalah sebesar Rp712.395.461.565.00 atau 92,19%. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus pada Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp203.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp188.948.550.770,00 atau 93,08%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp22.086.924.440,00 dan terealisasi sebesar Rp21.569.542.000,00 atau 97,66%.
 - c) Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp351.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp328.476.933.728,00 atau 93,48%
- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp12.473.157.500.00. Realisasinya adalah sebesar Rp11.590.700.195,00 atau 92,93%. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Belanja Modal Pengadaan Kontainer pada Dinas Kebersihan dianggarkan 5.500.000.000,00 dan terealisasi Rp5.086.617.600,00 atau 92,48%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Gerobak pada Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan

Rp1.503.930.000,00 dan terealisasi
Rp1.374.390.420,00 atau 91,39%

c) Belanja Modal Pengadaan Gerobak pada Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Rp1.181.200.000,00 dan terealisasi Rp1.118.026.300,00 atau 94,65%.

4) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp61.214.711.520,00. Realisasinya adalah sebesar Rp28.822.228.315,00 atau 47,08%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan dianggarkan Rp43.419.071.520,00 dan terealisasi Rp12.048.868.515,00 atau 27,75%.

b) Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan Rp7.992.450.000,00 dan terealisasi Rp7.566.999.500,00 atau 94,68%.

c) Belanja Modal Pengadaan Speed Boat pada Dinas Kesehatan dianggarkan Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi Rp3.767.749.000,00 atau 94,19%.

5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp2.380.953.992,00. Realisasinya adalah sebesar Rp2.221.474.300,00 atau 93,30%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet pada Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi Rp1.399.195.000,00 atau 93,28%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan Rp586.748.992,00 dan terealisasi Rp530.201.800,00 atau 90,36%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet pada Satpol PP dianggarkan Rp173.050.000,00 dan terealisasi Rp173.002.500,00 atau 99,97%.
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp80.629.710.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp73.397.754.586,00 atau 91,03%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan Rp18.386.677.000,00 dan terealisasi Rp17.536.360.250,00 atau 95,38%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan Rp15.704.619.000,00 dan terealisasi Rp14.259.219.700,00 atau 90,80%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Mesin Las pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan Rp9.763.466.000,00 dan terealisasi Rp9.235.861.537,00 atau 94,60%.
- 7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar Rp8.573.706.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp7.757.793.563,00 atau 90,48%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dianggarkan Rp2.091.260.000,00 dan terealisasi Rp1.990.517.463,00 atau 95,18%
 - b) Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan pada Dinas Kelautan dan Pertanian dianggarkan Rp2.009.904.200,00 dan terealisasi Rp1.899.806.000,00 atau 94,52%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan pada Dinas Pendidikan dianggarkan Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi Rp1.190.527.500,00 atau 91,58%.
- 8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp111.270.991.510,00. Realisasinya adalah sebesar Rp75.638.274.209,00 atau 67,98%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor pada Dinas Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran dianggarkan Rp25.210.000.000,00 dan terealisasi Rp3.590.685.000,00 atau 14,24%.
- b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi dianggarkan Rp21.100.000.000,00 dan terealisasi Rp21.046.416.735,00 atau 99,75%.
- c) Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik dianggarkan Rp14.992.470.000,00 dan terealisasi Rp10.950.099.650,00 atau Rp73,04%.

9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp541.887.541.551,00. Realisasinya adalah sebesar Rp427.079.302.359,00 atau 78,81%

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan Rp305.080.486.500,00 dan terealisasi Rp248.653.612.172,00 atau 81,50%.

b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan Rp27.889.000.000,00 dan terealisasi Rp20.015.359.936,00 atau 71,77%.

c) Belanja Modal Pengadaan Almari pada Dinas Pendidikan dianggarkan Rp16.116.100.000,00 dan terealisasi Rp13.270.683.884,00 atau 82,34%.

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp234.284.061.854,00. Realisasinya adalah sebesar Rp180.249.565.952,00 atau 76,94%

Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dianggarkan Rp22.282.365.000,00 dan terealisasi Rp19.062.270.930,00 atau 85,55%.

b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Perhubungan dianggarkan Rp20.400.680.000,00 dan terealisasi Rp19.691.708.370,00 atau 96,52%.

c) Belanja Modal Pengadaan Scanner pada Dinas Pendidikan dianggarkan Rp14.234.000.000,00 dan terealisasi Rp12.388.012.497,00 atau 87,03%.

11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan sebesar Rp591.061.315.304,00. Realisasinya adalah sebesar Rp445.548.800.409,00 atau 75,38%

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair pada Dinas Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Lemari dianggarkan Rp94.493.832.000,00 dan terealisasi Rp80.709.498.776,00 atau 85,41%.

b) Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar dianggarkan Rp87.644.650.000,00 dan terealisasi Rp72.799.732.047,00 atau 83,06%.

c) Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar dianggarkan Rp70.005.972.500,00 dan terealisasi Rp57.917.098.395,00 atau 82,73%.

12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dianggarkan sebesar Rp5.782.058.650,00. Realisasinya adalah sebesar Rp5.091.058.082,00 atau 88,05%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan Rp1.005.575.000,00 dan terealisasi Rp931.522.210 atau 92,64%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada BLUD RS Koja dianggarkan Rp506.745.000,00 dan terealisasi Rp405.492.300,00 atau 80,02%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada BLUD RS Pasar Rebo dianggarkan

Rp455.481.000,00 dan terealisasi
Rp439.950.000,00 atau 96,59%.

- 13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp8.563.800.400,00. Realisasinya adalah sebesar Rp5.931.366.920,00 atau 69,26%.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Hiasan pada Dinas Olahraga dan Pemuda dianggarkan Rp2.923.755.300,00 dan terealisasi Rp2.568.593.608,00 atau 87,85%.

- b) Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden pada Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan Rp815.000.000,00 dan terealisasi Rp753.113.200,00 atau 92,41%.

- c) Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden pada Dinas Olahraga dan Pemuda dianggarkan Rp438.494.500,00 dan terealisasi Rp375.910.620,00 atau 85,73%.

- 14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio dianggarkan sebesar Rp154.691.493.449,00. Realisasinya adalah sebesar Rp125.180.260.850,00 atau 80,92%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan CCTV pada Dinas Pendidikan dianggarkan Rp21.212.070.000,00 dan terealisasi Rp18.492.089.846,00 atau 87,18%.

- b) Belanja Modal Pengadaan Sound System pada Dinas Pendidikan dianggarkan

Rp18.685.000.000,00 dan terealisasi
Rp14.404.077.504,00 atau 77,09%.

c) Belanja Modal Pengadaan Sound System pada
Dinas Komunikasi, informatikan dan Kehumasan
dianggarkan Rp19.680.000.000,00 dan
terealisasi Rp6.805.865.000,00 atau 34,58%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
dianggarkan sebesar Rp162.032.476.462,00.
Realisasinya adalah sebesar
Rp122.884.505.152,00 atau 75,84%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi di
antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi
Informasi pada Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah dianggarkan Rp53.034.000.000,00 dan
terealisasi Rp46.866.950.550,00 atau 88,37%.

b) Balanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi
Informasi pada Dinas Pendidikan dianggarkan
Rp35.578.950.000,00 dan terealisasi
Rp34.160.880.525,00 atau 96,01%.

c) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
UHF pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan dianggarkan Rp19.680.000.000,00
dan terealisasi Rp6.805.865.000,00 atau
34,58%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
dianggarkan sebesar Rp17.424.201.500,00.
Realisasinya adalah sebesar Rp10.078.689.352,00
atau 57,84%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur di
antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat
Pengukuran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan Perdagangan

dianggarkan Rp2.946.000.000,00 dan terealisasi Rp2.897.761.900,00 atau 98,36%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat Ukut Telimetri pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dianggarkan Rp2.767.998.500,00 dan terealisasi Rp2.621.773.000,00 atau 94,72%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat GPS pada Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan Rp2.560.300.000,00 dan terealisasi Rp2.550.766.210,00 atau 99,63%

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp277.927.896.932,00. Realisasinya adalah sebesar Rp231.579.309.349,00 atau 83,32%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan dianggarkan Rp27.195.365.431,00 dan terealisasi Rp6.665.529.088,00 atau 24,51%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada BLUD RS Tarakan dianggarkan Rp23.500.000.000,00 dan terealisasi Rp23.209.803.085,00 atau 98,77%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada BLUS RS Koja dianggarkan Rp22.000.000.000,00 dan terealisasi Rp20.052.243.400,00 atau 91,15%.

18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp858.846.146.479,00. Realisasinya adalah sebesar Rp740.862.593.018,00 atau 86,26%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Dinas Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah dianggarkan Rp672.883.284.000,00 dan terealisasi Rp584.613.227.486,00 atau 86,88%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa dianggarkan Rp45.200.000.000,00 dan terealisasi Rp33.511.110.097 atau 74,14%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi dianggarkan Rp37.900.000.000,00 dan terealisasi Rp33.753.967.415,00 atau 89,06%.
- 19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp48.175.501.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.669.350.630,00 atau 3,47%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan Rp1.042.950.000,00 dan terealisasi Rp1.010.480.800,00 atau 96,89%.
 - b) Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter pada Dinas Perhubungan dianggarkan Rp147.430.000,00 dan terealisasi Rp144.062.000,00 atau 97,72%.
 - c) Belanja Modal Pengadaan Senjata Bius/Gas pada Dinas Kelautan dan Pertanian dianggarkan Rp100.000.000,00 dan terealisasi Rp93.500.000,00 atau 93,50%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat belanja sebesar Rp38.630.125.737,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin.

Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan belanja atas perolehan aset hibah Rp13.123.217.806,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.1.1.3 dan nomor 5.1.4.3.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp3.604.999.577.515,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini turun sebesar Rp485.604.017.652,00 atau 13,47% menjadi sebesar Rp3.119.395.559.863,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp2.527.761.153.328,00 atau 81,03%, dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp591.634.406.535,00 atau 18,97%.

Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut diantaranya:

1) Dinas Pendidikan

Menganggarkan sebesar Rp810.246.158.590,00 dengan realisasi sebesar Rp716.043.182.960,00 atau 88,37%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

b) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total Gedung SDN dengan anggaran sebesar Rp196.149.009.113,00 dan terealisasi sebesar Rp177.719.874.102,00 atau 90,60%;

- c) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total Gedung SMPN dengan anggaran sebesar Rp126.062.269.920,00 dan terealisasi sebesar Rp117.826.134.679,00 atau 93,47%; dan
 - d) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total Gedung SMAN/SMKN dengan anggaran sebesar Rp72.366.483.800,00 dan terealisasi sebesar Rp67.399.736.100,00 atau 93,14%.
- 2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
- Menganggarkan sebesar Rp765.183.093.000,00 dengan realisasi sebesar Rp568.474.818.176,00 atau 74,29%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:
- a) Kegiatan Pengembangan Gedung DPRD dan Balaikota dianggarkan sebesar Rp182.256.218.000,00 dan realisasinya sebesar Rp178.930.309.250,00 atau 98,18%;
 - b) Pembangunan lanjutan Gedung Wisma Islamic Center dianggarkan sebesar Rp111.161.875.000,00 dan realisasinya sebesar Rp110.787.208.706,00 atau 99,66%; dan
 - c) Kegiatan renovasi Gedung Blok G sebagai Green Building (tahap III) dianggarkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp81.974.083.741,00 atau 91,08%.
- 3) Dinas Perhubungan
- Menganggarkan sebesar Rp544.880.296.311,00 dengan realisasi sebesar Rp447.340.547.902,00 atau 82,10%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang Tahap III dianggarkan sebesar Rp203.390.796.311,00 dan terealisasi sebesar Rp185.319.461.851,00 atau 91,11%;
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Busway Tanjung Priok - Pluit dianggarkan sebesar Rp116.000.000.000,00 dan terealisasi Rp105.035.015.000 atau 90,55%;
 - c) Pembangunan ITS 2012 (lanjutan) dianggarkan sebesar Rp27.907.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.699.000.000,00 atau 95,67%; dan
 - d) Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas dianggarkan sebesar Rp19.735.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.833.999.000,00 atau 95,43%.
- 4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Menganggarkan sebesar Rp169.932.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp132.531.742.521,00 atau 77,99%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada :
- a) Penyempurnaan Gedung Teater Jakarta PKJ-TIM dianggarkan sebesar Rp31.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.789.693.520,00 atau 92,87%;
 - b) Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan (lanjutan) dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.313.978.130,00 atau 44,38%; dan
 - c) Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.078.632.947,00 atau 53,86%.

5) Dinas Olahraga dan Pemuda

Menganggarkan sebesar Rp108.947.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.084.873.677,00 atau 91,86%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp28.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.816.553.519,00 atau 92,20%;
- b) Rehabilitasi total Gelanggang Olah Raga (GOR) Kecamatan Kelapa Gading dianggarkan sebesar Rp13.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.320.464.902,00 atau 88,32%;
- c) Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola UPT Gelanggang Olah Raga Rawamangun dan UPT GOR Ragunan dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.754.683.932,00 atau 95,21%; dan
- d) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Grogol Petamburan dianggarkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.319.445.082,00 atau 94,33%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut terdapat belanja sebesar Rp8.412.469.314,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan belanja atas perolehan aset hibah Rp17.574.826.713,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.1.1.3 dan nomor 5.1.4.3.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp2.182.999.235.225,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini naik sebesar Rp632.866.677.050,00 atau 28,99% menjadi sebesar Rp2.815.865.912.275,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp1.961.671.907.869,00 atau 69,66%, dan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp854.194.004.406,00 atau 30,34%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

1) Dinas Pekerjaan Umum

Menganggarkan sebesar Rp2.238.798.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.520.902.624.675,00 atau 67,93%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (stage 1: Sudirman - Casablanca) dengan anggaran sebesar Rp509.340.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp336.291.250.164,00 atau 66,02%;
- b) Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari sampai Blok M (Stage 1: Pasar Inpres Cipete – Lap. Mabak Blok M) dengan anggaran sebesar Rp717.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp542.465.265.982,00 atau 75,66%;

- c) Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang Lanjutan dengan anggaran sebesar Rp120.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.972.950.000,00 atau 23,31%;
 - d) Pembangunan On/Off Ramp Timur Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang dengan anggaran sebesar Rp163.047.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.133.365.261,00 atau 71,23%; dan
 - e) Pembangunan Jalur Busway Koridor Pluit - Tanjung Priok (Segmen I dan Segmen II) dengan anggaran sebesar Rp85.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.294.453.996,00 atau 77,99%.
- 2) Dinas Perindustrian dan Energi
- Menganggarkan sebesar Rp129.763.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp101.041.683.680,00 atau 77,87%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:
- a) Pembangunan Lampu Tunnel (Jalan Layang Non TOL Antasari - Blok M Jakarta Selatan) dianggarkan sebesar Rp37.535.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.686.339.135,00 atau 84,42%;
 - b) Pembangunan lampu Tunnel (Jalan Layang Non TOL Kampung Melayu-Tanah Abang Jakarta Selatan) dianggarkan sebesar Rp21.870.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.029.851.024,00 atau 64,15%;
 - c) Pembangunan PJU pada Jalan Layang Non TOL Kampung Melayu - Tanah Abang Jakarta Selatan dan Jalan Layang Non TOL Antasari - Blok M Jakarta Selatan dianggarkan sebesar

Rp10.746.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.575.251.835,00 atau 70,49%;

d) Pembangunan Pencahayaan pada Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok) dianggarkan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.788.692.900,00 atau 63,85%; dan

e) Pengembangan Energi Alternatif di Pulau Sebira dianggarkan sebesar Rp3.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.057.082.600,00 atau 98,62%.

3) Dinas Perhubungan

Menganggarkan sebesar Rp51.910.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.353.127.896,00 atau 62,32%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

a) Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun Tanjung Barat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Taman Mini 1 Jakarta Timur, Jalan Buncit Raya Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Jalan Pattimura Jakarta Selatan, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, Jalan Cilincing Marunda dekat SMP 244 Jakarta Utara, Jalan Bekasi Timur Jakarta Timur, Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur, Jalan Raya Panjang Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp33.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.522.136.506,00 atau 53,10%;

b) Pematangan Lahan Pelabuhan Muara Angke dianggarkan sebesar Rp8.589.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.311.498.000,00 atau 96,76%;

- c) Fasilitas Transfer Antar Moda Kawasan Dukuh Atas dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.272.675.890,00 atau 28,28%;
 - d) Pembangunan SWPA Terminal Kp. Rambutan dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.821.800.000,00 atau 95,55%; dan
 - e) Pengadaan Sarana Penerangan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan di Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp1.470.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.375.248.000,00 atau 93,50%.
- 4) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Menganggarkan sebesar Rp29.661.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.368.398.699,00 atau 85,53%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:
- a) Pembangunan Sarana Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.475.672.500,00 atau 94,17%;
 - b) Peninggian Halaman Parkir dianggarkan sebesar Rp4.625.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.498.113.000,00 atau 97,26%;
 - c) Pengolahan/Penampungan Kolam Limbah dianggarkan sebesar Rp2.813.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp492.910.147,00 atau 17,52%;
 - d) Pembangunan Arboretum Mangrove dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.857.562.000,00 atau 95,25%; dan

- e) Pembangunan *breakwater* di suaka margasatwa Pulau Rambut Lanjutan dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.911.877.000,00 atau 95,59%.

5) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Menganggarkan sebesar Rp17.612.395.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.948.738.345,00 atau 84,88%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Program Penerapan Kaidah *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup seperti Pemasangan Baru Instalasi Listrik dan Pengadaan Alat Listrik di TPU dianggarkan sebesar Rp21.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.793.530,00 atau 99,11%;
- b) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota; seperti Rehabilitasi Sarana Penyiraman, Pembangunan Lampu Taman, Pembangunan Deep Well dan Pencahayaan Rumah Kaca Taman Menteng dianggarkan sebesar Rp4.717.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.976.620.137,00 atau 84,29%;
- c) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau; seperti Penggantian Lampu Air Mancur Bundaran HI, Peningkatan Sarana Penyiraman Patung Tani, Rehabilitasi Sarana Penyiraman, Pencahayaan Gedung Kantor TPU Karet Bivak, Penataan Lampu Taman, Rehabilitasi Lampu Taman Menteng dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.375.821.015,00 atau 87,52%;

- d) Program Peningkatan Kapasitas Pemakaman; seperti Penataan Areal Parkir, Jalan dan Saluran Air di TPU Pondok Kelapa, Pembangunan Jalan dan Saluran Air TPU, Pembangunan Turap TPU dianggarkan sebesar Rp6.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.036.925.611,00 atau 81,90%; dan
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup; seperti Pembuatan atau Pemasangan Listrik, Pembuatan/Pemasangan Instalasi Air di TPU, Pembuatan Resapan Air TPU, Peningkatan jalan setapak interblok TPU dianggarkan sebesar Rp1.722.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.537.578.052,00 atau 89,25%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat belanja sebesar Rp9.597.780.085,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar Rp523.001.066.735,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini naik sebesar Rp149.626.816.500,00 atau 28,61% menjadi sebesar Rp672.627.883.235,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp538.248.170.756,00 atau 80,02%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp134.379.712.479,00 atau 19,98%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut diantaranya:

1) Dinas Pendidikan

Menganggarkan sebesar Rp484.729.250.235,00 dengan realisasi sebesar Rp392.666.034.716,00 atau 81,01%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Program Penerapan Kaidah *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan seperti Bimbingan Teknis Keamanan Satuan Pendidikan dan Pengendalian Administrasi Kantor Puslatdikjur dianggarkan sebesar Rp71.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.559.000,00 atau 99,31%.
- b) Program Pendidikan Anak Usia Dini dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun.
- c) Program Peningkatan Mutu Pendidikan seperti Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) SMP Negeri, Ensiklopedia Flora dan Kebudayaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan Sehat SMA dan SMK dalam Rangka Adipura dianggarkan sebesar Rp59.808.495.235,00 dan terealisasi sebesar Rp53.366.823.640,00 atau 89,23%.
- d) Program peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dianggarkan sebesar Rp424.763.705.000,00 dan terealisasi sebesar Rp339.222.652.076,00 atau 79,86%.

2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Menganggarkan sebesar Rp133.351.239.000,00 dengan realisasi sebesar Rp95.501.966.846,00 atau 71,62%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Pembuatan Papan Himbauan atau Papan Nama Taman dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.044.455,00 atau 98,09%.
 - b) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota; seperti Penataan Jalur Hijau, Pembangunan Taman RTH, Penghijauan dalam Rangka Mendukung Program Penataan RW Kumuh, Pengadaan Pot dan Tanaman Hias, Persediaan Pohon Pelindung dan Penataan Taman dianggarkan sebesar Rp56.976.929.500,00 dan terealisasi sebesar Rp37.617.628.368,00 atau 66,02%.
 - c) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau; seperti Penghijauan di Wilayah Jakarta, Rehabilitasi Jam Kota, Peningkatan Taman, Pemeliharaan Tanaman Pot, Perbaikan Jalur Hijau dan Taman dianggarkan sebesar Rp65.394.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.369.903.389,00 atau 78,55%.
 - d) Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup; seperti Penanaman Pohon Pelindung, Penanaman Pohon TPU, Penghijauan Pohon Pelindung TPU dan Penghijauan Tanaman Berbunga Indah di Areal TPU dianggarkan sebesar Rp4.929.589.500,00 dan terealisasi sebesar Rp4.519.040.634,00 atau 91,67%.
- 3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Menganggarkan sebesar Rp15.600.675.000,00
dengan realisasi sebesar Rp14.247.101.868,00

atau 91,32%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Pengadaan Peralatan dan Sistem Lighting Studio FFTV IKJ dianggarkan sebesar Rp3.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.054.570.470,00 atau 91,18%.
 - b) Renovasi System Tata Cahaya Balai Latihan Kesenian Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp3.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.862.660.600,00 atau 89,46%.
 - c) Pengadaan dan Pemasangan Lighting System Gedung Kesenian Miss Tjitjih dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.796.782.340,00 atau 93,23%.
 - d) Pengembangan Tata Cahaya Gedung Wayang Orang Bharata dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp952.970.700,00 atau 95,30%.
 - e) Pengembangan dan Integrasi Sistem Tata Panggung Museum Wayang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp887.800.000,00 atau 88,78%.
- 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Menganggarkan sebesar Rp15.570.214.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.095.293.171,00 atau 90,53%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:
- a) Program Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Urusan Kearsipan seperti Pengadaan Bahan Pustaka atau Buku Perpustakaan untuk Layanan Paket Buku, Pengadaan Bahan Pustaka atau Buku Perpustakaan untuk Layanan Mobil

Perpustakaan Keliling dan Pengadaan Bahan Pustaka atau Buku Perpustakaan untuk Kecamatan dan Kelurahan dianggarkan sebesar Rp941.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp836.982.850,00 atau 88,86%.

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan dianggarkan sebesar Rp86.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.509.900,00 atau 95,28%.
- c) Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp23.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.553.015,00 atau 99,80%.
- d) Program Pemberdayaan Komunitas Perpustakaan dalam Pengelolaan Perpustakaan seperti Pengadaan Bahan Pustaka dan Alat Edukasi Kota Layak Anak, Pengadaan Buku Perpustakaan untuk RW Kumuh dan Pengadaan Bahan Pustaka dan Alat Edukasi Kota Layak Anak dianggarkan sebesar Rp166.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp161.579.317,00 atau 97,22%.
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan seperti Pengadaan Bahan Perpustakaan Siap Layan dan Elektronik, Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka, Pengadaan Koleksi Current Issue dan Pengadaan Bahan Pustaka Umum dianggarkan sebesar Rp14.351.859.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.990.668.089,00 atau 90,52%.

5) Dinas Olahraga dan Pemuda

Menganggarkan sebesar Rp13.396.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.858.968.007,00 atau 95,99%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Pengadaan Alat Latih Beban dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.318.258.000,00 atau 96,70%.
- b) Pengadaan Peralatan Kolam Renang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.441.892.065,00 atau 97,68%.
- c) Pengadaan Peralatan Angkat Besi dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.441.781.210,00 atau 97,67%.
- d) Pengadaan Perahu Kayak, Perahu Olah Raga Dayung dan Perahu Dayung dianggarkan sebesar Rp1.575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.544.599.930,00 atau 98,07%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut terdapat belanja sebesar Rp42.584.400.883,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Di samping itu digunakan dalam rangka

pengecahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan sebesar Rp59.359.087.500,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini naik sebesar 37.629.743.309,00 atau 63,39% menjadi sebesar Rp96.988.830.809,00.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 belanja ini terealisasi sebesar Rp2.487.672.700,00 atau 2,56%.

Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap darurat angin puting beliung di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.402.500.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 210/2012, dan untuk pengembalian kelebihan bayar utang setoran pemberian hak milik atas nama Ny. Johana Sunarti Nasution dan Hendriarti Sahara Nurdin sesuai Keputusan Gubernur Nomor 994 tahun 2012.

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2012, dapat digambarkan pada tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2012		%	Realisasi 2011
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN WAJIB	37.221.896.037.946,00	30.554.448.430.013,00	82,09	25.466.769.964.215,00
1.	Pendidikan	10.464.665.084.551,00	9.562.236.801.231,00	91,38	7.877.004.259.720,00
2.	Kesehatan	3.205.354.122.390,75	2.881.150.513.179,00	89,89	2.455.766.331.391,00
3.	Pekerjaan Umum	6.606.042.719.099,00	4.797.786.442.188,00	72,63	4.129.798.029.746,00
4.	Perumahan	686.376.921.397,30	366.578.301.709,00	53,41	310.127.372.137,00
5.	Penataan Ruang	186.026.858.696,75	148.900.970.178,00	80,04	134.659.826.637,00
6.	Perencanaan Pembangunan	118.329.851.173,80	86.373.680.272,00	72,99	71.384.148.185,00
7.	Perhubungan	2.391.199.647.677,00	1.925.279.495.360,00	80,52	1.696.741.514.636,00
8.	Lingkungan Hidup	1.836.305.133.904,65	978.970.231.156,00	53,31	1.037.445.130.715,00
9.	Pertanahan	30.248.000.000,00	5.447.574.700,00	18,01	6.255.965.314,00
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	139.160.646.246,30	114.418.847.976,00	82,22	105.614.331.227,00
11.	Pemberdayaan Perempuan	11.620.680.500,00	11.073.437.081,00	95,29	4.708.381.930,00
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	42.896.009.366,00	35.796.067.062,00	83,45	25.916.766.755,00
13.	Sosial	469.786.133.284,25	441.247.560.802,00	93,93	354.562.438.867,00
14.	Ketenagakerjaan	398.675.093.060,00	361.083.823.422,00	90,57	280.138.466.853,00
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139.489.135.443,75	112.861.922.433,00	80,91	94.528.331.138,00
16.	Penanaman Modal	50.471.493.103,00	34.040.399.859,00	67,44	28.700.893.113,00
17.	Kebudayaan	526.942.954.535,75	453.239.659.908,00	86,01	281.894.165.843,00
18.	Pemuda dan Olahraga	759.191.243.824,55	485.193.050.387,00	63,91	372.367.579.050,00

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2012		%	Realisasi 2011
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
19.	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	78.702.792.658,80	71.633.139.980,00	91,02	62.215.901.981,00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah	8.433.416.421.979,05	7.144.110.013.385,00	84,71	5.696.840.759.328,00
21.	Ketahanan Pangan	44.394.759.000,00	38.202.904.408,00	86,05	24.485.337.449,00
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	153.865.030.958,50	144.859.356.404,00	94,15	135.120.530.448,00
23.	Statistik	5.100.000.000,00	4.902.381.450,00	96,13	4.053.914.050,00
24.	Kearsipan	35.597.972.406,00	26.419.424.755,00	74,22	22.715.051.137,00
25.	Komunikasi dan Informatika	255.766.459.124,50	190.041.770.183,00	74,30	147.507.258.222,00
26.	Perpustakaan	152.270.873.565,30	132.600.660.545,00	87,08	106.217.278.343,00
II	URUSAN PILIHAN	1.144.784.035.895,00	1.004.258.468.912,00	87,72	956.829.929.082,00
1.	Energi dan Sumberdaya Mineral	424.790.446.695,00	373.574.877.630,00	87,94	439.689.793.279,00
2.	Pariwisata	187.154.079.856,00	167.554.022.200,00	89,53	118.494.835.573,00
3.	Kelautan dan Perikanan	389.958.806.176,50	346.669.669.067,00	88,90	291.902.972.004,00
4.	Perdagangan	101.679.818.000,00	79.173.790.413,00	77,87	73.663.932.648,00
5.	Industri	41.200.885.167,50	37.286.109.602,00	90,50	33.078.395.578,00
Jumlah (I dan II)		38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00	82,26	26.423.599.893.297,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp10.464.665.084.551,00 dengan total realisasi sebesar Rp9.562.236.801.231,00 atau 91,38%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp902.428.283.320,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar 12 Tahun

Untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.410.803.203.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.278.867.703.866,00 atau 90,65%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp131.935.499.534,00.

2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp154.719.038.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp137.766.866.444,00 atau 89,04%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp16.952.171.806,00.

3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Untuk Program Pendidikan Non Formal dan Informal, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp16.996.015.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.772.561.175,00 atau 92,80%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.223.454.125,00.

4) Program Pendidikan Luar Biasa

Untuk Program Pendidikan Luar Biasa, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.770.677.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.653.201.540,00 atau 97,96% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp117.475.460,00.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.947.596.881.443,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp2.460.155.508.021,00 atau 83,46%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp487.441.373.422,00.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.205.354.122.390,75 dengan total realisasi sebesar Rp2.881.150.513.179,00 atau 89,89%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp324.203.609.211,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara lain:

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp39.403.764.825,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.826.363.356,00 atau 73,16%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp10.577.401.469,00.

2) Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Untuk Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.341.321.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.337.353.954,00 atau 81,20%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.003.967.746,00.

3) Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Untuk Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp4.360.571.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.894.590.085,00 atau 89,31%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp465.981.615,00.

4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp10.613.284.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.646.838.286,00 atau 81,47%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.966.445.964,00.

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp15.418.836.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.915.355.392,00 atau 77,28%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.503.480.908,00.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp6.606.042.719.099,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.797.786.442.188,00 atau 72.63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.808.256.276.911,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang telah dilaksanakan dan output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain:

1) Program Pengendalian Banjir

Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp282.437.830.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp194.111.240.790,00 atau 68,73%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp88.326.589.210,00.

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp265.526.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.446.400.147,00 atau 52,14%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp127.079.599.853,00.

3) Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp510.669.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp430.981.512.382,00 atau 84,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp79.687.887.618,00.

4) Program Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai, Situ, Saluran dan Waduk

Untuk Penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran dan waduk, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp297.673.300.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp130.489.373.708,00 atau 43,84%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp167.183.926.292,00.

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.187.617.137.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp936.091.679.548,00 atau 78,82%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp251.525.457.452,00.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp686.376.921.397,30 dan telah direalisasikan sebesar Rp366.578.301.709,00 atau 53,41%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp319.798.619.688,30.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp218.742.510.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.614.908.738,00 atau 22,68%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp169.127.601.262,00.

2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp178.642.822.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp125.141.303.422,00 atau 70,05%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp53.501.518.878,00.

3) Program peningkatan kesehatan lingkungan permukiman

Untuk Program peningkatan kesehatan lingkungan permukiman, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp102.494.534.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.204.542.146,00 atau 75,33%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp25.289.991.854,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp11.693.404.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.665.931.603,00 atau 82,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.027.472.397,00.

5) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perumahan Rakyat

Untuk Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Perumahan Rakyat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.900.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.187.475.600,00 atau 56,09%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.712.524.400,00.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp186.026.858.696,75 dan telah direalisasikan sebesar Rp148.900.970.178,00 atau 80,04%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp37.125.888.519,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Penataan Ruang antara lain:

1) Program Penerapan Kaidah *Good governance* Dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Untuk Program Penerapan Kaidah *Good governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp11.218.950.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.931.465.195,00 atau 61,78%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.287.485.705,00.

2) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp14.654.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.815.481.149,00 atau 87,45%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.839.318.851,00.

3) Program Peningkatan Pelayanan Ketatakotaan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Ketatakotaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp11.340.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.282.605.896,00 atau 64,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.057.394.104,00.

4) Program Penataan dan Pengawasan Bangunan

Untuk Program Penataan dan Pengawasan Bangunan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.458.337.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.617.720.350,00 atau 75,32%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.840.617.150,00.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan Ruang

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp33.999.516.011,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.253.123.577,00 atau 62,51%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp12.746.392.434,00.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp118.329.851.173,80 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp86.373.680.272,00 atau 72,99%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp31.956.170.901,80.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.200.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.768.588.445,00 atau 72,47%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.431.411.555,00.

2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp8.075.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.950.820.620,00 atau 86,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.124.179.380,00.

3) Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kota, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp25.920.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.318.057.407,00 atau 24,38%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19.601.942.593,00.

4) Program Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp1.150.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.041.305.645,00 atau 90,55%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp108.694.355,00.

5) Program Perencanaan Pembangunan Tata Praja

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Tata Praja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.775.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.379.394.370,00 atau 85,74%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp395.605.630,00.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.391.199.647.677,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.925.279.495.360,00 atau 80,52%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp465.920.152.317,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pengelolaan Terminal Bus Antar Kota

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Terminal Bus Antar Kota, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp17.090.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.076.719.970,00 atau 64,81%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.013.280.030,00.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Busway

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Busway, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.202.330.125.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp967.484.120.986,00 atau 80,47%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp234.846.004.014,00.

3) Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Untuk Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp142.410.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp113.122.648.087,00 atau 79,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp29.287.351.913,00.

4) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Perhubungan

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Perhubungan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp209.837.888.101,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp145.785.434.788,00 atau 69,48%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp64.052.453.313,00.

5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp41.825.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.584.475.015,00 atau 49,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp21.240.524.985,00.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.836.305.133.904,65 dan telah direalisasikan

sebesar Rp978.970.231.156,00 atau 53,31%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp857.334.902.748,65.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Penataan Ruang antara lain:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp28.153.250.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.203.835.581,00 atau 89,52%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.949.414.419,00.

2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Untuk Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp27.122.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.363.002.709,00 atau 75,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.758.997.291,00.

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp15.299.350.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.242.837.122,00 atau 93,09%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.056.512.878,00.

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp80.296.376.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.571.754.786,00 atau 64,23%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp28.724.621.814,00.

5) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Untuk Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.107.911.997.399,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp367.459.438.006,00 atau 33,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp740.452.559.393,00.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanahan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp30.248.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.447.574.700,00 atau 18,01%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp24.800.425.300,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Untuk Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp28.648.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.861.138.500,00 atau

16,97%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp23.786.861.500,00.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp139.160.646.246,30 dan telah direalisasikan sebesar Rp114.418.847.976,00 atau 82,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp24.741.798.270,30.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.128.136.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.990.932.250,00 atau 63,65%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.137.204.250,00.

2) Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp15.014.626.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.168.358.910,00 atau 54,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.846.267.090,00.

3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.824.504.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.307.478.020,00 atau 71,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp517.026.580,00.

4) Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Untuk Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp28.613.521.820,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.876.311.723,00 atau 79,95%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.737.210.097,00.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp11.620.680.500,00 dengan total penyerapan sebesar Rp11.073.437.081,00 atau 95,29%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp547.243.419,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1) Program Kebijakan Tentang Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Untuk Program Kebijakan Tentang Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.171.034.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.051.043.526,00 atau 96,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp119.990.974,00.

2) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp880.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp805.516.980,00 atau 91,54%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp74.483.020,00.

3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.626.829.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.493.503.650,00 atau 94,92%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp133.325.350,00.

4) Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.787.817.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.616.629.850,00

atau 95,48%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp171.187.150,00.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp42.896.009.366,00 dengan total penyerapan sebesar Rp35.796.067.062,00 atau 83,45%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.099.942.304,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain:

1) Program Keluarga Berencana (KB)

Untuk Program Keluarga Berencana (KB), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp19.771.501.342,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.570.462.526,00 atau 73,69%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.201.038.816,00.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.685.188.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.512.196.108,00 atau 89,73%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp172.991.892,00.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Untuk Program Pelayanan Kontrasepsi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.253.475.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.833.436.181,00 atau 87,09%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp420.039.119,00.

4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja

Untuk Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.062.733.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.026.889.171,00 atau 96,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp35.843.829,00.

5) Program Pengembangan Model Operasional BKB (Bina Keluarga Balita) – Posyandu.

Untuk Program Pengembangan Model Operasional BKB (Bina Keluarga Balita) – Posyandu, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.006.990.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.967.008.691,00 atau 98,01%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp39.981.809,00.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp469.786.133.284,25 dengan total penyerapan sebesar Rp441.247.560.802,00 atau 93,93%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp28.538.572.482,25.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan sosial antara lain:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp131.877.797.615,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp124.185.032.599,00 atau 94,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.692.765.016,00.

2) Program Pembinaan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp28.844.250.357,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.726.357.675,00 atau 96,12%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.117.892.682,00.

3) Program Pembinaan Lembaga Mental Spiritual

Untuk Program Pembinaan Lembaga Mental Spiritual, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp23.317.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.346.044.350,00 atau 91,55%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.970.955.650,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp127.919.874.051,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp122.079.475.609,00 atau 95,43%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.840.398.442,00.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan ketenagakerjaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp398.675.093.060,00 dan direalisasikan sebesar Rp361.083.823.422,00, atau 90,57%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp37.591.269.638,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp22.485.027.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.299.773.460,00 atau 90,28%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.185.253.540,00.

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Untuk Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp16.229.039.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.371.220.204,00 atau 94,71%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp857.818.796,00.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp64.018.471.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.655.262.233,00

atau 93,18%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.363.209.467,00.

4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Untuk Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.754.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.628.264.603,00 atau 80,44%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.125.735.397,00.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp139.489.135.443,75 dan direalisasikan sebesar Rp112.861.922.433,00 atau 80,91%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp26.627.213.010,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi dan UKM, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.077.218.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.481.396.080,00 atau 63,32%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.595.821.920,00.

2) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Untuk Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp6.152.138.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.507.844.600,00 atau 73,27%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.644.293.400,00.

3) Program Pembinaan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM

Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp10.648.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.660.954.300,00 atau 81,34%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.987.045.700,00.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp50.471.493.103,00 dan direalisasikan sebesar Rp34.040.399.859,00 atau 67,44%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp16.431.093.244,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Penanaman Modal antara lain:

1) Program Peningkatan Investasi

Untuk Program Peningkatan Investasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp950.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp781.512.341,00 atau 82,26%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp168.487.659,00.

2) Program Peningkatan Promosi Investasi

Untuk Program Peningkatan Promosi Investasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp9.770.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp8.982.424.234,00 atau 91,94%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp787.575.766,00.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012 dialokasikan sebesar Rp526.942.954.535,75 dan direalisasikan sebesar Rp453.239.659.908,00 atau 86,01%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp73.703.294.627,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Kebudayaan antara lain:

1) Program Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan urusan Kebudayaan

Untuk Program Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan urusan Kebudayaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp51.396.653.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp43.240.381.605,00 atau 84,13%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp8.156.271.395,00.

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp70.530.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.857.965.268,00 atau 93,38%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.672.034.732,00.

3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp92.525.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp84.595.479.383,00 atau 91,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.929.520.617,00.

4) Program Pengembangan Nilai Budaya

Untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp4.825.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.699.690.050,00 atau 97,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp125.309.950,00.

5) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Untuk Program Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.570.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.333.364.460,00 atau 95,75%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp236.635.540,00.

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp759.191.243.824,55 dengan total penyerapan sebesar Rp485.193.050.387,00 atau 63,91%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp273.998.193.437,55.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Olahraga dan Pemuda antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp68.527.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp61.427.357.574,00 atau 89,64%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.100.242.426,00.

2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemuda, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp102.604.132.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.508.231.480,00 atau 95,03%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.095.900.920,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp485.422.267.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp239.169.940.134,00 atau 49,27%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp246.252.327.066,00.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp78.702.792.658,80 serta telah direalisasikan sebesar

Rp71.633.139.980,00 atau 91,02%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.069.652.678,80.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Untuk Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp14.165.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.158.984.288,00 atau 92,90%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.006.015.712,00.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp15.030.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.137.825.650,00 atau 94,06%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp892.174.350,00.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp27.780.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.544.691.150,00 atau 88,35%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.235.308.850,00.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp8.433.416.421.979,05 serta telah direalisasikan sebesar Rp7.144.110.013.385,00 atau 84,71%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.289.306.408.594,05.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi belanja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Untuk Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi, pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar Rp78.720.415.774,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.518.632.411,00 atau 83,23%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp13.201.783.363,00.

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Untuk Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi, pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar Rp46.396.294.259,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.245.102.386,00 atau 84,59%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.151.191.873,00.

3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar Rp106.792.749.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp96.822.566.879,00 atau 90,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.970.182.821,00.

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan, pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar Rp667.036.235.752,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp637.562.700.902,00 atau 95,58%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp29.473.534.850,00

5) Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan

Untuk Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar Rp563.475.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp438.856.100,00 atau 77,88%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp124.618.900,00.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp44.394.759.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.202.904.408,00 atau

86,05%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.191.854.592,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan ketahanan pangan antara lain:

1) Program Pengamanan Sembilan Bahan Pokok (Sembako)

Untuk Program Pengamanan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.205.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp779.190.970,00 atau 64,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp425.809.030,00.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp4.460.240.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.016.206.300,00 atau 90,04%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp444.033.700,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.808.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.357.005.404,00 atau 92,23%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp450.994.596,00.

4) Program SPM Lain Urusan Ketahanan Pangan

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.265.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.166.810.644,00 atau 92,24%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp98.189.356,00.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp153.865.030.958,50 dengan total penyerapan sebesar Rp144.859.356.404,00 atau 94,15%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.005.674.554,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp6.430.136.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.818.902.025,00 atau 79,94%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.611.234.475,00.

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp14.080.091.020,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.552.765.870,00 atau 89,15%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.527.325.150,00.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.761.040.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.644.922.015,00 atau 93,41%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp116.117.985,00.

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp6.838.764.033,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.943.641.262,00 atau 86,91%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp895.122.771,00.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp197.618.550,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Statistik antara lain:

1) Program Pengembangan Statistik daerah

Untuk Program Pengembangan Statistik daerah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 197.618.550,00.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp35.597.972.406,00 dengan total penyerapan sebesar Rp26.419.424.755,00 atau 74,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.178.547.651,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Kearsipan antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.833.591.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.332.397.665,00 atau 82,31%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp501.193.635,00.

2) Program Penyelamatan Arsip Daerah

Untuk Program Penyelamatan Arsip Daerah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.272.669.840,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp1.393.022.818,00 atau 61,29%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp879.647.022,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp16.233.433.375,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.728.758.163,00 atau 84,57%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.504.675.212,00.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp 255.766.459.124,50 dan telah direalisasikan sebesar Rp190.041.770.183,00 atau 74,30%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp65.724.688.941,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah

Untuk Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp58.728.969.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.663.110.927,00 atau 84,56%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp9.065.858.573,00.

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp19.606.229.696,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.039.758.479,00 atau 86,91%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.566.471.217,00.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp6.757.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.252.119.275,00 atau 18,53%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.505.680.725,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp121.939.623.100,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp81.819.805.913,00 atau 67,10%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp40.119.817.187,00.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp152.270.873.565,30 dengan total penyerapan sebesar Rp132.600.660.545,00 atau 87,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19.670.213.020,30.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Perpustakaan antara lain:

1) Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta

Untuk Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp14.430.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.896.364.340,00 atau 89,37%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.533.635.660,00.

2) Program Pemberdayaan Komunitas Perpustakaan Dalam Pengelolaan Perpustakaan

Untuk Program Pemberdayaan Komunitas Perpustakaan Dalam Pengelolaan Perpustakaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.212.362.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.373.176.982,00 atau 88,36%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp839.185.128,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp82.789.827.782,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp72.164.437.914,00 atau 87,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp10.625.389.868,00.

4) Program Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Lain Urusan Perpustakaan

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Perpustakaan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp3.909.398.516,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.605.027.111,00 atau 92,21%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp304.371.405,00.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan

Urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp424.790.446.695,00 dan direalisasikan sebesar Rp373.574.877.630,00 atau 87,94%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp51.215.569.065,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

1) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana

Untuk Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp126.096.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp99.063.025.203,00 atau 78,56%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp27.033.474.797,00.

2) Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp279.988.946.695,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp259.521.842.834,00 atau 92,69%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp20.467.103.861,00.

3) Program Peningkatan Energi

Untuk Program Peningkatan Energi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp16.505.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.005.167.173,00 atau 78,80%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.499.832.827,00.

4) Program Pengendalian Air Bawah Tanah

Untuk Program Pengendalian Air Bawah Tanah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.200.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.984.842.420,00 atau 90,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp215.157.580,00.

2. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

Urusan Pariwisata pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp187.154.079.856,00 dan direalisasikan sebesar Rp167.554.022.200,00 atau 89,53%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19.600.057.656,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Pariwisata antara lain:

1) Program Penerapan Kaidah *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Untuk Program Penerapan Kaidah *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Urusan

Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp3.850.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.763.841.450,00 atau 97,76%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp86.358.550,00.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp25.890.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.295.690.680,00 atau 93,84%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.594.309.320,00.

3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp92.967.840.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp86.508.382.038,00 atau 93,05%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.459.457.962,00 .

4) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Untuk Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp4.758.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.561.545.130,00 atau 95,86%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp196.954.870,00.

5) Program Fasilitas Wisata *Meeting, Incentive, Convention Exhibition* (MICE)

Untuk Program Fasilitas Wisata Meeting, Incentive, Convention Exhibition (MICE), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp5.600.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.370.037.580,00

atau 95,89%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp229.962.420,00.

3. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp389.958.806.176,50 dan direalisasikan sebesar Rp346.669.669.067,00 atau 88,90%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp43.289.137.109,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:

1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Untuk Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp10.392.115.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.632.788.315,00 atau 83,07%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.759.326.685,00.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp2.648.890.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.318.936.950,00 atau 87,54%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp329.953.050,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan, Kelautan dan Peternakan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan, Kelautan dan Peternakan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp76.856.280.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp64.607.329.606,00 atau 84,06%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp12.248.950.394,00.

4) Program Pengembangan Usaha Peternakan, Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan Tangkap

Untuk Program Pengembangan Usaha Peternakan, Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan Tangkap, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp10.993.885.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.275.908.505,00 atau 93,47%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp717.976.495,00.

5) Program Pengelolaan Sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Untuk Program Pengelolaan Sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp8.450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.130.202.502,00 atau 96,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp319.797.498,00

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp142.880.703.167,50 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.459.900.015,00

atau 81,51%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp26.420.803.152,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan Urusan Perdagangan antara lain:

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1.453.937.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.002.117.675,00 atau 68,92%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp451.819.325,00.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp142.034.000,00 atau 94,69%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.966.000,00.

3) Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Ekspor

Untuk Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Ekspor, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp15.844.078.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.791.201.808,00 atau 80,73%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.052.876.192,00.

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan Menengah

Untuk Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp7.970.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp6.410.272.978,00 atau 80,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.559.727.022,00.

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp9.048.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.158.493.294,00 atau 79,11%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.890.106.706,00.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012, disajikan pada tabel 5.20.

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2012		%	Realisasi 2011
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2012		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.552.587.002.387,00	11.673.114.293.318,00	92,99	9.627.347.326.824,00
I	BELANJA PEGAWAI	10.286.142.104.248,00	9.688.176.243.356,00	94,19	8.757.472.025.898,00
	1. Gaji dan Tunjangan	8.558.008.316.248,00	8.061.669.497.424,00	94,20	3.514.434.650.203,00
	2. Tambahan Penghasilan PNS	78.823.000.000,00	78.822.510.426,00	100,00	3.992.831.055.143,00
	3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	27.792.355.000,00	26.936.333.350,00	96,92	27.702.300.356,00
	4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	514.437.500.000,00	446.913.971.496,00	86,87	413.826.255.281,00
	5. Biaya Kematian Pegawai	16.192.500.000,00	16.192.230.686,00	100,00	0,00
	6. Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000,00	37.779.575.000,00	98,29	37.576.675.000,00
	7. Belanja Penghasilan Lainnya	1.052.452.433.000,00	1.019.862.124.974,00	96,90	771.101.089.915,00
II	BELANJA BUNGA	4.353.828.000,00	3.172.974.470,00	72,88	4.353.524.981,00
	Bunga Utang Pinjaman	4.353.828.000,00	3.172.974.470,00	72,88	4.353.524.981,00
III	BELANJA HIBAH	2.089.282.239.330,00	1.933.097.203.700,00	92,52	825.595.987.217,00
	1. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	2.029.728.278.830,00	1.879.067.803.780,00	92,58	802.157.266.719,00
	2. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	59.553.960.500,00	54.029.399.920,00	90,72	23.438.720.498,00
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL	29.470.000.000,00	15.993.940.302,00	54,27	38.587.205.558,00
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	29.470.000.000,00	15.993.940.302,00	54,27	38.587.205.558,00
V	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	46.350.000.000,00	30.186.258.790,00	65,13	1.338.583.170,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	45.000.000.000,00	28.900.000.000,00	64,22	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.350.000.000,00	1.286.258.790,00	95,28	1.338.583.170,00
VI	BELANJA TIDAK TERDUGA	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
	Belanja Tidak Terduga	96.988.830.809,00	2.487.672.700,00	2,56	0,00
	BELANJA LANGSUNG	25.814.093.071.454,00	19.885.592.605.607,00	77,03	16.796.252.566.473,00
I	BELANJA PEGAWAI	1.610.699.060.912,00	1.397.773.926.422,00	86,78	1.138.088.013.279,00
	1. Honorarium PNS	441.136.801.146,00	361.161.124.558,00	81,87	216.573.046.176,00
	2. Honorarium Non PNS	1.106.647.712.066,00	1.006.253.728.469,00	90,93	836.097.154.226,00
	3. Uang Lembur	31.177.876.000,00	11.966.144.345,00	38,38	5.434.530.875,00
	4. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	11.625.922.500,00	5.467.622.500,00	47,03	79.983.282.002,00
	5. Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota	20.110.749.200,00	12.925.306.550,00	64,27	0,00
II	BELANJA BARANG DAN JASA	11.383.664.759.250,00	9.703.452.918.759,00	85,24	8.341.831.218.443,00
III	BELANJA MODAL	12.819.729.251.292,00	8.784.365.760.426,00	68,52	7.316.333.334.751,00
	Jumlah	38.366.680.073.841,00	31.558.706.898.925,00	82,26	26.423.599.893.297,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.475.552.012.483,20. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit oleh BPK-RI yaitu sebesar Rp6.470.618.490.508,20, ditambah dengan penerimaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penjualan saham sebesar Rp4.933.521.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Rheem Indonesia	Rp	47.871.975,00
b. PT Alakasa Industrindo Tbk	Rp	4.885.650.000,00
Jumlah	Rp	4.933.521.975,00

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp832.303.634.733,00 terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	49.061.900.213,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	Rp	618.477.833.261,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp	8.169.288.822,00
d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp	34.653.506.454,00
e. Pembayaran Utang Kepada Pegawai	Rp	112.920.178,00
f. Pembayaran Utang Biaya Pemungutan	Rp	4.077.107.793,00
g. Pembayaran Utang Perpanjangan STNK	Rp	3.629.500,00
h. Pembayaran Utang Pajak	Rp	62.307.448.512,00
i. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	55.440.000.000,00
Jumlah	Rp	832.303.634.733,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp49.061.900.213,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2012, melainkan pendapatan

bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp618.477.833.261,00 merupakan pencairan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta sebesar Rp68.477.833.261,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1525 tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nomor 637 tahun 2012, yang dialokasikan sebesar Rp65.000.000.000,00 dan dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.477.833.261,00. Selain itu, pencairan penyertaan modal tahun 2012 juga diberikan kepada PT Bank DKI sebesar Rp500.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 795/2012 dan 1493/2012, dan PT Jakarta Propertindo sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 796 tahun 2012.

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp55.440.000.000,00, merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk Dana Bergulir melalui Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK. Pemberian pinjaman tersebut berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp53.400.000.000,00 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1997/2012 dan hasil jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp2.040.000.000,00. Pemberian pinjaman ini secara otomatis menambah nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir di neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.4.2.1.

5.1.4 Aset

5.1.4.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.1.4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.457.673.627.660,23 dan Rp6.604.170.595.035,20 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Kas Daerah	9.412.305.325.601,23	6.415.285.572.576,20
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	35.679.588.189,00	180.324.484.427,00
3	Kas Non Anggaran	9.688.713.870,00	8.560.538.032,00
Jumlah		9.457.673.627.660,23	6.604.170.595.035,20

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp9.412.305.325.601,23 terdiri dari saldo Kas di Bank sebesar Rp9.412.148.224.840,33 dan saldo Uang Tunai (*cash on hand*) BUD sebesar Rp157.100.760,90.

Rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.412.148.224.840,33 dan Rp6.415.285.572.576,20 tersaji pada tabel 5.21.

Tabel 5.21
Kas di Bank
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No	Rekening Bank	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	1.396.666.308,34	2.832.030.522,60
2	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	1.242.061.168,06	5.167.136.261,05
3	Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1)	51.201.013,02	49.934.033,60
4	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5)	102.250.565.176,89	54.191.697.164,28
5	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7)	1.312.969.986,65	4.737.014.155,58
6	Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4)	1.193.177.717.299,00	468.100.460.204,00
7	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	164.568.583.281,00	108.884.815.463,00
8	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	138.574.502.950,00	78.010.282.051,00
9	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	97.592.937.111,00	93.827.655.875,00
10	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	120.880.584.856,00	88.575.048.591,00
11	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	212.252.996.864,00	118.583.845.140,00
12	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	47.991.543.634,00	32.761.829.980,00
13	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	3.039.732.689.610,00	48.899.098.864,00
14	Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2)	4.844.219.414,00	4.654.104.375,00
15	Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1)	13.128.898.273,00	12.613.644.481,00
16	Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9)	11.170.841.624,00	10.732.433.351,00
17	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	1.987.294.347.007,37	2.258.555.153.891,09
18	Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1)	173.027.336.003,00	75.634.671.599,00

No	Rekening Bank	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
19	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	5.172,00	0,00
20	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	878.021.398.211,00	1.338.330.108.066,00
21	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	223.244.212.399,00	609.756.937.886,00
22	BNI (Rek. 8920644)	255.755.320,00	252.770.537,00
23	BNI (Rek. 8920688)	136.192.159,00	134.900.085,00
24	Deposito Bank BRI (0019-01-008133-40-4)	0,00	500.000.000.000,00
25	Deposito Bank BRI (0019-01-008167-40-3)	0,00	500.000.000.000,00
26	Deposito Bank DKI (139-25-00555-5)	500.000.000.000,00	0,00
27	Deposito Bank BRI (0019-01-009392-40-9)	500.000.000.000,00	0,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	9.412.148.224.840,33	6.415.285.572.576,20

Sumber data: Berdasarkan saldo tercatat di BPKD yang telah dilakukan penutupan dan rekonsiliasi

Saldo Uang Tunai (*cash on hand*) BUD per 31 Desember 2012 sebesar Rp157.100.760,90 merupakan setoran pengembalian belanja yang dibayar tunai dan terletak di UPPK Balakota sebesar Rp154.917.735,00, UPPK Jakarta Timur sebesar Rp2.157.025,00, serta UPPK Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebesar Rp26.000,90.

Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp180.324.484.427,00 mencakup Utang PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp1.221.750.000,00 dan Rp183.262.500,00, berasal dari Belanja Modal Pengadaan senjata bius/gas Tahun Anggaran 2011 yang dibatalkan pada Tahun 2012.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2008 mengelola Kas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Non Anggaran ini, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4, menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran Gubernur dapat melimpahkan

sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran. Saldo Kas Non Anggaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 9.688.713.870,00 dan Rp8.560.538.032,00 merupakan penerimaan uang jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara.

Saldo Kas Non Anggaran tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing tercatat sebesar Rp5.267.200.973,00 dan Rp5.033.309.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp784.754.860,00 dan Rp814.754.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan dengan saldo akhir senilai Rp1.182.498.682,00.

5.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp58.812.066.657,00 dan Rp63.322.260.315,00. Saldo kas per 31 Desember 2012 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi sisa uang persediaan sebesar Rp51.416.205.213,00, Jasa Giro di SKPD yang belum disetor sebesar Rp19.203.717,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor ke kas Negara sebesar Rp4.296.293.333,00, dan Uang Titipan sebesar Rp3.080.364.394,00. Uang Titipan tersebut antara lain berada di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.062.334.894,00 dengan perincian Rp1.194.367.500,00 merupakan outstanding SP2D TKD susulan dan sebesar Rp1.867.967.394,00 merupakan Tunjangan Profesi Sertifikasi & Non Sertifikasi yang sedang dalam proses penyelesaian ke rekening guru-guru. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 1.

5.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp2.260.860,00 dan Rp471.150.214.490,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Pendapatan yang Belum Disetor	2.260.860,00	62.176.350,00
2	Kas BLUD (Unit Swadana)	0,00	468.769.267.507,00
3	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	0,00	1.958.141.015,00
4	Uang Muka Pasien RSUD	0,00	360.629.618,00
	Jumlah	2.260.860,00	471.150.214.490,00

Pada tahun 2012 dilakukan perubahan kode akun untuk BLUD, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan hanya mempunyai sub akun Pendapatan yang Belum Disetor. Sub akun lainnya dipindahkan ke dalam akun Kas dan Setara Kas BLUD sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.4.1.4.

Saldo Pendapatan yang Belum Disetor sebesar Rp2.260.860,00 merupakan penerimaan retribusi jasa usaha terminal yang belum disetor ke Kas Daerah di tahun 2012 pada Dinas Perhubungan.

5.1.4.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp424.844.726.091,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Kas Tunai	9.180.359.503,00	0,00
2	Kas di Bank	342.898.883.894,00	0,00
3	Kas Transito	69.581.431.478,00	0,00
4	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	2.325.678.308,00	0,00
5	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	858.372.908,00	0,00
	Jumlah	424.844.726.091,00	0,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas BLUD (Unit Swadana), Uang Titipan, Pajak di BLUD yang Belum Disetor, dan Uang Muka Pasien RSUD/RSKD semula tercatat sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode

akun sehingga akun-akun tersebut diklasifikasikan sebagai sub akun dari Kas dan Setara Kas BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	Kas Tunai	9.180.359.503,00	10.188.855.826,00
2	Kas di Bank	342.898.883.894,00	406.650.078.197,00
3	Kas Transito	69.581.431.478,00	51.930.333.484,00
4	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	2.325.678.308,00	1.958.141.015,00
5	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	858.372.908,00	360.629.618,00
	Jumlah	424.844.726.091,00	471.088.038.140,00

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Kas Tunai dan Kas di Bank sebesar Rp9.180.359.503,00 dan Rp342.898.883.894,00 yang karena pengelolaannya bersifat khusus, pada akhir Bulan Desember 2012 tidak disetorkan ke kas daerah sehingga dapat digunakan kembali dalam kegiatan operasional pada bulan berikutnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas Tunai dan Kas di Bank merupakan bagian dari akun Kas BLUD (Unit Swadana) yang merupakan sub akun Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Kas Tunai dan Kas di Bank diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas BLUD.

b. Kas Transito

Kas Transito sebesar Rp69.581.431.478,00 merupakan belanja operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2012 belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas Transito merupakan bagian dari akun Kas BLUD (Unit Swadana)

yang merupakan sub akun Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Kas Transito diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Kas Transito per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	RSUD Cengkareng	22.215.278.583,00	17.442.038.176,00
2	UPK PPUMKMP Pulogadung	16.958.995.113,00	12.323.893.936,00
3	RSUD Koja	18.149.932.969,00	10.677.200.351,00
4	RSUD Pasar Rebo	8.632.099.652,00	4.851.838.246,00
5	UPT Dana Bergulir	3.145.076.228,00	3.145.076.228,00
6	BLUD lainnya di bawah 3 Miliar Rupiah	480.048.933,00	3.490.286.547,00
	Jumlah	69.581.431.478,00	51.930.333.484,00

Saldo belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.958.995.113,00 merupakan akumulasi dari tahun 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp4.635.101.177,00, Rp5.043.896.285,00 dan Rp7.279.997.651,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK

PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor sebesar Rp2.325.678.308,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara pada 31 Desember 2012.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Pajak di BLUD yang Belum Disetor merupakan sub akun Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Pajak di BLUD yang Belum Disetor diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas BLUD.

d. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2012 sebesar Rp858.372.908,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Uang Muka Pasien RSUD/RSKD merupakan sub akun Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Uang Muka Pasien RSUD/RSKD diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	BLUD RS Koja	277.462.814,00	26.116.564,00
2	BLUD RS Tarakan	295.522.014,00	83.683.381,00
3	BLUD RS Cengkareng	90.011.951,00	78.695.889,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	81.847.629,00	93.529.784,00
5	BLUD RS Budhi Asih	90.528.500,00	72.154.000,00
6	BLUD RS Duren Sawit	23.000.000,00	6.450.000,00
	Jumlah	858.372.908,00	360.629.618,00

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tidak termasuk jumlah kas di rekening penampungan di Bank BRI sebagai pelaksanaan program Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	BLUD RS Tarakan	882.173.348,00	649.815.296,00
2	BLUD RS Koja	1.317.745.530,00	1.435.806.085,00
3	BLUD RS Pasar Rebo	-	800.294.956,00
4	BLUD RS Cengkareng	675.674.499,00	84.952.249,00
5	BLUD RS Duren Sawit	45.173.184,00	48.645.467,00
6	BLUD RS Budhi Asih	725.266.216,00	316.550.963,00
Jumlah		3.646.032.777,00	3.336.065.016,00

5.1.4.1.5 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp365.651.751.132,00 dan Rp318.360.404.837,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	6.843.100.410,00	3.733.637.146,00
2. Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor	259.643.510,00	1.217.038.410,00
3. Piutang Pajak Hotel	17.557.342.727,00	16.653.392.552,00
4. Piutang Pajak Restoran	99.549.745.298,00	107.130.290.458,00
5. Piutang Pajak Hiburan	42.537.429.230,00	43.735.944.732,00
6. Piutang Pajak Reklame	114.425.673.410,00	63.148.211.222,00
7. Piutang Pajak Parkir	2.833.064.117,00	3.335.167.612,00
8. Piutang Pajak Air Bawah Tanah	57.669.729.678,00	54.537.428.175,00
9. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	22.566.025.260,00	24.869.294.530,00
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.409.997.492,00	0,00
Jumlah	365.651.751.132,00	318.360.404.837,00

Sumber data: Laporan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Piutang pajak sebesar Rp365.651.751.132,00 adalah hasil gabungan piutang pada Dinas, Suku Dinas dan UPPD di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

a.	Mutasi Piutang Tahun 2011		
	Piutang per 31 Desember 2011	Rp	318.360.404.837,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011	Rp	(83.511.373.891,00)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2011	Rp	(3.377.500.099,00)
	Koreksi	Rp	(674.382.300,00)
	Saldo Piutang Tahun 2011	Rp	230.797.148.547,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	708.368.194.345,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)	Rp	(571.109.024.859,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)	Rp	(2.404.566.901,00)
	Saldo Piutang Tahun 2012	Rp	134.854.602.585,00
c.	Piutang per 31 Desember 2012 (a+b)	Rp	365.651.751.132,00

Mutasi atas beberapa jenis piutang pajak adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Reklame

a.	Mutasi Piutang Tahun 2011		
	Piutang per 31 Desember 2011	Rp	63.148.211.222,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011	Rp	(32.516.467.466,00)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2011	Rp	(32.016.234,00)
	Saldo Piutang Tahun 2011		30.599.727.522,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	494.158.850.295,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)	Rp	(409.883.786.758,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)	Rp	(449.117.649,00)
	Saldo Piutang Tahun 2012	Rp	83.825.945.888,00
c.	Piutang per 31 Desember 2012 (a+b)	Rp	114.425.673.410,00

Mutasi Piutang Pajak Restoran

a.	Mutasi Piutang Tahun 2011		
	Piutang per 31 Desember 2011	Rp	107.130.290.458,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011	Rp	(23.432.197.887,00)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2011		(793.309.910,00)
	Saldo Piutang Tahun 2011	Rp	82.904.782.661,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	56.258.118.973,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)	Rp	(39.145.752.748,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)	Rp	(467.403.588,00)
	Saldo Piutang Tahun 2012	Rp	16.644.962.637,00
c.	Piutang per 31 Desember 2012 (a+b)	Rp	99.549.745.298,00

Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah

a.	Mutasi Piutang Tahun 2011		
	Piutang per 31 Desember 2011	Rp	54.537.428.175,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011	Rp	(12.447.482.721,00)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2011		(984.200.505,00)
	Saldo Piutang Tahun 2011	Rp	41.105.744.949,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	85.445.155.211,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)	Rp	(68.572.404.388,00)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)	Rp	(308.766.094,00)
	Saldo Piutang Tahun 2012	Rp	16.563.984.729,00
c.	Piutang per 31 Desember 2012 (a+b)	Rp	57.669.729.678,00

Pada tahun 2011 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, piutang BPHTB merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil

DJP dengan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak sesuai kewenangan wilayahnya.

Penjelasan atas mutasi piutang BPHTB adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan

a.	Mutasi Piutang Tahun 2011		
	Piutang per 31 Desember 2011	Rp	24.869.294.530,00
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011	Rp	(1.611.470.090,00)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2011	Rp	(17.416.880,00)
	Koreksi	Rp	(674.382.300,00)
	Saldo Piutang Tahun 2011	Rp	22.566.025.260,00
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	53.961.417,00
	Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)	Rp	53.961.417,00
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)	Rp	0,00
	Saldo Piutang Tahun 2012	Rp	0,00
c.	Piutang per 31 Desember 2012 (a+b)	Rp	22.566.025.260,00

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.409.997.492,00 merupakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipotong oleh PT Pertamina sebagai upah pungut. Atas pemotongan upah pungut tersebut, telah disetorkan kembali oleh PT Pertamina ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2013.

Pengurangan Piutang Pajak dari penerimaan pembayaran diakui berdasarkan bukti setor yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak.

Rincian lebih lanjut atas mutasi Piutang Pajak disajikan dalam lampiran 3.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS PAJAK	≤ 1 Th.	1 s.d 2 Th.	2 s.d 3 Th.	3 s.d 4 Th.	4 s.d 5 Th.	≥ 5 Th.	JUMLAH
1	HOTEL	3.465.899.182,89	1.096.457.697,00	1.635.656.948,00	3.228.990.786,88	1.312.894.666,00	6.817.443.445,72	17.557.342.726,49
2	RESTORAN	16.644.962.636,47	9.186.616.918,53	28.138.370.612,35	11.309.987.691,02	13.589.933.272,72	20.679.874.166,33	99.549.745.297,42
3	HIBURAN	8.606.891.914,54	1.817.194.970,84	7.923.401.865,43	13.393.466.792,44	1.874.729.143,29	8.921.744.543,72	42.537.429.230,26
4	REKLAME	83.951.026.950,38	12.345.758.315,61	9.433.250.442,10	5.387.486.987,50	2.295.808.154,00	1.012.342.560,20	114.425.673.409,79
5	PARKIR	320.440.078,00	467.391.444,00	1.177.976.995,00	250.905.405,00	521.147.981,00	95.202.214,50	2.833.064.117,50
6	PAT	16.889.496.474,40	13.492.580.960,00	14.403.796.086,00	10.701.149.921,00	1.250.949.456,00	931.756.781,00	57.669.729.678,40
7	BPHTB	0,00	8.218.320.859,00	4.691.381.793,00	2.506.758.251,00	1.238.643.433,00	5.910.920.924,00	22.566.025.260,00
8	BBN-KB	0,00	104.930.000,00	28.579.600,00	9.337.050,00	116.796.860,00	0,00	259.643.510,00
9	PKB	4.134.825.620,00	808.164.400,00	708.265.200,00	684.415.650,00	507.429.540,00	0,00	6.843.100.410,00
10	PBBKB	1.409.997.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.997.492,00
	TOTAL	135.423.540.348,68	47.537.415.564,98	68.140.679.541,88	47.472.498.534,84	22.708.332.506,01	44.369.284.635,47	365.651.751.131,86

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan unit pencatat per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	≤ 1 Th.	1 s.d 2 Th.	2 s.d 3 Th.	3 s.d 4 Th.	4 s.d 5 Th.	≥ 5 Th.	JUMLAH
1	DINAS	1.409.997.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.997.492,00
2	SUDIN PUSAT I	20.023.335.878,06	8.543.803.799,23	18.727.389.606,00	4.214.033.114,93	4.876.070.633,04	10.242.887.555,28	66.627.520.586,54
3	SUDIN PUSAT II	14.046.734.086,58	3.373.796.431,53	5.909.736.416,00	4.782.561.933,60	1.119.329.755,00	6.767.068.147,94	35.999.226.770,65
4	SUDIN SELATAN I	27.559.411.259,65	7.017.156.804,15	9.328.330.190,50	9.524.463.333,70	4.837.492.958,76	8.277.644.480,52	66.544.499.027,28
5	SUDIN SELATAN II	12.880.809.810,00	4.840.227.228,25	2.397.937.388,00	7.700.769.687,00	2.058.468.294,00	3.353.764.075,78	33.231.976.483,03
6	SUDIN BARAT I	6.077.199.828,80	1.866.628.461,75	5.376.837.349,75	5.672.372.046,00	314.427.148,00	123.457.260,20	19.430.922.094,50
7	SUDIN BARAT II	17.656.303.285,00	4.919.719.700,25	7.284.178.485,25	4.719.324.109,95	2.082.833.450,80	5.590.894.321,05	42.253.253.352,30
8	SUDIN TIMUR I	4.132.443.305,00	778.108.516,00	1.409.703.579,00	628.313.519,00	238.246.135,00	482.563.768,00	7.669.378.822,00
9	SUDIN TIMUR II	5.868.454.165,40	8.614.465.190,70	3.839.628.547,00	3.110.182.888,75	2.122.267.481,00	238.990.084,00	23.793.988.356,85
10	SUDIN UTARA I	11.639.088.173,36	3.842.947.754,12	6.434.240.904,38	4.784.115.184,21	3.185.849.460,66	4.033.550.576,24	33.919.792.052,97
11	SUDIN UTARA II	9.994.937.444,83	2.827.467.279,00	6.695.852.276,00	1.642.610.017,70	1.249.120.789,75	5.258.464.366,46	27.668.452.173,74
12	SAMSAT PUSAT	993.887.900,00	78.785.000,00	215.241.100,00	245.365.100,00	147.911.700,00	0,00	1.681.190.800,00
13	SAMSAT SELATAN	2.293.828.025,00	459.826.500,00	315.173.550,00	192.556.100,00	183.678.600,00	0,00	3.445.062.775,00
14	SAMSAT BARAT	172.208.375,00	20.531.000,00	28.311.700,00	67.109.300,00	18.917.500,00	0,00	307.077.875,00
15	SAMSAT TIMUR	505.427.620,00	164.027.900,00	81.025.850,00	157.915.900,00	217.203.210,00	0,00	1.125.600.480,00
16	SAMSAT UTARA	169.473.700,00	189.924.000,00	97.092.600,00	30.806.300,00	56.515.390,00	0,00	543.811.990,00
	TOTAL	135.423.540.348,68	47.537.415.564,98	68.140.679.541,88	47.472.498.534,84	22.708.332.506,01	44.369.284.635,47	365.651.751.131,86

5.1.4.1.6 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi diklasifikasikan dalam enam kode rekening yaitu Piutang Retribusi Jasa Umum, Piutang Retribusi Jasa Usaha, Piutang Retribusi Perizinan Tertentu, Piutang Denda Retribusi Jasa Umum, Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha, dan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp75.814.361.784,00 dan Rp52.164.511.797,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.310.114.824,00	6.447.500,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	15.131.157.156,00	4.192.135.000,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	54.304.022.867,00	43.143.472.390,00
4	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
5	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	3.003.000,00
6	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	5.069.066.937,00	4.819.453.907,00
	Jumlah	75.814.361.784,00	52.164.511.797,00

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.310.114.824,00 di antaranya terdapat di SKPD Dinas Tata Tata Ruang sebesar Rp1.163.955.336,00 dan SKPD Dinas Kebersihan sebesar Rp21.956.600,00. Piutang Retribusi Jasa Umum pada Dinas Tata Ruang di antaranya merupakan piutang atas Retribusi Penataan Perpetakan Pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder sebesar Rp681.273.180,00, Piutang atas Retribusi Pematokan untuk penerapan rencana kota sebesar Rp291.687.156,00 dan piutang atas Retribusi Survey dan Perencanaan Trace jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas sebesar Rp170.000.000,00.

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp15.131.157.156,00 di antaranya tercatat di SKPD Dinas Perumahan yaitu sebesar Rp10.081.670.451,00 dan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00. Piutang pada Dinas Perumahan merupakan piutang atas Retribusi Sewa Rumah Susun dan piutang di SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan.

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp54.304.022.867,00 terdapat di SKPD Dinas Tata Ruang sebesar Rp 46.517.787.900,00 dan SKPD Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan sebesar Rp7.786.234.967. Piutang Retribusi di Dinas Tata Ruang di antaranya merupakan piutang atas Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp26.950.348.685 dan piutang atas Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan sebesar Rp11.820.890.215,00, sedangkan Piutang Retribusi di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan di antaranya merupakan piutang atas Retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar Rp4.182.425.632,00 dan piutang atas Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan sebesar Rp3.603.809.335,00

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5.069.066.937,00 terdapat di SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sebesar Rp4.160.898.811,00, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan sebesar Rp547.534.665,00 dan Dinas Tata Ruang sebesar Rp360.633.461,00. Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu di Di SKPD BPLHD sebesar Rp4.160.898.811 adalah piutang atas Retribusi denda pemakaian kelebihan debit air bawah tanah.

5.1.4.1.7 Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2012 sebesar Rp67.883.800.527,00 terdiri dari Piutang BLUD Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan, Piutang BLUD Pelayanan Transportasi, Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi, dan Piutang BLUD Lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2011, sub akun Piutang di BLUD sebesar Rp55.638.874.076,00 terdiri dari Piutang Pelayanan Kesehatan sebesar Rp27.864.559.387,00 dan

Piutang Lainnya di BLUD sebesar Rp27.774.314.689,00 dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya.

Pada tahun 2012 sub akun Piutang di BLUD tersebut direklasifikasi dan disajikan sebagai akun Piutang BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)
1	Piutang BLUD Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan	39.139.638.216,00
2	Piutang BLUD Pelayanan Transportasi	584.801.830,00
3	Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi	374.971.720,00
4	Piutang BLUD Lainnya	27.784.388.761,00
	Jumlah	67.883.800.527,00

1) Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan

Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp39.139.638.216,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut merupakan piutang atas pelayanan kesehatan yang tercatat pada Neraca Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan merupakan sub akun Piutang di BLUD yang dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya. Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan diklasifikasikan sebagai sub akun Piutang BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	BLUD RS Koja	9.310.790.133,00	4.976.003.491,00
2	BLUD RS Tarakan	2.227.756.218,00	4.699.423.781,00
3	BLUD RS Cengkareng	7.290.329.688,00	5.812.729.200,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	11.158.691.491,00	8.472.680.267,00
5	BLUD RS Budhi Asih	6.063.202.828,00	2.416.638.051,00
6	BLUD RS Duren Sawit	342.432.258,00	338.061.813,00
7	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah dan BLUD Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan	2.746.435.600,00	1.149.022.784,00
	Jumlah	39.139.638.216,00	27.864.559.387,00

2) Piutang BLUD Pelayanan Transportasi

Piutang BLUD Pelayanan Transportasi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp584.801.830,00,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut merupakan piutang BLUD pada UPT Perpustakaan yang merupakan tagihan lancar kepada pihak ke 3 dalam rangka Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional di lokasi milik BLUD UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan rincian lokasi sebagai berikut:

a) KSO Lingkungan Blok M	: Rp412.229.750,00
b) KSO Pelataran Boulevard Barat	: Rp136.000.000,00
c) KSO Artha Gading	: Rp 9.500.000,00
d) KSO Gading Batavia	: Rp 7.000.000,00
e) Parkir Tepi Jalan	: <u>Rp 20.072.080,00</u>
Jumlah	Rp584.801.830,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 Piutang BLUD Pelayanan Transportasi merupakan sub-sub akun Piutang di BLUD yang dikelompokkan dalam sub akun Piutang Lainnya. Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Piutang BLUD Pelayanan Transportasi diklasifikasikan sebagai sub akun Piutang BLUD.

3) Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi

Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp374.971.720,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut merupakan piutang pada UPT Taman Margasatwa Ragunan atas pemanfaatan danau seluas 4 hektar dengan CV SATU NAFAS berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 10/AK/BP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.

4) Piutang BLUD Lainnya

Piutang BLUD Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp27.784.388.761,00 dan Rp0,00. Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang BLUD Lainnya merupakan sub-sub akun Piutang di BLUD yang dikelompokkan dalam sub akun Piutang Lainnya. Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Piutang BLUD Lainnya diklasifikasikan sebagai sub akun Piutang BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	(BPLIP) UPK PPUMKMP Pulogadung	27.271.180.217,00	27.271.180.217,00
2	UPT Pengelola Perparkiran	0,00	280.440.000,00
3	BLUD RS Cengkareng	150.104.059,00	152.125.971,00
4	BLUD Transjakarta Busway	21.819.501,00	21.819.501,00
5	BLUD RS Tarakan	84.329.000,00	48.749.000,00
6	BLUD UPT Stadion Lebak Bulus	215.074.484,00	0,00
7	BLUD RS Pasar Rebo	41.881.500,00	0,00
	Jumlah	27.784.388.761,00	27.774.314.689,00

Rincian Piutang BLUD di UPK PPUMKMP Pulogadung per 31 Desember 2012 sebesar Rp27.271.180.217,00 sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Piutang Sewa SKH	1.678.665.220,00
2	Piutang Sewa Barak Kerja	39.796.000,00
3	Piutang Sewa Ruang Pamer	130.000.000,00
4	Piutang PHU dari KSO (Tanah 1,5 Ha)	20.342.000.000,00
5	Piutang PHU dari KSO (Tanah 0,394 Ha)	3.285.850.000,00
6	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO	98.168.000,00
7	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540,00
8	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000,00
9	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109,00
10	Piutang Pra Opreasional Business Center	1.274.052.348,00
11	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000,00
12	Piutang Karyawan	303.900.000,00
	Jumlah	27. 271.180.217,00

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

Piutang lainnya di BLUD RS Cengkareng per 31 Desember 2012 Rp150.104.059,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)
1	PPN ex PT RS Cengkareng	103.106.179,00
2	Piutang Karyawan (Short Kasir)	39.532.157,00
3	Piutang Pendidikan Karyawan	7.465.723,00
	JUMLAH	150.104.059,00

Piutang lainnya di BLUD RS Tarakan dan Stadion Lebak Bulus merupakan piutang atas sewa lahan.

Piutang lainnya di BLUD RS Pasar Rebo merupakan piutang atas biaya kepaniteraan klinik dengan Universitas YARSI.

Sedangkan Piutang lainnya di BLUD Transjakarta Busway merupakan piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007.

5.1.4.1.8 Piutang Dana Perimbangan

Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp40.510.071.353,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)
1	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi	27.841.973.623,00
2	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi	12.279.107.837,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Perikanan	276.308.091,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Cukai	112.681.802,00
Jumlah		40.510.071.353,00

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi, Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi, dan Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Perikanan merupakan selisih antara realisasi dana transfer TA 2012 untuk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Transfer Daerah Pemerintah Pusat TA 2012 (audited) dengan jumlah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kas Daerah tahun 2012. Seluruh piutang dana transfer tersebut telah diterima di Kas Daerah pada TA 2013.

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Cukai merupakan kekurangan penerimaan dana alokasi bagi hasil cukai TA 2011 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2012 tanggal 26 Desember 2012. Kekurangan penerimaan tersebut telah diterima di Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp112.681.802,00.

5.1.4.1.9 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Piutang Penjualan Barang Bergerak Kendaraan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.705.415.742,00 dan Rp647.865.846,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

5.1.4.1.10 Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.799.266.672,00 dan Rp6.010.554.773,00.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR.

Atas piutang-piutang TGR tersebut terdapat jaminan atas piutang yang berasal dari wajib bayar/debitur berupa Sertifikat tanah dan Akta Jual Beli tanah.

Klasifikasi umur piutang TP/TGR per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Jenis Kasus	Di bawah 5 Tahun	5 s.d 10 Tahun	Di atas 10 Tahun	Jumlah
1	Kasus Badan Peradilan	0,00	0,00	900.648.728,00	900.648.727,00
2	Kasus Kehilangan Mobil	344.863.492,00	238.504.800,00	102.166.222,00	685.534.514,00
3	Kasus Kehilangan Motor	16.770.000,00	3.015.625,00	3.570.000,00	23.355.625,00
4	Kasus Ketekoran Kas	11.281.518.943,00	197.032.000,00	0,00	11.478.550.943,00
5	Kasus Lain-lain	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
6	Kasus P3D	0,00	0,00	88.695.279,00	88.695.279,00
7	Kasus Walikota Jaksel	0,00	0,00	393.181.816,00	393.181.816,00
8	Kasus Wisma Jaya Raya	0,00	0,00	1.220.099.767,00	1.220.099.767,00
Jumlah		11.643.152.435,00	447.752.425,00	2.708.361.812,00	14.799.266.672,00

Selain jumlah tersebut, masih terdapat tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan tercatat sebesar Rp11.065.394.418,00, namun dari jumlah tersebut terdapat 8 kasus kerugian yang telah ditetapkan pembebanannya menjadi piutang sebesar Rp392.986.200,00, sehingga masih tersisa sebesar Rp10.672.408.218,00. Dari piutang sebesar Rp392.986.200,00 tersebut, telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp82.250.400,00.

Untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp162.894.898.999,00 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp120.164.998.098,00 sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp42.729.900.901,00.

5.1.4.1.11 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp19.129.947.636,00 dan sebesar Rp17.433.576.963,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Piutang Sewa Aset Daerah	10.363.190.477,00	8.209.981.629,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	4.001.816.564,00	4.143.541.564,00
3	Piutang Titik Reklame	4.764.940.595,00	5.080.053.770,00
	Jumlah	19.129.947.636,00	17.433.576.963,00

Klasifikasi umur Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Di bawah 5 Tahun	5 s.d. 10 Tahun	Di atas 10 Tahun	Jumlah
1	Sewa Aset	10.133.190.477,00	230.000.000,00	0,00	10.363.190.477,00
2	Kontribusi BOT/BTO	3.941.816.564,00	60.000.000,00	0,00	4.001.816.564,00
3	Sewa Titik Reklame	4.764.940.595,00	0,00	0,00	4.764.940.595,00
	Jumlah	18.839.947.636,00	290.000.000,00	0,00	19.129.947.636,00

Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Build, Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, Operate (BTO).

Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada lampiran 4.

5.1.4.1.12 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp96.373.461.207,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset merupakan sub akun Piutang Lainnya.

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - Sewa	8.814.217.504,00	6.390.562.039,00
2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO	87.559.243.703,00	91.141.214.678,00
	JUMLAH	96.373.461.207,00	97.531.776.717,00

Rekapitulasi saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset tersaji dalam lampiran 4.

5.1.4.1.13 Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp68.002.646.550,00 dan Rp82.806.023.066,00.

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.572,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit ex BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2012 telah diterima pembayaran sebesar Rp14.803.376.516,00, dengan nomor validasi 2012PBKT020000974 dan pembayaran tersebut diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

5.1.4.1.14 Piutang Penjualan Saham

Piutang penjualan saham per 31 Desember 2011 sebesar Rp47.871.975,00 merupakan kekurangan pembayaran atas divestasi saham PT Rheem Indonesia pada tahun 2010. Atas nilai piutang tersebut seluruhnya sudah disetorkan ke kas

daerah pada tanggal 1 Maret 2012 dengan nomor validasi 2012PBKT010004130, sehingga nilai Piutang Penjualan Saham per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

5.1.4.1.15 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.366.309.441,00, merupakan pencatatan akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan merupakan sub akun Piutang Lainnya.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 6 (enam) rekening bank pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2013	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	10
1	Bank DKI Cab. Balaikota	6,00%	1 Bulan	108-25-00424-9	11-Des-2012	752.836.722
2	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01-005175-40-7	14-Des-2012	1.067.749.277
3	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01-005268-40-4	14-Des-2012	244.412.909
4	Bank DKI Cab. Juanda	6,00%	1 Bulan	101-25-08463-6	16-Des-2012	212.686.836
5	Bank DKI Cab. Juanda	6,00%	1 Bulan	101-25-08464-4	16-Des-2012	46.890.655
6	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01-006200-40-9	24-Des-2012	41.733.042
Jumlah						2.366.309.441

5.1.4.1.16 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp10.492.265.788,00 dan Rp360.736.484.563,00 yang terdiri dari:

JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan	338.957.600,00	0,00
2. Piutang Bunga Deposito	1.972.602.740,00	2.902.739.726,00
3. Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
4. Piutang Tagihan Listrik dan Air	3.073.330.416,00	2.246.287.675,00
5. Piutang Sewa	0,00	7.099.814.420,00
6. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	688.235.032	0,00
7. Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	2.817.730.006,00
8. Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan sewa aset	0,00	97.531.776.717,00
9. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	2.515.206.855,00
10. Piutang di BLUD	0,00	55.638.874.076,00
11. Piutang Lain-lain	0,00	185.564.915.088,00
Jumlah	10.492.265.788,00	360.736.484.563,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp338.957.600,00 dan Rp0,00. Adapun saldo Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp338.957.600,00 seluruhnya merupakan piutang dividen milik BP THR Lokasari. Atas piutang tersebut, BP THR Lokasari telah melunasi seluruhnya pada tahun 2013.

b. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp1.972.602.740,00 dan Rp2.902.739.726,00. Piutang Bunga Deposito ini merupakan pencatatan akrual atas bunga rekening deposito Kas Daerah yang masih *outstanding* dan jatuh tempo pada tahun berjalan.

Rincian perhitungan piutang bunga deposito pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel 5.23 berikut.

Tabel 5.23
Perhitungan Akrua! Bunga Deposito
Per 31 Desember 2012

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrua!		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Bunga Piutang (Rp)
1	BANK BRI	0019.01.009392.40.9	13-Des-11	31-Des-11	18 hari	6,00%	500.000.000.000	1.479.452.055
2	BANK DKI	139.25.00555.5	25-Des-11	31-Des-11	6 hari	6,00%	500.000.000.000	493.150.685
								1.972.602.740

c. Piutang Tunjangan

Piutang Tunjangan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

d. Piutang Tagihan Listrik dan Air

Piutang Listrik dan Air per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp3.073.330.416,00 dan Rp2.246.287.675,00. Piutang Listrik dan Air merupakan tagihan listrik dan air di beberapa rumah susun yang belum dibayar oleh penghuni rumah susun yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

e. Piutang Sewa

Piutang Sewa per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.099.814.420,00, merupakan piutang sewa rumah susun dan piutang sewa lapangan sepak bola Stadion Lebak Bulus yang pada tahun 2012 diakui sebagai Piutang Retribusi dan Piutang BLUD.

f. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp688.235.032,00 dan Rp0,00. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi merupakan piutang atas pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi dengan perusahaan asuransi yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja.

g. Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.817.730.006,00.

Piutang tersebut merupakan piutang kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat di tahun 2011. Pada tahun 2012 telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah, sehingga saldo Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

h. Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp97.531.776.717,00.

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap akun Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset yang sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.12 tentang Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

i. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.515.206.855,00.

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap akun Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan yang sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.15 tentang Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

j. Piutang di BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing menjadi sebesar Rp0,00 dan Rp55.638.874.076,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Piutang Pelayanan kesehatan	0,00	27.864.559.387,00
2	Piutang BLUD Penyedia Jasa Lainnya	0,00	27.774.314.689,00
Jumlah		0,00	55.638.874.076,00

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap akun Piutang di BLUD yang sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.7 tentang Piutang BLUD, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

k. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp185.564.915.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Asuransi Dibayar di Muka	0,00	16.575.490.628,00
2	Uang Muka Kerja - SKPD	0,00	168.989.424.460,00
Jumlah		0,00	185.564.915.088,00

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap akun Asuransi Dibayar di Muka yang sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang Lain-lain, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.17 tentang Aset Lancar Lainnya, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

Sedangkan untuk saldo Uang Muka Kerja di SKPD per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp0,00 dikarenakan seluruh saldo Uang Muka kerja yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum telah selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.

Piutang Lainnya belum termasuk piutang konsinyasi atas kasus ganti rugi lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong seluas 11.682 meter².

Lahan yang digunakan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Serpong tersebut digugat masyarakat dan berperkara di Pengadilan. Dalam masa perkara tersebut, PT Jasa Marga

selaku pengguna lahan menitipkan uang ganti rugi sebesar Rp17.709.912.000,00 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai uang konsinyasi, sesuai Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 07/CON/2003 tanggal 29 Juli 2003.

Perkara telah diputus sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005, yang mengabulkan permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan permintaan pembayaran melalui Tim Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum.

5.1.4.1.17 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.923.237.564,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka	14.844.237.564,00	0,00
2	Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di BLUD	79.000.000,00	0,00
Jumlah		14.923.237.564,00	0,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Asuransi Dibayar di Muka dan Uang Muka Kerja merupakan sub akun Piutang Lain-Lain yang dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya. Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Asuransi Dibayar di Muka dan Uang Muka Kerja dikelompokkan dalam akun Aset Lancar Lainnya.

Saldo Belanja Dibayar dimuka merupakan Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp14.844.237.564,00 di antaranya adalah asuransi gedung dan kendaraan yang dikelola oleh BPKD

sebesar Rp11.778.444.868,00 serta asuransi kebakaran gedung rumah susun di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah sebesar Rp2.309.044.980,00, Asuransi Perpajakan oleh Dinas Perhubungan (UPT Pengelola Perpajakan) sebesar Rp200.735.216,00, Asuransi Akibat Bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp556.012.500,00.

Saldo Uang Muka Kerja per 31 Desember 2012 sebesar Rp79.000.000,00 merupakan Uang Muka Kerja yang terdapat di BLUD RS Cengkareng.

5.1.4.1.18 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp437.576.910.348,00 dan Rp530.477.129.539,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan harga pembelian / harga perolehan pada tanggal transaksi. Khusus untuk penilaian persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2012 merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca SKPD, di antaranya adalah:

- a. Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp33.032.673.392,00, di antaranya adalah komponen Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp32.812.114.693,60.

- b. Persediaan pada Dinas Kebersihan sebesar Rp15.864.646.667,00, di antaranya adalah ban kendaraan dinas operasional khusus sebesar Rp6.260.281.500,00 dan ban kendaraan dinas operasional TPST kota sebesar Rp3.196.560.950,00.
- c. Persediaan pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp15.846.938.604,00 di antaranya adalah alat laboratorium sebesar Rp8.307.852.499,00 dan bahan kimia sebesar Rp4.398.498.904,00. Nilai persediaan pada BLUD Labkesda sebesar Rp15.846.938.604,00 tersebut belum termasuk persediaan hibah yang berasal dari REDI dan USAID yang belum diketahui nilainya. Persediaan hibah tersebut di antaranya PCR 8-tube strips TBS0201, Factal Bovine Serum, EXO Sap IT Buffer, Penicillin and Streptomycin Solution, dan Viral Transport Medium.
- d. Persediaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp14.436.703.447,00. Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan hibah yang berasal dari BKKBN Pusat (APBN) sebesar Rp14.393.407.161,00 berupa alat kontrasepsi sebesar Rp12.480.813.363,00 dan alat kesehatan non alat kontrasepsi sebesar Rp1.912.593.798,00. Sedangkan nilai persediaan yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp43.296.286,00 berupa ATK, Barang Cetak, dan Card Reader.
- e. Persediaan pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp13.495.982.743,00, di antaranya adalah alat tulis kantor, cetakan khusus, dan cetakan umum.
- f. Persediaan pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan sebesar Rp9.946.201.593,00 di antaranya adalah alat/perengkapan pemadam sebesar Rp8.982.787.300,00.
- g. Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.866.757.389,00 di antaranya adalah bahan baku

bangunan sebesar Rp4.603.460.900,00 dan minyak pelumas sebesar Rp2.765.929.408,00.

- h. Persediaan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp9.768.156.635,00, di antaranya adalah alat/perlengkapan olahraga yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp4.611.842.560,00.

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 terdapat persediaan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp117.325.982.989,00, yang di antaranya berupa gedung dan bangunan, yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai
1	Pembangunan Gedung Islamic Center	Rp 98.255.366.707,00
2	Pembangunan Gedung DE Kejari Jakarta Selatan	Rp 11.136.907.860,00
3	Pembangunan Gedung Rutan Pondok Bambu	Rp 5.516.667.555,00
4	Pengembangan GOR TNI AU	Rp 264.668.240,00
5	Pembangunan Mesjid Komplek Marinir Cilandak, Jakarta Selatan	Rp 2.109.245.642,00
Jumlah		Rp 117.282.856.004,00

Pada tahun 2012 aset tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatannya direklasifikasi ke dalam kelompok aset tetap dan aset kerja sama dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gedung Islamic Center, Gedung Rutan Pondok Bambu, GOR TNI AU, dan Masjid Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan direklasifikasi sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan,
- b. Gedung DE Kejari Jakarta Selatan direklasifikasi sebagai Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 5.

5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp7.191.505.580.814,00 dan Rp6.023.955.690.786,00 terdiri dari:

5.1.4.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp836.797.591.237,00. Rekapitulasi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2011 tergambar pada tabel 5.24.

Tabel 5.24
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2011)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	271.577.125.000	832.473.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	4.324.522.622	4.324.522.622
IV	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III)	436.351.583.078	400.446.008.159	836.797.591.237
V	Saldo Kas dan Bank	-	177.832.208.159	177.832.208.159
VI	Dana di Pemanfaat	428.693.745.547	222.613.800.000	651.307.545.547
VII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)	428.693.745.547	400.446.008.159	829.139.753.706
VIII	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan sekarang.

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang BPMPKB) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola

dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi BPMPKB. Selain itu, dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat selisih sebesar Rp7.657.837.531,00 yang belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Pada tahun 2012, nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir tercatat sebesar Rp889.968.530.527,00.

Mutasi tambah Investasi Non Permanen – Dana Bergulir sebesar Rp53.170.939.290,00 dijelaskan sebagai berikut.

- a. Mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1997/2012, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penempatan Dana Bergulir sebesar Rp53.400.000.000,00;
- b. Pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp2.040.000.000,00;
- c. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.269.060.710,00 yang merupakan koreksi atas saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir karena atas sejumlah nilai tersebut masih tercatat pada akun Kas Transito.

Rekapitulasi Dana Bergulir per 31 Desember 2012 tersaji pada tabel 5.25.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2012)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	4.095.461.912	4.095.461.912
IV	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III)	436.351.583.078	453.616.947.449	889.968.530.527
V	Saldo Kas dan Bank	-	299.314.906.069	299.314.906.069
VI	Dana di Pemanfaat	428.693.745.547	154.302.041.380	582.995.786.927
VII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)	428.693.745.547	453.616.947.449	882.310.692.996
VIII	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2012 sebesar Rp436.351.583.078,00, yaitu dana awal sebesar Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00. Pengalihan dana dari Bina Ekonomi PPMK ke rekening UPT Dana Bergulir tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK.

Rincian nilai investasi Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2012 sebesar Rp436.351.583.078,00 tersaji pada tabel 5.26.

Tabel 5.26
Rincian Nilai Investasi Bina Ekonomi PPMK di BPMPKB
Periode 2001 sampai dengan 2007 setelah Pengalihan ke UPDB
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp 4.387.726.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp 43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp 8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp 332.579.462.295
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp 13.698.243.589
6	Data Tidak Lengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp 26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp 7.657.837.531
Jumlah		Rp 436.351.583.078

Dari nilai investasi sebesar Rp436.351.583.078,00 tersebut, terdapat dana bergulir kepada masyarakat dengan kondisi data tidak lengkap / tidak diketahui pemanfaatnya sebesar Rp26.511.008.225. Selain itu, terdapat saldo dana bergulir yang belum terjelaskan sebesar Rp7.657.837.531. Saldo belum terjelaskan tersebut merupakan selisih kurang antara Dana Awal dana bergulir (total realisasi dana pemerintah dari Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007) dibandingkan dengan dana yang ada di pengelola (267 Dewan Kelurahan) berdasarkan laporan auditor independen per 31 Desember 2009.

Atas saldo Piutang Dana Bergulir yang dikelola Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Asistensi dan Satgas Penyelesaian Permasalahan Bina Ekonomi PPMK. BPMPKB ditunjuk sebagai penanggung jawab tim tersebut.

Prosedur kerja Tim Asistensi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007. Upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Tim Asistensi

dan Satgas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 berupa penagihan kepada para pemanfaat yang menunggak dengan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Masyarakat pemanfaat yang masih mempunyai tunggakan dengan kriteria enggan Mengembalikan; atau Usahnya Bangkrut; dilakukan tindakan secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset atau, membuat surat permohonan tidak mampu.
2. Pemanfaat yang Pindah Alamat Tanpa Laporkan; atau Meninggal Dunia dilakukan tindakan secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi alamat ahli waris untuk diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset, membuat surat permohonan tidak mampu atau, membuat surat keterangan dari Ketua RT atau RW bahwa pemanfaat tidak diketahui tempat tinggalnya.
3. Para pengelola yang menyalahgunakan dana dan/atau dana PPMK tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang terdiri atas Dewan Kelurahan; Unit Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPMK); dan Tim Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW) dilakukan tindakan secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset atau, penyerahan permasalahan untuk diselesaikan oleh pihak yang berwajib.
4. Pegawai Negeri Sipil di kelurahan yang menyalahgunakan/meminjam dan PPMK, namun belum ada penyelesaian dilakukan tindakan secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset atau, penyerahan permasalahan untuk diselesaikan oleh walikota atau bupati.

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 2012 per 31 Desember 2012 sebesar Rp453.616.947.449,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp4.095.461.912,00. Dari nilai investasi sebesar Rp453.616.947.449,00 tersebut, tercatat sebesar Rp154.302.041.380,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp299.314.906.069,00 merupakan saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir.

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih. Penyisihan ini dilakukan agar nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp440.708.790.724,00, sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp449.259.739.803,00.

Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada di pemanfaat disajikan dalam tabel 5.27.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No	Uraian	0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	Akumulasi Penyisihan
		5%	10%	50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	-	-	-	428.693.745.547	428.693.745.547
II	Penyisihan	-	-	-	428.693.745.547	428.693.745.547
III	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	142.946.612.252	2.025.000.000	9.330.429.128	-	154.302.041.380
IV	Penyisihan	7.147.330.613	202.500.000	4.665.214.564	-	12.015.045.177
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih (II + IV)	7.147.330.613	202.500.000	4.665.214.564	428.693.745.547	440.708.790.724

5.1.4.2.2 Investasi Permanen

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp6.742.245.841.011,00 dan Rp5.187.158.099.549,00 dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 6.

Penilaian investasi permanen tersebut terdiri dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Untuk pencatatan dengan

metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang tercatat pada laporan keuangan *audited* perusahaan dikalikan dengan persentase kepemilikan. Sedangkan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Berikut ringkasan penjelasan penilaian investasi permanen dengan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp6.400.984.664.011,00 dan Rp4.841.011.272.549,00. Dengan rincian dalam tabel 5.28 sebagai berikut:

Tabel 5.28
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0,00	0,00
2.	PD Dharma Jaya	100%	33.148.897.467,00	37.425.012.275,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	100.858.261.189,00	89.961.884.886,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	376.135.756.773,00	387.248.131.582,00
5.	PD PAL Jaya	100%	125.021.761.420,00	120.542.934.774,00
	Jumlah		635.164.676.849,00	635.177.963.517,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	1.194.073.167.632,00	609.828.914.716,00
2.	PT Food Station Tjipinang	74,67%	13.292.586.656,00	11.995.198.013,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	112.156.667.409,00	104.573.943.127,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	154.000.248.575,00	145.586.286.563,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	904.219.206.868,00	821.255.307.513,00
6.	PT Ratax Armada	28,00%	364.099.431,00	455.043.277,00

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
7.	PT Jakarta Propertindo	99,93%	815.081.100.620,00	683.192.751.178,00
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,91%	1.934.697.119.531,00	1.246.854.835.200,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	476.581.488.104,00	466.835.609.931,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,70%	161.354.302.336,00	115.255.419.514,00
	Jumlah		5.765.819.987.162,00	4.205.833.309.032,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		6.400.984.664.011,00	4.841.011.272.549,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merealisasikan pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp618.477.833.261,00, terdiri dari:

a) Penambahan penyertaan modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) Tahun 2012 adalah sebesar Rp68.477.833.261,00 yang alokasinya berasal dari APBD murni sebesar Rp65.000.000.000,00 dan dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.477.833.261,00. Pencairan penyertaan modal dan dana hibah ini mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 637 tahun 2012 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1525 tahun 2012.

Adapun pendapatan hibah yang merupakan pemberian pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008. *Loan Agreement* tersebut menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan atas sejumlah dana tersebut, Pemerintah Pusat menghibahkan kepada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan. Dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan jasa konsultasi bagi pelaksanaan kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta.

Pendapatan hibah ini kemudian diberikan kepada PT Mass Rapid Transit sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dialokasikan dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Sesuai dengan RUPS LB pada tanggal 3 Oktober 2012 yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H, disetujui adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT MRT Jakarta senilai Rp10.013.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat kenaikan persentase kepemilikan dari 99,68% di tahun 2011 menjadi 99,70% di tahun 2012.

Atas pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp68.477.833.261,00, berdasarkan Laporan Keuangan PT MRT Jakarta per 31 Desember 2012 sebesar Rp65.245.611.052,00 masih tercatat sebagai Modal disetor lainnya pada komponen ekuitas PT MRT Jakarta.

- b) Penambahan penyertaan modal pada PT Bank DKI sebesar Rp500.000.000.000,00 mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Nomor 795/2012 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1493/2012, sehingga terdapat kenaikan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank DKI dari 99,84% menjadi 99,91%.

c) Penambahan penyertaan modal pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp50.000.000.000,00 mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 796/2012.

Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 7 Desember 2011 oleh Aryanti Artisari, SH.Mkn mengenai pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Jakarta Propertindo, disetujui adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Jakarta Tourisindo senilai Rp100.000.000.000,00 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat kenaikan persentase kepemilikan dari 99,92% di tahun 2011 menjadi 99,93% di tahun 2012.

Atas pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00, berdasarkan Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2012 seluruhnya masih tercatat sebagai Modal disetor lainnya pada komponen ekuitas PT Jakarta Propertindo.

2) Pada tahun 2012, terdapat hasil penjualan tanah di Rawa Kebo oleh PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp6.500.000.000,00. Hasil Penjualan tersebut dicatat sebagai penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo, dan telah disahkan dalam RUPS LB tanggal 24 April 2012 melalui Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Oleh karena itu, terdapat kenaikan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Tourisindo dari 99,34% menjadi 99,35%.

3) Pada tahun 2011, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2011.

Sedangkan di tahun 2012, PD Dharma Jaya telah menyampaikan Laporan Keuangan Audited tahun 2012. Dari laporan keuangan tersebut, PD Dharma Jaya mengalami rugi usaha sebesar Rp2.926.014.097,00, dikarenakan laba kotor yang diperoleh sebesar Rp6.175.901.778,00, dan beban usahanya sebesar Rp9.101.915.875,00.

- 4) PT Pembangunan Jaya belum menyerahkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2012. Nilai penyertaan PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp1.194.073.167.632,00. Nilai tersebut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Tahun 2011. Posisi laporan keuangan tahun 2012 sedang dalam proses audit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan.
- 5) Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM audited tahun 2011 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp932.775.708.432,00 dan audited tahun 2012 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp848.521.691.245,00.
- 6) Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:
 - a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
 - b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.

- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp341.261.177.000,00 dan Rp346.146.827.000,00 dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.29.

Tabel 5.29
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk.	4,81%	0,00	4.885.650.000,00
3.	PT Cemani Toka	35,00%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
4.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
5.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
6.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,47%	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
7.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
8.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta	51,00%	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya			341.261.177.000,00	346.146.827.000,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan Investasi yang menggunakan metode biaya:

- 1) Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani akta jual beli saham (divestasi) atas penyertaan modal di PT Alakasa Industrindo Tbk dengan nilai sebesar Rp4.885.650.000,00. Hal ini merupakan tindak lanjut atas:
 - a) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham (divestasi) Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

pada PT Jaya Nur Sukses, PT Pakuan International, PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo Tbk, PT Determinan Indah dan PT Rheem Indonesia.

b) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2165/2010 tentang Penetapan Harga Jual Saham Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada PT Alakasa Industrindo Tbk, PT Jaya Nur Sukses, PT Pakuan Internasional, PT Bumi Grafika Jaya, PT Determinan Indah dan PT Rheem Indonesia.

2) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (35%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

3) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14 Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RS Haji Jakarta.

Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan masih dalam sengketa.

Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51% saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham. Sejak adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji Jakarta untuk sementara dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk

berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008 tanggal 4 April 2008 dan secara *de facto* PT RS Haji Jakarta dalam keadaan tidak aktif.

Atas hal itu terdapat tiga putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222PK/Pdt/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008.
- b) Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 441K/TUN/2009 tanggal 2 Maret 2011 yang menguatkan hasil RUPS-LB PT RS Haji Jakarta tanggal 22 Maret 2008 yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu mengangkat dr. Salimar Salim sebagai Direktur PT RS Haji Jakarta.
- c) Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 1177K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang membatalkan RUPS-LB PT RS Haji Jakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2008 dan memerintahkan Direksi PT RS Haji Jakarta yang lama yaitu dr. Suprijanto Rijadi, dkk untuk segera melaksanakan RUPS-LB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor 10/SRT.PDT.PK/2013/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 93/PDT.G/2008/PN.JKT.PST pada tanggal 13 Mei 2013 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2011 dan 2012 jumlah ekuitas RS Haji Jakarta sebesar

Rp101.494.711.962,00 dan Rp106.707.065.202,00. RS Haji Jakarta sejak tahun 2005 hingga saat ini belum pernah memberikan kontribusi berupa pendapatan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan keuangan RS Haji Jakarta tahun 2012 unaudited menunjukkan perolehan laba sebesar Rp5.212.353.240,00 dan saldo laba ditahan tercatat sebesar Rp6.398.787.202,00.

Berdasarkan surat Direktur RS Haji Jakarta nomor 108/RSHJ/DIR/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyatakan bahwa posisi laporan keuangan PT RS Haji Jakarta tahun 2012 audited belum dapat disampaikan karena terkendala masalah Sistem Informasi Manajemen (SIM).

5.1.4.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp342.279.347.954.770,00 dan sebesar Rp335.071.237.986.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Tanah	279.151.046.794.830,00	280.270.515.025.054,00
2	Peralatan dan Mesin	14.464.442.456.567,00	11.292.005.795.458,00
3	Gedung dan Bangunan	21.566.584.083.436,00	17.708.599.595.514,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.831.416.473.846,00	21.875.489.499.979,00

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya	1.859.808.199.687,00	1.326.742.286.822,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.406.049.946.404,00	2.597.885.783.289,00
	Jumlah	342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00

Daftar mutasi Aset Tetap selama tahun 2012, tersaji pada lampiran 7. Mutasi Aset Tetap Tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp10.438.675.998.502,00 yang terdiri dari:

a. Penambahan aset tetap dari Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.784.365.760.426,00, terdiri dari:

1. Tanah	Rp	489.949.683.873,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	3.250.158.282.085,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.025.990.009.722,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.487.037.843.973,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	538.248.170.756,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	992.981.770.017,00
Jumlah	Rp	8.784.365.760.426,00

Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp258.574.791.216,00, Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp126.482.459.794,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp50.982.827.188,00, dan Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar Rp45.862.786.165,00.

2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.322.736.664.730,00, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp624.613.101.670,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp274.173.249.457,00.

3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp533.445.532.276,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp468.139.975.135,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp447.340.547.902,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.046.268.810.779,00, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp173.692.086.323,00, dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp101.041.683.680,00.
5. Aset Tetap Lainnya, di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp392.666.034.716,00 dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp95.501.966.846,00.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp992.981.770.017,00 merupakan belanja modal Tahun Anggaran 2012 untuk perolehan aset yang belum dapat dimanfaatkan di Tahun Anggaran 2012, terdiri dari:

a. Tanah	Rp	3.764.852.600,00
b. Peralatan dan Mesin	Rp	12.811.709.915,00
c. Gedung dan Bangunan	Rp	501.771.143.606,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	474.634.063.896,00
Jumlah	Rp	992.981.770.017,00

Penambahan KDP berupa Tanah di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.674.513.700,00 dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp415.078.900,00 yang merupakan biaya inventarisasi dan sosialisasi pembebasan tanah. Sementara itu, penambahan KDP berupa Gedung dan Bangunan di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp 247.903.207.825,00,

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp35.029.285.900,00, RSUD Pasar Rebo sebesar Rp65.499.780.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp43.606.829.497,00. Selain itu, penambahan KDP berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp474.633.813.896,00.

- b. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja Modal sebesar Rp542.644.441.069,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	3.157.389.400,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	26.272.414.253,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	363.816.610.944,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	98.313.001.757,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	3.504.922.825,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	47.580.101.890,00
Jumlah	Rp	542.644.441.069,00

- c. Penambahan Aset Tetap dari Dana Operasional BLUD sebesar Rp 43.702.405.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	8.085.802.922,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	35.543.418.749,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	65.890.000,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	7.294.200,00
Jumlah	Rp	43.702.405.871,00

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.085.802.922,00 di antaranya terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp3.742.140.631,00, RSUD Cengkareng sebesar Rp1.823.153.369,00 dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp1.086.051.872,00 sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.543.418.749,00 di

antaranya terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp35.357.621.820,00.

d. Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga sebesar Rp31.515.823.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	2.317.871.200,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	4.763.861.228,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	23.878.790.580,00
4. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	555.300.087,00
Jumlah	Rp	31.515.823.095,00

Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga di antaranya terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.894.684.700,00 berupa Peralatan dan Mesin dan sebesar Rp2.874.004.760,00 berupa Gedung dan Bangunan. Disamping itu terdapat penambahan aset di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp23.878.790.580,00 berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dan sebesar Rp481.126.587,00,00 berupa Kostruksi Dalam Pengerjaan.

e. Penambahan Aset Tetap dari Hibah dan Tukar Menukar sebesar Rp38.140.505.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	14.851.507.437,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	23.288.998.073,00
Jumlah	Rp	38.140.505.510,00

Dari nilai tersebut, penambahan Aset Tetap dari hibah sebesar Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	13.123.217.806,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	17.574.826.713,00
Jumlah	Rp	30.698.044.519,00

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.123.217.806,00 di antaranya terdapat di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.987.038.100,00 berupa peralatan laboratorium dan peralatan pelatihan *Competency Based Training* yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.556.610.882.00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.489.837.024.00. Selain itu, penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.574.826.713,00 seluruhnya terdapat di Dinas Olahraga dan Pemuda berupa gedung dan bangunan atas pelaksanaan SEA Games XXXVI/2011.

Aset hibah tersebut belum termasuk aset tetap Tanah dan Bangunan dari Kepolisian RI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan sebagai Depo Lansir MRT. Aset hibah terdiri atas tanah seluas 8.518 m² dengan sertifikat nomor 230, tanah seluas 6.221 m² dengan sertifikat nomor 231 dan bangunan seluas 1.660 m² yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 41, Lebak Bulus, Cilandak. Hibah tersebut dituangkan dalam BAST Sementara No. BA/1718/XI/2012/SSARPRAS dan BAST Sementara No. 4450/-076.25 tanggal 21 November 2012 sementara Berita Acara Serah Terima Aset Definitif masih menunggu selesainya surat persetujuan hibah dari Menteri Keuangan RI.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hasil proses tukar menukar terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.467.661.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp3.246.510.360,00. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan pencatatan atas gedung Puskesmas Kecamatan Setiabudi dan Puskesmas Kecamatan Tebet sebagai hasil tukar menukar aset Kompleks Kantor Kelurahan Setiabudi yang terdiri dari kantor lurah, puskesmas, rumah dinas lurah

dan rumah dinas dokter, yang terletak di Jalan Setiabudi Barat VII RT 003 RW 003, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 3.165 m² milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan aset milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang terletak di Jalan Setiabudi Barat RT 004 RW 004, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 2.848 m² sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tentang Tukar Menukar Tanah Beserta Bangunan Berupa Kompleks Kantor Kelurahan Setiabudi tanggal 24 September 2008 yang belum tercatat pada laporan keuangan *audited* tahun 2011.

- f. Penambahan Aset Tetap sebesar Rp998.307.062.531,00 merupakan hasil koreksi lain-lain di antaranya terjadi karena koreksi kurang catat, reklasifikasi antar aset tetap dan penyelesaian konsinyasi aset tetap berupa tanah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	158.073.206.004,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	213.527.463.520,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	213.569.654.647,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	200.209.538.325,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	166.237.640.005,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	46.689.560.030,00
Jumlah	Rp	998.307.062.531,00

Dari penambahan tersebut terdapat penambahan Aset Tetap dari koreksi kurang catat/salah catat sebesar Rp234.129.186.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	93.347.972.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	28.713.588.522,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	63.015.192.021,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	2.362.874.217,00
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	46.689.560.030,00
Jumlah	Rp	234.129.186.790,00

Penambahan tersebut di antaranya terdapat di Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp16.562.279.000,00 berupa tanah dan sebesar Rp37.561.259.697,00 berupa gedung dan bangunan, Dinas Pendidikan sebesar Rp14.315.948.325,00 berupa peralatan dan mesin dan sebesar Rp10.132.761.000,00 berupa Gedung dan Bangunan, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar 1.503.353.600,00 berupa aset tetap lainnya, dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp59.911.726.000,00 berupa tanah dan sebesar Rp43.794.763.925,00 berupa KDP.

2. Pengurangan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 3.230.566.029.848,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar Rp62.903.752.119,00 terdiri dari:

1. Tanah	Rp	6.480.000.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	16.119.526.701,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	40.304.225.418,00
Jumlah	Rp	62.903.752.119,00

Penghapusan aset tetap Tanah seluruhnya terdapat di Dinas Kesehatan sebagai bagian dari proses tukar menukar aset tetap dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 693/2008 tentang Tukar Menukar dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan

Tanah dan Bangunan Milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912.

- b. Pengurangan Aset Tetap karena diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp31.673.949.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	28.467.549.109,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	1.422.602.617,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	1.783.797.609,00
Jumlah	Rp	31.673.949.335,00

Aset tetap yang diserahkan tersebut berasal dari belanja modal tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran sebelumnya.

- c. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap ke persediaan sebesar Rp129.396.008.286,00 karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	65.718.332.311,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	11.231.169.814,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	9.642.679.098,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	42.803.827.063,00
Jumlah	Rp	129.396.008.286,00

- d. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Rusak Berat sebesar Rp96.822.324.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	82.908.770.442,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	13.911.522.000,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	2.031.920,00
Jumlah	Rp	96.822.324.362,00

- e. Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp2.909.769.995.746,00 merupakan hasil koreksi lain-lain di antaranya terjadi karena koreksi salah catat/pencatatan ganda, reklasifikasi antar aset tetap dan

konsinyasi aset tetap berupa tanah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	1.764.168.509.501,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	149.660.561.745,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	302.540.532.216,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	561.958.272.097,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	130.760.879.829,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	681.240.358,00
Jumlah	Rp	2.909.769.995.746,00

Pengurangan aset tetap tersebut di antaranya terjadi karena salah catat/pencatatan ganda yaitu:

1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.441.393.142.000,00 merupakan koreksi salah catat tanah saluran, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp140.220.000.000,00 berupa tanah yang sudah tercatat sebagai aset PT Jakarta Tourisindo tetapi masih tercatat di Dinas Perindustrian dan Energi serta Dinas Kelautan dan Pertanian sebesar Rp75.250.000.000,00 berupa lahan hutan lindung yang bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1995.
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp48.548.361.125,00 berupa UHF Tentra yang sudah tercatat Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas Olahraga sebesar Rp24.378.820.294,00 berupa Gelanggang Olahraga di Gelanggang Remaja Jakarta Barat dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

sebesar Rp36.285.642.697,00 berupa gedung parkir Kantor Walikota Jakarta Barat yang telah dicatat di Kantor Walikota Jakarta Barat.

3. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011		Rp 2.597.885.783.289,00
Penambahan:		
Belanja Modal KDP	Rp 992.981.770.017,00	
Kapitalisasi Non Belanja Modal	Rp 47.580.101.890,00	
Hutang Pihak ketiga	Rp 555.300.087,00	
Koreksi tambah kurang catat	Rp 46.689.560.030,00	
Jumlah Penambahan		Rp 1.087.806.732.024,00
Pengurangan:		
KDP selesai dikerjakan	Rp 2.278.961.328.551,00	
- Peralatan dan Mesin	Rp 98.060.000,00	
- Gedung dan Bangunan	Rp 1.560.421.986.624,00	
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 718.022.860.427,00	
- Aset Tetap Lainnya	Rp 418.421.500,00	
Koreksi Lain-lain	Rp 681.240.358,00	
Jumlah Pengurangan		Rp 2.279.642.568.909,00
Saldo per 31 Desember 2012		Rp 1.406.049.946.404,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat di SKPD:

- a. Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pembangunan jalan layang non tol (JLNT) Antasari - Blok M sebesar Rp331.624.462.347,00 dan JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang sebesar Rp178.776.028.556,00
- Paket pekerjaan JLNT Antasari - Blok M terdiri dari lima paket yaitu Pasar Cipete, Cipete Utara, Taman Brawijaya, Prapanca dan Lapangan Mabak dengan nilai sebesar Rp1.349.690.162.186,00. Tiga dari lima paket pekerjaan tersebut mengajukan klaim biaya tambah karena adanya

penyesuaian dengan keadaan lapangan (perubahan desain dan penambahan volume) yaitu paket Pasar Cipete, Taman Brawijaya dan Prapanca. Perubahan desain tersebut menyebabkan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan paket pekerjaan hingga tanggal 15 Desember 2012, kecuali paket Pasar Cipete yang memerlukan perpanjangan waktu lebih lama karena terkendala oleh lahan yang baru dibebaskan di bulan Desember 2012. Pada akhir Tahun Anggaran 2012, empat dari lima paket pekerjaan yaitu Cipete Utara, Taman Brawijaya, Prapanca dan Lapangan Mabak telah selesai dan diserahkan sebesar Rp1.018.065.699.839,00 sedangkan satu paket pekerjaan yaitu paket Pasar Cipete masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp331.624.462.347,00.

Ruas JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang dibagi menjadi 3 paket pekerjaan yaitu Casablanca, Satrio dan Mas Mansyur dengan nilai sebesar Rp767.420.352.807,00. Pelaksana ketiga paket pekerjaan tersebut seluruhnya mengajukan klaim biaya tambah karena adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan (perubahan desain dan penambahan volume). Perubahan desain tersebut dikarenakan adanya persyaratan bahwa desain jalan layang di jalan Casablanca, Satrio dan Mas Mansyur harus mengikuti ketentuan dalam Panduan Perencanaan Kota/*Urban Design Guide Line (UDGL)* yaitu:

1. Jarak antara dua balok box girder tidak terlalu rapat dan kolom harus tinggi agar cahaya matahari bisa masuk menembus ke bawah, sehingga tanaman di bawah dapat tumbuh, mengingat konsep penghijauan di dalam kota harus diutamakan.

2. Bentuk kolom dan box girder harus artistik.

Dengan adanya ketentuan *UDGL* tersebut, terjadi perubahan desain yang cukup kompleks untuk paket Mas Mansyur karena terdapat pipa air baku di sisi selatan sehingga ruas JLNT diatas Jl. Sudirman dipindahkan ke sisi utara.

Perubahan desain tersebut menyebabkan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan paket pekerjaan hingga tanggal 15 Desember 2012, kecuali paket Mas Mansyur yang membutuhkan waktu pelaksanaan hingga bulan Juni 2013. Pada akhir TA 2012, dua dari tiga paket pekerjaan yaitu paket Casablanca dan Satrio telah selesai dan diserahterimakan sebesar Rp588.644.324.250 sementara satu paket pekerjaan yaitu paket Mas Mansyur masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp178.776.028.556,00.

Dana yang diperlukan untuk membiayai penyelesaian pekerjaan dan pembayaran klaim pekerjaan tambah sudah tersedia di Tahun Anggaran 2013.

- b. Dinas Pendidikan, antara lain pembangunan dan rehabilitasi total gedung sekolah sebesar Rp304.151.725.247,00;
- c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen sebesar Rp84.535.189.400,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersaji dalam lampiran 8.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2012 tersebut di atas sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum

Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (*heritage assets*) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap dan belum dilakukan revaluasi pada sensus tahun 2008.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan proses sertifikasi tanah. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah dilakukan pensertifikatan untuk 239 bidang tanah seluas 1.735.156 m². Dari jumlah tersebut telah diperoleh sertifikat untuk 55 bidang tanah, seluas 218.390 m² dan 184 bidang tanah, seluas 1.516.766 m² masih dalam proses sertifikasi.

Pemprov DKI telah melakukan upaya penyelesaian atas aset tanah yang bermasalah pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung diantaranya:

1. Tujuh bidang tanah seluas 136.516 m² masih dalam proses di tingkat pengadilan negeri;
2. Delapan bidang tanah dalam proses di tingkat pengadilan tinggi;
3. Enam bidang tanah seluas 304.443 m² dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
4. Tujuh bidang tanah seluas 235.221 m² dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas ± 78 ha milik PT Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Atas perkara tersebut, Pemprov. DKI Jakarta melakukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Upaya hukum Perlawanan (*derden verzet*) atas penetapan eksekusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162 m², di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m² dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m². Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

5.1.4.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp791.015.263.995,00. Selama tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp49.061.900.213,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp840.077.164.208,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2012 tersaji dalam tabel 5.30 sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2013	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo Awal 31 Des 2011	Bunga Jatuh Tempo Jan-Des 2012	Saldo Dana Cadangan Tanggal Jatuh Tempo
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
1	Bank DKI Cab. Balaikota	6,00%	1 Bulan	108-25-00424-9	11-Des	215.558.875.542	13.428.960.651	228.987.836.193

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2013	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo Awal 31 Des 2011	Bunga Jatuh Tempo Jan-Des 2012	Saldo Dana Cadangan Tanggal Jatuh Tempo
2	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01- 005175- 40-7	14-Des	359.813.240.948	22.273.510.213	382.086.751.161
3	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01- 005268- 40-4	14-Des	82.362.969.383	5.098.512.870	87.461.482.253
4	Bank DKI Cab. Juanda	6,00%	1 Bulan	101-25- 08463-6	16-Des	81.197.753.152	5.058.574.778	86.256.327.930
5	Bank DKI Cab. Juanda	6,00%	1 Bulan	101-25- 08464-4	16-Des	17.901.511.493	1.115.253.999	19.016.765.492
6	BRI Cab. Jakarta Kota	6,00%	1 Bulan	0019-01- 006200- 40-9	24-Des	34.180.913.477	2.087.087.702	36.268.001.179
Jumlah						791.015.263.995	49.061.900.213	840.077.164.208

5.1.4.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp25.835.540.271.031,00 dan Rp25.351.783.833.367,00 dengan rincian dalam tabel 5.31 sebagai berikut:

Tabel 5.31
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	68.109.789.672,00	37.890.238.255,00
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.317.851.376.057,00	3.160.513.773.625,00
3. Aset Tidak Berwujud	41.639.162.110,00	13.192.113.229,00
4. Aset di BP THR Lokasari	12.593.785.847,00	12.571.834.631,00
5. Aset Lain-Lain	22.395.346.157.345,00	22.127.615.873.627,00
Jumlah Aset Lainnya	25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

5.1.4.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp68.109.789.672,00 dan Rp37.890.238.255,00.

5.1.4.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp3.317.851.376.057,00 dan Rp3.160.513.773.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	339.015.103.572,00	339.015.103.572,00
2	Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.021.276.911.132,00	1.008.667.348.780,00
3	Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
4	Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.689.204.485.353,00	1.544.476.445.273,00
	Jumlah	3.317.851.376.057,00	3.160.513.773.625,00

Pada Tahun Anggaran 2011 terdapat penambahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan PT Jaya Real Property berupa pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Penambahan PKS ini tidak menambah nilai aset kerjasama karena bentuk perjanjiannya merupakan BOT.

Aset Kerja Sama Pihak Ketiga Lainnya merupakan barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi (a) Sewa Umum; (b) Sewa Umum dalam Proses; (c) Menara Telkom; dan (d) Pinjam Pakai. Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dari Tahun 2011 ke 2012 sebesar Rp157.337.602.432,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) sebesar Rp12.609.562.352,00 merupakan penambahan aset kerjasama dalam bentuk

BTO yang berasal dari penyerahan Yayasan Bukit Sion berdasarkan BAST tanggal 9 November 2012 berupa bangunan gedung sekolah senilai Rp10.689.612.352,00 dan kelengkapan bangunan sekolah senilai Rp1.919.950.000,00.

b. Mutasi tambah Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp144.728.040.080,00 terdiri dari:

- 1) Yayasan Ancol Barat yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana pendidikan dengan nilai tanah sebesar Rp585.480.000,00;
- 2) Yayasan Muslim Bojong Indah yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana ibadah dengan nilai tanah sebesar Rp163.800.000,00 dan bangunan sebesar Rp1.471.250.000,00. Aset yang disewakan ini berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama pengembang Bojong Permai;
- 3) Yayasan Suhargo Gondokudumo yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana pendidikan dengan nilai tanah sebesar Rp7.814.016.000,00 dan bangunan sebesar Rp6.139.188.493,00. Aset yang disewakan ini berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama pengembang PT Satwika Permai Indah;
- 4) Yayasan Pantara yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana perdagangan dengan nilai tanah sebesar Rp4.158.336.000,00. Aset yang disewakan ini berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama pengembang PT TCP Internusa;
- 5) PT Wiradarma Sportindo yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana olahraga dengan nilai tanah sebesar

Rp12.049.500.000,00. Aset yang disewakan ini berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama pengembang PT Summarecon Agung;

- 6) Gereja Tiberias Indonesia yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana ibadah dengan nilai bangunan sebesar Rp31.071.945.000,00. Aset yang disewakan ini berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum yang diserahkan tahun 2012;
- 7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk pinjam pakai aset berupa tanah dan bangunan eks. Kantor Lurah Bungur senilai Rp1.121.770.000,00, tanah dan bangunan eks. Sudin Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara senilai Rp1.926.414.000,00, tanah dan bangunan eks. Kantor BKKBD Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp2.911.454.000,00, tanah dan bangunan eks Kantor Kecamatan Mampang Prapatan senilai Rp13.104.882.755,00, dan tanah dan bangunan eks. Kantor Kecamatan Pulo Gadung senilai Rp4.612.440.000,00; dan
- 8) Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk pinjam pakai aset di Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat berupa tanah senilai Rp15.212.870.000,00 dan bangunan senilai Rp42.384.693.832,00.

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO tersaji pada lampiran 9.

5.1.4.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp41.639.162.110,00 dan Rp13.192.113.229,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	15.099.635.266,00	1.771.311.860,00
2.	Kota Administrasi Jakarta Utara	8.800.701.766,00	8.785.701.766,00
3.	Dinas Pelayanan Pajak	7.824.149.839,00	0,00
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.963.397.830,00	0,00
5.	Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan	1.817.522.959,00	0,00
6.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	1.540.541.458,00	1.536.349.358,00
7.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.351.537.000,00	0,00
8.	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.121.873.575,00	530.012.075,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	801.494.200,00	0,00
10.	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	720.572.747,00	194.280.000,00
11.	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	192.856.270,00	138.213.770,00
12.	Dinas Sosial	158.776.900,00	158.776.900,00
13.	Dinas Pendidikan	95.622.500,00	48.757.500,00
14.	Dinas Kesehatan	48.510.000,00	13.860.000,00
15.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	39.600.000,00	14.850.000,00
16.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	37.369.800,00	0,00
17.	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	25.000.000,00	0,00
	Jumlah	41.639.162.110,00	13.192.113.229,00

Beberapa bentuk Aset tidak berwujud tersebut diantaranya berupa:

- 1) E-book dan naskah elektronik di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- 2) Perangkat lunak (*software*) *Building Automation System* dan sistem proteksi dini kebakaran yang berfungsi untuk keamanan gedung di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- 3) Sistem untuk pengelolaan pajak daerah di Dinas Pelayanan Pajak.

5.1.4.5.4 Aset di BP THR Lokasari

Saldo Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp12.593.785.847,00 dan Rp12.571.834.631,00. Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari. Saat ini BP THR Lokasari sedang dalam proses perubahan status menjadi BUMD atau UPT yang menerapkan PPK BLUD di bawah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk sementara nilai penyertaan pada BP THR Lokasari tercatat di kelompok aset lainnya.

5.1.4.5.5 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp22.395.346.157.345,00 dan Rp22.127.615.873.627,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.32.

Tabel 5.32
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1. Aset Rusak Berat	360.123.826.749,00	286.840.762.551,00
2. Aset yang belum ditetapkan statusnya	570.557.400,00	0,00
3. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
4. Kas Dikonsinyasikan	119.024.219.062,00	110.739.341.062,00
5. Aset Fasos Fasum	21.896.215.686.592,00	21.710.623.902.472,00
6. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	15.754.944.225,00	15.754.944.225,00
7. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Jumlah	22.395.346.157.345,00	22.127.615.873.627,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Aset lain-lain rusak berat adalah barang-barang kondisi rusak berat yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp286.840.762.551,00. Penambahan aset lain-lain rusak berat pada tahun 2012 berasal dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp96.822.324.362,00. Pengurangan aset lain-lain rusak berat tahun 2012 berasal dari penghapusan sebesar Rp21.688.400.891,00 dan hasil koreksi sebesar Rp1.850.859.273,00. Sehingga saldo aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2012 sebesar Rp360.123.826.749,00.

Tiga SKPD yang memiliki aset lain-lain rusak berat terbesar adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp121.810.641.928,00.
 - 2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp14.251.585.500,00.
 - 3) Satpol PP sebesar Rp13.179.499.463,00.
- b. Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sama, yaitu sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) HAKKI Batik Betawi | Rp 240.230.000,00 |
| 2) Pengamanan Aset | Rp 1.106.500.000,00 |
| 3) Master Plan dan Sisdur | <u>Rp 2.201.662.265,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp 3.548.392.265,00</u> |
- c. Kas Dikonsinyasikan adalah kas yang dikonsinyasikan ke pengadilan pada kegiatan pembebasan pengadaan tanah. Jumlah kas yang dikonsinyasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp110.739.341.062,00. Pada tahun 2012 terdapat penambahan Kas Dikonsinyasikan yang berasal dari Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.284.878.000,00 yang merupakan

konsinyasi tanah proyek Banjir Kanal Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga saldo Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp119.024.219.062,00. Saldo Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2012 tersebut terdiri dari:

1) Tahun 2004 sebesar	Rp 11.069.824.878,00
2) Tahun 2008 sebesar	Rp 16.649.938.284,00
3) Tahun 2009 sebesar	Rp 70.155.074.800,00
4) Tahun 2010 sebesar	Rp 12.523.331.100,00
5) Tahun 2011 sebesar	Rp 341.172.000,00
6) Tahun 2012 sebesar	<u>Rp 8.284.878.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp119.024.219.062,00</u>

- d. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)
Saldo Aset Fasos Fasum per 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp21.710.623.902.472,00, terdiri dari:

1) Tanah	Rp18.856.645.661.702,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp 6.766.641.322,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp 608.025.619.494,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.223.700.116.272,00
5) Aset Tetap lainnya	<u>Rp 15.485.863.682,00</u>
Jumlah	<u>Rp21.710.623.902.472,00</u>

Nilai tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi dan penelusuran ulang atas seluruh BAST terkait aset fasos fasum dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti BPKD, Badan Pengendali Pembangunan Oleh Pengembang Wilayah (BP3W), Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Gedung Penyimpanan Dokumen Aset Pulomas.

Nilai tersebut merupakan nilai dari 483 BAST yang terdiri dari penyerahan aset berdasarkan SIPPT sebanyak 405 BAST dan berdasarkan selain SIPPT sebanyak 78 BAST, dengan rincian sebagai berikut:

1) 332 BAST yang ditemukan sampai dengan Tahun 2010	Rp15.687.512.280.264,00
2) 137 BAST yang ditemukan dalam inventarisasi dokumen tahun 2011	Rp 5.607.410.565.178,00
3) <u>14 BAST Tahun 2011</u>	<u>Rp 415.701.057.030,00</u>
Total 483 BAST per 31 Desember 2011	Rp21.710.623.902.472,00

Dari jumlah tersebut, yang telah dilakukan cek fisik lapangan berdasarkan laporan kegiatan sensus tahun 2009 sampai dengan 2011 sebanyak 172 BAST yaitu:

1) Cek fisik hasil sensus sampai dengan Tahun 2010 sebanyak 129 BAST, dan

2) Cek fisik hasil sensus Tahun 2011 sebanyak 43 BAST
Selain itu, berdasarkan laporan *stock opname* dokumen kepemilikan aset tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dari fasos fasum berdasarkan SIPPT diketahui bahwa hak milik atas tanah yang ada terdiri dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 115 buah/lokasi dan atas nama pihak lain sebanyak 263 buah/lokasi.

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Pertanahan jumlah Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- 1) SIPPT yang diterbitkan sejak Januari 1971 sampai dengan Desember 2012 sebanyak 3.094 SIPPT.
- 2) Dari 3.094 SIPPT yang terbit, jumlah SIPPT yang efektif sebanyak 2.572 SIPPT sedangkan sisanya sebanyak 522 SIPPT merupakan:

- a) SIPPT Penyempurnaan : 258 SIPPT
 - b) SIPPT Pencabutan : 139 SIPPT
 - c) SIPPT Peralihan : 125 SIPPT
- 3) SIPPT efektif sebanyak 2.572 SIPPT, terdiri dari :
- a) SIPPT tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum sebanyak 1.100 SIPPT;
 - b) SIPPT mencantumkan kewajiban untuk menyerahkan aset fasos fasum sebanyak 1.405 SIPPT; dan
 - c) SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan aset fasos fasum 67 SIPPT.

Pada tahun 2012 terdapat penyerahan aset fasos fasum dari Pengembang Pemegang SIPPT sebanyak 7 BAST dengan total nilai aset yang diserahkan Rp410.897.843.274,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	377.079.058.770,00
2.	Peralatan dan Mesin	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	33.818.784.504,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah		410.897.843.274,00

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1.	PT Andrasa Pranaguna	Bangunan Gedung Balai Warga	629.433.504,00
2.	PT Metropolitan Development	Tanah PHT	1.815.744.000,00
3.	DPD REI DKI Jakarta	Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana (200 Unit)	27.451.400.000,00
4.	Yayasan IPK	Tanah Marga Jalan	861.349.770,00

No.	Nama Pengembang	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
5.	PT Nusa Plaza Indah	Tanah	329.183.715.000,00
6.	PT Mulia Karya Gemilang	Tanah Pengganti	45.218.250.000,00
7.	PT Bakrie Swasakti Utama	Rumah Dinas Lurah Jl. Menteng Pulo	811.895.000,00
		Bangunan Mesjid Jl. Muria Dalam	4.926.056.000,00
Jumlah			410.897.843.274,00

Tahun 2012 telah dilakukan rekonsiliasi aset Fasos Fasum dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Kota Administrasi Jakarta barat sebagai berikut:

- 1) Hasil rekonsiliasi berhasil mengidentifikasi aset senilai Rp64.775.236.000,00 yang telah tercatat sebagai aset pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a) Tanah	Rp 64.725.234.000,00
b) Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
c) Gedung dan Bangunan	Rp 50.002.000,00
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
e) Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 0,00</u>
Total	Rp 64.775.236.000,00

- 2) Hasil rekonsiliasi berhasil mengidentifikasi aset senilai Rp130.369.782.661,00 yang telah tercatat sebagai aset pada Kota Administrasi Jakarta barat yang terdapat di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Jelambar Baru dan Walikota Jakarta Barat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a) Tanah	Rp 128.690.353.000,00
b) Peralatan dan Mesin	Rp 0,00
c) Gedung dan Bangunan	Rp 1.679.429.661,00
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0,00
e) Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 0,00</u>
Total	Rp 130.369.782.661,00

Selain itu telah dilakukan juga rekonsiliasi aset Fasos Fasum terhadap Aset yang Dikerjasamakan. Dari hasil rekonsiliasi tersebut diperoleh sejumlah Rp30.161.040.493,00 yang sudah tercatat pada Aset yang Dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah	Rp	24.021.852.000,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp	6.139.188.493,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
5) Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>0,00</u>
Total	Rp	30.161.040.493,00

Dengan demikian maka saldo aset Fasos Fasum per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp21.896.215.686.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah	Rp	19.016.287.281.472,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp	6.766.641.322,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp	633.975.783.844,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.223.700.116.272,00
5) Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>15.485.863.682,00</u>
Total	Rp	21.896.215.686.592,00

Berdasarkan laporan *stock opname* TA 2012 dokumen kepemilikan aset tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari fasos fasum berdasarkan SIPPT diketahui bahwa hak milik atas tanah yang ada terdiri dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 150 buah/lokasi dan atas nama pihak lain sebanyak 260 buah/lokasi.

- e. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp108.531.052,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- f. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp15.754.944.225,00. Aset tersebut berada di 5 (lima) Lembaga Keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
- 1) Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran sebesar Rp6.616.623.386,00;
 - 2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp94.020.000,00;
 - 3) Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah sebesar Rp3.261.838.236,00;
 - 4) *Jakarta Islamic Center* sebesar Rp5.623.642.103,00; dan
 - 5) Koordinator Dakwah Islamiyah sebesar Rp158.820.500,00.

Lembaga keagamaan tersebut menempati dan menggunakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik tanah, gedung maupun sarana dan prasarana. Selain itu, sebagian pegawai di lembaga tersebut berasal dari pegawai negeri sipil daerah.

5.1.5 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp903.875.313.321,00 dan Rp715.436.707.127,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.33 berikut ini:

Tabel 5.33

Kewajiban

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	891.621.380.088,00	695.013.485.072,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	12.253.933.233,00	20.423.222.055,00
JUMLAH		903.875.313.321,00	715.436.707.127,00

Penjelasan lebih lanjut dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp891.621.380.088,00 dan Rp695.013.485.072,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) BLUD, BYMHD TAL, dan Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS merupakan sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya, sedangkan akun Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga di kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun, sehingga akun Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) BLUD, BYMHD TAL, dan Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Belanja, dan akun Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

Untuk tujuan komparasi, rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.34 berikut ini:

Tabel 5.34
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1.	Utang PFK di PPKD	35.679.588.189,00	180.324.484.427,00
2.	Utang PFK di SKPD	9.930.007.235,00	10.187.965.044,00
3.	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Bunga	919.895.960,00	1.287.854.344,00

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
4.	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Pokok	8.169.288.822,00	8.169.288.822,00
5.	Pendapatan Diterima Di Muka	14.790.800.740,00	13.412.097.456,00
6.	Belanja yang masih harus dibayar – BLUD	137.955.722.329,00	61.726.666.062,00
7.	Belanja yang masih harus dibayar – TAL	1.860.020.461,00	5.150.637.064,00
8.	Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	437.825.172.753,00	207.630.078.369,00
9.	Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	154.769.970.863,00	39.645.760.836,00
10.	Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD	41.748.239.842,00	58.326.707.080,00
11.	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	38.283.959.024,00	100.591.407.536,00
12.	Utang Jaminan	9.688.713.870,00	8.560.538.032,00
	Jumlah	891.621.380.088,00	695.013.485.072,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.1.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2012, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK di PPKD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp35.679.588.189,00 dan Rp180.324.484.427,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.35 berikut ini:

Tabel 5.35
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	6.446.487.279,00	16.887.022.126,00
2.	Utang PPN Pusat	29.006.849.809,00	163.318.732.790,00
3.	Utang Jamsostek	207.171.101,00	99.389.511,00
4.	Utang Asuransi	19.080.000,00	19.340.000,00
	Jumlah	35.679.588.189,00	180.324.484.427,00

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan PPh dan Pemotongan PPN yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.930.007.235,00 dan Rp10.187.965.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	1.550.239.924,00	1.679.042.575,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	192.400.362,00	193.169.890,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	187.880.483,00	134.037.668,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	2.528.355.233,00	6.244.165.404,00
5.	Utang Pemotongan PPN	2.405.166.839,00	1.937.549.507,00
6.	Utang PFK Lainnya	3.065.964.394,00	0,00
	Jumlah	9.930.007.235,00	10.187.965.044,00

Untuk Utang PFK Lainnya sebesar Rp3.065.964.394,00 terdiri dari uang titipan yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.062.334.894,00 dan pada Biro Prasarana dan Sarana Kota sebesar Rp3.629.500,00.

Utang PFK di SKPD tiga terbesar di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.063.063.894,00, Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp2.815.649.784,00 dan BLUD Transjakarta sebesar Rp2.314.838.844,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2012

No.	Jenis Pajak	Dinas Pendidikan (Rp)	Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Rp)	BLUD Transjakarta (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	729.000,00	252.082.007,00	0,00
2.	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00	53.472.568,00	99.372.601,00
3.	Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23	0,00	21.146.751,00	122.039.699,00
4.	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	0,00	2.333.075.665,00	188.961.818,00
5.	Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai	0,00	155.872.793,00	1.904.464.726,00
6.	Utang PFK Lainnya	3.062.334.894,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.063.063.894,00	2.815.649.784,00	2.314.838.844,00

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 10.

5.1.5.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing Rp919.895.960,00 dan Rp1.287.854.344,00. Utang

bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas belanja bunga yang timbul dari perjanjian pinjaman dengan nomor OECF IP-414 SLA-876. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan *Jakarta Solid Waste Management Improvement Project* dengan jangka waktu 15 tahun yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2015.

Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga per 31 Desember 2012 sebesar Rp919.895.960,00 tersaji pada tabel 5.38.

Tabel 5.38

Perhitungan Utang Bunga (Akrual)

Per 31 Desember 2012

No.	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Suku Bunga	Hutang (bulan)	Pembayaran Bunga Semester I 2013		Hutang Bunga Akrual per 31 Des 12 (Rp)
					Bunga Berjalan (Rp)	Jasa Bank (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)/6 * [(6)+(7)]
1	OECF IP-414 SLA 876	15-8-12 s.d 15-2-13	11.75%	4.5	1.200.431.607,43	26.096.339,29	919.895.960,00
JUMLAH					1.200.431.607,43	26.096.339,29	919.895.960,00

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sama, sebesar Rp8.169.288.822,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas perjanjian nomor OECF IP-414 SLA-876 untuk pembiayaan *Jakarta Solid Waste Management Improvement Project* yang akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2015.

5.1.5.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp14.790.800.740,00 dan Rp13.412.097.456,00.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 terdiri dari pendapatan diterima dimuka sewa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.289.309.120,00 seperti tersaji pada lampiran 11, Pendapatan Diterima Dimuka kontribusi BOT/BTO sebesar Rp6.643.118.712,00 seperti tersaji pada lampiran 12, dan Pendapatan Diterima Dimuka BLUD sebesar Rp858.372.908,00.

5.1.5.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2012 adalah Rp577.640.915.543,00 terdiri dari Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) – BLUD, BYMHD – TALI, dan Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun BYMHD BLUD, BYMHD TALI, dan Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS merupakan sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pada tahun 2012 ketiga akun tersebut direklasifikasi dan disajikan sebagai sub akun Utang Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.39 berikut ini:

Tabel 5.39
Utang Belanja

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1.	Belanja yg masih harus dibayar – BLUD	137.955.722.329,00	61.726.666.062,00
2.	Belanja yg masih harus dibayar – TALI	1.860.020.461,00	5.150.637.064,00
3.	Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Gizi Buruk dan jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)	437.825.172.753,00	207.630.078.369,00
JUMLAH		577.640.915.543,00	274.507.381.495,00

a. Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) – BLUD dan TALI per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp139.815.742.790,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun BYMHD BLUD dan TALI merupakan sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pada tahun 2012 akun BYMHD – BLUD dan TALI direklasifikasi dan disajikan sebagai sub akun Utang Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.40 berikut ini:

Tabel 5.40
Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI
Per 31 Desember 2012 dan 2011

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1.	Belanja yg masih harus dibayar – BLUD	137.955.722.329,00	61.726.666.062,00
2.	Belanja yg masih harus dibayar –TALI	1.860.020.461,00	5.150.637.064,00
JUMLAH		139.815.742.790,00	66.877.303.126,00

Belanja yang masih harus dibayar – BLUD tersebut yang terbesar di antaranya terdapat pada BLUD Trans Jakarta Busway sebesar Rp38.553.390.000,00 yang merupakan utang pelayanan bulan Desember 2012 kepada operator. Selain itu terdapat utang pada BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp28.069.672.886,00, BLUD RS Tarakan sebesar Rp27.785.149.745,00, BLUD RS Koja sebesar Rp20.974.041.777,00, BLUD RS Budhi Asih sebesar Rp17.751.304.351,00, dan BLUD RS Cengkareng sebesar Rp3.879.140.611,00 yang merupakan utang pada *supplier* obat dan utang jasa pelayanan dan pegawai.

b. Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)

Utang Dana Keluarga Miskin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS yang tercatat di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp437.825.172.753,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) merupakan sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya. Pada tahun 2012 akun Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) direklasifikasi dan disajikan sebagai sub akun Utang Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.41 berikut ini:

Tabel 5.41

**Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)
Per 31 Desember 2012 dan 2011**

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	376.407.926.748,00	194.676.438.825,00
2.	Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	61.417.246.005,00	12.953.639.544,00
Jumlah		437.825.172.753,00	207.630.078.369,00

Pada tahun 2012 Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan pelayanan Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk pada masyarakat. Pelayanan kesehatan berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan juga diberikan kepada PNS yang disebut JPK PNS. Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan mencatat pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan sebagai Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada RSUD, Puskesmas, UPT,

dan lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pada tahun 2012 utang ini dicatat oleh Unit Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda). Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Puskesmas, UPT, dan RSUD adalah utang hubungan istimewa di UP Jamkesda yang saling mengeliminasi dengan piutang hubungan istimewa di Puskesmas, UPT, dan RSUD pada saat konsolidasi laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Utang kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2012 merupakan tagihan dari 110 lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Utang per 31 Desember 2011	Rp	207.630.078.369,00
Koreksi utang per 31 Desember 2011	Rp	(835.941.929,00)
Jumlah klaim yang diajukan		
(Januari - Desember 2012)	Rp	841.377.594.381,00
Pembayaran		
(Januari - Desember 2012)	Rp	(591.544.916.269,00)
Pengurangan atas utang yang tidak layak klaim (Selisih Paket Pelayanan Esensial/Katastropik)	Rp	(18.801.641.799,00)
Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS per 31 Desember 2012	Rp	437.825.172.753,00

Jumlah klaim yang diajukan pada tahun 2012 sebesar Rp841.377.594.381,00 terdiri dari klaim JPK Gakin sebesar Rp718.195.016.965,00 dan JPK PNS sebesar Rp123.182.577.416,00. Sampai dengan 31 Desember 2012 jumlah klaim yang belum diverifikasi sebesar Rp250.877.595.409,00.

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2012, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.42 berikut ini:

Tabel 5.42
Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Kepada
Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2012

No.	Lembaga Medis	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk (Rp)	Utang JPK PNS (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	RS Cipto Mangunkusumo	94.306.306.597	2.246.013.057	96.552.319.654
2.	RS Persahabatan	32.804.803.242	408.271.268	33.213.074.510
3.	RS Fatmawati	27.925.111.073	2.106.231.054	30.031.342.127
4.	RS Islam Cempaka Putih	17.735.622.119	8.010.972.515	25.746.594.634
5.	RS Jantung Harapan Kita	18.007.594.550	2.017.898.320	20.025.492.870
6.	RS PGI Cikini	8.033.448.539	6.836.361.318	14.869.809.857
7.	RS Kanker Dharmais	12.992.487.863	691.836.102	13.684.323.965
8.	RS Islam Sukapura	10.588.832.493	1.531.157.265	12.119.989.758
9.	RS Islam Pondok Kopi	4.148.127.066	7.007.674.966	11.155.802.032
10.	RS Kartika Pulomas	10.285.788.025	232.978.144	10.518.766.169
11.	RS Budi Kemuliaan	9.963.036.013	-	9.963.036.013
12.	RS Haji Jakarta	4.046.451.673	4.668.899.566	8.715.351.239
13.	RS FK – UKI	7.643.570.771	354.233.789	7.997.804.560
14.	RS PAD Gatot Subroto	7.466.209.722	79.277.174	7.545.486.896
15.	RS Siloam Hospital Karawaci	63.734.942	7.189.445.756	7.253.180.698
16.	RS MH Thamrin Int Salemba	4.634.103.804	2.413.646.370	7.047.750.174
17.	RS Jiwa Soeharto Herdjan	6.806.341.246	-	6.806.341.246
18.	RS Atmajaya	6.162.804.130	-	6.162.804.130
19.	RS Peln	5.722.920.784	214.076.377	5.936.997.161
20.	RS Pelabuhan Jakarta	5.582.483.259	3.491.201	5.585.974.460
21.	RS Menteng Mitra Afia	5.478.957.695	-	5.478.957.695
22.	RS Sulianti Suroso	5.342.583.364	77.043.544	5.419.626.908
23.	RS Sari Asih Cileduk	-	5.008.936.247	5.008.936.247
24.	Utang dengan nilai di bawah 5 Miliar Rupiah	70.666.607.778	10.318.801.972	80.985.409.750
Jumlah		376.407.926.748	61.417.246.005	437.825.172.753

5.1.5.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Utang kepada Pihak Ketiga

1) Utang kepada Pihak Ketiga – di SKPD

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp154.769.970.863,00 dan Rp39.645.760.836,00. Selama tahun 2012 terjadi penambahan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

sebesar Rp154.145.369.179,00 dan telah dilakukan pembayaran atas utang sebesar Rp38.847.163.925,00. Selain itu terdapat koreksi pengurangan atas Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD tahun 2012 sebesar Rp173.995.227,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD tahun 2012 sebesar Rp154.769.970.863,00 terdiri atas utang di SKPD, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp121.408.882.545,00 di antaranya merupakan:

(1) Utang atas pekerjaan 8 paket proyek Pembangunan Jalan Layang Non Tol ruas Kampung Melayu-Tanah Abang dan ruas Antasari-Blok M sebesar Rp82.728.172.710,00. Pada Dinas Pekerjaan Umum masih terdapat sisa pekerjaan yang masih dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2013 di antaranya pekerjaan Jalan Layang Non Tol senilai Rp61.135.012.783,00.

(2) Utang atas pemeliharaan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebesar Rp21.601.280.452,00.

(3) Utang atas proyek pembangunan rumah pompa di Muara Kali Banglio dan Muara Baru Jakarta Utara sebesar Rp12.393.458.104,00.

b) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp15.730.444.909,00 di antaranya merupakan utang atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan PT Seaworld Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13B/200/PT TUN JKT tanggal 9 April 2007. Jumlah utang kepada PT Seaworld Indonesia diakui sebesar Rp15.624.376.723,00 berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagaimana termuat dalam laporan Nomor LAP/8986/PW09/3/2012 tanggal 20 November 2012.

- c) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Perumahan sebesar Rp7.070.872.293,00 merupakan utang atas pekerjaan penyelesaian pembangunan Rumah Susun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakarta Utara.

Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di SKPD disajikan dalam lampiran 13.

Akun Utang kepada pihak ketiga tersebut tidak termasuk potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 sebagaimana telah dijelaskan dalam CaLK 5.1.4.3, dan potensi kewajiban kepada PT DWK atas tidak dapat dilaksanakannya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1997 tanggal 26 Juni 1997.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT DWK timbul atas gugatan PT DWK sebagai penggarap lahan seluas $\pm$ 30.000 m² di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. PT DWK menggarap lahan seluas $\pm$ 30.000 m² sejak tahun 1984 sesuai Surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor 112/BKD.Wk.I/XI/84 tanggal 22 November 1984 yang menyatakan bahwa tanah

garapan tersebut baik secara sifat maupun secara administrasi masih milik H. Djasmani yang telah dialihkan haknya pada PT DWK dan ternyata tidak termasuk tanah yang dibebaskan oleh BPOP Sunter (PPL Sunter) dan Surat Keterangan Lurah Papanggo dan Camat Tanjung Priok Nomor 114/1755.5/1988 tanggal 20 Februari 1988 yang menerangkan bahwa betul hak-hak tanah tersebut adalah milik PT DWK dan tidak pernah / belum dibebaskan oleh BPO (BP3L Sunter) atau instansi pemerintah lainnya.

Pada tahun 1992 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas $\pm 144.240 \text{ m}^2$ untuk pembangunan perumahan. Atas hal tersebut PT DWK menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena tanah garapan PT DWK seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ telah menjadi obyek perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Super Progress.

Gugatan PT DWK diputus dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 jo. Nomor 113 K/TUN/1994 jo. Nomor 52/B/1994/PT.TUN.JKT jo. Nomor 063/G/1993/ IJ/PTUN-JKT menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan/mengeluarkan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas obyek sengketa kepada PT DWK.

Bahwa jika menunjuk kepada keputusan PTUN tersebut di atas, maka seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan SIPPT di atas lahan sengketa.

Putusan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan, yaitu:

- a. Tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ yang menjadi objek gugatan PT DWK telah menjadi obyek perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Super Progress tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 1568 Tahun 1992 dan telah terbit sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 128/HPL/BNP/93 tanggal 27 September 1993. Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 128/HPL/BNP/93, pada huruf e disebutkan bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 1993 No.1.177.2/1.99/31-02/F/HPL/1993 sebagian tanah yang dimohon diklaim oleh PT DWK, sebagaimana suratnya tanggal 11 Februari 1993 No.02/Pem/GCR/93 Jo tanggal 8 Maret 1993 No.21/DIR/III/93 yang ditujukan kepada BP3L Sunter DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan gugatan perkara di pengadilan TUN Jakarta No.063/G/1993/PTUN Jakarta tanggal 24 Juni 1993. Dalam huruf f disebutkan bahwa atas perkara PTUN No.063/G/1993/PTUN Jakarta telah ada penetapannya yaitu menunda/menangguhkan pelaksanaan kerjasama atas bidang tanah seluas 141.984 m² antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Progres.
- b. Telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2355/Papanggo sampai dengan 2498/Papanggo atas nama PT Super Progress.

Atas tidak dapat dilaksanakan putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan PTUN Jakarta yang intinya dapat dilakukan mediasi atau negosiasi dengan PT DWK dan Biro Hukum Pemprov DKI. Kepala Biro Hukum sesuai sesuai Nota Dinas No.2061/-1.711.32 tanggal 19 Desember 2011 perihal Tindak Lanjut disposisi Gubernur atas permasalahan tanah PT DWK memberikan pendapat bahwa permohonan ganti rugi atas tanah garapan seluas $\pm$ 30.000 m² dapat dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pergub No.193 tahun 2010 tentang pemberian santunan kepada penggarap tanah negara. Dalam rangka pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08 PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997, Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta melakukan kesepakatan perdamaian dengan PT DWK yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 237 tanggal 21 November 2012 di hadapan Notaris Arry Supratno, SH. Akta perdamaian tersebut menyepakati bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp40.000.000.000,00 (sebelum dipotong Pajak 5%). Dalam tahun 2012, ganti rugi tersebut belum terbayar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan kewajiban kepada PT DWK sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Perundangan lainnya.

2) Utang kepada Pihak Ketiga – di BLUD

Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan ke laporan keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Utang kepada Pihak Ketiga – BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp41.748.239.842,00 dan Rp58.326.707.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) BLUD RS Pasar Rebo

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Pasar Rebo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp4.022.485.380,00 dan Rp21.606.484.538,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Pembelian obat dan jasa pemeliharaan	0,00	12.434.295.495,00
2	Imbalan Pasca Kerja	0,00	5.785.066.251,00
3	Notaris	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Pajak-pajak yang belum dibayar	3.742.918.130,00	3.357.122.792,00
5	Pegawai eks PT	249.567.250,00	0,00
	JUMLAH	4.022.485.380,00	21.606.484.538,00

Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses likuidasi PT RS Pasar Rebo sebesar Rp1.794.475.500,00 yang terdiri dari kompensasi komisaris dan direksi sebesar Rp1.170.480.000,00, penghargaan komisaris dan direksi sebesar Rp134.485.500,00 dan honorarium tim likuidasi sebesar Rp489.510.000,00.

b) BLUD RS Cengkareng

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp28.681.054.110,00 dan Rp18.751.413.650,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Pembelian obat dan jasa pemeliharaan	16.086.966.191,00	10.346.400.105,00
2	Imbalan Pasca Kerja Karyawan	10.412.868.198,00	6.223.793.824,00
3	Notaris dan Konsultan	68.500.000,00	68.500.000,00
4	Pajak-pajak yang belum dibayar	2.112.719.721,00	2.112.719.721,00
	JUMLAH	28.681.054.110,00	18.751.413.650,00

Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses likuidasi PT RS Cengkareng sebesar Rp1.586.680.854,00 terdiri dari kompensasi komisaris dan direksi Rp802.498.095,00, penghargaan komisaris dan direksi Rp294.672.759,00 dan honorarium tim likuidasi Rp489.510.000,00.

Adapun BLUD RS Koja, BLUD RS Tarakan, BLUD RS Budhi Asih, dan BLUD RS Duren Sawit belum melakukan perhitungan penyisihan imbalan pasca kerja karyawan.

c) BLUD RS Tarakan

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Tarakan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.484.755.498,00. Nilai tersebut merupakan kewajiban atas pembelian obat dan jasa pemeliharaan.

d) BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD PPUMKMP pada tahun 2012 per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp9.044.700.352,00 dan Rp9.306.758.232,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Des 2012 (Rp)	31 Des 2011 (Rp)
1.	Biaya Iuran Dana Pensiun	6.816.258.854,00	6.816.258.854,00
2.	Biaya Operasional Kendaraan	153.000.000,00	153.000.000,00
3.	Biaya Jasa Konsultan Hukum	90.000.000,00	90.000.000,00
4.	Biaya Pembuatan Company Profile	92.400.000,00	92.400.000,00
5.	Biaya Perencanaan Pemagaran	52.500.000,00	52.500.000,00
6.	Biaya Pesangan Pegawai	400.646.516,00	400.646.516,00
7.	Biaya Pembuatan Plank	4.353.049,00	4.353.049,00
8.	Dana Talangan KoPeg	43.045.816,00	43.045.816,00
9.	Pinjaman Kepada Pihak Ketiga	360.000.000,00	360.000.000,00
10.	Utang PBB Tahun 1993 s/d Tahun 2005	577.190.117,00	839.247.997,00
11.	Sewa diterima dimuka	455.306.000,00	455.306.000,00
12.	Utang kepada pihak ketiga lainnya	0,00	0,00
Jumlah		9.044.700.352,00	9.306.758.232,00

3) Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp100.591.407.536,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.5.1.5.c.

Untuk tujuan komparasi, saldo Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	38.283.959.024,00	100.591.407.536,00
	JUMLAH	38.283.959.024,00	100.591.407.536,00

b. Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.688.713.870,00 dan Rp8.560.538.032,00.

Utang Jaminan tersebut merupakan uang jaminan bongkar reklame sebesar Rp5.675.868.727,00 dan BP3W Sunter Jakarta Utara sebesar Rp4.012.845.143,00 yang diakui sebagai Kas Non Anggaran di Kas Daerah, disimpan di Rekening Giro Kas Non Anggaran Bank DKI dengan nomor rekening 139.02.00025 atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rekening ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 114/2008 Tentang Penunjukan Bank DKI untuk Pembukaan dan Penyimpanan Rekening Giro Kas Non Anggaran.

Saldo uang jaminan bongkar reklame per 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp4.547.692.889,00. Selama tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima uang jaminan bongkar reklame sebesar Rp1.128.175.838,00, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp5.675.868.727,00. Sedangkan saldo uang jaminan BP3W Sunter Jakarta Utara tidak mengalami perubahan selama tahun 2012, sehingga saldo per 31 Desember 2012 adalah tetap sebesar Rp4.012.845.143,00.

Saldo utang jaminan belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) sebesar Rp Rp5.267.200.973,00, Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp784.754.860,00, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.182.498.682,00, sebagaimana dijelaskan CaLK 5.1.4.1.1 tentang Kas Non Anggaran.

Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan dengan saldo akhir per 30 April 2013 adalah senilai Rp1.182.498.682,00.

c. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp38.283.959.024,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun Utang

Kepada Pihak Ketiga, sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.5.1.5.a.3).

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

Untuk tujuan komparasi, saldo Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	Penyajian Kembali Saldo 31 Desember 2011 (Rp)
1	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	38.283.959.024,00	100.591.407.536,00
	JUMLAH	38.283.959.024,00	100.591.407.536,00

Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Wisata Niaga Jaya dan Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi PT Jakarta Tourisindo yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004, maka seluruh kekayaan, usaha-usaha, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah (PD) Wisata Niaga Jaya dan Yayasan Wisma Jaya Raya dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Jakarta Tourisindo termasuk utang PPN dan utang PPh eks PD Wisata Niaga Jaya sebesar Rp100.591.407.536,00 yang belum dicatat pada laporan keuangannya. Atas utang pajak tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran sebesar Rp62.307.448.512,00. Adapun sisanya sebesar Rp38.283.959.024,00 yang merupakan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak akan

diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.

Rincian utang PPN dan PPh adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Utang Pajak (Rp)	Keterangan
1.	PPN Pasal 16 D	20.103.320.971,00	SKPKB Ditjen Pajak No:Kep: 1145/WPJ.06/2011
2.	PPN Pasal 16 D	8.376.383.738,00	SKPKB Ditjen Pajak No:Kep:- 1144/WPJ.06/2011
3.	PPh Pasal 4 (2)	9.804.254.315,00	STP PPN Ditjen Pajak No:00001/137/04/024/09
Jumlah		38.283.959.024,00	

5.1.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 2011 tercatat masing–masing sebesar Rp12.253.933.233,00 dan Rp20.423.222.055,00.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat yang jatuh tempo pembayarannya di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat dengan nomor OECF IP–414 SLA–876 tersebut digunakan untuk Pembiayaan *Jakarta Solid Waste Management Improvement Project* pada Dinas Kebersihan yang diberikan pada tahun 1996.

Atas Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 sebesar Rp20.423.222.055,00, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran sebesar Rp8.169.288.822,00.

5.1.6 Ekuitas Dana

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp386.399.157.784.514,23 dan Rp375.029.883.560.336,20.

5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp10.264.940.746.924,23 dan Rp7.812.314.008.127,20 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	9.463.721.530.814,23	6.470.618.490.508,20
2	Pendapatan yang ditangguhkan	421.696.539.452,00	468.833.033.411,00
3	Cadangan Piutang	762.729.297.832,00	838.207.293.820,00
4	Cadangan Persediaan	437.576.910.348,00	530.477.129.539,00
5	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	(835.706.769.086,00)	(495.821.939.151,00)
6	Cadangan Aset Lancar Lainnya	14.923.237.564,00	0,00
	Jumlah	10.264.940.746.924,23	7.812.314.008.127,20

Pada Tahun 2012 terdapat penambahan sub akun baru pada Ekuitas Dana Lancar yaitu Cadangan Aset Lancar Lainnya. Sub Akun ini menampung kontra akun Aset Lancar Lainnya yang terdiri dari sub akun Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Kerja.

5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp375.294.139.873.382,00 dan Rp366.426.554.288.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	7.191.505.580.814,00	6.023.955.690.786,00
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	342.279.347.954.770,00	335.071.237.986.116,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	25.835.540.271.031,00	25.351.783.833.367,00
4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Panjang	(12.253.933.233,00)	(20.423.222.055,00)
	Jumlah	375.294.139.873.382,00	366.426.554.288.214,00

5.1.6.3 Ekuitas Dana Cadangan

Saldo Ekuitas Dana Cadangan 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp840.077.164.208,00 dan Rp791.015.263.995,00.

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2012.

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2012.

5.1.7.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per 31 Desember 2012, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp35.360.875.933.775,80 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp22.774.341.138.499,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2012 sebesar Rp12.586.534.795.276,80.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas **(1) Arus Kas Masuk** yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam,

Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya, dan **(2) Arus Kas Keluar** yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2012, sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp17.721.493.016.509,30. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp15.221.249.152.689,40 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp2.500.243.863.819,90 atau 16,43%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp1.820.435.447.667,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp609.349.051.004,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp1.211.086.396.663,00 atau 198,75%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp351.823.210.568,54. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp278.789.767.934,40 maka untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp73.033.442.634,14 atau 26,20%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp2.128.745.654.965,95. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp1.708.621.029.835,96 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp420.124.625.129,99 atau 24,59%. Realisasi Lain-lain PAD per 31 Desember 2012 tersebut termasuk pendapatan bunga dari Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah sebesar Rp49.061.900.213,00, sebagaimana dijelaskan CaLK 5.1.1.1.4.6 tentang Pendapatan Bunga.

e. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp10.984.787.699.665,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp8.747.636.169.886,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp2.237.151.529.779,00 atau 25,57%.

f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp294.849.251.139,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp192.163.351.403,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp102.685.899.736,00 atau 53,44%.

g. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp275.327.857.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 tercatat sebesar Rp209.909.442.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp65.418.415.000,00 atau 31,17%.

h. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp1.779.682.463.000,00. Apabila dibandingkan dengan periode tahun 2011 tercatat sebesar Rp1.313.254.447.360,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp466.428.015.640,00 atau 35,52%.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus per 31 Desember 2012 bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non Sertifikasi sebesar Rp25.608.000.000,00;
2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi sebesar Rp1.026.844.433.000,00; dan
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp727.230.030.000,00.

i. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp3.731.333.261,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp8.410.777.790,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 turun sebesar Rp4.679.444.529,00 atau 55,64%.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2012 merupakan hibah dari tim sukses pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebesar Rp253.500.000,00, dan hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan PT Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp3.477.833.261,00.

Hibah untuk kegiatan PT MRT tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008. Loan Agreement tersebut menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan atas sejumlah dana tersebut, Pemerintah Pusat menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Penerimaan hibah dari pemerintah pusat tersebut kemudian digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit yang penggunaannya dianggarkan dan dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan hibah sebesar Rp3.731.333.261,00 belum termasuk hibah non kas berupa aset tetap sebesar Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin	Rp	13.123.217.806,00
2) Gedung dan Bangunan	<u>Rp</u>	<u>17.574.826.713,00</u>
Jumlah	Rp	30.698.044.519,00

Hibah non kas tersebut berupa aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.123.217.806,00 di antaranya terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.987.038.100,00 berupa peralatan laboratorium dan peralatan pelatihan *Competency Based Training* yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.556.610.882.00, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1.489.837.024.00. Selain itu, penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.574.826.713,00 seluruhnya terdapat di Dinas Olahraga dan Pemuda berupa gedung dan bangunan atas pelaksanaan SEA Games XXXVII/2011.

2. Arus Kas Keluar

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2012.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp11.085.950.169.778,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp9.895.560.039.177,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp1.190.390.130.601,00 atau 12,03%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp9.703.452.918.759,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp8.341.831.218.443,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp1.361.621.700.316,00 atau 16,32%.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Realisasi Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp3.172.974.470,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp4.353.524.981,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 turun sebesar Rp1.180.550.511,00 atau 27,12%.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp1.933.097.203.700,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp825.595.987.217,00 maka

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp1.107.501.216.483,00 atau 134,15%.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2012.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp15.993.940.302,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp38.587.205.558,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 turun sebesar Rp22.593.265.256,00 atau 58,55%.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp30.186.258.790,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp1.338.583.170,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar Rp28.847.675.620,00 atau 2.155,09%.

g. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk periode yang berakhir berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp2.487.672.700,00. Pada tahun 2011 tidak terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga.

5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Arus Kas Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yaitu ditunjukkan oleh pengadaan Belanja Modal sebesar Rp7.316.333.334.751,00 dan penjualan aset sebesar Rp7.978.292.967,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 realisasi belanja modal sebesar Rp8.784.365.760.426,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar Rp17.949.302.317,22, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.1.4.1.

Kemampuan mencapai Arus kas investasi sejalan dengan program prioritas dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2012. Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 2011 dan periode yang berakhir 31 Desember 2012, sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga. Selama periode Tahun 2011 dan 2012

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2011 Rp7.978.292.967,00. Sedangkan periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp17.949.302.317,22.

2. Arus Keluar Kas

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Belanja Modal tahun 2011 sebesar Rp7.316.333.334.751,00, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 Belanja Modal sebesar Rp8.784.365.760.426,00.

5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pembiayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas (1) Arus Kas Masuk; Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2011) dan (2) Arus Kas Keluar; Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Utang Kepada Pegawai, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2012). Secara

rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Pembiayaan selama periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebagai berikut.

1. Arus Kas Masuk

a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012, realisasi belanja Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp4.933.521.975,00 dan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp14.882.248.025,00.

b. Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2011)

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012, realisasi belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2011) sebesar Rp55.332.917.932,00 dan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp39.372.286.912,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembentukan Dana Cadangan

Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp49.061.900.213,00 dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan).

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, Badan Pengelola (BP), Yayasan. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp136.780.777.790,00.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp618.477.833.261,00 dengan rincian:

- 1) PT Mass Rapid Transit Jakarta Rp 68.477.833.261,00
- 2) PT Bank DKI Rp500.000.000.000,00
- 3) PT Jakarta Propertindo Rp 50.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk Pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Realisasi Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp11.227.980.606,00. Sedangkan Realisasi Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.169.288.822,00, sebagaimana disajikan pada tabel 5.43.

Tabel 5.43

Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman
Per 31 Desember 2012

No	Uraian	Pembayaran Tahun 2012 (Rp)	Pembayaran Tahun 2011 (Rp)
1.	OECD IP – 346 SLA – 614	0,00	2.002.670.024,00
2.	OECD IP - 365 SLA – 650	0,00	1.056.021.760,00
3.	OECD IP – 414 SLA – 876	8.169.288.822,00	8.169.288.822,00
	Jumlah	8.169.288.822,00	11.227.980.606,00

d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk Pembayaran Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga selama periode yang berakhir 31 Desember 2012. Realisasi Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp120.985.101.023,00. Sedangkan Realisasi Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp101.041.692.259,00.

e. Pembayaran Kepada Pegawai

Pembayaran Utang Kepada Pegawai menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Tunjangan Kesra dan TPP. Realisasi Pembayaran Utang Kepada Pegawai sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.346.657.473,00. Sedangkan Realisasi Pembayaran Utang Kepada Pegawai sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp112.920.178,00.

f. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp55.440.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir (PPMK) yang digulirkan kembali kepada masyarakat dan pada tahun 2011 sebesar Rp4.324.522.622,00.

g. Belanja Dibayar Dimuka

Tahun Anggaran 2011 realisasi Belanja Dibayar Dimuka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp55.332.917.932,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp51.416.205.213,00.

5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

1. Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan

Penerimaan Uang Jaminan pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp1.128.175.838,00 dan pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp995.484.806,00. Pada tahun 2012 dan 2011 tidak terdapat pengeluaran uang jaminan.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 terdapat penerimaan jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp354.815.896,00 dan tidak ada pengeluaran transfer ke rekening kas daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2011 terdapat penerimaan dari jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp323.165.720,00 dan pengeluaran transfer ke rekening kas daerah sejumlah yang sama.

3. Penerimaan dan Pengeluaran PFK

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar Rp1.923.624.936.565,00 dan Rp2.068.269.832.803,00 sebagaimana disajikan pada tabel 5.44. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar Rp1.759.665.947.862,00 dan sebesar Rp1.849.363.370.620,00.

Tabel 5.44
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2012	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2012
1.	PPN	901.566.319.718,00	1.035.878.202.699,00
2.	PPh Pasal 21	476.429.156.568,00	476.425.084.146,00
3.	PPh Pasal 22	47.007.436.519,00	56.439.080.009,00
4.	PPh Pasal 23	34.499.605.060,00	35.348.582.898,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	146.205.508.204,00	146.369.494.145,00
6.	Jamsostek	7.575.882.093,00	7.576.142.093,00
7.	Asuransi	15.680.921.590,00	15.573.140.000,00
8.	Dana Pensiun	136.569.338.246,00	136.569.338.246,00
9.	Askes	57.506.272.084,00	57.506.272.084,00
10.	Tabungan Hari Tua	93.438.101.483,00	93.438.101.483,00
11.	Taperum	7.146.395.000,00	7.146.395.000,00
	Jumlah	1.923.624.936.565,00	2.068.269.832.803,00

5.1.7.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2011 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp1.454.759.903.406,81, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp2.853.503.032.625,04. Saldo awal kas di BUD tahun 2012 sebesar Rp6.604.170.595.035,20, sehingga atas kenaikan yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp9.457.673.627.660,23.



BAB VI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah :

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya

dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 32 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- 1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- 2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan;
- 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Ketenaga Kerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Perpustakaan;
- 26) Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup :

- 1) Pariwisata;
- 2) Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
- 3) Perdagangan;
- 4) Industri;
- 5) Energi.

c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012, yang telah diundangkan pada tanggal 26 Februari 2008 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1, yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah seperti, 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2007-2012 yaitu :

1) Visi;

Visi Pembangunan 2007-2012 adalah "JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA".

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah Jakarta sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakat sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci.

Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2) Misi;

Misi adalah untuk mewujudkan visi, oleh karena itu misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut.

- a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*";
- b) Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima;
- c) Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan;
- d) Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e) Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota;
- b) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional, regional dan internasional;
- c) Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik;
- d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/ sosial kota yang strategis;

- e) Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta;
- f) Membentuk birokrasi yang efektif;
- g) Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin;
- h) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreement contract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.

Rencana Program Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Program *dedicated*, yaitu seperti pengendalian banjir, pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah "*good governance*" dan pengelolaan bencana.
- b) Program menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
- c) Program Kewilayahan yaitu kerjasama wilayah Jabodetabekjur, program kerjasama provinsi se Jawa-Bali, pengembangan kawasan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;

- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi :

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan terdiri dari; urusan wajib, urusan pilihan, dan menurut urusan pemerintahan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain :

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

d. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/*sister cities* (kota di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

1) Kerjasama Antar Daerah (Dalam Negeri)

Kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang, antara lain pemeliharaan situ di Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur), Pendidikan dan Kesehatan, Manajemen Sampah, Kependudukan, Sosial dan Lingkungan Hidup, Perindustrian, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, Transmigrasi, Perdagangan, Perhubungan dan Pemerintahan.

2) Kerjasama Antar Kota (Luar Negeri)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 15 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi dan Istambul. Selain itu telah pula ditandatangani Letter of Intent (LoI) Kyiv, Athena, Kwazulu Natal, Maputo dan Tripoli. Perjanjian kerjasama ini ada yang masih aktif adapula yang sudah tidak aktif.

e. Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.



BAB VII

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2012, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacup ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan tahun kelima dimana SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca SKPD, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2012 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kelima kali penyusunannya dilaksanakan dengan cara konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 737 SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 47 entitas akuntansi penggabungan. Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari UKPD dibawahnya. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas-Suku Dinas Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-Dinas, sedangkan untuk Dinas

Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas-Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada target pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp33.650.011.958.617,00. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp35.379.180.051.989,03 atau 105,14 persen, melebihi target sebesar Rp1.729.168.093.372,03 atau 5,14%. Di sisi lain capaian anggaran belanja setelah perubahan di Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp38.366.680.073.841,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp6.807.973.174.916,00 atau 17,74%. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di tahun 2012 terjadi surplus sebesar Rp3.820.473.153.064,03, surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang ditargetkan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.703.218.490.508,00 terealisasi Rp6.475.552.012.483,20 atau 84,06%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp2.986.550.375.284,00 terealisasi sebesar Rp5.643.248.377.750,20 atau 119,64%.

Dengan demikian SiLPA Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp9.463.721.530.814,23 yang diperoleh dari selisih Realisasi Pendapatan Daerah dengan Realisasi Belanja sebesar Rp3.820.473.153.064,03 dan pembiayaan neto sebesar Rp926.580.262.526,20.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2012.

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



JOKO WIDODO



LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2012**

**DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	NAMA SKPD/UKPD	Sisa Pengisian Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
1	SEKRETARIAT DPRD	450.315.126	-	-	-	450.315.126
2	SEKRETARIAT DAERAH	845.369.263	-	501.000	-	845.870.263
3	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	42.531.000	-	-	-	42.531.000
4	BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA	-	-	-	3.629.500	3.629.500
5	BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.092.420.651	-	920.000	-	1.093.340.651
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	16.618.532.323	-	124.682.914	-	16.743.215.237
7	Sudin PU Tata Air - JAKPUS	9.141.440	-	-	-	9.141.440
8	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL	-	-	563.500	-	563.500
9	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM	1.075.825.639	-	-	-	1.075.825.639
10	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu	179.429.949	-	-	-	179.429.949
11	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	19.695.882.885	-	2.815.649.784	-	22.511.532.669
12	Sudin Pertamanan - JAKPUS	4.709.630	-	-	-	4.709.630
13	DINAS PERHUBUNGAN	8.667.254.072	-	836.335.503	-	9.503.589.575
14	Sudin Perhubungan - JAKPUS	22.350	-	-	-	22.350
15	Sudin Perhubungan - JAKBAR	8.000	-	-	-	8.000
16	Sudin Perhubungan - JAKSEL	370.000	-	-	-	370.000
17	BLUD RS Pasar Rebo	-	13.863.296	-	14.400.000	28.263.296
18	BLUD RS Kepulauan Seribu	76.867.930	-	10.448.708	-	87.316.638
19	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	500.000	-	-	-	500.000
20	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR	-	-	1.127.000	-	1.127.000
21	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL	-	-	575.139	-	575.139
22	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL	238.996.109	-	-	-	238.996.109
23	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	25.000	-	-	-	25.000
24	Sudin Kesehatan - JAKTIM	218.932.000	-	19.212.400	-	238.144.400
25	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	683.500	-	-	-	683.500
26	DINAS PENDIDIKAN	-	-	729.000	3.062.334.894	3.063.063.894
27	BPPK Duren Sawit	1.400.812	-	-	-	1.400.812
28	Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS	67.436.731	-	-	-	67.436.731
29	Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT	8.470.000	-	-	-	8.470.000
30	Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT	36.000.000	-	-	-	36.000.000
31	Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR	32.987.006	-	72.274.501	-	105.261.507
32	Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR	534.697	-	-	-	534.697
33	Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM	49.720.000	-	-	-	49.720.000
34	Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM	233.078.800	-	-	-	233.078.800
35	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	368.111.141	-	-	-	368.111.141
36	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	12.000.000	-	857.930	-	12.857.930
37	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT	-	-	11.256.064	-	11.256.064
38	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM	3.117.550	-	1.262.000	-	4.379.550
39	PSBD Budi Bhakti Cengkareng	4.300.000	-	4.567.110	-	8.867.110
40	PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung	1.000	-	-	-	1.000
41	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM	287.936.625	-	19.461.820	-	307.398.445
42	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKTIM	800.000	-	-	-	800.000
43	UPT Dana Bergulir	-	4.656.945	-	-	4.656.945
44	UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	-	345.137	-	-	345.137
45	Satpol PP - JAKUT	-	-	148.500	-	148.500
46	UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan	-	-	1.991.700	-	1.991.700
47	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM	-	-	151.293.725	-	151.293.725
48	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	232.179.005	-	-	-	232.179.005
49	UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH	-	-	3.276.340	-	3.276.340

No.	NAMA SKPD/UKPD	Sisa Pengisian Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
50	INSPEKTORAT	348.743.000	-	-	-	348.743.000
51	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKTIM	500.000	-	1.516.894	-	2.016.894
52	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm. Kep. Seribu	8.450.000	-	-	-	8.450.000
53	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM	-	-	1.042.400	-	1.042.400
54	Sudin Kebersihan - JAKTIM	100.000	-	-	-	100.000
55	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	33.018.700	-	33.018.700
56	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKBAR	112.325.000	-	-	-	112.325.000
57	BLKD Jakarta Utara	-	-	140.000	-	140.000
58	BLKD Jakarta Timur	4.000	-	-	-	4.000
59	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKTIM	310.000	-	-	-	310.000
60	Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS	374.625	-	-	-	374.625
61	Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS	220.000	-	-	-	220.000
62	Kecamatan Johar Baru - JAKPUS	-	-	4.386.588	-	4.386.588
63	Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS	-	-	4.865.596	-	4.865.596
64	Kelurahan Pejagalan - JAKUT	413.500	-	-	-	413.500
65	Kelurahan Tugu Utara - JAKUT	73.354.149	-	54.492.599	-	127.846.748
66	Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT	-	-	463.435	-	463.435
67	Kelurahan Lagoa - JAKUT	30.000	-	-	-	30.000
68	Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT	720.000	-	-	-	720.000
69	Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR	67.583.705	-	-	-	67.583.705
70	Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR	-	-	46.371.895	-	46.371.895
71	Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR	428.900	-	-	-	428.900
72	Kelurahan Pegadungan - JAKBAR	21.858.540	-	-	-	21.858.540
73	Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR	5.004.568	-	-	-	5.004.568
74	Kelurahan Tambora - JAKBAR	40.026.200	-	-	-	40.026.200
75	Kelurahan Pekojan - JAKBAR	18.145.500	-	12.007.950	-	30.153.450
76	Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR	-	-	2.631.015	-	2.631.015
77	Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL	880.000	-	-	-	880.000
78	Kelurahan Kebagusan - JAKSEL	1.900	-	-	-	1.900
79	Kelurahan Bangka - JAKSEL	54.040.000	-	-	-	54.040.000
80	Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL	-	-	4.229.780	-	4.229.780
81	Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL	56.596.700	-	-	-	56.596.700
82	Kota Administrasi Jakarta Timur	91.000	-	-	-	91.000
83	Kelurahan Baru - JAKTIM	91.550	-	2.943.955	-	3.035.505
84	Kelurahan Cijantung - JAKTIM	1.374.002	-	814.585	-	2.188.587
85	Kelurahan Ciracas - JAKTIM	-	-	49.550	-	49.550
86	Kelurahan Lubang Buaya - JAKTIM	300.600	-	-	-	300.600
87	Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM	-	281.679	-	-	281.679
88	Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM	4.280.850	-	-	-	4.280.850
89	Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM	-	56.660	-	-	56.660
90	Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM	42.402.190	-	34.372.026	-	76.774.216
91	Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM	507.000	-	-	-	507.000
92	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu	1.157.500	-	15.811.727	-	16.969.227
SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		51.416.205.213	19.203.717	4.296.293.333	3.080.364.394	58.812.066.657

**DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	NAMA SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Kas Transito	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
1	BLUD Transjakarta Busway	6.828.392.050	202.930.198.720	47.195.210	2.314.838.844	-	212.120.624.824
2	UPT Pengelola Perparkiran	137.730.125	21.921.477.386	5.000	-	-	22.059.212.511
3	BLUD RS Koja	132.211.295	12.266.837.618	18.149.932.969	4.000.000	277.462.814	30.830.444.696
4	BLUD RS Tarakan	163.758.020	3.493.802.747	-	-	295.522.014	3.953.082.781
5	BLUD RS Cengkareng	390.083.300	16.794.856.643	22.215.278.583	-	90.011.951	39.490.230.477
6	BLUD RS Pasar Rebo	829.099.404	8.644.452.308	8.632.099.652	-	81.847.629	18.187.498.993
7	BLUD RS Budhi Asih	149.151.951	5.393.825.124	-	-	90.528.500	5.633.505.575
8	BLUD RS Duren Sawit	17.511.600	2.899.040.982	-	-	23.000.000	2.939.552.582
9	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	4.645.044	3.815.214.247	-	-	-	3.819.859.291
10	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	2.553.466	723.644.785	-	-	-	726.198.251
11	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	8.850.000	19.043.243	2.421	-	-	27.895.664
12	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS	4.823.886	1.430.211.276	-	-	-	1.435.035.162
13	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS	371.000	1.200.161.643	-	-	-	1.200.532.643
14	BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS	940.000	860.049.165	206.065	-	-	861.195.230
15	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS	2.948.000	722.584.482	-	-	-	725.532.482
16	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS	1.946.737	1.139.696.113	15.777.999	-	-	1.157.420.849
17	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS	5.531.331	1.317.548.940	-	-	-	1.323.080.271
18	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	2.272.205	74.477.358	-	-	-	76.749.563
19	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS	6.418.198	337.222.664	-	-	-	343.640.862
20	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT	180.673.836	594.570.406	2.000	-	-	775.246.242
21	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT	5.790.305	1.476.412.057	-	-	-	1.482.202.362
22	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT	4.353.362	1.943.345.264	-	-	-	1.947.698.626
23	BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT	993.000	1.984.930.044	-	-	-	1.985.923.044
24	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT	340.068	340.040.604	-	-	-	340.380.672
25	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT	14.886.855	1.297.378.060	-	-	-	1.312.264.915
26	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR	10.522.575	1.049.607.518	-	-	-	1.060.130.093
27	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR	24.216.135	261.095.747	-	-	-	285.311.882
28	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR	1.650.983	1.006.920.835	-	903.490	-	1.009.475.308
29	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR	7.598.312	192.669.199	-	-	-	200.267.511
30	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR	7.773.680	133.126.431	-	40	-	140.900.151
31	BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR	2.878.626	1.294.399.705	-	-	-	1.297.278.331
32	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR	9.326.000	444.148.479	-	-	-	453.474.479
33	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR	24.817.148	449.834.710	-	-	-	474.651.858
34	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL	6.654.781	677.316.008	249.141	-	-	684.219.930
35	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL	6.382.640	519.087.723	-	-	-	525.470.363
36	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL	25.962.002	2.296.995.791	238.290.684	5.842.434	-	2.567.090.911
37	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL	3.539.377	1.103.959.742	171.523	-	-	1.107.670.642
38	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL	5.099.762	241.981.603	175.608.759	-	-	422.690.124
39	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL	18.274.922	507.379.410	-	-	-	525.654.332
40	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL	1.930.000	621.408.055	183.255	-	-	623.521.310
41	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL	16.965.926	244.250.369	-	-	-	261.216.295
42	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL	17.668	535.535.180	117.480	-	-	535.670.328
43	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL	16.869.153	274.990.156	-	-	-	291.859.309
44	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM	2.869.000	379.776.417	-	-	-	382.645.417
45	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM	16.932.133	926.934.636	2.072.100	-	-	945.938.869
46	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM	1.437.000	399.764.964	-	-	-	401.201.964
47	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM	12.475.948	923.662.639	-	93.500	-	936.232.087
48	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM	4.424.903	1.729.120.475	-	-	-	1.733.545.378
49	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM	794.000	1.304.248.933	-	-	-	1.305.042.933
50	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM	21.857.705	614.324.920	-	-	-	636.182.625
51	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM	-	982.088.924	-	-	-	982.088.924
52	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM	2.145.000	366.192.054	167.296	-	-	368.504.350
53	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	16.512.175	708.110.285	-	-	-	724.622.440
54	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	-	90.592.121	-	-	-	90.592.121
55	BLUD UPT Stadion Lebak Bulus	-	2.528.166.217	-	-	-	2.528.166.217
56	UPT Dana Bergulir	-	12.954.879.440	3.145.076.228	-	-	16.099.955.668
57	UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	14.156.911	267.397.583	16.958.995.113	-	-	17.240.549.607
58	UPT Taman Margasatwa Ragunan	-	13.247.895.766	-	-	-	13.247.895.766
SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		9.180.359.503	342.898.883.894	69.581.431.478	2.325.678.308	858.372.908	424.844.726.091

**REKAPITULASI PIUTANG PAJAK SETELAH KOREKSI
DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012**

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2011	PEMBAYARAN	KEPUTUSAN KEBERATAN	SISA PIUTANG 2011 SEBELUM KOREKSI	KOREKSI 2011	SISA PIUTANG TAHUN 2011 SETELAH KOREKSI	PIUTANG TH. BERJALAN DES 2012	PEMBAYARAN TH. BERJALAN DES 2012	KEP. KEBERATAN TH. BERJALAN DES 2012	SISA PIUTANG TH. BERJALAN DES 2012	PIUTANG AKHIR PER 31 DES 2012
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7	8=6-7	9	10	11	12=9-10-11	13=8+12
1	HOTEL	16.653.392.552,49	2.301.283.170,89	142.320.889,00	14.209.788.492,60	0,00	14.209.788.492,60	11.288.488.281,40	7.699.007.489,51	241.926.558,00	3.347.554.233,89	17.557.342.726,49
2	RESTORAN	107.130.290.458,26	23.432.197.887,06	793.309.910,25	82.904.782.660,95	0,00	82.904.782.660,95	56.258.118.973,41	39.145.752.748,94	467.403.588,00	16.644.962.636,47	99.549.745.297,42
3	HIBURAN	43.735.944.732,26	8.427.855.483,54	1.377.551.925,00	33.930.537.323,72	0,00	33.930.537.323,72	39.377.766.251,90	29.910.533.545,86	860.340.799,50	8.606.891.906,54	42.537.429.230,26
4	REKLAME	63.148.211.222,04	32.516.467.466,13	32.016.234,00	30.599.727.521,91	0,00	30.599.727.521,91	494.158.850.295,58	409.883.786.758,10	449.117.649,60	83.825.945.887,88	114.425.673.409,79
5	PARKIR	3.335.167.611,94	791.859.816,44	30.683.756,00	2.512.624.039,50	0,00	2.512.624.039,50	12.811.126.402,00	12.413.674.112,00	77.012.212,00	320.440.078,00	2.833.064.117,50
6	ABT	54.537.428.174,60	12.447.482.720,60	984.200.505,00	41.105.744.949,00	0,00	41.105.744.949,00	85.445.155.211,88	68.572.404.388,48	308.766.094,00	16.563.984.729,40	57.669.729.678,40
7	BPHTB	24.869.294.530,00	1.611.470.090,00	17.416.880,00	23.240.407.560,00	(674.382.300,00)	22.566.025.260,00	53.961.417,00	53.961.417,00	0,00	0,00	22.566.025.260,00
8	BBN-KB	1.217.038.410,00	957.394.900,00	0,00	259.643.510,00	0,00	259.643.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.643.510,00
9	PKB	3.733.637.146,00	1.025.362.356,00	0,00	2.708.274.790,00	0,00	2.708.274.790,00	7.564.730.020,00	3.429.904.400,00	0,00	4.134.825.620,00	6.843.100.410,00
10	PBBKB							1.409.997.492,00	0,00		1.409.997.492,00	1.409.997.492,00
	JUMLAH TOTAL	318.360.404.837,59	83.511.373.890,66	3.377.500.099,25	231.471.530.847,68	(674.382.300,00)	230.797.148.547,68	708.368.194.345,17	571.109.024.859,89	2.404.566.901,10	134.854.602.584,18	365.651.751.131,86

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA,
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2012**

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2012	POKOK PIUTANG	PIUTANG DENDA	TOTAL 31 Des 2012	Saldo Piutang	
			Mulai	Berakhir		Saldo 31-12-2012	Saldo 31-12-2012	Saldo Piutang Poko + Sewa	Pokok	Denda
1	2	3	4	5	9	13 = 10+11-12	17 = 14+15-16			
1	Nireta Vista Creative	4.337.656.250	3-Oct-08	3-Sep-13	10-Mar-12	-	16.089.250	16.089.250	-	16.089.250
2	Koppenda DKI Jakarta	150.000.000	31-Jan-08	30-Jan-13	30-Jan-12	-	1.590.000	1.590.000	-	5.640.000
3	PT. Bank DKI	802.035.000	22-Feb-08	21-Feb-13	6-Mar-12	-	45.074.362	45.074.362	-	45.074.362
4	Happy Day Utama Indonesia	580.000.000	23-Dec-08	22-Dec-13	3-Jan-12	-	150.000	150.000	-	150.000
					8-Apr-12	-	-	-	-	-
					8-Jul-12	-	-	-	-	-
					7-Oct-12	-	-	-	-	-
5	Nusantara Sejahtera Raya	1.060.000.000	19-Aug-09	18-Aug-14	26-Aug-12	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000
6	PT. Panca Permata Istana Pasar Baru	4.496.856.804	16/7/2012	15/7/2017	16/9/2012	310.705.313	37.284.638	347.989.950	2.227.283.875	130.006.513
7	PT. Lingkar Seni							-	-	-
8	Metro Penata Sarana	200.000.000	16-Jul-08	15-Jul-13	27-Aug-12	-	-	-	-	-
9	PT. Bank DKI (Abdul Muis)	375.000.000	6-Jun-06	6-May-11	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH JAK-PUS					310.705.313	101.238.250	411.943.562		
								-	-	-
1	UD. Restu Ibu	84.556.394	5-Dec-08	4-Dec-13	20-Dec-12	-	-	-	-	-
2	Yay. Pendidikan Elka	1.150.000.000	23/3/2008	22/3/2013	1-Apr-12	-	14.030.000	14.030.000	-	14.030.000
3	Yay. The Gandhi Memorial International School	1.409.273.240	13-Jan-09	12-Jan-14	26-Jan-12	-	2.811.800	2.811.800	-	2.811.800
4	Yay. Korpri Kodya Jakut	460.409.000	20-Oct-08	19-Oct-13	28-Oct-12	-	10.995.025	10.995.025	-	10.995.025
5	Prima Indo Bahari	738.190.006	15-Jun-09	14-Jun-14	10-Jul-12	-	55.152.688	55.152.688	-	55.152.688
6	Prima Alto Sejahtera	2.367.579.043	3-Feb-10	3-Jan-15	17-Mar-12	393.260.000	23.595.600	416.855.600	393.260.000	23.595.600
7	UD. Matahari Terbit	84.556.394	5-May-10	5-Apr-15	15-May-12	27.136.000	17.807.820	44.943.820	27.136.000	2.492.700
8	Yay. Al Amanah Sunter Agung	164.000.000	1-Oct-09	1-Sep-14	16-Jan-12	-	-	-	-	-
9	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.183.789.522	5-Apr-10	4-Apr-15	5-Apr-12	-	-	-	-	-
10	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan (coldstorage)	270.606.000	19-Apr-11	19-Apr-14	19-Apr-12	-	-	-	-	-
11	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan (SPBU)	981.593.198	16-Feb-11	17-Feb-16	16-Feb-12	-	-	-	-	-
12	PD. Sumber Alam	225.483.718	16-Feb-11	16-Feb-16	16-Feb-12	35.333.333	13.605.600	48.938.933	35.333.333	4.447.200

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2012	POKOK PIUTANG	PIUTANG DENDA	TOTAL 31 Des 2012	Saldo Piutang	
			Mulai	Berakhir		Saldo 31-12-2012	Saldo 31-12-2012	Saldo Piutang Poko + Sewa	Pokok	Denda
1	2	3	4	5	9	13 = 10+11-12	17 = 14+15-16			
13	PT Bank DKI	14.300.660.100	31-May-11	30-May-16	31-May-12	-	-	-	-	-
14	PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 ruang ATM)	3.120.130.953	7-Jul-11	6-Jul-16	7-Jul-12	-	4.894.020	4.894.020	-	4.894.020
15	PT Bank DKI (22 kantor kecamatan)	2.609.622.450	7-Jul-11	6-Jul-16	7-Jul-12	-	4.416.424	4.416.424	-	4.416.424
16	PT Astra Daihatsu Motor	298.765.927	3-Jan-11	2-Jan-16	21-Jul-12	-	-	-	-	-
17	Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI)	25.000.000	18-Oct-11	17-Oct-16	18-Oct-12	-	-	-	-	-
18	PT. Alam Segar Jaya	719.293.062	28-Feb-12	27-Feb-17	14-Mar-12	-	-	-	-	-
19	Yayasan Ancol Barat	160.784.300	12-Apr-12	11-Apr-12	27-Apr-12	-	-	-	-	-
20	PT. Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation	990.000.000	12-Apr-12	11-Apr-17	18-Jun-12	-	-	-	-	-
21	Yayasah Harapan Bangsa	507.338.366	15-Jun-12	14-Jun-17	14-Nov-12	-	-	-	-	-
22	PT. Wiradharma Sportindo	563.709.296	8-Nov-12	7-Nov-17	28-Nov-12	-	500.000	500.000	-	500.000
23	Koperasi Putri Salju	208.572.440	22-Nov-12	21-Nov-17	7-Dec-12	-	370.000	370.000	-	370.000
24	PT. Rukun Gaya Baru	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Yay. Jemaat Sungai Yordan	100.000.000	13-Nov-07	12-Nov-12	23-Nov-12	-	-	-	-	-
26	Gereja Tiberias Indonesia	250.000.000	14-May-07	13-May-12	2011	-	-	-	-	-
27	Yay. Harapan Bangsa	320.000.000	5-Jun-07	4-Jun-12	-	-	-	-	-	-
28	Yay. Pendidikan Karya Kasih	56.370.930	6-Jan-07	5-Jan-12	-	-	-	-	-	-
29	PT Nata Sempurna Abdi	75.000.000	4-Apr-05	3-Apr-10	-	60.000.000	92.400.000	152.400.000	60.000.000	114.360.000
30	Koperasi Karyawan Bina Sejahtera BP3W Kodya Jakarta Utara	42.750.000	30-May-05	29-May-10	-	-	718.200	718.200	-	718.200
31	Yay. Mahatma Gading	750.000.000	24-Mar-06	23-Mar-11	-	-	-	-	-	-
32	Yay. Masyarakat Olahraga Jakarta Utara	519.375.000	22-Dec-06	21-Dec-11	-	-	-	-	-	-
33	PT Jaya Fibrindo				-	-	-	-	-	-
34	Sukijat				-	-	-	-	-	-
35	PT. Flora Hijau Permai					48.000.000	-	48.000.000	48.000.000	-
	JUMLAH JAK-UTR					563.729.333	241.297.178	805.026.511		
								-	-	-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2012	POKOK PIUTANG	PIUTANG DENDA	TOTAL 31 Des 2012	Saldo Piutang	
			Mulai	Berakhir		Saldo 31-12-2012	Saldo 31-12-2012	Saldo Piutang Poko + Sewa	Pokok	Denda
1	2	3	4	5	9	13 = 10+11-12	17 = 14+15-16			
1	Kadin Jakarta Barat	40.000.000	22-Feb-08	21-Feb-13	22-Feb-12	25.333.333	19.248.000	44.581.333	25.333.333	19.248.000
2	Yay. Pusat Pelatihan E & P	500.000.000	25-Aug-08	24-Aug-13	24-Sep-12	-	-	-	-	-
3	PT Antilope Madju Puri Indah	690.000.000	30-Nov-08	30-Nov-13	14-Dec-12	-	169.602.000	169.602.000	-	169.602.000
4	Palang Merah Indonesia Jakarta Barat	30.000.000	19-Sep-08	18-Sep-13	-	-	-	-	-	-
5	Yay. Pendidikan Citra Kasih	530.000.000	29-Jul-09	29-Jul-14	8-Aug-12	-	8.470.000	8.470.000	-	8.470.000
6	Yay. Pendidikan Cengkareng	339.243.885	18-Aug-09	17-Aug-14	18-Sep-12	-	13.925.087	13.925.087	-	13.925.087
7	Yay. Pendidikan Kemurnian	350.000.000	26-Apr-08	25-Apr-13	9-May-12	-	-	-	-	-
8	PT Petross Gas	2.778.654.183	1-Apr-10	31-Mar-15	5-Jul-12	-	27.542.499	27.542.499	-	27.542.499
9	Yay. Pendidikan Pelita Harapan	2.500.000.000	1-Jul-10	30-Jun-15	-	-	-	-	-	-
10	Yayasan Diannanda (sd)	430.117.600	27/9/2008	26/9/2013	31-May-12	-	-	-	-	-
11	Yayasan Suhargo Gondokusumo	530.000.000	25-Jun-12	24-Jun-17	10-Jul-12	-	-	-	-	-
12	Yayasan Muslim Bojong Indah	30.000.000	19-Apr-12	18-Apr-17	4/19/2012 dan 5/19/2012	-	250.000	250.000	-	250.000
13	Yayasan Pendidikan Citra Kasih (Blok bl. 11-12	730.000.000	12-Apr-12	11-Apr-17	19-Apr-12	-	-	-	-	-
14	PT. Davalty Mugitama Gasindo	2.395.764.506	15-Mar-12	14-Mar-17	19-Oct-12	26.202.456	-	26.202.456	26.202.456	1.310.123
15	Yay. Pendidikan Islam Al Huda	45.000.000	29-Apr-08	28-Apr-11	-	15.000.000	29.580.000	44.580.000	15.000.000	29.580.000
16	PT Petroleum Sukses	882.950.000	27-Apr-06	26-Apr-11	-	706.360.000	1.072.077.890	1.778.437.890	706.360.000	1.072.077.890
17	Yay. Pendidikan Citra Kasih	380.000.000	8-Sep-06	7-Sep-11	-	-	6.800.000	6.800.000	-	6.800.000
18	Yay. Pendidikan Dian Kasih	46.000.000	7-Sep-05	7-Sep-10	17-Sep-12	10.000.000	19.612.000	29.612.000	-	302.000
19	PT Davalti Mugi Utama	1.664.553.982	15-Mar-07	14-Mar-12	-	-	82.828.729	82.828.729	-	82.828.729
20	PT Pentrago Fertila Utama	500.000.000	23-Oct-07	23-Oct-12	-	500.000.000	696.700.000	1.196.700.000	500.000.000	696.700.000
21	Yayasan Diannanda	169.112.789	21-Nov-07	20-Nov-12	-	-	113.621	113.621	-	113.621
22	Yay. Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	100.000.000	14-Nov-07	14-Nov-12	-	-	-	-	-	-
23	Alfa Indah Sportindo	546.411.042	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT. Alita Praya Mitra	802.200.000	23-Nov-07	21-Feb-12	-	204.030.000	120.971.760	325.001.760	204.030.000	120.971.760
25	PT. Maya Saribakti Utama	424.800.000	22-Oct-07	22-Oct-12	-	56.640.000	69.412.320	126.052.320	56.640.000	69.412.320
	JUMLAH JAK-BAR					1.543.565.789	2.337.133.906	3.880.699.695		
								-	-	-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2012	POKOK PIUTANG	PIUTANG DENDA	TOTAL 31 Des 2012	Saldo Piutang	
			Mulai	Berakhir		Saldo 31-12-2012	Saldo 31-12-2012	Saldo Piutang Poko + Sewa	Pokok	Denda
1	2	3	4	5	9	13 = 10+11-12	17 = 14+15-16			
1	Koperasi Pegawai Dinas Pariwisata	125.000.000	30-Dec-08	29-Nov-13	13-Jan-12	75.000.000	49.325.000	124.325.000	75.000.000	53.900.000
2	Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM	30.000.000	14-Jul-08	13-Jul-13	23-Jul-12	8.500.000	1.296.000	9.796.000	8.500.000	3.735.000
3	PT Multi Kontrol Nusantara	250.000.000	14-Dec-09	13-Dec-14	-	-	-	-	-	-
4	Yay. Putera Bahagia	967.328.750	15-Jun-09	14-Jun-14	28-Jun-12	-	9.479.822	9.479.822	-	9.479.822
5	CV Kandang Mas	180.386.975	29-Dec-10	28-Dec-15	12-Jan-12	-	-	-	-	-
6	Himpunan Penyayang Binatang	30.000.000	30-Jun-11	29-Jun-16	-	-	-	-	-	-
7	Koperasi BLU Trans Jakarta Busway	2.047.640.000	15-Jun-11	14-Jun-14	15-Jun-12	-	-	-	-	-
8	PT Safari Persada	986.491.268	7-Jul-11	6-Jul-16	7-Jul-12	92.750.000	9.275.000	102.025.000	92.750.000	9.275.000
9	PT. Asri Karya Indah Pesona	620.080.226	1-Jan-12	31-Dec-16	1/12/2012 dan 1/7/2012	-	2.750.000	2.750.000	-	-
10	Yayasan Pantara	112.741.859	8-Aug-12	7-Aug-17	21-Aug-12	-	-	-	-	-
11	PT. Griya Berlian	3.190.000.000	29-Nov-12	28-Nov-17	-	-	-	-	-	-
12	CV Satu Nafas	500.000.000	3-Jul-08	2-Jul-13	13-Jan-12	283.333.333	185.100.000	468.433.333	300.000.000	198.300.000
					13-Jul-12	-	-	-	-	-
13	Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan	1.268.345.916	1-Jan-07	1-Jan-12	1/1/2012 dan 1/7/2012	-	-	-	-	-
14	PT. Harco Jaya Abadi	2.500.000.000	1-Jun-11	31-May-16	15-Jun-12	-	-	-	-	-
					1-Sep-12	-	-	-	-	-
					1-Dec-12	-	-	-	-	-
					1-Mar-13	-	-	-	-	-
15	CV. Virgini							-	-	-
16	PD. Pasar Jaya	400.000.000			2012	-	-	-	-	-
17	Yay. Golf DKI Jakarta	200.000.000	20-Jul-07	19-Jul-12	20-Jul-12	-	42.880.000	42.880.000	-	42.880.000
18	PT Figur Karya Semesta	311.625.000	10-Dec-07	9-Dec-12	-	-	140.854.500	140.854.500	-	140.854.500
19	PT PLN	75.000.000	4-Jun-07	4-Jun-12	-	-	150.000	150.000	-	150.000
20	PT Ratax Armada	500.000.000	11-Aug-06	11-Aug-11	-	-	33.250.000	33.250.000	-	33.250.000
21	Univ. Indraprasta PGRI	162.000.000	11-Dec-07	30-Nov-12	21-May-12	-	-	-	-	-
					21-Nov-12	-	-	-	-	-
22	PT Bank DKI (Nyi Ageng Serang)	250.000.000	12-Nov-07	11-Nov-12	-	-	6.300.000	6.300.000	-	6.300.000
23	PD Pembangunan Sarana Jaya	1.200.000.000	4-Apr-05	4-Apr-10	-	240.000.000	250.720.000	490.720.000	-	720.000
24	Univ. Indraprasta PGRI (Kel. Tj. Barat)	75.000.000	22-Dec-06	21-Dec-11	-	-	-	-	-	-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Tahun 2012	POKOK PIUTANG	PIUTANG DENDA	TOTAL 31 Des 2012	Saldo Piutang	
			Mulai	Berakhir		Saldo 31-12-2012	Saldo 31-12-2012	Saldo Piutang Poko + Sewa	Pokok	Denda
1	2	3	4	5	9	13 = 10+11-12	17 = 14+15-16			
25	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga	37.500.000	13-Oct-06	12-Oct-11	-	-	735.000	735.000	-	735.000
26	PT Jaya Real Property	475.000.000	31-Dec-07	30-Dec-11	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
27	PD Pasar Jaya	186.188.625	5-May-10	5-Nov-11	-	-	-	-	-	-
28	Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan	600.000.000	1-Jan-07	1-Jan-12	-	210.000.000	-	210.000.000	210.000.000	-
29	PT. Harkat Abadi Sukses					100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
30	PT. Harco Jaya Abadi	2.100.000.000	1-Jun-06	30-May-11	-	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
	JUMLAH JAK-SEL					1.009.583.333	733.115.322	1.742.698.655		
								-	-	-
1	PT Aksara Andalan Prima Lokasi Kp. Rambutan	4.246.908.500	21-Apr-08	21-Apr-13	-	3.114.399.567	2.594.577.966	5.708.977.533	3.114.399.567	2.661.112.866
2	PT T. Energy	2.700.000.000	1-Dec-08	30-Nov-13	31-Dec-12	26.361.913	189.975.026	216.336.939	26.361.913	189.975.026
3	Yay. Perguruan Rakyat	500.000.000	2-Feb-09	1-Feb-14	11-Feb-12	-	-	-	-	-
4	KSU Ceger Jaya	125.000.000	25-Apr-08	24-Apr-13	15-Apr-12	-	-	-	-	-
5	Yay. Dharma Diswa	75.000.000	27-Apr-08	26-Apr-13	22-Apr-12	-	-	-	-	-
6	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	32.500.000	25-May-11	24-May-16	-	-	-	-	-	-
7	PT Bank BNI (Persero) Tbk	375.000.000	1-Jun-09	31-May-14	-	-	375.000	375.000	-	375.000
8	PT Bank Mandiri	300.000.000	7-Jun-09	6-Jun-14	-	-	-	-	-	-
9	Yay. Rumah Bersalin Bidara Mulia	67.644.916	16-Jun-09	15-Jun-14	15-Jun-12	-	-	-	-	-
10	PT Bianglala Metropolitan	2.189.585.000	13-Jan-11	12-Jan-16	15-Jul-12	-	3.065.419	3.065.419	-	3.065.419
11	Kadin Jakarta Timur	125.000.000	13-Sep-11	12-Sep-16	28-Sep-13	-	-	-	-	-
12	PT. Pal Jayabumi Utama	1.250.000.000	18-Jan-06	18-Jan-11	-	1.000.000.000	1.634.250.000	2.634.250.000	1.000.000.000	1.634.250.000
13	Yayasan Nurmala Hikmah	12.500.000	1-Jun-06	31-May-11	-	-	17.500	17.500	-	17.500
14	PT Hyunwoo Trading Indonesia	1.111.600.000	5-May-08	4-May-13	14-May-12	1.111.600.000	1.064.245.840	2.175.845.840	1.111.600.000	1.068.914.560
	JUMLAH JAK-TIM					5.252.361.480	5.486.506.751	10.738.868.231		
								-		
	JUMLAH TOTAL					8.679.945.247,83	8.899.291.406	17.579.236.654	10.363.190.477,00	8.814.217.504,04

**DAFTAR REKONSILIASI PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2012**

No.	Pihak Ketiga	Thn PKS	Jangka Waktu PKS	Nilai Kontribusi PKS BOT/BTO	Piutang Pokok Per 31 Des 2011	Piutang Pokok Per 31 Des 2012	Piutang Denda Per 31 Des 2011	Piutang Denda Per 31 Des 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. Kempas Indah Indonesia	1997	1999 s/d 2024	910.000.000,00		-		-
2	PT. Duta Pertiwi Tbk	1997	1997 s/d 2017	460.000.000,00		-		-
3	PT. Duta Pertiwi Tbk	1999	1999 s/d 2029	1.450.000.000,00		-		-
4	PT. Rointan Eka Jaya	2001	2001 s/d 2031	1.250.000.000,00		-	14.400.000,00	14.400.000,00
5	PT. Duta Masa Nusa	2003	2006 s/d 2031	2.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		-
6	PT. Duta Pertiwi Tbk	2003	2004 s/d 2029	1.500.000.000,00		-		-
7	PT. Gading Raya Propertindo	2004	2004 s/d 2029	3.500.000.000,00		-		-
8	PT. Hotel Cikini Raya	2006	2008 s/d 2032	6.150.000.000,00		-	3.600.000,00	3.600.000,00
9	PT. Grand Indonesia	2009	2008 s/d 2035	53.074.000.000,00		-		-
10	PT. Jaya Real Property	2011	2012 s/d 2037	6.957.000.000,00		-		-
11	PT. Fajar Setia Mandiri	2002	2003 s/d 2023	2.218.000.000,00		-	123.050.000,00	123.050.000,00
12	PT. AGB Tuna (Coldstorage)	2004	2004 s/d 2024	600.000.000,00		-	73.150.000,00	73.150.000,00
13	Yayasan Al-Muhajirin	2005	2005 s/d -	-		-		-
14	PT. Gamma Investa Lestari	2006	175.108.000,00	1.500.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	105.060.000,00	105.060.000,00
15	Gereja Protestan Minahasa	2006	2006 s/d -	-		-		-
16	PT. AGB Tuna (Pabrik Es)	2006	2006 s/d 2026	450.000.000,00		-	57.400.000,00	57.400.000,00
17	PT. Duta Pertiwi Tbk	2008	2006 s/d 2031	7.453.280.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00		-
18	PT. Gerak Maju Abadi	1997	1997 s/d 2017	5.315.000.000,00		-	57.225.000,00	57.225.000,00
19	PT. Bina Citra Tataswati	2000	2002 s/d 2040	200.000.000,00		-		-
20	Yayasan Tunas Muda	2000	2000 s/d 2025	911.281.327,75	14.093.750,00	14.093.750,00		-
21	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	2001	2001 s/d 2026	562.500.000,00		-		-
22	Yayasan Katolik Mardi Luhur	2001	2001 s/d 2026	911.281.326,20	113.185.417,00	146.460.417,00	70.849.350,00	109.330.375,00
23	PT. Pesona Marga Mandiri	2003	2004 s/d 2029	7.494.152.500,00		-	21.364.000,00	21.364.000,00
24	Yayasan Patmos	2003	2006 s/d 2031	2.629.958.656,75		-		-
25	Yay. Pusat Pelatihan E&P	2003	2006 s/d 2031	2.446.290.729,77		-		-
26	Gereja Bethel Jemaat Ecclesia	2005	2005 s/d -	-		-		-

No.	Pihak Ketiga	Thn PKS	Jangka Waktu PKS	Nilai Kontribusi PKS BOT/BTO	Piutang Pokok Per 31 Des 2011	Piutang Pokok Per 31 Des 2012	Piutang Denda Per 31 Des 2011	Piutang Denda Per 31 Des 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	2006	2008 s/d 2033	6.929.568.694,13	75.000.001,00	180.000.001,00	34.330.000,00	43.360.000,00
27	PT. Langgeng Ayom Lestari	1990	1991 s/d 2021	2.605.000.000,00		-	13.760.000,00	19.010.000,00
28	Yay. Sapta Nawami Bhakti	1992	1992 s/d 2012	351.779.690,00		-		-
29	PT. Dharma Alumas Sakti	1992	1997 s/d 2044	22.271.759.150,00		-	60.104.931.681,00	60.104.931.681,00
30	PT. Bakrie Investindo	1992	1997 s/d 2044	18.237.500.000,00		-	27.477.233.262,00	23.977.233.262,00
31	PT. Pasific Bangun Mas	2001	2001 s/d 2026	700.000.000,00		-	116.600.000,00	116.600.000,00
32	PT. Perwita Margasakti	2003	2003 s/d 2028	2.500.000.000,00		-		-
33	PT. Metropolitan Kentjana	2008	2006 s/d 2031	24.912.000.000,00	277.500.000,00	277.500.000,00	22.552.000,00	22.552.000,00
34	PT. Perwita Margasakti	2010	2010 s/d 2035	5.220.000.000,00		-	2.700.000,00	2.808.000,00
35	Yayasan Tugasku	1998	2004 s/d 2024	1.250.950.000,00	1.100.950.000,00	850.950.000,00		-
36	Yay. Pend. Pemb. Bangsa	2003	2003 s/d 2028	-		-		-
37	PT. Fajar Setia Mandiri	2003	2003 s/d 2023	1.600.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	175.108.000,00	175.528.000,00
38	PT. Pasific Prima Buana Mas	2004	2004 s/d 2029	250.000.000,00		-	2.569.651.385,00	2.569.651.385,00
39	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2004	2004 s/d 2029	2.350.000.000,00		-	6.750.000,00	6.750.000,00
40	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2006	2006 s/d 2031	3.000.000.000,00			91.500.000,00	91.500.000,00
41	Yayasan Darul Ma'arif	2006	2006 s/d -	-		-		-
42	PT. AAP				4.302.396,00	4.302.396,00		-
43	Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP		30 Tahun		540.000.000,00	540.000.000,00		-
44	Eks. PDUK		30 Tahun		400.000.000,00	400.000.000,00		-
45	T. Kav No.I.C.2		25 Tahun		525.000.000,00	525.000.000,00		-
46	Tanah Kavling Blok III A (PT. MML)		30 Tahun		1.510.000,00	1.510.000,00		-
47	Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P)		30 Tahun		450.000.000,00	450.000.000,00		-
	JUMLAH			202.121.302.074,60	4.143.541.564,00	4.031.816.564,00	91.141.214.678,00	87.694.503.703,00

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA TITIK REKLAME PER 31 DESEMBER 2012**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
1	PT. Nindhotama Kharisma	JPO Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII Kebon Kacang Jakarta Pusat	341.500.000,00	341.500.000,00		0,00	0,00	341.500.000,00	
2	PT. Caesar	Bahu Jalan Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten Jakarta Barat	170.000.000,00	170.000.000,00		0,00	0,00	170.000.000,00	
3	PT. Griya Kaya Kreasi	JPO Jl. HR. Rasuna Said dpn Kedubes Turki Jakarta Selatan	305.000.000,00	305.000.000,00		0,00	305.000.000,00	0,00	Lunas 10 Feb 2012
4	PT. Billy Sinar Pratama	JPO Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex. Kymco Motor Jakarta Barat	39.500.000,00	39.500.000,00		0,00	0,00	39.500.000,00	
5	PT. Ditadini Neo Swara	Halte Busway Bagian Dalam Koridor 1 (19 unit)	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00	0,00	25.000.000,00	
6	PT. Starindo Pola Abadi	Halte Bus Reguler Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI Jakarta Timur	25.741.000,00	25.741.000,00		0,00	0,00	25.741.000,00	
7	PT. Garis Mediatama	JPO Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes Jakarta Selatan	157.500.000,00	157.500.000,00		0,00	0,00	157.500.000,00	
8	PT. Sundul Langit Media Indonesia	JPO Jl. Prof. Dr. Latumenten (Setelah Rel KA) Jakarta Barat	29.500.000,00	29.500.000,00		0,00	0,00	29.500.000,00	
9	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi Kec.Mampang Prapatan	372.000.670,00	186.000.335,00		0,00	0,00	186.000.335,00	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
10	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi	68.000.670,00	34.000.335,00		0,00	0,00	34.000.335,00	Tahap I Lunas 18 Nov 2011

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
11	PT. Dinamika Mitra Internusa	Kec.Matraman Jak Timur Pos Polisi Jl. Bekasi Barat samping Fly Over Kec.Jatinegara Jak Timur	27.000.670,00	13.500.335,00		0,00	0,00	13.500.335,00	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
12	PT. Dinamika Mitra Internusa	Titik S-9B Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas Kec.Keb Baru, Jak Sel	400.000.670,00	200.000.335,00		0,00	0,00	200.000.335,00	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
13	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO Jl. Warung Jati Barat depan Hotel Jati Padang Kec.Ps Minggu Jak Sel	226.000.670,00	113.000.335,00		0,00	0,00	113.000.335,00	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
14	PT. Puri Anugerah Utama	Pos Polisi Jl. S.Parman-Jl.Palmerah Kec.Palmerah Jak Barat	105.000.670,00	52.500.335,00		0,00	0,00	52.500.335,00	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
15	PT. Simpati Advertising	JPO Samping Pasar raya Blok M Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai Jakarta Selatan	6.690.450,00	6.690.450,00		0,00	0,00	6.690.450,00	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
16	PT. Mida Jaya	JPO Busway Jl. Jend Gatot Subroto perempatan Slipi - Letjen S.Parman Jakarta Pusat	25.995.300,00	25.995.300,00		0,00	0,00	25.995.300,00	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
17	PT. Puri Anugerah Utama	JPO Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox Senen, Jakarta Pusat	254.589.000,00	254.589.000,00		0,00	127.294.500,00	127.294.500,00	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
18	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO Jl. Salemba Raya depan UI Senen, Jakarta Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	0,00	250.000.000,00	BATAL Terbit SPS Nomor 56/SPS/BPKD-PPTR/VII/2012
19	PT. Puri Anugerah Utama	JPO Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC Senen, Jakarta Pusat	289.900.000,00	289.900.000,00		0,00	0,00	289.900.000,00	Belum dibayar
20	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO Jl. Salemba Raya dpn Carolus Senen, Jakarta Pusat	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	0,00	250.000.000,00	Belum dibayar
21	PT. Puri Anugerah Utama	JPO Jl. HayamWuruk depan Htl Jayakarta	285.500.000,00	285.500.000,00		0,00	142.750.000,00	142.750.000,00	Tahap I Lunas 27 Feb 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
22	PT. Caesar	Taman Sari, Jakarta Barat Titik B1B Jl Letjen S.Parman Palmerah Jakarta Barat	472.600.000,00	236.300.000,00		0,00	0,00	236.300.000,00	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
23	PT. Caesar	Titik B1A Jl Letjen S.Parman Palmerah Jakarta Barat	472.600.000,00	236.300.000,00		0,00	0,00	236.300.000,00	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
24	PT A&S Cipta Sentra Komunika	Titik S2A Jl, HR Rasuna Said/PD PAL Setiabudi Jakarta Selatan	480.000.000,00	240.000.000,00		0,00	240.000.000,00	0,00	Tahap I Lunas 18 Okt 2011 Tahap II Lunas 1 Nov 2012
25	PT Genta Cipta Pariwara	Titik P26 Jl, Jend Gatot Subroto/Jl. Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat	515.000.000,00	515.000.000,00		0,00	515.000.000,00	0,00	Lunas 18 Januari 2012
26	PT. Caesar	Titik P7B Jl, HR Rasuna/Latuharhari Menteng Jakarta Pusat	945.000.000,00	472.500.000,00		0,00	0,00	472.500.000,00	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
27	PT. Mida Jaya	Titik B10A Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar	122.000.000,00	122.000.000,00		0,00	0,00	122.000.000,00	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
28	PT. Simpati Advertising	JPO depan Atrium Jl. Senen Raya, Kel Senen Jakarta Pusat	10.035.675,00	10.035.675,00		0,00	10.035.675,00	0,00	Lunas 18 Januari 2012 Denda Pembatalan Sewa Tirek
29	PT. Puri Anugerah Utama	JPO Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti Fauji, Kec Ps Minggu Jak Sel	353.000.670,00	176.500.335,00	176.500.335,00	0,00	176.500.335,00	176.500.335,00	Tahap I Lunas 25 Januari 2012 dikeluarkan 2x SPS
30	PT. Indira Dadi Jaya	JPO Jl. Tomang Raya dpn Mandala Hero Kec. Grogol Petamburan	16.000.000,00	16.000.000,00		0,00	16.000.000,00	0,00	Lunas 1 Februari 2012 Denda Pembatalan Sewa Tirek
31	PT. Unggul Dian Perkasa	JPO Jl. Jend. Gatot Subroto dpn Plaza Semanggi, Kec. Setiabudi Jak Sel	750.000.000,00	0,00		750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Lunas 13 Februari 2012
32	PT. Unggul Dian Perkasa	Titik S28 Jl. Senopati/Jl. Rajasa (SCBD) Kec. Kebayoran Baru Jak Sel	1.599.000.000,00	0,00		1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	0,00	Lunas 17 Februari 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
33	PT. Pesona Creative 13	Titik S5A Jl. DR. Soepomo Kec. Tebet Jak-Sel	666.000.000,00	0,00		666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	Lunas 9 Februari 2012
34	PT. Pixel Media Inovasi	Titik S13A Jl. Warung Jati Barat/Jl. Pejaten Kec. Pasar Minggu Jak-Sel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Batal Terbit SPS 167/SPS/BPKD- PPTR/VII/2012
35	PT. Pesona Creative 13	Titik S9A Jl. Panglima Polim/Jl. Sambas Kec. Kebayoran Baru Jak-Sel	150.000.000,00	0,00		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Lunas 9 Februari 2012
36	PT. Artamedia Nusantara Mandiri	JPO Sky Walk Samping Gedung Landmark Kec. Setiabudi Jak-Sel	338.000.000,00	0,00		338.000.000,00	0,00	338.000.000,00	
37	PT. Billy Sinar Pratama	JPO Busway Jl. Duren Tiga Kec. Mampang Prapatan Jak-Sel	200.500.000,00	0,00		200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	Lunas 13 Februari 2012
38	PT. Puri Anugrah Utama	JPO Jl. Matraman Raya dpn BCA Kec. Matraman Jak-Sel	280.067.000,00	0,00		280.067.000,00	0,00	280.067.000,00	
39	PT. Artamedia Nusantara Mandiri	JPO Jl. Panglima Polim samping Blok M Plaza Kec. Kebayoran Baru Jak-Sel	318.000.000,00	0,00		318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	Lunas 2 April 2012
40	PT. Media Indra Buana	Titik S22 Jl. Kemang Raya/Jl. Bangka Raya Pela Mampang Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel	36.752.872,00	0,00		36.752.872,00	36.752.872,00	0,00	Lunas 7 Juni 2012
41	PT. Media Indra Buana	Titik P15 Jl. Jend. Gatot Subroto dpn Manggala Wanabakti, Bendungan Hilir Kec.Tanah Abang Jak-Pus	71.400.424,00	0,00		71.400.424,00	71.400.424,00	0,00	Lunas 7 Juni 2012
42	PT. Media Indra Buana	Titik S21 Jl. Hang Lekir/Jl. Asia Afrika Gunung Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	24.722.472,00	0,00		24.722.472,00	24.722.472,00	0,00	Lunas 7 Juni 2012
43	PT. Media Indra Buana	Titik S20 Jl. Setiabudi Tengah/Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi	342.490.450,00	0,00		342.490.450,00	342.490.450,00	0,00	Lunas 7 Juni 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
		Kec.Setiabudi Jak-Sel							
44	PT. Jonathan Mandiri	Titik B8A Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang Kec.Palmerah Jak-Bar	320.000.000,00	0,00		320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Lunas Mei 2012
45	PT. Media Indra Buana	Titik B31 Jl. Letjend. S. Parman-Tanjung Duren Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar	453.000.000,00	0,00		453.000.000,00	453.000.000,00	0,00	Lunas 10 Mei 2012
46	PT. Trimitra Sekarya	JPO Jl. Casablanca dekat Gd.Elektrolux Kec.Tebet Jak-Sel	285.000.000,00	0,00		285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	Lunas 15 Mei 2012
47	CV. Multi Pratama Indonesia	Titik B8C Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang Kec.Palmerah Jak-Bar	328.000.000,00	0,00		328.000.000,00	328.000.000,00	0,00	Lunas Mei 2012
48	PT. Rainbow Asia Posters	Titik B8B Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang Kec.Palmerah Jak-Bar	325.000.000,00	0,00		325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Lunas 7 Mei 2012
49	PT. Cakra Mahkota	JPO Jl. Senen Raya dpn Atrium Kec.Senen Jak-Pus	151.000.000,00	0,00		151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	Lunas 3 Mei 2012
50	PT. Media Indra Buana	Pos Polisi Jl. Sisingamangaraja (Bundaran Senayan) Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	46.445.520,00	0,00		46.445.520,00	46.445.520,00	0,00	Lunas 11 April 2012
51	PT. Media Indra Buana	Titik S23 Jl. Jend. Gatot Subroto dpn Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	2.367.943.632,00	0,00		2.367.943.632,00	2.367.943.632,00	0,00	Lunas 7 Juni 2012
52	PT. Garis Mediatama Mandiri	JPO Jl. Salemba Raya depan RS. ST. Carolus Kec.Senen Jak-Pus	222.000.000,00	0,00		222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	Lunas 10 Okt 2012
53	PT. A&S Cipta Sentra Komunika	Titik S2B Jl. HR. Rasuna Said (PD. PAL) Kec.Setiabudi Jak-Sel	485.000.000,00	0,00		485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	Lunas 12 Sept 2012
54	PT. Media Indra Buana	Titik SK 53/2005 Jl. Jend. Ahmad Yani Kec.Jatinegara Jak-Tim	100.000.000,00	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Lunas 17 Sept 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
55	PT. Media Indra Buana	Titik T10E Jl. Raya Bogor/Jl. TB. Simatupang Kec.Ciracas Jak-Tim	330.000.000,00	0,00		330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	Lunas 17 Sept 2012
56	PT. Pesona Creative 13	JPO Jl. Gunung Sahari Raya depan Golden Truly Kec.Kemayoran Jak-Pus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(Rp. 513.000.000) sebagai ganti titik S5A
57	PT. Media Indra Buana	Titik P21 Jl. Penjernihan/Jl. Pejompongan Kec.Tanah Abang Jak-Pus	400.000.000,00	0,00		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Lunas 17 Sept 2012
58	PT. Media Indra Buana	Titik S10A Jl. Kyai Maja/Jl. Barito 1 Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	1.259.000.000,00	0,00		1.259.000.000,00	1.259.000.000,00	0,00	Lunas 17 Sept 2012
59	PT. Media Indra Buana	Titik SK 82/2007 Jl. DR. Saharjo Kec.Tebet Jak-Sel	609.000.000,00	0,00		609.000.000,00	609.000.000,00	0,00	Lunas 17 Sept 2012
60	PT. Level Delapan Utama	Titik P28 Jl. Senen Raya belakang Hotel Borobudur Kec.Sawah Besar Jak-Pus	1.010.000.000,00	0,00		1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	Lunas 14 Sept 2012
61	PT. Imaje	JPO Jl. Tomang Raya depan Hero/Mandala Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar	235.000.000,00	0,00		235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	Lunas 18 Sept 2012
62	PT. Imaje	JPO Jl. Daan Mogot samping Citraland Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar	369.000.000,00	0,00		369.000.000,00	369.000.000,00	0,00	Lunas 18 Sept 2012
63	PT. Billy Sinar Pratama	JPO Jl. Warung Jati Barat depna SMK 57 Kec.Pasar Minggu Jak-Sel	59.000.000,00	0,00		59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	Lunas 19 Sept 2012
64	PT. Pesona Creative 13	JPO Jl. Letjen Suprpto depan Cempaka Mas Kec.Cempaka Putih Jak-Pus	313.000.000,00	0,00		313.000.000,00	313.000.000,00	0,00	Lunas 28 Sept 2012
65	PT. Pesona Creative 13	Titik SK 53/2005 Jl. Senen Raya/Jl. Prapatan Kwitang Kec.Senen Jak-Pus	1.813.000.000,00	0,00		1.813.000.000,00	1.813.000.000,00	0,00	Lunas 28 Sept 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
66	PT. Globalindo Sarana Utama	JPO Jl. Raya Pasar Minggu depan Terminal Kec.Pasar Minggu Jak-Sel	203.000.000,00	0,00		203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	Lunas 1 Okt 2012
67	PT. Globalindo Sarana Utama	JPO Jl. Jatinegara Timur depan RS. Mitra Keluarga Kec.Matraman Jak-Tim	125.000.000,00	0,00		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Lunas 1 Okt 2012
68	PT. Rainbow Asia Posters	Titik S10B Jl. Kyai Maja/Jl. Barito 1 Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	519.999.999,00	0,00		519.999.999,00	519.999.999,00	0,00	Lunas 24 Sept 2012
69	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO Jl. Casablanca depan Halte SD/ Pemakaman Kec.Tebet Jak-Sel	200.900.000,00	0,00		200.900.000,00	0,00	200.900.000,00	
70	PT. Nuansa Raya Ciptakreasindo	Armada Busway Koridor I (20 Bus) Koridor I Blok M - Kota	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lunas 26 Juli 2012
71	PT. Pesona Creative 13	Titik S9A (Perubahan Ukuran) Jl. Panglima Polim/Jl. Sambas Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	187.493.200,00	0,00		187.493.200,00	187.493.200,00	0,00	LUNAS
72	PT. Jaya Adhimedia	Titik S45 Jl. Letjen. MT. Haryono depan Ditlantas Kec.Tebet Jak-Sel	451.000.000,00	0,00		451.000.000,00	451.000.000,00	0,00	Lunas 4 Desember 2012
73	PT. Unggul Dian Perkasa	Titik S4B Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook Jl. HR. Rasuna Said arah Cawang Kec.Setiabudi Jak-Sel	450.000.000,00	0,00		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Lunas 20 Nov 2012
74	PT. Unggul Dian Perkasa	Titik S4A Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook Jl. HR. Rasuna Said arah Cawang Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel	450.000.000,00	0,00		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Lunas 12 Nov 2012
75	PT. Unggul Dian Perkasa	Titik S7A Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook Jl. HR. Rasuna Said arah Semanggi Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel	450.000.000,00	0,00		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Lunas 12 Nov 2012
76	PT. Globalindo Sarana Utama	JPO Jl. Salemba Raya depan UI	222.000.000,00	0,00		222.000.000,00	0,00	222.000.000,00	

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
77	PT. Globalindo Sarana Utama	Kec.Senen Jak-Pus JPO Jl. Letjend Suprpto depan ITC Cempaka Mas Kec.Senen Jak-Pus	138.000.000,00	0,00		138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	Lunas 13 Nov 2012
78	PT. Pesona Creative 13	JPO Jl. Jatinegara Timur/Jl. Bekasi Barat Kec.Jatinegara Jak-Pus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	(Rp. 75.500.000) sebagai ganti S5A
79	PT. Media Indra Buana	Titik SK 53/2005 Jl. Jend. Gatot Subroto depan Park Royal Kec.Tanah Abang Jak-Pus	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lunas 2 Nov 2012
80	PT. Media Indra Buana	Titik SK 53/2005 Jl. Letjend. S.Parman-Simpang Tomang Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar	216.000.000,00	0,00		216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Lunas 2 Nov 2012
81	PT. Unggul Dian Perkasa	Titik S51 Jl. Pasar Minggu Raya (Pertigaan) Jl. Pahlawan Kalibata Kec. Duren Tiga Jak-Sel	85.000.000,00	0,00		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Lunas 28 Agustus 2012
82	PT. Unggul Dian Perkasa	Halte Bus Reguler Jl. Kapt. Tendean dpn TransTV Jl. Asia Afrika dpn Metro Plaza Senayan Jl. Asia Afrika dpn Istora Senayan Jl. Asia Afrika dpn Senayan City Jl. Tengku Nyak Arif dpn Gandaria City	77.000.000,00	0,00		77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Lunas 5 September 2012
83	PT. Raisa Promosindo	Shelter Bus Jl. Sultan Iskandar Muda dpn Gandaria Jl. Prof. Soepomo seberang Gereja Jl. Metro Pondok Indah dpn BCA	50.000.000,00	0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lunas 19 September 2012
84	CV. Multi Pratama Indonesia	JPO Jl. Mayjen Sutoyo dpn Park Hotel (View arah dari UKI) Kec. Kramat Jati Jak-Tim	65.000.000,00	0,00		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Lunas 20 Januari 2012
85	PT. Unggul Dian Perkasa	Shelter Bus 5 Wilayah DKI	800.000.000,00	0,00		800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Lunas 7 November 2012
86	PT. Intertema Nusa Kana	Armada Busway Koridor 9 Pinang Ranti - Pluit	60.000.000,00	0,00		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Lunas 7 September 2012

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per Desember 2011	Koreksi Piutang 2011	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d Des 2012	Keterangan
87	PT. Prisma Harapan	Jembatan Niaga Jl. Mangga Dua Raya dpn ITC (arah Kota ke Gunung Sahari) Kec. Pademangan Jak-Utr	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Lunas 31 Mei 2012
88	CV. Multi Pratama Indonesia	JPO Jl. Mangga Dua Raya dpn IKAD Keramik Kec. Sawah Besar Jak-Pus	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Lunas 10 Februari 2012
89	PT. Prisma Harapan	JPO Jl. Daan Mogot - Jl. Hemat Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Lunas 12 Januari 2012
			28.436.371.684,00	5.080.053.770,00	176.500.335,00	21.395.715.569,00	21.887.329.079,00	4.764.940.595,00	

**DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	33.032.673.392
2	DINAS KEBERSIHAN	15.864.646.667
3	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	15.846.938.604
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	14.436.703.447
5	DINAS PELAYANAN PAJAK	13.495.982.743
6	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKSEL	9.946.201.593
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	9.866.757.389
8	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	9.768.156.635
9	DINAS KESEHATAN	9.301.222.822
10	BLUD RS Tarakan	8.992.553.860
11	BLUD RS Koja	8.301.961.434
12	Sudin Kesehatan - JAKTIM	8.238.969.053
13	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8.177.728.529
14	DINAS PERHUBUNGAN	8.167.965.203
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.627.885.070
16	BLUD RS Pasar Rebo	6.178.944.610
17	BLUD Transjakarta Busway	5.917.785.238
18	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	5.733.187.221
19	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR	5.073.997.557
20	BLUD RS Cengkareng	4.878.034.120
21	Sudin Kebersihan - JAKUT	4.791.154.625
22	BLUD RS Duren Sawit	4.761.538.877
23	Sudin Kebersihan - JAKSEL	4.726.851.607
24	Sudin Kesehatan - JAKSEL	4.675.969.655
25	Sudin Kebersihan - JAKPUS	4.665.277.659
26	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM	4.598.399.369
27	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT	4.578.825.290
28	Sudin Kesehatan - JAKPUS	4.551.463.470
29	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL	4.526.406.974
30	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	3.829.953.501
31	UPT Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan	3.798.022.438
32	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR	3.782.963.351
33	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS	3.211.727.473
34	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM	3.205.360.781
35	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL	3.184.536.354
36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3.174.747.587
37	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL	3.153.095.919
38	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.114.348.129
39	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT	2.947.250.928
40	BLUD RS Budhi Asih	2.922.397.723
41	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR	2.834.908.732
42	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR	2.770.707.715
43	Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS	2.767.055.826
44	BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS	2.764.017.019
45	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL	2.750.548.384
46	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL	2.750.392.816
47	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM	2.709.511.078
48	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS	2.692.781.928
49	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM	2.688.502.251
50	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM	2.675.050.461
51	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR	2.629.918.326
52	UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH	2.606.945.965
53	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS	2.568.214.647
54	DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN	2.547.627.280
55	BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT	2.521.549.543
56	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM	2.470.466.247
57	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM	2.466.201.689

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
58	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	2.451.919.593
59	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR	2.438.576.049
60	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL	2.413.575.678
61	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL	2.392.905.387
62	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	2.374.784.071
63	UPT Taman Margasatwa Ragunan	2.360.864.735
64	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL	2.334.468.892
65	Sudin Kesehatan - JAKBAR	2.290.068.472
66	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM	2.247.850.800
67	Sudin Kesehatan - JAKUT	2.180.659.685
68	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR	2.159.661.949
69	BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR	2.147.299.217
70	Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM	2.110.143.461
71	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT	2.090.098.645
72	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR	2.032.128.583
73	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT	1.998.293.686
74	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS	1.985.050.926
75	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	1.950.134.976
76	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT	1.929.608.710
77	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM	1.902.314.307
78	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS	1.849.703.247
79	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM	1.807.542.631
80	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL	1.788.513.808
81	UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu	1.705.577.473
82	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL	1.645.345.344
83	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS	1.638.807.282
84	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS	1.620.198.227
85	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL	1.546.535.639
86	UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.519.056.040
87	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.378.647.875
88	UPT Pengelola Perparkiran	1.376.258.120
89	Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL	1.364.444.000
90	Kantor Keluarga Berencana - JAKUT	1.351.644.065
91	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT	1.347.750.863
92	Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS	1.312.020.326
93	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM	1.134.761.615
94	Museum Tekstil	1.076.015.974
95	UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata	1.068.680.003
96	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN (GABUNGAN)	979.075.447
97	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	951.483.433
98	UPT Balai Budidaya Perikanan	926.936.217
99	Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR	924.159.158
100	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI	833.925.995
101	DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN	814.198.330
102	Sudin Kebersihan - JAKTIM	801.856.402
103	Balai Konservasi	782.051.754
104	Sudin PU Jalan - JAKBAR	770.504.464
105	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKPUS	759.177.585
106	Kota Administrasi Jakarta Barat	740.429.216
107	PSTW Usada Mulia 5	651.689.643
108	Museum Sejarah	644.820.930
109	UPT Balai Proteksi Tanaman	632.020.125
110	SEKRETARIAT DPRD	598.455.728
111	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	554.086.321
112	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKUT	541.225.859
113	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	533.289.559
114	BIRO UMUM	499.687.989
115	INSPEKTORAT	499.064.125
116	SATPOL PP	498.451.250
117	Monumen Nasional (Monas)	462.651.409
118	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	420.452.379

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
119	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKBAR	417.812.973
120	UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan	380.324.956
121	Planetarium	380.276.743
122	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	373.686.947
123	Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL	361.561.750
124	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKSEL	358.733.272
125	Kota Administrasi Jakarta Selatan	357.022.424
126	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	351.803.950
127	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKUT	351.466.540
128	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKSEL	340.647.047
129	Museum Joang 45	326.464.875
130	Museum Senirupa dan Keramik	325.194.980
131	Sudin Pertamanan - JAKBAR	322.099.239
132	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	316.753.425
133	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	293.430.542
134	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	289.762.272
135	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	277.500.000
136	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKUT	264.007.700
137	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM	249.235.213
138	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKPUS	246.289.445
139	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKTIM	242.414.635
140	UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII	238.713.970
141	PSBG Belaian Kasih Pegadungan	232.076.027
142	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKPUS	229.944.656
143	UPT Balai Metrologi	222.118.820
144	PSTW Budi Mulia 1 Cipayung	219.090.353
145	Sudin Perizinan Bangunan - JAKSEL	207.484.898
146	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKPUS	204.510.069
147	Sudin Pariwisata - JAKPUS	203.272.080
148	Sudin Pelayanan Pajak II - JAKUT	198.809.348
149	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	193.111.270
150	Balai Latihan Kesenian Jakpus	189.620.200
151	Sudin Pemakaman - JAKUT	184.927.453
152	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA TIMUR	183.216.154
153	PSTW Budi Mulia 4 Margaguna	182.332.644
154	Sudin Perizinan Bangunan - JAKPUS	180.161.850
155	Sudin Kependudukan Dan Catatan Sipil - Kep.Seribu	175.014.546
156	UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan	167.851.869
157	PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung	151.784.339
158	Museum Wayang	143.843.975
159	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA UTARA	141.009.918
160	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	136.464.977
161	Kantor Lingkungan Hidup - JAKTIM	136.417.502
162	BLUD RS Kepulauan Seribu	126.041.680
163	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKSEL	124.568.950
164	BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA	116.921.570
165	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	116.635.959
166	UPT. MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET	115.908.672
167	Taman Arkeologi P. Onrust	115.000.952
168	Sudin Pelayanan Pajak II - JAKBAR	114.544.360
169	Kantor Lingkungan Hidup - JAKPUS	114.484.480
170	UPT Pusat Perkayuan	113.663.880
171	UPT Teknologi Pengembangan Produksi Peternakan	112.267.230
172	PSAA Putra Utama 2 Plumpang	111.119.916
173	UPK SAMSAT SELATAN	110.460.240
174	Sudin Pelayanan Pajak II - JAKPUS	107.618.261
175	Sudin Pemakaman - JAKTIM	105.560.081
176	Sudin Kebudayaan - JAKPUS	104.130.150
177	PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger	100.701.770
178	UPT Balai Tekstil	99.806.190
179	Kota Administrasi Jakarta Pusat	99.468.787
180	UPK SAMSAT TIMUR	99.434.885

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
181	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	98.646.515
182	Kecamatan Ciracas - JAKTIM	95.707.599
183	Sudin Perhubungan - JAKSEL	95.340.561
184	Sudin Kebersihan - JAKBAR	92.388.426
185	Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya	89.728.815
186	BIRO HUKUM	89.524.050
187	Kecamatan Koja - JAKUT	87.516.253
188	UPK SAMSAT UTARA	84.895.690
189	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKPUS	77.771.210
190	Sudin Pemakaman - JAKSEL	77.577.106
191	Kecamatan Pasar Rebo - JAKTIM	76.896.176
192	Sudin Pelayanan Pajak I - JAKUT	76.282.143
193	UPK SAMSAT BARAT	74.982.270
194	Sudin Pelayanan Pajak II - JAKTIM	74.504.966
195	Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM	74.334.000
196	PSBK Harapan Jaya Balaraja	74.121.685
197	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKTIM	73.726.373
198	Kelurahan Utan Panjang - JAKPUS	73.633.025
199	BLKD Jakarta Utara	72.657.879
200	Sudin Pariwisata - JAKBAR	71.505.500
201	Balai Higiene Persh, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	70.780.825
202	Kecamatan Cilandak - JAKSEL	69.658.343
203	Sudin Perhubungan - JAKTIM	69.604.129
204	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN)	69.600.175
205	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	67.479.445
206	UPT Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	67.120.009
207	UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan	67.093.180
208	Sudin Pelayanan Pajak I - JAKPUS	66.312.009
209	UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan	65.903.800
210	Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL	65.405.560
211	Kota Administrasi Jakarta Utara	64.359.766
212	Kantor Perpustakaan dan Arsip - P. SERIBU	64.172.800
213	Kecamatan Pulogadung - JAKTIM	62.814.503
214	Inspektorat Pembantu - JAKTIM	62.656.937
215	Sudin PU Tata Air - JAKUT	61.430.754
216	Inspektorat Pembantu - JAKSEL	61.202.900
217	Sudin Kebudayaan - JAKUT	61.102.800
218	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKSEL	60.832.200
219	Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu	59.325.750
220	Kelurahan Jati Pulo - JAKBAR	58.187.800
221	Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT	56.225.650
222	BIRO PEREKONOMIAN	55.390.830
223	Sudin Pariwisata - JAKTIM	54.698.985
224	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKUT	54.283.295
225	Kelurahan Wijaya Kusuma - JAKBAR	54.213.005
226	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKBAR	53.618.620
227	Kelurahan Pluit - JAKUT	53.219.540
228	Kecamatan Kebayoran Lama - JAKSEL	53.217.900
229	BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	52.009.728
230	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Kep. Seribu	51.717.985
231	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKBAR	51.543.631
232	Kelurahan Warakas - JAKUT	51.482.200
233	Inspektorat Pembantu - JAKBAR	51.349.100
234	Sudin Pariwisata - JAKUT	51.011.410
235	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA BARAT	50.288.370
236	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKSEL	49.762.770
237	Sudin Sosial - JAKBAR	48.714.250
238	Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKTIM	48.586.780
239	UPT Graha Wisata	47.901.975
240	Kecamatan Duren Sawit - JAKTIM	47.734.690
241	Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKUT	46.805.000
242	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS BALAIKOTA	46.706.660

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	46.532.409
244	Sudin Pelayanan Pajak II - JAKSEL	46.421.032
245	Sudin PU Jalan - JAKSEL	44.899.012
246	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	44.316.140
247	Kelurahan Gunung - JAKSEL	44.071.253
248	Sudin Pelayanan Pajak I - JAKSEL	43.719.161
249	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKBAR	43.521.627
250	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKUT	40.209.950
251	Kelurahan Cakung Timur - JAKTIM	40.128.000
252	Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu	40.016.350
253	Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM	39.664.607
254	Gelanggang Olahraga Rawamangun	39.061.603
255	Sudin Pertamanan - JAKSEL	38.075.239
256	Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKPUS	37.726.480
257	PSTW Budi Mulia 3 Ciracas	36.012.926
258	Kelurahan Senayan - JAKSEL	35.480.250
259	Sudin Perizinan Bangunan - JAKUT	35.057.000
260	UPK SAMSAT PUSAT	34.892.550
261	UPT Balai Kerajinan	34.874.785
262	Kelurahan Ragunan - JAKSEL	34.307.680
263	Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKBAR	33.276.950
264	BLKPI Pasar Rebo	32.533.050
265	Unit Pengolahan Limbah Septictank	31.590.240
266	Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	31.529.028
267	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA SELATAN	31.525.780
268	PSBKW Harapan Mulya Kedoya	30.886.890
269	PSBI Bangun Daya 1 Kedoya	30.311.765
270	Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR	30.124.600
271	Satpol PP - JAKBAR	29.768.090
272	Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL	29.632.130
273	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM	29.421.070
274	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKTIM	29.011.545
275	PSBN Cahaya Bathin Cengkareng	28.860.870
276	Kecamatan Senen - JAKPUS	28.656.703
277	Kelurahan Cipinang Muara - JAKTIM	27.327.300
278	Kantor Kepegawaian - JAKTIM	27.314.815
279	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	27.207.070
280	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKBAR	26.540.525
281	UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA PUSAT	25.914.042
282	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKTIM	25.754.014
283	Sudin Pelayanan Pajak I - JAKBAR	25.699.300
284	PSBD Budi Bhakti Cengkareng	25.451.648
285	Kecamatan Cempaka Putih - JAKPUS	25.440.800
286	UPT Dana Bergulir	24.998.270
287	DINAS PENDIDIKAN	24.972.871
288	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKBAR	24.070.200
289	Kelurahan Kartini - JAKPUS	23.893.100
290	Kelurahan Cakung Barat - JAKTIM	23.529.550
291	UPT Pusat Peredaran Hasil Hutan	22.697.400
292	Museum Bahari	22.335.500
293	Kelurahan Cipulir - JAKSEL	22.308.700
294	Kelurahan Kebon Sirih - JAKPUS	21.994.010
295	PSBL Harapan Sentosa 4	21.975.525
296	Kelurahan Cilandak Barat - JAKSEL	21.632.600
297	Sudin PU Tata Air - JAKSEL	21.586.950
298	Kelurahan Pulo - JAKSEL	21.559.010
299	PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung	20.785.750
300	Satpol PP - JAKUT	20.672.300
301	Inspektorat Pembantu - JAKUT	20.661.300
302	Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT	20.567.250
303	BP3LS	20.100.375
304	Kelurahan Duren Sawit - JAKTIM	19.485.950

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
305	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKSEL	19.001.290
306	BLKD Jakarta Selatan	18.491.165
307	Kelurahan Taman Sari - JAKBAR	18.404.100
308	Inspektorat Pembantu - JAKPUS	18.214.112
309	Sudin PU Jalan - JAKUT	18.007.338
310	Kelurahan Kuningan Barat - JAKSEL	17.955.300
311	Kelurahan Sukabumi Selatan Jakbar	17.828.580
312	Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur	17.614.651
313	BLKD Jakarta Timur	17.435.768
314	Kelurahan Pondok Kopi - JAKTIM	17.161.760
315	Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu	17.074.482
316	Kelurahan Pekayon - JAKTIM	17.031.507
317	Kantor Lingkungan Hidup - JAKSEL	16.901.000
318	Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL	16.735.620
319	BPPK Jakarta Barat	16.673.920
320	Kelurahan Kebon Baru - JAKSEL	16.642.262
321	Sudin Pertamanan - JAKPUS	16.466.890
322	Gelanggang Olahraga Sunter	16.415.554
323	Kelurahan Slipi - JAKBAR	16.180.322
324	Kelurahan Pejagalan - JAKUT	16.045.700
325	Kelurahan Ujung Menteng - JAKTIM	15.947.800
326	Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS	15.850.093
327	Sudin Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana - Kep.Seribu	15.833.500
328	Kelurahan Karet Kuningan - JAKSEL	15.687.705
329	Gelanggang Remaja Jakarta Timur	15.587.565
330	Sudin Pertamanan - JAKTIM	15.489.650
331	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS	15.462.645
332	Kelurahan Cengkareng Timur - JAKBAR	15.445.540
333	Kelurahan Selong - JAKSEL	15.164.135
334	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu	15.147.000
335	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKUT	14.993.495
336	Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu	14.935.800
337	Kelurahan Tebet Barat - JAKSEL	14.605.965
338	Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL	14.473.120
339	DINAS SOSIAL	14.459.293
340	Kelurahan Cilandak Timur - JAKSEL	14.059.650
341	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu	14.000.000
342	Satpol PP - JAKTIM	13.966.667
343	BIRO TATA PEMERINTAHAN	13.949.330
344	Gelanggang Remaja Jakarta Barat	13.937.279
345	UPT Sekolah Pertanian dan Pembangunan	13.564.650
346	Kelurahan Karang Anyar - JAKPUS	13.556.290
347	BLKD Jakarta Barat	13.435.950
348	Sudin PU Tata Air - JAKPUS	13.399.870
349	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS	13.300.000
350	Kelurahan Cijantung - JAKTIM	13.261.105
351	Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT	13.193.400
352	Kelurahan Gandaria Utara - JAKSEL	13.170.700
353	PSBI Bangun Daya 2 Ceger	13.152.825
354	Sudin PU Tata Air - JAKTIM	13.100.450
355	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKPUS	12.899.850
356	PSAA Putra Utama 4 Ceger	12.828.200
357	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM	12.345.550
358	PSPP Khusnul Khotimah Serpong	12.336.205
359	Kelurahan Malaka Sari - JAKTIM	12.191.040
360	Kelurahan Kelapa Gading Barat - JAKUT	12.188.700
361	Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKSEL	12.067.000
362	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	12.034.913
363	Sudin Sosial - JAKSEL	12.011.750
364	Kelurahan Pangadegan - JAKSEL	11.958.045
365	Kelurahan Petamburan - JAKPUS	11.840.070
366	Kelurahan Penjaringan - JAKUT	11.789.200

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
367	Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan - JAKUT	11.536.800
368	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKPUS	11.448.250
369	Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS	11.322.740
370	Sudin Pertanian dan Peternakan - JAKPUS	11.318.120
371	Kelurahan Kedoya Selatan - JAKBAR	11.209.550
372	Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL	11.099.110
373	Kelurahan Duri Kosambi - JAKBAR	10.987.265
374	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	10.907.611
375	UPT Pusdiklat KB dan Kesenjangan Gender	10.739.740
376	Kelurahan Kramat Pela - JAKSEL	10.588.765
377	Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKTIM	10.444.115
378	UPT Pengelola Kaw. Pelabuhan Perikanan dan Pangk. Pendaratan Ikan	10.292.614
379	Kelurahan Cilincing - JAKUT	10.206.052
380	Kelurahan Duri Pulo - JAKPUS	10.195.900
381	Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT	10.181.105
382	PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng	10.153.478
383	Kecamatan Palmerah - JAKBAR	9.989.667
384	Kelurahan Galur - JAKPUS	9.935.640
385	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu	9.879.350
386	Kelurahan Kebon Kacang - JAKPUS	9.751.600
387	Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR	9.704.667
388	Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL	9.676.400
389	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	9.579.078
390	Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL	9.514.450
391	PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng	9.439.098
392	Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL	9.323.325
393	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI)	9.254.850
394	PSAA Putra Utama 1 Klender	9.228.490
395	Kelurahan Kuningan Timur - JAKSEL	9.097.908
396	UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	9.093.417
397	Kecamatan Mampang Prapatan - JAKSEL	9.093.250
398	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	9.071.095
399	Kelurahan Kamal - JAKBAR	9.000.000
400	Kelurahan Cempaka Baru - JAKPUS	8.974.483
401	Kelurahan Gedong - JAKTIM	8.944.320
402	Kelurahan Cilangkap - JAKTIM	8.942.890
403	Kelurahan Jati Padang - JAKSEL	8.889.375
404	Kecamatan Jatinegara - JAKTIM	8.824.000
405	Kelurahan Makasar - JAKTIM	8.740.026
406	Kelurahan Ciracas - JAKTIM	8.688.800
407	Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu	8.570.100
408	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT	8.495.960
409	Kelurahan Rawa Barat - JAKSEL	8.491.615
410	Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL	8.435.240
411	Kecamatan Cilincing - JAKUT	8.228.446
412	Kecamatan Matraman - JAKTIM	7.980.065
413	PSP Bhakti kasih Kebon Kosong	7.905.779
414	Sudin Pertamanan - JAKUT	7.835.120
415	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	7.767.855
416	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL	7.710.340
417	Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT	7.671.400
418	Kelurahan Kalibaru - JAKUT	7.538.850
419	Kelurahan Duri Kepa - JAKBAR	7.505.080
420	Kecamatan Cakung - JAKTIM	7.385.538
421	Kelurahan Cengkareng Barat - JAKBAR	7.324.900
422	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKUT	7.305.000
423	Gelanggang Olahraga Ragunan	7.304.139
424	Kecamatan Kebon Jeruk - JAKBAR	7.300.600
425	Kelurahan Cawang - JAKTIM	7.284.035
426	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT	7.265.500
427	Kelurahan Glodok - JAKBAR	7.245.046
428	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm. Kep. Seribu	7.170.350

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
429	Kecamatan Gambir - JAKPUS	7.125.030
430	Kelurahan Kramat - JAKPUS	7.041.100
431	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR	7.002.710
432	BPPK Pulogadung	6.842.660
433	Kelurahan Cipete Selatan - JAKSEL	6.774.128
434	Kecamatan Kebayoran Baru - JAKSEL	6.743.055
435	Kelurahan Rawasari - JAKPUS	6.718.250
436	Kelurahan Mangga Dua Selatan - JAKPUS	6.703.565
437	Kelurahan Lebak Bulus - JAKSEL	6.697.350
438	Kecamatan Setiabudi - JAKSEL	6.679.000
439	BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar)	6.639.500
440	Kelurahan Tegal Parang - JAKSEL	6.565.350
441	Kelurahan Grogol Utara - JAKSEL	6.557.925
442	Kelurahan Pondok Bambu - JAKTIM	6.551.215
443	Kecamatan Cipayung - JAKTIM	6.454.140
444	Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM	6.442.535
445	Kelurahan Ceger - JAKTIM	6.436.507
446	PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu	6.416.540
447	Sudin Perhubungan - JAKUT	6.323.900
448	Kelurahan Susukan - JAKTIM	6.322.250
449	Kelurahan Tanah Tinggi - JAKPUS	6.253.500
450	PSBR Taruna Jaya Tebet	6.176.061
451	Kelurahan Ulujami - JAKSEL	6.066.497
452	Kelurahan Cipinang Cempedak - JAKTIM	5.837.700
453	Kelurahan Bungur - JAKPUS	5.831.210
454	Sudin Perhubungan - JAKPUS	5.785.000
455	Kecamatan Tanah Abang - JAKPUS	5.738.645
456	Kelurahan Tanjung Duren Utara - JAKBAR	5.727.000
457	Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT	5.684.360
458	BPPK Budi Utomo	5.582.280
459	Kelurahan Munjul - JAKTIM	5.561.600
460	Sudin Perizinan Bangunan - JAKTIM	5.464.090
461	Kelurahan Utan Kayu Selatan - JAKTIM	5.463.460
462	Kelurahan Maphar - JAKBAR	5.355.070
463	Kelurahan Pisangan Baru - JAKTIM	5.341.530
464	Kelurahan Rawa Jati - JAKSEL	5.304.420
465	Kelurahan Baru - JAKTIM	5.244.489
466	Kelurahan Tambora - JAKBAR	5.239.658
467	Kecamatan Makasar - JAKTIM	5.084.090
468	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - JAKPUS	5.079.900
469	PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit	5.076.045
470	Kelurahan Kedoya Utara - JAKBAR	4.993.526
471	Kecamatan Pademangan - JAKUT	4.922.177
472	Kelurahan Setiabudi - JAKSEL	4.904.625
473	Sudin Pemakaman - JAKPUS	4.883.890
474	Kelurahan Kebon Jeruk - JAKBAR	4.883.120
475	BLKD Jakarta Pusat	4.846.380
476	Sudin Perhubungan - Kep. Seribu	4.836.590
477	Kelurahan Cipedak - JAKSEL	4.830.305
478	Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL	4.815.063
479	Kantor Kepegawaian - JAKBAR	4.711.630
480	Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS	4.589.000
481	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKSEL	4.570.500
482	Kecamatan Johar Baru - JAKPUS	4.564.100
483	Kecamatan Tebet - JAKSEL	4.499.385
484	Kantor Kepegawaian - KEP SERIBU	4.419.635
485	Kelurahan Pisangan Timur - JAKTIM	4.419.450
486	PSAA Putra Utama 6 Cengkareng	4.416.967
487	Kelurahan Srengseng - JAKBAR	4.410.450
488	Balai Latihan Kesenian Jaksel	4.408.828
489	Kelurahan Jatinegara - JAKTIM	4.356.515
490	Kelurahan Sunter Agung - JAKUT	4.316.400

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
491	Kecamatan Kelapa Gading - JAKUT	4.298.900
492	Sudin Sosial - JAKPUS	4.239.686
493	Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKTIM	4.147.281
494	Kelurahan Karet - JAKSEL	3.983.125
495	Kelurahan Klender - JAKTIM	3.978.550
496	Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT	3.935.500
497	Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR	3.925.570
498	BPPK Lenteng Agung	3.912.825
499	Kelurahan Bidara Cina - JAKTIM	3.909.180
500	Kelurahan Bendungan Hilir - JAKPUS	3.901.445
501	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKTIM	3.896.100
502	Kelurahan Gandaria Selatan - JAKSEL	3.864.410
503	Kelurahan Pondok Rangon - JAKTIM	3.801.820
504	Kelurahan Joglo - JAKBAR	3.796.800
505	Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKBAR	3.787.843
506	Kelurahan Cipinang Besar Utara - JAKTIM	3.753.200
507	Kelurahan Cipinang - JAKTIM	3.748.800
508	Kelurahan Sukapura - JAKUT	3.737.100
509	Kelurahan Karet Tengsin - JAKPUS	3.693.800
510	Kelurahan Lagoa - JAKUT	3.684.828
511	Sudin Perhubungan - JAKBAR	3.679.133
512	Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR	3.672.500
513	Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT	3.542.770
514	Kelurahan Pulogadung - JAKTIM	3.542.220
515	Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL	3.540.505
516	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS	3.540.100
517	Kelurahan Kenari - JAKPUS	3.420.100
518	Kelurahan Kebon Kosong - JAKPUS	3.417.884
519	Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS	3.402.740
520	Kelurahan Bukit Duri - JAKSEL	3.308.415
521	Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT	3.306.160
522	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKBAR	3.287.000
523	Kelurahan Cipinang Melayu - JAKTIM	3.278.440
524	Kelurahan Serdang - JAKPUS	3.273.534
525	Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM	3.228.060
526	Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD)	3.222.250
527	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - JAKTIM	3.185.875
528	Kelurahan Pancoran - JAKSEL	3.163.490
529	Kantor Kepegawaian - JAKSEL	3.161.750
530	Kelurahan Guntur - JAKSEL	3.130.765
531	Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR	3.095.000
532	Kelurahan Duri Utara - JAKBAR	3.093.475
533	Kelurahan Jelambar - JAKBAR	3.089.655
534	Kelurahan Gunung Sahari Utara - JAKPUS	3.064.457
535	Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM	3.040.884
536	Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL	3.034.665
537	Kecamatan Pancoran - JAKSEL	3.020.825
538	Kelurahan Kalianyar - JAKBAR	2.992.000
539	Kecamatan Pesanggrahan - JAKSEL	2.971.804
540	Kelurahan Gelora - JAKPUS	2.949.025
541	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - JAKSEL	2.869.150
542	Kelurahan Tangki - JAKBAR	2.868.250
543	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL	2.851.000
544	Kelurahan P. Tidung - Kep. Seribu	2.838.000
545	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	2.834.227
546	Kelurahan Kalideres - JAKBAR	2.787.800
547	Kelurahan Tengah - JAKTIM	2.777.693
548	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - JAKTIM	2.763.090
549	Kelurahan Semanan - JAKBAR	2.761.000
550	BPPK Duren Sawit	2.715.400
551	Kelurahan Tanjung Barat - JAKSEL	2.659.250
552	Kelurahan Rambutan - JAKTIM	2.631.200

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
553	Kantor Lingkungan Hidup - JAKBAR	2.626.333
554	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKPUS	2.613.960
555	Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR	2.612.700
556	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	2.554.750
557	Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL	2.516.800
558	Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT	2.499.750
559	Kelurahan Sempur Barat - JAKUT	2.464.250
560	Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS	2.431.550
561	Kelurahan Kamal Muara - JAKUT	2.425.500
562	Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKBAR	2.421.650
563	Sudin Pariwisata - JAKSEL	2.364.000
564	Kecamatan Cengkareng - JAKBAR	2.336.200
565	Kecamatan Kalideres - JAKBAR	2.331.945
566	Sudin Sosial - JAKUT	2.322.670
567	Kelurahan Bangka - JAKSEL	2.318.085
568	Kelurahan Rawa Terate - JAKTIM	2.306.993
569	UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI)	2.270.800
570	Kecamatan Penjarangan - JAKUT	2.265.698
571	Kelurahan Petukangan Utara - JAKSEL	2.201.265
572	Kelurahan Koja - JAKUT	2.187.240
573	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - JAKTIM	2.179.210
574	Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR	2.171.400
575	Kelurahan Johar Baru - JAKPUS	2.167.880
576	Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS	2.136.500
577	UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisata	2.134.000
578	Balai Latihan Kesenian Jaktim	2.059.640
579	Kelurahan Pinang Ranti - JAKTIM	2.020.130
580	Kelurahan Petogogan - JAKSEL	1.983.190
581	Kecamatan Jagakarsa - JAKSEL	1.978.570
582	Sudin Kebudayaan - JAKTIM	1.926.650
583	Kelurahan Kalibata - JAKSEL	1.897.600
584	Kelurahan Karet Semanggi - JAKSEL	1.886.600
585	Kelurahan Sukabumi Utara - JAKBAR	1.880.450
586	Kelurahan Jatinegara Kaum - JAKTIM	1.857.000
587	Kelurahan Ancol - JAKUT	1.848.000
588	Kelurahan Pekoja - JAKBAR	1.837.330
589	Kelurahan Duren Tiga - JAKSEL	1.809.500
590	SEKRETARIAT DAERAH	1.805.100
591	Kelurahan Kebon Manggis - JAKTIM	1.791.460
592	Kelurahan Palmerah - JAKBAR	1.781.923
593	Kelurahan Petukangan Selatan - JAKSEL	1.754.225
594	Kelurahan Tugu Utara - JAKUT	1.712.900
595	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKUT	1.702.140
596	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu	1.697.850
597	UPT Balai Bahan dan Barang Teknik	1.685.000
598	Kantor Kepegawaian - JAKPUS	1.655.300
599	Kelurahan Senen - JAKPUS	1.631.630
600	Balai Latihan Kerja Khusus Pengembangan Las Condet	1.625.800
601	UPT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA	1.602.810
602	Kelurahan Rawa Bunga - JAKTIM	1.590.000
603	Sudin Sosial - JAKTIM	1.585.530
604	Kelurahan Malaka Jaya - JAKTIM	1.576.300
605	Kelurahan Manggarai - JAKSEL	1.571.350
606	Sudin Kelautan dan Pertanian - KEP. SERIBU	1.552.900
607	Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT	1.500.675
608	Kelurahan Cililitan - JAKTIM	1.495.450
609	Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS	1.467.675
610	Kelurahan Bale Kambang - JAKTIM	1.460.800
611	Kelurahan Batu Ampar - JAKTIM	1.445.400
612	Kelurahan Kapuk - JAKBAR	1.421.046
613	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR	1.418.800
614	Kelurahan Marunda - JAKUT	1.391.500

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
615	Kelurahan Pegadungan - JAKBAR	1.380.000
616	Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR	1.348.600
617	Kelurahan Meruya Selatan - JAKBAR	1.330.670
618	Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKSEL	1.327.700
619	Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	1.275.450
620	Kelurahan Jagakarsa - JAKSEL	1.236.180
621	Kelurahan Melawai - JAKSEL	1.227.050
622	Kecamatan Taman Sari - JAKBAR	1.163.250
623	Kantor Kepegawaian - JAKUT	1.129.975
624	BLUD UPT Stadion Lebak Bulus	1.128.600
625	Kelurahan Krukut - JAKBAR	1.110.000
626	Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT	1.103.036
627	Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM	1.085.480
628	Sudin Kebudayaan - JAKBAR	1.057.870
629	Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM	1.057.597
630	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKTIM	1.038.950
631	Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS	1.011.010
632	Kelurahan Dukuh - JAKTIM	1.000.340
633	Kelurahan Grogol - JAKBAR	988.100
634	Kantor Lingkungan Hidup - JAKUT	986.260
635	Kelurahan Penggilingan - JAKTIM	974.182
636	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKSEL	922.790
637	Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil	899.800
638	Kelurahan Semper Timur - JAKUT	895.000
639	Gelanggang Olahraga Cendrawasih	889.900
640	Kelurahan Rawa Badak Utara - JAKUT	885.830
641	Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM	884.650
642	Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu	882.600
643	Kelurahan Kebagusan - JAKSEL	856.075
644	Kelurahan Sumur Batu - JAKPUS	844.500
645	Kelurahan Kembangan Utara - JAKBAR	830.500
646	PSAA Putra Utama 3 Tebet	811.790
647	Kelurahan Menteng Dalam - JAKSEL	799.128
648	Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM	765.000
649	Kelurahan Meruya Utara - JAKBAR	746.020
650	Kelurahan Manggarai Selatan - JAKSEL	741.900
651	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR	741.400
652	Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu	719.510
653	Kelurahan Keagungan - JAKBAR	717.530
654	Kelurahan Lenteng Agung - JAKSEL	693.005
655	Kecamatan Kembangan - JAKBAR	669.900
656	Kelurahan Rawamangun - JAKTIM	623.867
657	Kelurahan Kwitang - JAKPUS	618.750
658	Kelurahan Gondangdia - JAKPUS	616.000
659	Kelurahan Kemayoran - JAKPUS	608.850
660	Kelurahan Grogol Selatan - JAKSEL	589.710
661	Kelurahan Paseban - JAKPUS	568.700
662	Kelurahan Cipayung - JAKTIM	564.135
663	Kelurahan Ciganjur - JAKSEL	558.500
664	Kelurahan Jati - JAKTIM	537.500
665	Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM	527.700
666	Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM	508.750
667	Kelurahan Bintaro - JAKSEL	507.760
668	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKUT	502.000
669	Sudin Kebudayaan - JAKSEL	434.060
670	Kelurahan Pesanggrahan - JAKSEL	432.960
671	Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM	411.450
672	Kelurahan Krendang - JAKBAR	403.350
673	Kelurahan Cikoko - JAKSEL	403.158
674	Kelurahan Petojo Selatan - JAKPUS	398.450
675	Satpol PP - JAKSEL	395.000
676	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL	353.980

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
677	Kelurahan Angke - JAKBAR	340.000
678	Kelurahan Kampung Rawa - JAKPUS	310.000
679	Kelurahan Kayu Putih - JAKTIM	309.600
680	Kelurahan Harapan Mulia - JAKPUS	306.350
681	Kelurahan Melayu - JAKTIM	305.494
682	Kelurahan Pegangsaan - JAKPUS	295.000
683	Kelurahan Kebon Kelapa - JAKPUS	271.810
684	Kelurahan Pinangisia - JAKBAR	264.000
685	Kelurahan Gambir - JAKPUS	259.600
686	Balai Latihan Kesenian Jakbar	259.050
687	Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu	257.950
688	Kelurahan Cibubur - JAKTIM	253.880
689	Kelurahan Tanah Sereal - JAKBAR	244.915
690	Kelurahan Cikini - JAKPUS	240.000
691	Kelurahan Bali Mester - JAKTIM	234.300
692	Kelurahan Cideng - JAKPUS	227.500
693	Kelurahan Srengseng Sawah - JAKSEL	220.000
694	Kecamatan Kemayoran - JAKPUS	204.325
695	Kelurahan Menteng - JAKPUS	175.230
696	Kelurahan Pasar Baru - JAKPUS	167.145
697	Kelurahan Setu - JAKTIM	155.100
698	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT	136.400
699	Kelurahan Rorotan - JAKUT	95.800
700	Satpol PP - JAKPUS	28.961
701	Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT	24.000
702	Kelurahan Kalisari - JAKTIM	23.100
	JUMLAH PERSEDIAAN	437.576.910.348

NAMA AKUN : INVESTASI PERMANEN
IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012

No.	Perusahaan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	Modal	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% PMP Prov DKI Jakarta	Nilai PMP per 31 Desember 2012			
												Cost Method	Equity Method	Tambahan Modal Disetor (dari APBD TA 2012 dan Konversi cadangan/laba ditahan menjadi modal/saham)	Jumlah (Audited)
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11 x 12)	15	16
1	PD AM Jaya	Audited 2012	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	288.364.100.112,00	-	-	(1.136.885.791.357,00)	(848.521.691.245,00)	100,00%	-	-	-	-
2	PD Dharma Jaya	Audited 2012	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	33.918.096.678,00	-	18.373.233.473,00	(19.142.432.683,00)	33.148.897.467,00	100,00%	-	33.148.897.467,00	-	33.148.897.467,00
3	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2012	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	66.002.770.836,00	-	-	34.855.490.353,00	100.858.261.189,00	100,00%	-	100.858.261.189,00	-	100.858.261.189,00
4	PD Pasar Jaya	Audited 2012	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	18.319.097.779,00	315.240.403.798,00	-	42.576.255.196,00	376.135.756.773,00	100,00%	-	376.135.756.773,00	-	376.135.756.773,00
5	PD PAL Jaya	Audited 2012	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	94.752.401.828,00	-	-	30.269.359.592,00	125.021.761.420,00	100,00%	-	125.021.761.420,00	-	125.021.761.420,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD					501.356.467.233,00	315.240.403.798,00	18.373.233.473,00	(1.048.327.118.899,00)	(213.357.014.396,00)		-	635.164.676.849,00	-	635.164.676.849,00
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2011	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	3.117.000.000,00	131.653.737.000,00	1.273.090.466.000,00	1.669.646.961.000,00	3.077.508.164.000,00	38,80%	-	1.194.073.167.632,00	-	1.194.073.167.632,00
7	PT Food Station Tjipinang	Audited 2012	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	300.000.000,00	-	-	17.502.571.414,00	17.802.571.414,00	74,67%	-	13.292.586.656,00	-	13.292.586.656,00
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung ¹⁾	Audited 2012	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	80.000.000.000,00	-	3.122.089,00	144.310.212.729,00	224.313.334.818,00	50,00%	-	112.156.667.409,00	-	112.156.667.409,00
9	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2012	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	16.013.181.000,00	19.015.656.000,00	-	551.561.468.000,00	586.590.305.000,00	26,25%	-	154.000.248.575,00	-	154.000.248.575,00
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2012	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	400.000.000.000,00	36.709.233.000,00	-	819.150.776.059,00	1.255.860.009.059,00	72,00%	-	904.219.206.868,00	-	904.219.206.868,00
12	PT Ratax Armada	Audited 2012	1971	Akta No. 23/11-05-99	Saham	5.500.000.000,00	-	-	(4.199.644.891,00)	1.300.355.109,00	28,00%	-	364.099.431,00	-	364.099.431,00
13	PT Kawasan Berikat Nusantara ²⁾	Audited 2012	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	363.945.000.000,00	111.967.695.000,00	84.930.000,00	146.454.651.115,00	622.452.276.115,00	26,85%	209.692.695.000,00	-	-	209.692.695.000,00
14	PT Alakasa Industrindo, Tbk.	-	1996	Akta No. 31/21-02-1972	Saham	<i>divestasi</i>						-	-	-	-
15	PT Cemani Toka	Audited 2012	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	112.968.859.000,00	-	(2.869.839.019,00)	(82.231.126.690,00)	27.867.893.291,00	27,42%	27.059.360.000,00	-	-	27.059.360.000,00
16	PT Pakuan International	Audited 2010	1971	-	Saham	50.000.000.000,00	236.600.000,00	2.039.534.252,00	(13.416.224.197,00)	38.859.910.055,00	1,94%	1.345.900.000,00	-	-	1.345.900.000,00
17	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2010	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	48.870.000.000,00	592.242.795.672,00	-	(443.525.990.909,00)	197.586.804.763,00	8,08%	3.951.000.000,00	-	-	3.951.000.000,00
19	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2012	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	194.690.000.000,00	1.430.000.000,00	1.264.984.582,00	150.620.656.099,00	348.005.640.681,00	5,99%	8.680.000.000,00	-	-	8.680.000.000,00
20	PT Jakarta Propertindo	Audited 2012	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	529.995.757.000,00	50.000.000.000,00	-	235.623.964.729,00	815.619.721.729,00	99,93%	-	765.081.100.620,00	50.000.000.000,00	815.081.100.620,00
21	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2012	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	1.131.159.000.000,00	1.000.000,00	(1.342.000.000,00)	806.591.000.000,00	1.936.409.000.000,00	99,91%	-	1.434.697.119.531,00	500.000.000.000,00	1.934.697.119.531,00
22	PT Jakarta International Expo	Audited 07	2004	Akta Hibah No. 67/22-07-2004	Saham	300.000.000.000,00	-	-	(9.652.573.230,00)	290.347.426.770,00	13,14%	39.375.000.000,00	-	-	39.375.000.000,00
23	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2012	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	462.011.000.000,00	-	(16.990.391.619,00)	34.675.716.763,00	479.696.325.143,00	99,35%	-	476.581.488.104,00	-	476.581.488.104,00
24	PT RS Haji Jakarta ⁴⁾	Unaudited 2012	2004	Perda No. 12/2004	Saham	100.308.278.000,00	-	-	6.398.787.202,00	106.707.065.202,00	51,00%	51.157.222.000,00	-	-	51.157.222.000,00
25	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2012	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	165.013.000.000,00	65.245.611.052,00	-	(68.413.908.862,00)	161.844.702.190,00	99,70%	-	92.876.469.075,00	68.477.833.261,00	161.354.302.336,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan					3.963.891.075.000,00	1.008.502.327.724,00	1.255.280.806.285,00	3.961.097.296.331,00	10.188.771.505.339,00		341.261.177.000,00	5.147.342.153.901,00	618.477.833.261,00	6.107.081.164.162,00
	JUMLAH					4.465.247.542.233,00	1.323.742.731.522,00	1.273.654.039.758,00	2.912.770.177.432,00	9.975.414.490.943,00		341.261.177.000,00	5.782.506.830.750,00	618.477.833.261,00	6.742.245.841.011,00

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2012**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2011 (Audited BPK)	280.270.515.025.054,00	11.292.005.795.458,00	17.708.599.595.514,00	21.875.489.499.979,00	1.326.742.286.822,00	2.597.885.783.289,00	335.071.237.986.116,00
Mutasi Penambahan							
Belanja Modal	489.949.683.873,00	3.250.158.282.085,00	2.025.990.009.722,00	1.487.037.843.973,00	538.248.170.756,00	992.981.770.017,00	8.784.365.760.426,00
Kapitalisasi Non Belanja Modal	3.157.389.400,00	26.272.414.253,00	363.816.610.944,00	98.313.001.757,00	3.504.922.825,00	47.580.101.890,00	542.644.441.069,00
Hibah dan Tukar Menukar	-	14.851.507.437,00	23.288.998.073,00	-	-	-	38.140.505.510,00
Pengadaan Dari Dana Operasional BLUD	-	8.085.802.922,00	35.543.418.749,00	65.890.000,00	7.294.200,00	-	43.702.405.871,00
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan	-	98.060.000,00	1.560.421.986.624,00	718.022.860.427,00	418.421.500,00	-	2.278.961.328.551,00
Hutang Pihak Ke-3	-	2.317.871.200,00	4.763.861.228,00	23.878.790.580,00	-	555.300.087,00	31.515.823.095,00
Koreksi Kurang Catat/Salah Catat	93.347.972.000,00	28.713.588.522,00	63.015.192.021,00	-	2.362.874.217,00	46.689.560.030,00	234.129.186.790,00
Koreksi Penambahan	64.725.234.004,00	184.813.874.998,00	150.554.462.626,00	200.209.538.325,00	163.874.765.788,00	-	764.177.875.741,00
Jumlah Mutasi Penambahan	651.180.279.277,00	3.515.311.401.417,00	4.227.394.539.987,00	2.527.527.925.062,00	708.416.449.286,00	1.087.806.732.024,00	12.717.637.327.053,00
Mutasi Pengurangan							
Penghapusan	6.480.000.000,00	16.119.526.701,00	40.304.225.418,00	-	-	-	62.903.752.119,00
Reklas ke Persediaan/Inventaris	-	65.718.332.311,00	11.231.169.814,00	9.642.679.098,00	42.803.827.063,00	-	129.396.008.286,00
Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ke-3	-	28.467.549.109,00	1.422.602.617,00	-	1.783.797.609,00	-	31.673.949.335,00
Reklas ke Aset Rusak Berat	-	82.908.770.442,00	13.911.522.000,00	-	2.031.920,00	-	96.822.324.362,00
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan	-	-	-	-	-	2.278.961.328.551,00	2.278.961.328.551,00
Koreksi Pencatatan Ganda/Salah Catat	940.466.527.873,00	51.536.561.453,00	77.077.723.784,00	-	45.768.500,00	-	1.069.126.581.610,00
Koreksi Pengurangan	823.701.981.628,00	98.124.000.292,00	225.462.808.432,00	561.958.272.097,00	130.715.111.329,00	681.240.358,00	1.840.643.414.136,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	1.770.648.509.501,00	342.874.740.308,00	369.410.052.065,00	571.600.951.195,00	175.350.536.421,00	2.279.642.568.909,00	5.509.527.358.399,00
Saldo per 31 Desember 2012 (Audited BPK)	279.151.046.794.830,00	14.464.442.456.567,00	21.566.584.083.436,00	23.831.416.473.846,00	1.859.808.199.687,00	1.406.049.946.404,00	342.279.347.954.770,00

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM	935.065.252.349	556.507.955.675	718.022.860.427	97.408.358	773.452.939.239
	DINAS PEKERJAAN UMUM	930.351.719.299	550.999.076.681	713.214.834.790	82.726.358	768.053.234.832
1	Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M	518.950.183.233	223.944.548.725	411.270.269.611	-	331.624.462.347
2	Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang	231.051.912.819	136.456.096.074	188.715.627.114	16.353.222	178.776.028.557
3	Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang Tahap 1	33.312.740	116.133.365.261	-	9.173.136	116.157.504.865
4	Pembangunan Polder Kampung Bandan	19.015.849.866	-	-	-	19.015.849.866
5	Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marunda-Rorotan)	34.292.999.224	-	-	-	34.292.999.224
6	Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen rorotan-cakung timur)	10.206.563.541	-	-	-	10.206.563.541
7	Pelebaran jalan kembangan raya	11.810.272.541	-	11.810.272.541	-	-
8	Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen cakung timur-Raya Bekasi)	33.072.432.467	-	33.072.432.467	-	-
9	Pemb. jalan tembus Kelapa Gading/Boulevard timur terminal Pulo Gadung	21.866.469.745	-	21.866.469.745	-	-
10	Rumah Pompa di muara Kali Banglio/Muara Baru	3.152.834.811	8.754.968.274	-	57.200.000	11.850.603.085
11	Penurapan Kali Baru Timur	1.497.881.833	-	1.497.881.833	-	-
12	Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya jakbar dan jakut	17.047.972.330	-	17.047.972.330	-	-
13	Pemb akses terminal Pulo Gebang/pemb Akses (FO) Terminal Bus Pulo Gebang	17.222.105	29.920.372.105	17.222.105	-	29.920.372.105
14	Jembatan Jl. Pluit Utara (depan PLTU)	11.366.707.255	-	11.366.707.255	-	-
15	Jembatan Cakung Drain Sisi Utara	16.549.979.789	-	16.549.979.789	-	-
16	Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
17	Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigit	25.000.000	-	-	-	25.000.000
18	Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono	4.125.000	-	-	-	4.125.000
19	Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Krukut Jak-Sel (Kemang s/d Petogogan) Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
20	Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
21	Keg. Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
22	Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
23	Keg. Invent dan PT kali Angke Hulu Sigit Pramono	50.000.000	-	-	-	50.000.000
24	Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	5.000.000	-	-	-	5.000.000
25	Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulogdung - Rajiman- Dr. Sumarno Sigit Pramono	40.000.000	-	-	-	40.000.000
26	Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
27	Program Keg. Pembebasan tanah Jln. Tbs Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur-Jl. Sudirman, STIE Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl. Asia	50.000.000	-	-	-	50.000.000
28	Keg. PT Jln. Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman dll) Sigit Pramono	20.000.000	-	-	-	20.000.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
29	Prog. Optimalisasi, perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan, keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs, Missing Link Sigit Pramono	25.000.000	-	-	-	25.000.000
30	Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs Missing Link Sigit Pramono	50.000.000	-	-	-	50.000.000
33	Underpass Cendrawasih, Sultan Iskandar Muda	-	130.409.800	-	-	130.409.800
34	Pelebaran jembatan Cengkareng Draain, Jl. Daan Mogot	-	122.549.000	-	-	122.549.000
35	Peningkatan jembatan di Jl. Boulevard Timur - Jl. Pengangsaan Dua	-	120.789.000	-	-	120.789.000
40	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik)		25.351.011.942			25.351.011.942
41	Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik)		7.714.507.800			7.714.507.800
42	Keg inventarisasi dan pembebasan tanah utk aspal mixing plant di Marunda		9.419.700			9.419.700
43	Keg invent dan pembebasan tanah waduk pondok rangon III kali sunter lanjutan		25.000.000			25.000.000
44	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan WadukKeg Invent dan Pembbsn Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter Lanjutan		25.000.000			25.000.000
45	Keg pembebasan tanah waduk sunter hulu		37.500.000			37.500.000
46	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk. Keg Pembbsn Tanah Waduk Sunter Hulu		37.500.000			37.500.000
47	Keg pembebasan tanah waduk pondok rangon II kali sunter lanjutan		25.000.000			25.000.000
48	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan Waduk, Keg Pembbsn Tanah Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan		25.000.000			25.000.000
49	Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah situ munjul lanjutan		25.000.000			25.000.000
50	Keg inventarisasi pembebasan tanah situ munjul lanjutan		25.000.000			25.000.000
51	Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan PT. kolam penangkap lumpur/sampah waduk cilangkap		25.000.000			25.000.000
52	Keg pembebasan tanah kali pesanggrahan Ljt		2.351.000			2.351.000
53	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsn Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan		325.000.000			325.000.000
54	Keg PT Kali Pesanggrahan Lnjt		325.000.000			325.000.000
55	Program pengembangan drainase keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter ljt		225.000.000			225.000.000
56	Biaya pematokan trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan		25.000.000			25.000.000
57	Keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan		6.323.000			6.323.000
58	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsn Tanah Kali Sunter Lanjutan		225.000.000			225.000.000
59	Pembebasan tanah kali Angke Hulu Lanjutan		125.000.000			125.000.000
60	Biaya pematokan trace keg pembebasan tanah kali angke hulu ljt		25.000.000			25.000.000
61	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsn Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan		125.000.000			125.000.000
62	Keg inventarisasi pembebasan tanah kali cipinang		37.500.000			37.500.000
63	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Cipinang		37.500.000			37.500.000
64	Keg pembebasan tanah kali banglio		25.000.000			25.000.000
65	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali Banglio Sigit P		25.000.000			25.000.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
66	Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi pembebasan tanah saluran warung jengkol dan jalan inspeksi		25.000.000			25.000.000
67	Biaya keg inventarisasi dan pembebasan tanah saluran warung jengkol dan jalan inspeksi		25.000.000			25.000.000
68	Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jalur busway Kp. Melayu - Pulo Gebang ruas Fly over buaran - lembaga pemasyarakatan cipinang		50.000.000			50.000.000
69	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pembgn Jalan & Jembtn Keg Inventarisasi dan Pembbsn Tanah Jalur Busway Kamp Melayu-Pulogebang Ruas FO Buaran LP Cipinang		50.000.000			50.000.000
70	SP2D LS No. 18561, pemby pek. invent dan PT. bangunan persimpangan jembt dan trase jln/simpang susun dan kupingnya sentra primer ke pulogebang Persek KJPP "WITIJASTO & REKAN"		41.195.000			41.195.000
71	SP2D LS No.17586 Pemby Pek Pembebasan Tanah Jembatan Kalibata KJPP SAMSUL H.WAHYONO A HENDRA		45.375.000			45.375.000
72	Keg Invent PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lnjt		60.000.000			60.000.000
73	Keg inventarisasi pembebasan tanah jln tembus (missing link) industri pulo gadung - rajiman - Dr. Sumarmo Ljt		25.000.000			25.000.000
74	Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jl. Tbs Missing Link Ljt		75.000.000			75.000.000
75	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg Invent & Pembbsn Tanah Jl tembus Missing Link Lanjutan Sigit P		25.000.000			25.000.000
76	Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan (Dedicated) Keg. Invent dan Pembbsn Tanah Jalan Tembus Missing Link lanjutan		50.000.000			50.000.000
77	SP2D LS No. 18657, pemby pek. inventarisasi dan pembebasan tanah sejajar rel I Gusti Ngurah Rai Persek KJPP " WIJIJASTO & Rekan"		41.195.000			41.195.000
78	SP2D LS No.17341 Pemby Pek Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jln Layang Non Tol Tnh Abang - Kmp Melayu KJPP YANUAR BEY & REKAN		44.600.000			44.600.000
	SUDIN PU. JALAN JAKARTA PUSA1	-	45.000.000	-	-	45.000.000
1	Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari	-	45.000.000	-	-	45.000.000
	SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA PUSA1	-	7.999.900	-	-	7.999.900
1	Pembangunan Sistem pompa dan sistem drainase di Kawasan Bendungan Hilir	-	7.999.900	-	-	7.999.900
		-				
	SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA UTARA	124.728.000	453.690.500	-	-	578.418.500
1	Inventarisasi lahan pantai publik Kawasan Marunda wil Jakarta Utara	124.728.000	-	-	-	124.728.000
2	Pembangunan pompa Kamal Muara Kec. Penjaringan	-	90.929.000			90.929.000
3	Pmbangunan pomp Sub Sistem Kali Ancol Kec. Pademangan	-	115.929.000			115.929.000
4	Pembangunan rumah pompa sub sistem waduk Sunter Utara Kec. Tanjung Priuk	-	105.929.000			105.929.000
5	Normalisasi saluran Phb Jl. A. Jl. B menuju Waduk Teluk Gong	-	37.403.000			37.403.000
6	Normalisasi Saluran penghubung Ampera VII	-	8.000.000			8.000.000
7	Normalisasi saluran penghubung Pademangan A	-	27.750.500			27.750.500
8	Normalisasi saluran penghubung Pinang	-	8.000.000			8.000.000
9	Normalisasi saluran penghubung Papanggo Timur	-	23.999.500			23.999.500
10	Normalisasi saluran penghubung Trio 9Warakas)	-	27.750.500			27.750.500
11	PengadaancMesin genset (biaya lelang)	-	8.000.000			8.000.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
	SUDIN PU. JALAN JAKARTA SELATAN	4.518.805.050	2.612.372.453	4.808.025.637	14.682.000	2.308.469.866
1	Ducting System Kawasan Blok M	4.326.899.050	2.423.317.453	4.808.025.637	14.682.000	1.927.508.866
2	Inventarisasi dan pembebasan Tanah Jl. Cilandak I Ujung (Kel Cilandak Barat)	73.726.000		-	-	73.726.000
3	Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Tembus Mampang Prapatan (Kantor Kec. Mampang)	118.180.000		-	-	118.180.000
2	Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo - Sahardjo Kota Adm. Jakarta Selatan	-	45.000.000			45.000.000
3	Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan trace Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga Kota Adm. Jakarta Selatan	-	12.000.000			12.000.000
4	Perencanaan dan pengukuran trace pr a invent Jl. Bangka Raya	-	30.000.000			30.000.000
5	Perencanaan dan pengukuran trace invent jalan sejajar rel kereta Bukit Duri sisi barat	-	7.500.000			7.500.000
6	Perencanaan dan pengukuran trace, pematokan trace DTR, Pelaksanaan (pembayaran ganti rugi) invent dan Jl. Alwi	-	94.555.000			94.555.000
	SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA TIMUR	70.000.000	2.389.816.141	-	-	2.459.816.141
1	Inventarisasi saluran Phb Cipayang (Dokumen Pengukuran)	70.000.000	-	-	-	70.000.000
2	Pembebasan tanah waduk Surilng Jakarta Timur		90.000.000			90.000.000
3	Normalisasi saluran lingkungan KB		1.012.516.192			1.012.516.192
4	Pembangunan dan normalisasi turap kali Caglak Kel. Cibubur		1.287.299.949			1.287.299.949
	2. DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	547.787.233.229	35.029.285.900	547.787.233.229	-	35.029.285.900
	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	547.787.233.229	35.029.285.900	547.787.233.229	-	35.029.285.900
1	Perencanaan penyelesaian rusun Pulogebang	17.055.610.323	-	17.055.610.323	-	-
2	Pembangunan gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta	314.197.570.481		314.197.570.481	-	-
3	Pembangunan gedung Sarana wisma islamic center	141.277.304.320		141.277.304.320	-	-
4	Perencanaan/DE gedung Blok A Dinas Kesehatan	52.041.000		52.041.000	-	-
5	Pembangunan rusun Dinas Kebakaran Boker Jaktim 2 blok	14.663.422.968		14.663.422.968	-	-
6	Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	19.871.722.849		19.871.722.849	-	-
7	Perencanaan Konstruksi Rusun (3 Kontrak)	957.480.816		957.480.816	-	-
8	Konstruksi Rusun Cipinang Besar Selatan	9.905.793.932		9.905.793.932	-	-
9	Konstruksi Rusun Waduk Pulit	28.819.554.165		28.819.554.165	-	-
10	Kontrak Perencanaan tahun 2009	378.700.750		378.700.750	-	-
11	Konstruksi Rusun Jatinegara kaum	182.128.000		182.128.000	-	-
12	Kontrak Perencanaan Rusun DamKar Pegadungan	425.903.625		425.903.625	-	-
13	Pembangunan gedung LBIQ (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta		17.523.990.000	-	-	17.523.990.000
14	Pembangunan gedung PKP		17.505.295.900			17.505.295.900
	3. DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	6.843.021.483	863.809.786	-	-	7.706.831.269
1	Pembangunan jembatan TPU Tanah Kusir	6.118.241.600		-	-	6.118.241.600
2	Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	70.000.000		-	-	70.000.000
3	Lahan Ruang Terbuk Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Barat	6.000.000		-	-	6.000.000
4	Lahan Ruang terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Selatan	6.000.000		-	-	6.000.000
5	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Haji sapiih/ Jl. Lebak Bulus III, Kel. Pondok Labu	74.054.600		-	-	74.054.600
6	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kampung Rekreasi RT 007/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing	134.488.508		-	-	134.488.508
7	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Tanah mas Raya RT 003/01 Kel. Kayu Putih, Kec. Cempaka Putih	20.000.000		-	-	20.000.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
8	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Centex Gg. Masjid Kec. Ciracas	20.000.000		-	-	20.000.000
9	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah Bawah RT 001/012 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan	8.000.000		-	-	8.000.000
10	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Moh. Kahfi I. Kel Cipedak Kec. Jagakarsa	125.695.100		-	-	125.695.100
11	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah RT 002/12, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan	26.000.000		-	-	26.000.000
12	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Teluk Jakarta RT 006/08 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu	11.200.000		-	-	11.200.000
13	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Mawar Ujung Kec. Pesanggrahan	14.000.000		-	-	14.000.000
14	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan	28.000.000		-	-	28.000.000
15	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Perdatam Terusan RW 06 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan	40.000.000		-	-	40.000.000
16	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Sampi Kosambi Baru RT 001/10, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng	62.046.800		-	-	62.046.800
17	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Masjid Nur Imam RT 002/02 Kel. Semanan, Kec. Kalideres	31.100.000		-	-	31.100.000
18	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Srengseng Sawah RW 07 Kec. Jagakarsa	20.000.000		-	-	20.000.000
19	Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, kec. Kembangan	7.000.000		-	-	7.000.000
20	Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto Sisi Utara, Jakarta Selatan	19.390.500		-	-	19.390.500
21	Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto (Segmen Slipi-Semanggi)	1.804.375		-	-	1.804.375
55	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Cilangkap RW 01 Kel. Cilangkap Jakarta Timur	-	23.500.000			23.500.000
56	Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar, Jakarta Timur	-	48.000.000			48.000.000
57	Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur	-	17.000.000			17.000.000
58	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	-	16.508.100			16.508.100
59	Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	-	38.000.000			38.000.000
60	Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	58.640.900			58.640.900
61	Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	-	39.405.400			39.405.400
62	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur	-	34.000.000			34.000.000
63	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	-	26.802.000			26.802.000
64	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Jatimurni Buntu RT 005 RW 02 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	-	5.150.000			5.150.000
65	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Lapangan Tembak 8 RT 010/02 Cibubur Jakarta Timur	-	25.230.000			25.230.000
66	Biaya Perencanaan Tanah RTH Wilayah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	-	78.542.500			78.542.500
67	Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Kesehatan 6 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	-	4.300.000			4.300.000
68	Gudang penyimpanan aset pool Lenteng Agung	-	437.779.386			437.779.386
69	Kapitalisasi hasil audit 2012	-	10.951.500			10.951.500
4	DINAS PERHUBUNGAN	305.007.075.397	12.048.868.515	305.007.075.397	-	12.048.868.515
	DINAS PERHUBUNGAN	305.007.075.397	12.048.868.515	305.007.075.397	-	12.048.868.515
1	Pembangunan terminal Pulogebang Tahap I	302.788.603.371	-	302.788.603.371	-	-
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pulogebang	2.218.472.026	-	2.218.472.026	-	-
3	Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	-	12.048.868.515	-		12.048.868.515
5	BLUD RS PASAR REBO	37.094.924.430	67.378.428.500	103.481.481.930	-	991.871.000
1	Pengembangan master plan RSUD Pasar Rebo	459.287.000		459.287.000	-	-
2	DED Gedung baru	892.262.075		892.262.075	-	-
3	Pembangunan Fisik Gedung dan Konsultan	35.671.819.560		35.671.819.560	-	-
4	Belanja Konsultasi	61.628.500	904.777.500	886.777.500	-	79.628.500

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
5	Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu	9.927.295	7.377.477.000	7.377.477.000	-	9.927.295
6	Penyelesaian gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu RSUD Pasar Rebo		58.122.303.000	58.122.303.000	-	-
9	Kapitalisasi		973.871.000	71.555.795		902.315.205
6	BLUD RS Budi Asih	1.434.691.850	-	-	-	1.434.691.850
1	Pengembangan master plan RSUD Budi Asih	369.084.350			-	369.084.350
2	Pengembangan master plan RSUD Budi Asih	1.065.607.500	-	-	-	1.065.607.500
7	DINAS KESEHATAN	22.232.233.142	46.876.218.772	18.642.993.392	338.625.000	50.126.833.522
	DINAS KESEHATAN	3.250.614.750	14.459.304.060	-	-	17.709.918.810
1	Pembangunan konstruksi gedung RSUD Jakarta Selatan	3.250.614.750	260.586.260		-	3.511.201.010
2	Gedung Jamkesda		14.198.717.800			14.198.717.800
	SUDIN KESEHATAN JAKARTA PUSAT	12.755.165.862	31.266.362.900	12.755.165.862	-	31.266.362.900
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Pembangunan PKM Rawat Inap Kec. Cempaka Putih	12.562.199.612		12.562.199.612	-	-
2	Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur	192.966.250		192.966.250	-	-
3	Rehab Total Puskesmas Kec. Johar Baru	-	11.472.122.050			11.472.122.050
4	Pembangunan Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar	-	18.623.059.100			18.623.059.100
5	X-1 pembangunan Puskesmas Menteng, Bungur dan Gambir	-	1.171.181.750			1.171.181.750
	SUDIN KESEHATAN JAKARTA BARAT	254.966.500	-	254.966.500	-	-
1	Pembangunan Puskesmas Kec. Kalideres	254.966.500		254.966.500		-
	SUDIN KESEHATAN JAKARTA SELATAN	757.046.500	-	418.421.500	338.625.000	-
1	Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kec. Pasar Minggu	338.625.000			338.625.000	-
2	Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Kalibata I	166.547.500		166.547.500	-	-
3	Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ulujami	167.930.000		167.930.000	-	-
4	Perencanaan Pengembangan/Pembangunan Puskesmas Rawat Inap selain RB dan Alat Kamar Ruang Perawatan di Puskesmas Kec. Pesanggrahan	83.944.000		83.944.000	-	-
	SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA	-	336.897.125	-	-	336.897.125
1	Pembangunan Puskesmas	-	336.897.125			336.897.125
	SUDIN KESEHATAN JAKARTA TIMUR	5.041.379.530	813.654.687	5.041.379.530	-	813.654.687
1	Rehab Total PKL Cipinang Muara	1.240.525.730	-	1.240.525.730	-	-
2	Rehab Pengembangan PKC Kramat Jati selain RB	2.220.179.800	-	2.220.179.800	-	-
3	Rehab Pengembangan PKC Ciracas selain RB	1.580.674.000	-	1.580.674.000	-	-
4	Pembangunan puskesmas Kel. Cililitan	-	126.864.000	-	-	126.864.000
5	Pembangunan puskesmas Kel. Kampung Tengah	-	111.618.687	-	-	111.618.687
6	Pembangunan puskesmas Kel. Halim II	-	121.640.000	-	-	121.640.000
7	Pembangunan puskesmas Kel. Rawa Bunga	-	125.881.000	-	-	125.881.000
8	Pembangunan puskesmas Kel. Makasar	-	108.935.000	-	-	108.935.000
9	Pembangunan puskesmas Kel. Jati I	-	124.966.000	-	-	124.966.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
10	Rehab Berat Gedung Puskesmas Kecamatan Matraman		93.750.000	-	-	93.750.000
	SUDIN KESEHATAN KEPULAUAN SERIBU	75.000.000	-	75.000.000	-	-
1	Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Pulau Kelapa	75.000.000		75.000.000	-	
	BLUD RS Kep. Seribu	98.060.000	-	98.060.000	-	-
1	Jasa konsultan utk pembelian ambulan laut	98.060.000		98.060.000	-	-
8	DINAS PENDIDIKAN	555.719.348.312	255.348.882.825	506.916.505.890	-	304.151.725.247
	DINAS PENDIDIKAN	534.101.355.962	255.348.882.825	485.298.513.540	-	304.151.725.247
1	SMK 44	6.631.652.750		6.631.652.750		-
2	SEMANAN	6.003.272.351		6.003.272.351		-
3	SMP SUPURA	15.847.615.000		15.847.615.000		-
4	BARU 07	9.279.250.000		9.279.250.000		-
5	BENHIL 01-03	10.842.514.000		10.842.514.000		-
6	SUMUR BATU 14/15	5.563.405.612		5.563.405.612		-
7	P KELAPA 02	8.291.064.000		8.291.064.000		-
8	KELAPA GADING TIMUR 01/02	6.436.190.035		6.436.190.035		-
9	BATU AMPAR 08	8.776.513.000		8.776.513.000		-
10	KELAPA DUA WETAN 01	7.780.205.000		7.780.205.000		-
11	JATINEGARA KAUM 03	5.553.662.000		5.553.662.000		-
12	PEGANGSAAN DUA 05	7.957.487.000		7.957.487.000		-
13	CILANDAK TIMUR 05/07/08	13.847.286.000		13.847.286.000		-
14	MAKASAR 06	8.977.771.000		8.977.771.000		-
15	JATI 03/04	8.772.381.000		8.772.381.000		-
16	KALISARI 01	5.601.421.770		5.601.421.770		-
17	PINANGRANTI 05	6.763.870.500		6.763.870.500		-
18	KAYU PUTIH 09	6.411.207.000		6.411.207.000		-
19	SMP 139	16.369.060.000		16.369.060.000		-
20	SMP 37	13.945.611.000		13.945.611.000		-
21	SMP 86	13.151.784.765		13.151.784.765		-
22	SMP 34	14.951.762.594		14.951.762.594		-
23	SMP 167	11.436.086.000		11.436.086.000		-
24	SMP 1	8.849.917.000		8.849.917.000		-
25	SMP 228	11.153.995.240		11.153.995.240		-
26	SMP 166	14.011.508.000		14.011.508.000		-
27	SMP 110	9.861.994.000		9.861.994.000		-
28	SMP 77	12.182.336.000		12.182.336.000		-
29	SMP 147	12.360.461.000				12.360.461.000
30	SMP 249	15.223.521.600		15.223.521.600		-
31	SMP 149	12.115.167.000		12.115.167.000		-
32	SMP 184	13.345.015.250		13.345.015.250		-
33	SMP 96	9.350.243.000		9.350.243.000		-
34	KALIANGKE 06/16	4.874.753.000		4.874.753.000		-

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
35	PASAR BARU 07/09/10	5.697.255.472		5.697.255.472		-
36	SUNTER AGUNG 12	4.731.122.000		4.731.122.000		-
37	KEBON JERUK 02	5.967.440.000		5.967.440.000		-
38	PASEBAN 11	5.413.560.246		5.413.560.246		-
39	PLUIT 03/04	5.486.000.000		5.486.000.000		-
40	PLUIT 05/06	5.384.410.000		5.384.410.000		-
41	KALISARI 04	5.548.873.000		5.548.873.000		-
42	CEMPAKA BARU 03	5.493.857.000		5.493.857.000		-
43	CAKUNG BARAT 04	5.512.076.000		5.512.076.000		-
44	TEGAL ALUR 09/16	5.590.270.000		5.590.270.000		-
45	MAKASAR 05	4.219.093.162		4.219.093.162		-
46	PONDOK BAMBU 15	4.597.305.293		4.597.305.293		-
47	SMPN 103	5.520.922.000		5.520.922.000		-
48	SMPN 176	11.569.336.000		11.569.336.000		-
49	SMPN 28	11.913.910.000		11.913.910.000		-
50	SMPN 178	10.040.154.000	4.925.693.800			14.965.847.800
51	SMA RAGUNAN	3.731.277.157	1.169.579.000			4.900.856.157
52	SMK TERPADU CENGKARENG	18.143.324.000		18.143.324.000		-
53	SMA 20	9.933.926.000		9.933.926.000		-
54	SMA 29	15.766.213.000		15.766.213.000		-
55	SMKN 44	2.976.623.900		2.976.623.900		-
56	SMKN 28	9.555.570.000		9.555.570.000		-
57	SMA 21	2.346.642.000		2.346.642.000		-
58	SMP 38	3.771.262.000		3.771.262.000		-
59	SMP 258	2.163.491.985				2.163.491.985
60	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54	384.750.000				384.750.000
61	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27	383.175.000	16.668.740.000			17.051.915.000
62	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 14	384.575.000	9.955.811.000			10.340.386.000
63	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241 (Pulau Tidung)	294.225.000				294.225.000
64	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 196	301.443.750				301.443.750
65	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04/05	252.437.500				252.437.500
66	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sukabumi Utara 07	160.737.500				160.737.500
67	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulogadung 03/04	169.437.500				169.437.500
68	Perencanaan X-1 Pembangunan Kantor BPPK Kampung Jawa	166.500.000				166.500.000
69	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Eks SDN Balimester	218.937.500				218.937.500
70	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 03/04	216.425.000				216.425.000
71	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 11/12	167.600.000				167.600.000
72	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07	152.037.500	6.457.670.400			6.609.707.900
73	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06	163.275.000				163.275.000
74	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 05	153.000.000	6.629.314.000			6.782.314.000
75	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Karet Tengsin 13	164.625.000				164.625.000
76	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 07	145.062.500				145.062.500
77	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Sari 06	168.912.500				168.912.500

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
78	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 02	163.187.500	5.667.318.000			5.830.505.500
79	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 02	171.275.000				171.275.000
80	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalibata 07	157.850.000				157.850.000
81	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bidara Cina 05	159.512.500				159.512.500
82	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Palmerah 19	162.487.500				162.487.500
83	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Joglo 09	163.100.000				163.100.000
84	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 09	170.968.750				170.968.750
85	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11	165.762.500				165.762.500
86	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Jagakarsa 06	156.887.500				156.887.500
87	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN/SMPN Satu Atap Pulau Sebara	2.000.000				2.000.000
88	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Dukuh 09	158.375.000	6.347.042.000			6.505.417.000
89	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Tebet Barat 07/08	287.800.000				287.800.000
90	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebagusan 05	161.656.250				161.656.250
91	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Penggilingan 01	169.000.000				169.000.000
92	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 238	293.443.750				293.443.750
93	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 30	297.200.000				297.200.000
94	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 156	299.037.500				299.037.500
95	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 173	275.600.000				275.600.000
96	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 214	2.100.000				2.100.000
97	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 162	301.400.000				301.400.000
98	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 257	2.100.000				2.100.000
99	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 172	296.937.500				296.937.500
100	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 198	290.725.000				290.725.000
101	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 5	379.500.000				379.500.000
102	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 15	379.500.000				379.500.000
103	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung Taman Kanak-Kanak Negeri Papanggo	110.675.000				110.675.000
104	Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung RKB SMKN 4	187.687.500				187.687.500
105	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak 11/12	161.218.750				161.218.750
106	Perencanaan Rehabilitasi Total Komplek Pendidikan SDN Tambora 01-03,SMPN 63, SMAN 19	583.375.000				583.375.000
107	Perencanaan pembangunan gedung sekolah	10.349.939.530				10.349.939.530
108	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04		262.637.500			262.637.500
109	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN baru 02		183.250.000			183.250.000
110	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 01		179.125.000			179.125.000
111	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cijantung 05		184.950.000			184.950.000
112	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cakung Barat 14		179.125.000			179.125.000
113	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pondok Kelapa 05		190.550.000			190.550.000
114	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalisari 02		196.937.500			196.937.500
115	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 07/08		191.375.000			191.375.000
116	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 09/10		179.375.000			179.375.000
117	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 74		264.825.000			264.825.000
118	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 197		232.225.000			232.225.000
119	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 151		252.375.000			252.375.000
120	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 54		240.025.000			240.025.000
121	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 171		254.150.000			254.150.000

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
122	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 10		263.075.000			263.075.000
123	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 125		245.450.000			245.450.000
124	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 112		227.850.000			227.850.000
125	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 282		244.825.000			244.825.000
126	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 108		244.650.000			244.650.000
127	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 44		247.375.000			247.375.000
128	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 15		245.625.000			245.625.000
129	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 143		242.637.500			242.637.500
130	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 46		239.675.000			239.675.000
131	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 194		262.637.500			262.637.500
132	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 190		243.075.000			243.075.000
133	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 95		246.850.000			246.850.000
134	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 2		265.000.000			265.000.000
135	Perencanaan X-1 Pembangunan RKB SMPN 97		163.812.500			163.812.500
136	Perencanaan X-1 Rehab Gedung UPT Duren Sawit		514.125.000			514.125.000
137	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Jaya 06		192.650.000			192.650.000
138	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bali Mester 06		171.125.000			171.125.000
139	Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kramat 01-04		194.312.500			194.312.500
140	SDN Paseban 09/10		4.848.425.000			4.848.425.000
141	SDN Mampang Prapatan 02		6.486.305.400			6.486.305.400
142	SDN Benhil 09		9.344.206.000			9.344.206.000
143	SDN Tegal Alur 08/16		8.311.119.235			8.311.119.235
144	SDN Kemanggisan 01/02		11.408.370.000			11.408.370.000
145	SDN Kemanggisan 03/05		14.871.341.500			14.871.341.500
146	SDN Kebon Jeruk 01/03		6.451.238.000			6.451.238.000
147	SDN Kebon Jeruk 08/09		8.805.282.000			8.805.282.000
148	SDN Kembangan Utara 05/08		6.603.049.000			6.603.049.000
149	SDN Balimester 04		4.992.410.250			4.992.410.250
150	SDN Marunda 02 (Relokasi)		6.648.013.000			6.648.013.000
151	SDN Cipinang Besar Selatan 06		6.530.062.000			6.530.062.000
152	SMPN 273		19.110.247.700			19.110.247.700
153	SMPN 169		12.142.467.540			12.142.467.540
154	SMPN 261		14.096.538.000			14.096.538.000
155	SMPN 226		13.711.985.000			13.711.985.000
156	SMPN 235		7.545.762.000			7.545.762.000
157	SMAN 74		16.386.558.000			16.386.558.000
158	SMPN 147		4.247.560.000			4.247.560.000
159	SMPN 157		3.282.010.000			3.282.010.000
160	SMPN 146		4.259.090.000			4.259.090.000
SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKPUS		1.012.576.200	-	1.012.576.200	-	-
1	Perencanaan rehab sekolah	1.012.576.200		1.012.576.200	-	-
SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKPUS		20.056.246.150	-	20.056.246.150	-	-

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
1	Pembangunan Kantor Sudin Dikmen Kota Adm. Jakarta Pusat	20.056.246.150		20.056.246.150	-	-
	SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKARTA SELATAN	549.170.000	-	549.170.000	-	-
1	Perencanaan rehab sekolah	549.170.000		549.170.000	-	-
9	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	48.472.137.252	875.511.398	31.873.456.962	-	17.474.191.688
	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	48.154.400.202	821.949.398	31.873.456.962	-	17.102.892.638
1	Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi DKI Jakarta	10.370.944.223	-	7.494.636.668	-	2.876.307.555
2	Perencanaan Stadion Sepakbola Taman BMW	4.763.805.625	-		-	4.763.805.625
3	Perencanaan DED Rehabilitasi total Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta	398.864.995	-		-	398.864.995
4	Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Pulogadung	29.502.000	-		-	29.502.000
5	Perencanaan Desain Interior Gedung KNPI	38.973.000	-		-	38.973.000
6	Rehabilitasi Total Gelanggang Olahraga Grogol Peta, buran	24.378.820.294	-	24.378.820.294	-	-
7	DED Gelanggang Olahraga Ragunan	4.029.252.000	-		-	4.029.252.000
8	DED Gelanggang Olahraga Kec. Tanah Abang	796.200.000	-		-	796.200.000
9	DED Gelanggang Olahraga Kec. Matraman	801.872.000	-		-	801.872.000
10	DED Gelanggang Olahraga Kec. Cilandak	800.262.000	-		-	800.262.000
11	DED Gelanggang Olahraga Kec. Cengkareng	799.485.300	-		-	799.485.300
12	DED Gelanggang Olahraga Kec. Koja	799.263.000	-		-	799.263.000
13	Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemda	147.155.765	-		-	147.155.765
14	Perencanaan Kantor UPT Cendrawasih Jakarta Barat	-	234.401.598			234.401.598
15	Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu	-	48.316.400			48.316.400
16	Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading	-	48.866.400			48.866.400
17	Perencanaan, appraisal dan konsultasi pembebasan penggantian tanah Stadion Lebak Bulus	-	398.365.000			398.365.000
18	Perencanaan desain meubelair dan interior Dinas Olahraga		92.000.000			92.000.000
	GELANGGANG OLAHRAGA SUNTER	-	53.562.000	-	-	53.562.000
	SUDIN OLAHRAGA JAKARTA BARAT	317.737.050	-	-	-	317.737.050
1	Perencanaan Pembangunan gedung Olah raga	317.737.050	-	-	-	317.737.050
10	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN/	4.100.517.980	258.932.327	4.100.517.980	-	258.932.327
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCAN/	-	258.932.327	-	-	258.932.327
1	Jasa konsultasi perencanaan kantor sektor Tanjung Priok	-	187.854.013	-	-	187.854.013
	Jasa konsultasi perencanaan rumah dinas Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat	-	71.078.314	-	-	71.078.314
	SUDIN PEMADAM KEBAKARAN - JAKARTA TIMUR	4.100.517.980	-	4.100.517.980	-	-
1	Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran Duren Sawit	4.100.517.980		4.100.517.980	-	-
11	DINAS KOPERASI DAN UKM	196.806.500	12.918.824.000	196.806.500	-	12.918.824.000
	UPT Balai Metrologi	-	12.269.832.500	-	-	12.269.832.500
		-				
	SUDIN KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN JAKARTA UTAR/	196.806.500	648.991.500	196.806.500	-	648.991.500

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
1	Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103 Permai	196.806.500	648.991.500	196.806.500	-	648.991.500
		-				
12	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	2.508.262.725	14.786.273.988	1.837.525.000	191.778.000	15.265.233.713
	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	361.053.375	861.753.375	-	191.778.000	1.031.028.750
1	Pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota di Jakarta Barat	191.778.000			191.778.000	-
2	Perencanaan Pemb. Gedung Terpadu/Serbaguna Klender	169.275.375				169.275.375
3	Perencanaan pembangunan Hutan Kota Rawa Malang Jakarta Utara	-	173.547.500			173.547.500
4	Perencanaan pembangunan kios ikan	-	81.184.375			81.184.375
5	Pembebasan lahan (kajian)	-	276.895.000			276.895.000
6	Perencanaan (hasil audit 2012)	-	330.126.500			330.126.500
	UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan	-	13.337.946.950	-	-	13.337.946.950
1	Pematangan lahan Masjid Kawasan	-	6.509.386.500	-	-	6.509.386.500
2	Pematangan lahan Pasar Grosir Ikan		6.828.560.450			6.828.560.450
	UPT Balai Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	265.559.500	-	-	-	265.559.500
1	Perencanaan Rehab Gedung Serba Guna	169.958.500		-	-	169.958.500
2	Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga	95.601.000		-	-	95.601.000
	UPT BALAI BUDIDAYA PERIKANAN	-	317.177.000	-	-	317.177.000
1	Pembangunan pagar pengaman jalan	-	317.177.000	-	-	317.177.000
	UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI)	1.837.525.000	-	1.837.525.000	-	-
1	Peninggian Pelataran dan Rehab Mesjid	1.837.525.000		1.837.525.000	-	-
	UPT Taman Margasatwa Ragunan	13.957.000	18.897.600	-	-	32.854.600
	UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian		250.499.063	-	-	250.499.063
	UPT PUSAT PERKAYUAN	30.167.850	-	-	-	30.167.850
1	Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menteng	29.202.250	-	-	-	29.202.250
2	Dokumen tender Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menten	465.600	-	-	-	465.600
3	Honor Lelang Ruang Pengolah	500.000	-	-	-	500.000
4	Bangunan Pengering Kayu Pemanas Listrik PLN	-	-	-	-	-
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	3.683.878.593	829.014.900	3.683.878.593	-	829.014.900
	Dinas Perindustrian dan Energi	-	829.014.900	-	-	829.014.900
1	Pembangunan sumur resapan	-	829.014.900	-	-	829.014.900
	UPT BALAI TEKSTIL	3.683.878.593	-	3.683.878.593	-	-
1	Pembangunan Gedung Workshop	3.683.878.593	-	3.683.878.593	-	-
14	DINAS KEBERSIHAN	1.477.947.000	FALSE	1.477.947.000	-	-

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
	Sudin Kebersihan - Jakarta Timur	1.477.947.000	-	1.477.947.000	-	-
1	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.477.947.000	-	1.477.947.000	-	-
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.996.599.948	23.449.642.077	2.114.716.800	53.429.000	27.278.096.225
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	21.392.611.077	-	-	21.392.611.077
1	Pembangunan gedung Cinematografi dan Studio Cinematografi di Jl. Cikini Raya		8.078.632.947	-	-	8.078.632.947
2	Mess Wisa Betawi		13.313.978.130			13.313.978.130
	UPT ANJUNGAN TMII	3.828.454.148	2.057.031.000	-	-	5.885.485.148
1	Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya	3.828.454.148	2.057.031.000	-	-	5.885.485.148
	Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur	2.114.716.800	-	2.114.716.800	-	-
1	Pemb. Gedung Kantor Permanen	2.114.716.800		2.114.716.800	-	-
	Sudin Kebudayaan Jakarta Barat	53.429.000	-	-	53.429.000	-
1	Perencanaan Rumah Betawi	53.429.000		-	53.429.000	-
16	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.642.585.288	12.659.117.300	85.640.000	-	14.216.062.588
	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.084.871.863	12.659.117.300	-	-	13.743.989.163
1	Master Plan	86.625.000		-	-	86.625.000
2	DED Perpustakaan Internasional	998.246.863		-	-	998.246.863
3	Rehab Berat Gedung Arsip Jayakarta menjadi Gedung Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta		12.659.117.300			12.659.117.300
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUK	94.927.425	-	-	-	94.927.425
1	X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor	94.927.425		-	-	94.927.425
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKUJ	85.640.000	-	85.640.000	-	-
1	X-1 Rehabilitasi Total Gedung Perpustakaan Gereja Tugu	85.640.000	-	85.640.000	-	-
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL	88.742.500	-	-	-	88.742.500
	X-1 Pembangunan Gedung Kantor	88.742.500	-	-	-	88.742.500
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM	288.403.500	-	-	-	288.403.500
1	X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur	288.403.500		-	-	288.403.500
17	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	9.456.185.450	8.705.576.090	9.456.185.540	-	8.705.576.000
	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	9.456.185.450	8.705.576.090	9.456.185.540	-	8.705.576.000
1	Pembangunan Kantor Camat Senen	9.456.185.450	90	9.456.185.540	-	-
2	Pembangunan Kantor Camat Gambir	-	8.705.576.000,00	-	-	8.705.576.000
18	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	9.326.360.555	27.087.826.109	9.326.360.555	-	27.087.826.109
1	Rehabilitasi Total Gedung Kecamatan Kalideres	9.326.360.555		9.326.360.555	-	-
2	Pembangunan Kantor Kelurahan Palmerah		5.185.946.500			5.185.946.500

No.	SKPD	KDP per 31 Desember 2011	Tahun 2012			KDP per 31 Desember 2012
			Penambahan KDP	Pengurangan (Reklas ke Aset)	Pengurangan Lain- Lain	
3	Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara		5.231.505.500			5.231.505.500
4	Pembangunan Kantor Kelurahan Kelapa Dua		5.176.265.500			5.176.265.500
5	Pembangunan Kantor Kelurahan Cengkareng Timur		5.300.106.500			5.300.106.500
6	Pembangunan Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan		5.248.805.500			5.248.805.500
7	Pembangunan Kantor Kelurahan Jelambar		132.350.000			132.350.000
8	Pembangunan Kantor Kelurahan Meruya Selatan		162.350.000			162.350.000
9	Pembangunan Kantor Kelurahan Krukut		132.350.000			132.350.000
10	Pembangunan Kantor Kelurahan Mangga Besar		132.350.000			132.350.000
11	Pembangunan Kantor Kelurahan Kemanggisian		162.350.000			162.350.000
12	Pembangunan Kantor Camat Kembangan		223.446.609			223.446.609
19	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUF	10.135.368.790	8.790.862.082	9.779.979.740	-	9.146.251.132
	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUF	10.135.368.790	8.790.862.082	9.779.979.740	-	9.146.251.132
1	Perencanaan Rehab sedang Kantor Kecamatan Pulogadung	16.462.050	-	-	-	16.462.050
2	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bidara Cina	39.888.000	-	-	-	39.888.000
3	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Cipinang Muara	146.417.000	-	146.417.000	-	-
4	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan	146.417.000	-	-	-	146.417.000
5	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Kalisari	133.034.500	-	133.034.500	-	-
6	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Malaka sari	152.622.000	-	-	-	152.622.000
7	Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bambu Apus	149.920.500	-	149.920.500	-	-
8	Gedung Kantor Kecamatan Duren Sawit	9.350.607.740	-	9.350.607.740	-	-
9	Perencanaan pelapisan kulit luar Gedung Blok A Kantor WJT	-	359.049.500	-	-	359.049.500
10	Perencanaan gedung parkir Walikota Jakarta Timur	-	497.155.750	-	-	497.155.750
11	Perencanaan rehab total kantor Camat Ciracas	-	43.510.000	-	-	43.510.000
12	Perencanaan rehab total Kantor Lurah Utan Kayu Utara	-	43.400.000	-	-	43.400.000
13		-	7.847.746.832	-	-	7.847.746.832
20	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBL	89.705.353.016	-	5.170.163.616	-	84.535.189.400
1	Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen	84.535.189.400	-	-	-	84.535.189.400
2	Gapura	2.600.000	-	2.600.000	-	-
3	Pemb. Gedung Kantor	5.167.563.616	-	5.167.563.616	-	-
21	SATPOL PP	-	3.240.375.230	-	-	3.240.375.230
1	Pembangunan hanggar	-	3.240.375.230	-	-	3.240.375.230
22	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KI	-	151.326.550	-	-	151.326.550
	Kantor Keluarga Berencana - JAKUT	-	151.326.550	-	-	151.326.550
1	Jasa konsultasi perencanaan X-1 (DED Gedung Kantor KB Jakut	-	151.326.550	-	-	151.326.550
	TOTAL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2.597.885.783.289	1.087.806.732.024	2.278.961.328.551	681.240.358	1.406.049.946.404

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT,BTO DAN KSO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Investasi/Bangunan	Nilai Aset	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BPMP							
1	PT. Bakrie Investindo	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Tanah	41.990.830.572,00	9.983.361.000,00	-	51.974.191.572,00	-
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2	Jembatan	32.924.000.000,00	-	-	-	-
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	Tanah Terminal	-	449.585.220.000,00	449.585.220.000,00	-	-
4	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	Pembangunan Rumah Sakit Hewan	Tanah	2.469.840.000,00	23.164.125.000,00	25.633.965.000,00	-	-
5	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	-	18.243.975.000,00	-	18.243.975.000,00	-
6	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP	Jembatan	-	-	-	-	-
7	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	20.127.253.186,90	-	-	-	-
8	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	50.409.075.784,00	-	-	-	-
9	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-	-	-	-
10	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	20.092.540.000,00	-	-	-	-
11	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	14.624.400.000,00	-	-	-	-
12	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	17.039.520.000,00	3.078.200.000,00	-	20.117.720.000,00	-
13	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	9.768.000.000,00	-	-	-	-
14	PT. Bumi Grafika jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	-	48.508.000.000,00	-	48.508.000.000,00	-
15	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	-	29.812.500.000,00	-	29.812.500.000,00	-
16	PT. AGB Tuna	Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	-	22.806.000.000,00	-	22.806.000.000,00	-
17	PT. AGB Tuna	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	-	5.087.082.000,00	-	5.087.082.000,00	-
18	PT. Gading Raya Propertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	123.467.608.000,00	71.438.310.000,00	-	71.438.310.000,00	-
19	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	28.782.859.949,00	-	-	-	-
20	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mai Ambassador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	46.794.087.000,00	-	-	-	-
21	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	70.000.000.000,00	53.477.325.000,00	-	53.477.325.000,00	-
22	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna	222.000.000.000,00	-	-	-	-
JUMLAH I				700.490.014.491,90	735.184.098.000,00	475.219.185.000,00	321.465.103.572,00	-
II	Dinas Perhubungan (KSO)							
1	PT. Suar Andika WU	Tempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Tanah	-	-	-	-	-
2	PT. Nakia Dwipradita	Tempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat Luas 23.350 m2	Tanah	-	21.388.600.000,00	-	-	21.388.600.000,00
BP LIP								
1.	PT. Cakra Sarana Persada	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP	Tanah	-	246.966.276.000,00			246.966.276.000,00
JUMLAH II				-	268.354.876.000,00	-	-	268.354.876.000,00

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Investasi/Bangunan	Nilai Aset	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	BPKD (Eks Biro Perlengkapan)							
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah	5.684.000.000,00	6.223.392.000,00	11.907.392.000,00	-	-
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah	6.179.320.000,00	9.896.145.000,00	16.075.465.000,00	-	-
3	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU	721.710.000,00	7.128.225.000,00	7.849.935.000,00	-	-
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU	4.313.800.000,00	11.564.560.000,00	15.878.360.000,00	-	-
5	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	2.457.000.000,00	5.880.000.000,00	8.337.000.000,00	-	-
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	10.438.260.000,00	10.387.500.000,00	20.825.760.000,00	-	-
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah	5.710.320.000,00	16.813.500.000,00	22.523.820.000,00	-	-
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.499.270.000,00	5.309.436.000,00	10.808.706.000,00	-	-
9	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah	17.640.000.000,00	21.522.900.000,00	51.772.462.352,00	-	-
10	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah	89.415.700.000,00	195.432.825.000,00	284.848.525.000,00	-	-
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cililitan	Tanah	-	17.550.000.000,00	-	17.550.000.000,00	-
12	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah	2.242.240.000,00	35.500.000.000,00	37.742.240.000,00	-	-
13	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja	1.465.000.000,00	19.329.075.000,00	20.794.075.000,00	-	-
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gading Timur Jakarta Utara.	Masjid	11.105.600.000,00	9.504.000.000,00	20.609.600.000,00	-	-
15	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja	3.080.986.780,00	6.039.936.000,00	9.120.922.780,00	-	-
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa*	Sarana Pendidikan di JL. Swadaya Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.	Sekolah	-	3.675.936.000,00	3.675.936.000,00	-	-
17	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid	1.588.327.000,00	1.699.200.000,00	3.287.527.000,00	-	-
17	PT. Jaya Real Property	Jembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat	Tanah Jalan	19.011.075.000,00	-	-	-	-
JUMLAH III				186.552.608.780,00	383.456.630.000,00	546.057.726.132,00	17.550.000.000,00	-
JUMLAH I + II + III				887.042.623.271,90	1.386.995.604.000,00	1.021.276.911.132,00	339.015.103.572,00	268.354.876.000,00
TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO								1.628.646.890.704,00

**DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	NAMA SKPD/UKPD	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa 1	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Utang PFK Lainnya	Jumlah Utang PFK di SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
1	PPKD	242.071.200	-	-	-	-	-	242.071.200
2	SEKRETARIAT DAERAH	501.000	-	-	-	-	-	501.000
3	BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA	-	-	-	-	-	3.629.500	3.629.500
4	BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	920.000	-	-	-	-	-	920.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	115.622.900	339.900	-	6.317.750	2.402.364	-	124.682.914
6	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL	563.500	-	-	-	-	-	563.500
7	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	252.082.007	53.472.568	21.146.751	2.333.075.665	155.872.793	-	2.815.649.784
8	DINAS PERHUBUNGAN	672.427.016	18.431.536	14.397.980	-	131.078.971	-	836.335.503
9	BLUD Transjakarta Busway	-	99.372.601	122.039.699	188.961.818	1.904.464.726	-	2.314.838.844
10	BLUD RS Koja	1.900.000	-	-	-	2.100.000	-	4.000.000
11	BLUD RS Kepulauan Seribu	5.856.625	923.423	117.500	-	3.551.160	-	10.448.708
12	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR	903.490	-	-	-	-	-	903.490
13	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR	40	147.000	-	-	980.000	-	1.127.040
14	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL	2.408.034	-	572.400	-	2.862.000	-	5.842.434
15	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL	575.139	-	-	-	-	-	575.139
16	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM	93.500	-	-	-	-	-	93.500
17	Sudin Kesehatan - JAKTIM	19.212.400	-	-	-	-	-	19.212.400
18	DINAS PENDIDIKAN	729.000	-	-	-	-	3.062.334.894	3.063.063.894
19	Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR	53.642.302	1.099.305	9.049.557	-	8.483.337	-	72.274.501
20	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	857.930	-	-	-	-	-	857.930
21	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT	8.250.115	44.105	1.693.307	-	1.268.537	-	11.256.064
22	Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM	1.262.000	-	-	-	-	-	1.262.000
23	PSBD Budi Bhakti Cengkareng	-	595.710	-	-	3.971.400	-	4.567.110
24	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM	13.491.300	808.110	4.922.585	-	239.825	-	19.461.820
25	Satpol PP - JAKUT	-	-	148.500	-	-	-	148.500
26	UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan	62.500	-	322.000	-	1.607.200	-	1.991.700
27	Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM	65.722.250	5.189.641	8.054.614	-	72.327.220	-	151.293.725
28	UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH	1.300.000	246.180	-	-	1.730.160	-	3.276.340
29	Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKTIM	-	179.794	-	-	1.337.100	-	1.516.894
30	Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM	76.000	-	602.700	-	363.700	-	1.042.400
31	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	33.018.700	-	-	-	-	-	33.018.700
32	BLKD Jakarta Utara	140.000	-	-	-	-	-	140.000
33	Kecamatan Johar Baru - JAKPUS	-	-	-	-	4.386.588	-	4.386.588
34	Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS	3.017.311	276.270	-	-	1.572.015	-	4.865.596
35	Kelurahan Tugu Utara - JAKUT	18.123.315	5.686.233	569.273	-	30.113.778	-	54.492.599
36	Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT	255.245	9.690	-	-	198.500	-	463.435
37	Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR	6.480.000	-	-	-	39.891.895	-	46.371.895
38	Kelurahan Pekojaan - JAKBAR	12.007.950	-	-	-	-	-	12.007.950
39	Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR	2.631.015	-	-	-	-	-	2.631.015
40	Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL	-	820.530	-	-	3.409.250	-	4.229.780
41	Kelurahan Baru - JAKTIM	225.455	-	1.457.000	-	1.261.500	-	2.943.955
42	Kelurahan Cijantung - JAKTIM	36.135	-	240.900	-	537.550	-	814.585
43	Kelurahan Ciracas - JAKTIM	49.550	-	-	-	-	-	49.550
44	Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM	-	4.485.584	2.545.717	-	27.340.725	-	34.372.026
45	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu	13.725.000	272.182	-	-	1.814.545	-	15.811.727
SALDO PERHITUNGAN		1.550.239.924	192.400.362	187.880.483	2.528.355.233	2.405.166.839	3.065.964.394	9.930.007.235

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2012

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIBAYAR	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
1	PT. NIRETA VISTA CREATIVE	Tanah dan Bangunan Gedung Eks. Kantor Imigrasi Jl. Teuku Umar Nomor 1 Menteng Jakarta Pusat (Restaurant dan Constring)	1300/2007 26/11/2007	20/AK/BP/ XI/2007 26/11/2007	5 Tahun 03/10/2008 s.d. 03/09/2013	2	57.835.417	115.670.833
2	KOPERASI PEGAWAI DISPENDA	Kantor Kas Samsat Jakarta Timur Kantor Kas Samsat Jakarta Barat Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Koperasi)		1/AK/BP/II/ 2007 31/01/2007	5 Tahun 31/1/2008 s.d. 30/1/2013	1	-	2.500.000
3	PT. BANK DKI	Kantor Kas Samsat Jakarta Pusat Kantor Kas Samsat Jakarta Timur Kantor Kas Samsat Jakarta Barat (Kantor Kas Cabang)		2/AK/BP/II/ 2008 22/2/2008	5 Tahun 22/2/2008 s.d. 21/2/2013	2	-	26.734.500
4	PT. HAPPY DAY UTAMA INDONESIA	Bangunan Gedung Restoran Jl. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat (Restoran)	1803/2008 05/07/2008	21.1/AK/XII/ 2008 23/12/2008	5 Tahun 23/12/2008 s.d. 22/12/20013	3	-	37.500.000
5	PT. NUSANTARA SEJAH- TERA RAYA	Gedung Bioskop TIM-21 Areal TIM Jl. Cikin Raya No.73 Jakarta Pusat (Sarana Hiburan)		11/05/2010	5 Tahun 19/8/2009 s.d. 18/8/2014	8	-	146.666.667
6	UD. RESTU IBU	Lahan Di Areal Pasar Ikan Luar Batang Kec. Penjaringan Jakarta Utara (Coldstorage)		17/AK/BP/XII/ 2008 Tgl. 5/12/2008	5 Tahun 15/12/2008 s.d. 14/12/2013	11	1.578.096	17.359.058

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
7	YAY. PENDIDIKAN ELKA	Tanah dan Bangunan berupa 15 Unit Gedung Sekolah Perum Kelapa Gading Permai dan Perum Sunter Hijau, Jak-Utr (Sarana Pendidikan)	87/2009 14/1/2009	01/BPKD/ BP/III/2009 16/1/2009	5 Tahun 23/3/2008 s.d 22/3/2013	3	-	57.500.000
8	Yayasan The Gandhi Memorial Internasional School	Tanah Jalan Parang Tritis VI Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	-	13/1/2009	5 Tahun 13/1/2009 s.d. 01/12/2014	0	24.812.833	-
9	Yayasan KORPRI Jakarta Utara	Tanah dan Bangunan Poliklinik Medikarya dan Lap. Tennis Perum Kelapa Gading Permai dan Taman Pegangsaan, Jak-Utr (Poliklinik dan Sarana Olahraga)	-	06/BPKD/BP/ 2009 29/6/2009	5 tahun 10/10/2008 s.d. 19/10/2013	10	8.592.734	85.927.338
10	PT. Prima Indo Bahari	Tanah Areal Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara (Coldstorage)	-	04/AK/BP/VI/ 2009 15/6/2009	5 tahun 15/6/2009 s.d 14/6/2014	5	12.997.185	64.985.927
11	PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	Tanah dan Bangunan Gedung BP Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara (Perluasan Kantor DUFAN dan Kegiatan Lainnya)	-	23/3/2011	5 Tahun 04/05/2012 s.d. 04/04/2015	3	19.663.000	58.989.000
12	KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN	Ruangan Coldstorage dan Air Blast Freezer di Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara (Coldstorage)		19/4/2011	3 Tahun 19/4/2011 s.d. 18/4/2014	4	7.508.333	30.033.333
13	KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN	Tanah Di Areal Pasar Ikan Muara Angke	121/2011 25/1/2011	16/2/2011	5 Tahun 16/2/2011	2	15.381.581	30.763.161

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
		Penjaringan Jakarta Utara (SPBU)			s.d. 15/2/2016			
14	PT. BANK DKI	Tanah dan Bangunan Milik Pemda DKI tresebar di 34 lokasi (Kantor Opsional Bank DKI)	392/2011 03/07/2011	31/05/2011	5 Tahun 31/5/2011 s.d. 30/5/2016	5	222.757.719	1.113.788.596
15	PT. BANK DKI	Tanah dan Bangunan sebanyak 33 yg terletak di lima wilayah kota DKI Jakarta (Ruang ATM Bank DKI)		07/07/2011	5 Tahun 07/07/2011 s.d. 07/06/2016	6	45.315.000	271.890.000
16	PT. BANK DKI	Tanah dan Gedung Sebanyak 22 ktr Kecamatan di 5 Wilayah Kota (Pelayanan Terpadu)		07/07/2011	5 Tahun 07/07/2011 s.d. 07/06/2016	6	40.892.817	245.356.902
17	PT. ASTRA DAIHATSU	Berupa Ruang Publik (Udara) Jalan Gaya Motor Kel. S. Bambu Kec. Tj. Priok Jakarta Utara (Jembatan Penyebrangan Barang)	539/2011 04/08/2011	07/06/2011	5 Tahun 01/03/2011 s.d. 01/02/2016	12	4.962.567	59.550.800
18	PERKUMPULAN PEMBE- RANTASAN TBC IND.	Tanah Areal Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta Utara (Klinik Paru)	-	18/10/2011	5 Tahun 18/10/2011 s.d. 17/10/2016	10	416.667	4.166.667
19	PT. ALAM SEGAR JAYA	Tanah Pasar Ikan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (Coldstorage dan Gudang Barang atau Mesin)	1977/2011 20/12/2011	28/2/2012	5 Tahun 28/2/2012 s.d. 27/2/2017	2	10.633.333	21.266.667

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
20	YAY. ANCOL BARAT	Tanah Parang Tritis IX Blok B4 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	165/2012 27/1/2012	04/12/2012	5 Tahun 04/12/2012 s.d. 04/11/2017	3	2.679.738	8.039.215
21	PT. OBAYASHI KONTR. JOIN OPERASION	Tanah Jl. Ketel No. 1, Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara (Tempat menyimpan alat berat)	542/2912 30/3/2012	05/03/2012	3Tahun 06/03/2012 s.d. 06/02/2015	27	27.500.000	742.500.000
22	YAYASAN HARAPAN BANGSA	Tanah dan Bangunan 3 Unit Gedung Sekolah Perum Bisma Setjen Hankam- nas dan Perum Sunter Garden Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	-	11/08/2012	5 Tahun 06/05/2012 s.d 4/6/2017	5	7.500.000	37.500.000
23	KOPERASI PUTRI SALJU	Tanah di Areal Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta Utara (Coldsotorage)	1260/2012 22/11/2012	22/11/2012	5 Tahun 22/11/2012 s.d 21/11/2017	11	3.083.333	33.916.667
24	PT. RUKUN GAYA BARU	Tanah dan Bangunan Eks. BP IPM Jl. Krapu No 5 (Tongkol) Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara. (Sarana Angkutan Pengiriman)	793/2012 15/5/2012	Belum ada PKS	5 Tahun 08/11/2009 s.d 08/10/2014	19	10.833.333	205.833.333
25	YAY. AL AMANAH SUNTER AGUNG	Bangunan Sekolah TK dan SD Blok H, Jl. Karya Selatan Rt. 01/13 Kel. Sunter Agung Kec. Tj. Priok Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)		29/2/2010	5 Tahun 01/10/2009 s.d. 01/09/2014	0	3.000.000	-
26	YAY. PUSAT PELATIHAN E & P	Tanah Blok 1.1. Perum.Permata Buana		13/AK/BP/VIII/ 2008	5 Tahun 25/8/2008	8	-	66.666.667

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
		Kel. Kembangan Kec. Kideres Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)		25/8/2008	s.d 24/8/2013			
27	ANTILOPE MADJU PURI INDAH	Tanah dan Bangunan Ps. Puri Indah Jl. Puri Indah Raya Kompleks Perum Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat (Pasar Tradisional)		24/10/2008	5 Tahun 30/11/2008 s.d 29/11/2013	11	11.500.000	126.500.000
28	PMI JAKARTA BARAT	Tanah dan Bangunan Eks. Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat (Kantor Sekretariat)	-	15.1/BP/X/2008 19/9/2008	5 Tahun 19/9/2008 s.d 18/9/2013	9	500.000	4.500.000
29	YAY. PENDIDIKAN CITRA KASIH	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Kompleks Perum. Citra 5 Blok E Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat (sarana Pendidikan)		29/7/2009	5 Tahun 29/7/2009 s.d 28/7/2014	7	9.166.667	64.166.667
30	YAY. PENDIDIKAN CENGKARENG	Tanah Kawasan Rumah Susun Cengkareng, Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)		18/8/2009	5 Tahun 18/8/2009 s.d 17/8/2014	8	-	47.864.361
31	YAY. PENDIDIKAN KEMURNIAN	Tanah dan Bangunan Sarana Pend. Blok B.6 dan A3 Perum Citra 2 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)		20/1/2010	25/4/2008 s/d 25/4/2013	4	-	23.333.333
32	PT. PETROSS GAS	Tanah Jln. Perintis Kemerdekaan JT Jln. Lingkar Luar Cengkareng JB	2238/2010 22/12/2010	21/6/2011	5 Tahun 04/01/2010 s.d.	3	46.154.047	138.462.141

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
		(SPBG)			31/3/2015			
33	YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN	Bangunan Sarana Pendidikan TK, SD, SMP, SMA Perum Daan Mogot Baru Blok NA Jl. Bedugul Kalideres Jakarta Brt (Sarana Pendidikan)	-	05/11/2011	5 Tahun 07/01/2010 s.d 30/6/2015	30	41.666.667	1.250.000.000
34	YAY. DIANNANDA	Tanah dab Bangunan SD Perum Citra II Blok N.3 Kel. Pegunungan Kec. Kaloderes Kota Adm. Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)	502/2012 26/3/2012	24/5/2012	5 Tahun 27/9/2008 s.d 26/9/2013	9	9.166.667	82.500.000
35	YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Perum Taman Surya Blok MM Kel. Pegadungan Kalideres Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)	842/2012 29/5/2012	25/6/2012	5 Tahun 25/6/2012 s.d 24/6/2017	54	8.833.333	477.000.000
36	YAYASAN MUSLIM BOJONG INDAH	Tanah dan Bangunan Masjid Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komp. Perum Bojong Indah Jak-Bar (Sarana Ibadah)	1576/2012 11/07/2012	19/4/2012	5 Tahun 19/4/2012 s.d 18/4/2017	4	416.667	1.666.667
37	YAY. PENDIDIKAN CITRA KASIH	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Kompleks Perum. Citra 2 Extn. Blok B.1, 11 dan 12 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat (sarana Pendidikan)	1748/2011 12/01/2011	19/4/2012	5 Tahun 04/12/2012 s.d 04/11/2017	3	10.833.333	32.500.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
38	PT. DAVALTI MUGI UTAMA GASINDO	Tanah Jl. Daan Mogot NO. 94-95 Kel. Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (SPBG)	594/2008 25/4/2008	7/AK/BP/V/ 2008 05/02/2008	5 Tahun 15/3/2008 s.d. 14/3/2013 Perjanjian Tambahan 06/01/2011	2	35.416.667	70.833.333
39	PT. ALFA INDAH SPORTINDO	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga Kompleks Perum Taman Alfa Indah Blok A. 10 Joglo Jakarta Barat (sarana Olahraga)	1583/2012 10/01/2012	11/07/2012	5 Tahun 11/07/2012 s.d. 31/5/2017	10	5.416.667	54.166.667
40	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Gedung Nyi Ageng Serang Jakarta Selatan	-	14/12/2010	5 Tahun 14/12/2009 s.d. 13/12/2014	23	4.166.667	95.833.333
41	YAY. PUTRA BAHAGIA JAYA	Tanah dan Bangunan Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat (Peristirahatan)	722/2009 05/05/2009	15/6/2009	5 Tahun 15/6/2009 s.d. 14/6/2014	5	16.122.146	80.610.729
42	HIMPUNAN PENYAYANG BINATANG	Sebagian Tanah dan Bangunan Jl. Harsono RM. No. 10 Ragunan Jakarta Selatan	-	30/6/2011	5 Tahun 30/6/2011 s.d. 29/6/2016	42	500.000	21.000.000
43	KOPERASI PEGAWAI BLU TRANSJAKARTA BUSWAY	Sarana dan Prasarana BUSway pd Koridor I s.d VIII (untuk penempatan Vending Machine)	459/2011	15/6/2009	3 Tahun 15/6/2011 s.d. 14/6/2014	5	46.375.000	231.875.000
44	PT. ASRI KARYA	Tanah dan Bangunan Kolom Renang dan Lapangan Tennis	608/2012	16/5/2012	5 Tahun 01/01/2012	6	9.716.667	58.300.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
		Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan (Sarana Olahraga)			s.d. 31/12/2016			
45	YAYASAN PANTARA	Tanah di Perumahan Tanjung Mas Raya No. 55 Jak-Sel	1095/2012 07/12/2012	08/08/2012	5 Tahun 08/08/2012 s.d. 08/07/2017	7	1.666.667	11.666.667
46	PT. GRIYA BERLIAN	Tanah dan Bangunan 8 Unit Type Besar 4 Unit Type Kecil Jl. Taman Pejaten Mas Pasar Minggu, Jakarta Selatan	1161/2012	30/10/2012	5 Tahun 29/11/2012 s.d. 30/11/2017	11	50.000.000	550.000.000
47	YAYASAN PERGURUAN RAKYAT	Tanah dan Bangunan Sekolah Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)	226/2009 28/1/2009	02/02/2009	5 Tahun 02/02/2009 s.d. 02/01/2014	1	-	8.333.333
48	KSU " CEGER JAYA"	Tanah dan Bangunan RT. 001/01 Kel. Ceger Kec. Cipayg Kota Adm. Jakarta Timur (Koperasi)	83/2009 01/12/2009	06/08/2009	5 Tahun 25/4/2008 s.d. 24/4/2013	4	-	10.416.667
49	YAY. DHARMA SISWA	Tanah dan Bangunan Sekolah Blok B Perumahan Pulo Gebang Permai, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)	1136/2009 07/02/2009	10/02/2009	5 Tahun 27/4/2008 s.d. 26/4/2013	4	-	5.000.000
50	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA	Tanah dan Bangunan Eks. BP7 Jl. Pisangan Baru Timur No. 25A Jakarta Timur		25/5/2011	5 Tahun 25/5/2011 s.d.	41	541.667	22.208.333

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNA	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
		(Sarana Kesehatan)			24/5/2016			
51	PT. BANK BNI, Persero	Tanah dan Bangunan Kantor BP2TKI Jakarta Timur (Kantor Cabang BNI)		13/12/2011	5 Tahun 06/01/2011 s.d 31/5/20116	41	6.250.000	256.250.000
52	PT. BANK MANDIRI	Tanah dan Bangunan Kantor BP2TKI Jakarta Timur (Kantor Cabang Mandiri)		20/12/2011	5 Tahun 06/07/2011 s.d 06/06/2016	41	5.000.000	205.000.000
53	YAY. RSB BIDARAMULIA	Tanah Jl. Otista Raya No. 64 Kel. Bidara Mulia Kec. Jatinegara Jakarta Timr (Sarana Kesehatan)		16/8/2011	5 Tahun 16/6/2009 s.d 15/6/2014	6	1.191.000	7.146.000
54	PENGURUS KADIN JAKARTA TIMUR	Sebagian Kantor di Gedung Sudin Teknis Jakarta Timur Blok C Lantai III Jl. Jatinegara Bart (Kantor Sekretariat)	1064/2011 07/11/2011	-	5 Tahun 07/11/2011 s.d 07/10/2016	6	-	12.500.000
		JUMLAH						7.289.309.120

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2012**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2012	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DES 2012	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 8 Oktober 1997	20 Tahun	20/03/2009 14/03/2014	14.000.000	14	1.166.667	16.333.333
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan			15/03/2014 09/03/2019	16.000.000	60	1.333.333	80.000.000
		Kec. Sawah Besar JakPus							
		(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)							
2	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS No. 65 Tahun 1999	30 Tahun	13/09/2010 12/09/2011	31.666.667	200	2.638.889	527.777.783
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan	Tgl 13 September 1999						
		Kec. Sawah Besar JakPus							
		(JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC dan Gedung Mal Mangga Dua							
3	PT Rointa Eka Jaya	BOT	PKS No. 27 Tahun 2001	30 Tahun	30/03/2010 29/03/2011	30.000.000	219	2.500.000	547.500.000
		Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus	Tgl 30 Maret 2001						
		(Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhrudin)							
4	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 14 Mei 2003	25 Tahun	14/05/2011 13/05/2012	40.000.000	184	3.333.333	613.333.333
		Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan	Addendum Tgl 30 Agustus 2005						
		Kec. Sawah Besar JakPus							
		(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga Dua dengan Mal Mangga Dua)							
5	PT. Gading Raya Propertindo	BOT	PKS Tgl 27 Oktober 2004	25 Tahun	27/10/2010 26/10/2011	100.000.000	202	8.333.333	1.683.333.333
		Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus							
		(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)							
6	PT. Hotel Cikini Realty	BOT	PKS Tgl 17 Jul 2006	25 Tahun	08/08/2010 07/08/2011	150.000.000	19	12.500.000	237.500.000
		Jln. Cikini Raya No. 75 Kec. Menteng JakPus							
		(pengelolaan hotel & fasilitasnya)							
7	PT. Grand Indonesia	BOT	PKS Tgl 4 Mei 2009	28 Tahun	18/01/2011 18/01/2012	216.500.000	1	18.041.667	18.041.667
		Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati							
		Kec. Tanah Abang JakPus							
		(jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks							

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2012	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DES 2012	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)							
8	Jaya Real Properti	BOT	PKS Tgl 11 November 2011	25 Tahun	31/12/2012 31/12/2013	110.000.000	12	9.166.667	110.000.000
		Antara Plaza Atrium & Senen Jaya (Blok IV)							
		Jl. Pasar Senen Kelurahan Senen							
		Kec. Senen Jakarta Pusat.							
		(Jembatan Multiguna)							
9	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO	PKS No. 1500/073.511	20 Tahun	03/09/2012 02/09/2013	100.000.000	2	8.333.333	16.666.667
		Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya	Tgl 10 Mei 2002						
		Kec. Tanjung Priok JakUtara							
		(stasiun pengisian bahan bakar umum)							
10	PT. AGB Tuna (cold storage)	BOT	PKS Tgl 28 Feb 2004	20 Tahun	28/02/2011 27/02/2012	20.000.000	134	1.666.667	223.333.333
		Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit							
		Kec. Penjaringan JakUtara							
		(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta sarana pelengkapnnya)							
11	PT. AGB Tuna (pabrik es)	BOT	PKS Tgl 21 November 2006	20 Tahun	21/11/2010 20/11/2011	22.500.000	87	1.875.000	163.125.000
		Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit							
		Kec. Penjaringan JakUtara							
		(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana pelengkapnnya)							
12	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 13 Maret 2008	25 Tahun	29/02/2012 28/02/2013	252.000.000	2	21.000.000	42.000.000
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan							
		Kec. Sawah Besar JakPus							
		(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)							
13	PT. Gerak Maju Abadi	BOT	PKS Tgl 21 Juli 1997	20 Tahun	31/12/2012 31/12/2013	100.000.000	12	8.333.333	100.000.000
		Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat							
		(Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)							
14	Yayasan Tunas Muda	BTO	PKS Tgl 19 September 2000	25 Tahun	18/11/2012 11/18/20413	33.275.000	11	2.772.917	30.502.083
		Jl. Kedoya Angsana Raya Blok D-8 No.2							
		Kompleks Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya							
		Selatan Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat.							

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2012	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DES 2012	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(Sarana Pendidikan)							
15	Yay. Pendidikan Tiara Kasih	BTO Jl. Dharma Grilia Komp. Taman Semanan Indah Blok C.1 Kel.Semanan Kec. Kalideres Jak-Bar (Sarana Pendidikan)	PKS No. 256/073.511 Tgl 3 Januari 2005	25 Tahun	22/08/2012 22/08/2013	22.500.000	8	1.875.000	15.000.000
16	PT. Pesona Marga mandiri	BTO Jl. Petak Baru Pasar Pagi Kel. Roa Malaka Kec. Tambora Jakarta Barat (kios perdagangan)	PKS Tgl 21 Agustus 2003 Addendum Tgl 30 Desember 2004	25 Tahun	20/09/2012 20/09/2013	269.500.000	9	22.458.333	202.125.000
17	Yay. Patmos	BTO Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 210/073.551 Tgl 6 Pebruari 2003 Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006 Tgl 1 Juni 2006	25 Tahun	08/03/2012 08/03/2013	60.500.000	7	5.041.667	35.291.667
18	Yay. Pusat Pelatihan E & P	BTO Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 130/073.511 Tgl 28 Januari 2003 BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006	25 Tahun	27/02/2012 27/02/2013	58.416.513	2	4.868.043	9.736.086
19	PT Langgeng Ayom	BOT Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)	PKS tahun 1990 Addendum Tgl 18 Juli 2012	30 Tahun	18/07/2012 07/01/2013	250.000.000	1	20.833.333	20.833.333
20	PT. Dharma Alumas Sakti	BOT Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Kuningan JakSel (Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail & Ged. KNPI)	PKS Tgl 22 Agustus 1992 Addendum No. 1605 Tahun 1997 Tgl 2 Oktober 1997	48 Tahun	10/12/2012 10/12/2013	183.181.100	11	15.265.092	167.916.008
21	PT. Bakrie Investindo	BOT Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Kuningan JakSel (sarana olahraga an fasilitas komersil)	PKS Tgl 22 Agustus 1992	48 Tahun	10/12/2012 10/12/2013	150.000.000	11	12.500.000	137.500.000
22	PT. Pasific Bangun Mas	BOT Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan (Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)	PKS No. 40 Tahun 2001 Tgl 1 Mei 2001	25 Tahun	01/05/2011 30/04/2012	16.000.000	160	1.333.333	213.333.333

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2012	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN PER 31 DES 2012	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	PT. Perwita Margasakti	BOT Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel (jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)	PKS Tgl 12 April 2010	25 Tahun	29/02/2012 28/02/2013	54.000.000	2	4.500.000	9.000.000
24	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	PKS No. 734/073.511 Tgl 28 Maret 2003	20 Tahun	27/04/2012 27/04/2013	70.000.000	4	5.833.333	23.333.333
25	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan) Jakarta Timur (Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A) & Gedung Parkir (Bangunan B))	PKS Tgl 7 April 2004	25 Tahun	07/04/2010 06/04/2011	54.000.000	195	4.500.000	877.500.000
26	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur	PKS Tgl 13 Juli 2006	25 Tahun	31/07/2012 31/07/2015	100.000.000	30	8.333.333	250.000.000
27	PT. Metropolitan Kentjana Tbk	BOT Antara Pondok Indah Mal I & II Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel (Jembatan Multiguna)	PKS Tgl 4 April 2008	25 Tahun	29/02/2012 28/02/2013	666.000.000	2	55.500.000	111.000.000
28	PT. Gamma Investa Lestari	BTO Kompleks Bola Basket Internasional Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3 Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. (Sarana Olahraga)	PKS No. 15/AK/BP/III/2006 Tanggal 24 Maret 2006	25 Tahun	13/04/2012 13/04/2013	60.000.000	3	5.000.000	15.000.000
JUMLAH SELURUHNYA									6.643.118.712

**DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD DAN UTANG PAJAK PT JAKARTA TOURISINDO
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
A.	Utang Pada Pihak Ketiga di SKPD							
1	Sekretariat Daerah	-	7.753.798		-	7.753.798	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai Biro Ortala Organisasi dan Tunjangan Kinerja Daerah Biro KDH dan Luar Negeri
		25.438.471.464		25.438.471.464	-	-	PT.Askes	Kekurangan Iuran Wajib Pemprov DKI Jakarta Semester II Tahun 2010 ke PT. ASKES
2	Biro Prasarana dan Sarana Kota	2.365.000		-	2.365.000	-	Era Ban Service Station	Pembayaran Perbaikan Suku Cadang Kendaraan
		3.629.500		3.629.500		-	Dinas Pelayanan Pajak	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional
3	Sekretaris Korpri	1.013.000				1.013.000	Dinas Pelayanan Pajak	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional
4	Badan Kepegawaian Daerah	26.302.500		26.302.500		-	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum	288.136.200	859.163.500	288.136.200		859.163.500	PT.Tunggal Jaya Satya	Penurapan Kali Baru Timur (fisik)
		768.504.580	21.601.280.452	754.517.780	13.986.800	21.601.280.452	KSO Buminata Ruhaak Tunggal	Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (fisik)
		687.997.166	399.564.778	687.997.165	1	399.564.778	PT.Probicindo Tunggal Taruna	Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (fisik)
		1.994.706.851	275.590.484	1.994.706.849	2	275.590.484	PT.Bunga Tanjung Raya	Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (fisik)
		1.356.529.944	1.147.266.798	1.356.529.944		1.147.266.798	PT.Bunga Tanjung Raya	Pembangunan Jalan Tembus & Missing Link Lanjutan (Jl.Tb.Kelapa Gading Menuju Terminal Pulo Gadung - Jl.Tbs Boulevard Timur - Pegangsaan Dua) (fisik)
			108.645			108.645	PT.Asiana Technologies Lestary	Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)
			196.000.640			196.000.640	PT.Dian Primekon	Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (pengawasan)
			45.969.040			45.969.040	CV.Fortuna Konsulindo	Penurapan Kali Baru Timur (pengawasan)
			810.428.388			810.428.388	PT.Jasakons Putra Utama	Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (pengawasan)
			57.132.350			57.132.350	PT.Konsidotama Persadaloka	Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (pengawasan)
			104.908.485			104.908.485	PT.Triduta Mitraparama	Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (pengawasan)
			12.393.458.104			12.393.458.104	PT.Asiana Technologies Lestary	Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)
			385.528.268			385.528.268	PT. Idee Murni Pratama	Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik)
			404.309.903			404.309.903	PT. Sartonia Agung	Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
			14.500.617.147			14.500.617.147	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Cipete (Fisik)
			13.982.046.075			13.982.046.075	JO. Utama - Nindya	Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Taman Brawijaya (Fisik)
			1.905.355.599			1.905.355.599	PT. Modern - Lampiri, KSO	Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M), Paket Prapanca (Fisik)
			25.547.713.776			25.547.713.776	PT. WIKA - Jaya Konstruksi, KSO	Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Casablanca (Fisik)
			21.163.062.967			21.163.062.967	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Satrio (Fisik)
			5.605.237.542			5.605.237.542	PT. Istaka - Sumbersari, KSO	Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Mas Mansyur (Fisik)
			12.124.890			12.124.890	PT. Nindya Karya (Persero)	On-Off Ramp Sisi Timur Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang (Fisik)
			12.014.714			12.014.714	PT Nindya Karya (Persero)	On-Off Ramp Sisi Barat Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang (Fisik)
6	Sudin PU Jalan Jakarta Selatan	805.053.390	481.126.587	805.053.390		481.126.587	PT. Duta Pribumi Utama	Pekerjaan Ducting System Kawasan Blok M
7	Sudin PU Tata Air Jakarta Timur	-	285.066.332	-		285.066.332	PT. Godhar Utama Kharisma	Pembangunan Sal. Sisi Timur Jl. Tol Cakung(Kali Cakung s.d Crossing Tol)
8	Sudin Pertamanan - Timur	-	88.768.000	-	-	88.768.000	PT. Widyacitra Gumilangsari	Penataan Taman Segitiga Putaran Asrama Haji Jakarta Timur
		-	88.925.000			88.925.000	PT. Asanisi Rejeki	Peningkatan Taman Cipinang Elok RW 10 Depan Mesjid Al Iman
9	Dinas Perhubungan	83.006.000		83.006.000		-	CV. Angeline Jaya Mandiri	Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Todo Consult	Pemeliharaan Bangunan Terminal Kalideres (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	CV. Galuh	Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Bangunan Terminal Klender (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	CV. Galuh	Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Melayu (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Terminal Manggarai (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Terminal Pasar Minggu (Konsultan Pengawasan)
		3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti (Konsultan Perencanaan)
		6.930.000		6.930.000		-	CV. Galuh	Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Terminal Ragunan (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Terminal Tanjung Priok (Konsultan Pengawasan)
		3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Emplesemen Terminal Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
		6.930.000		6.930.000		-	CV. Galuh	Pemeliharaan Saluran Terminal Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Terminal Pulo Gadung (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		6.930.000		-	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Terminal Tanah Merdeka (Konsultan Pengawasan)
		6.930.000		5.720.000		1.210.000	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Terminal Muara Angke (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Todo Consult	Pemeliharaan Saluran Terminal Kalideres (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Todo Consult	Pemeliharaan Saluran Terminal Senen (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Terminal Rawamangun (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Komsha Akur Consult	Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Kampung Melayu (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Tanjung Priok (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Senen (Konsultan Pengawasan)
		1.950.000				1.950.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan (Konsultan Perencanaan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Komsha Akur Consult	Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan (Konsultan Perencanaan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Kalideres (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Komsha Akur Consult	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Pulo Gadung (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Komsha Akur Consult	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus TMB Pulo Gebang (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kalideres (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Komsha Akur Consult	Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)
		3.850.000		3.850.000		-	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Jakarta Kota (Konsultan Pengawasan)
		50.000.000				50.000.000	CV. Galuh	Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulo Gebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK.Gub)
		3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Emplasemen Terminal / Depo (Konsultan Perencanaan)
		50.000.000				50.000.000	Sugeng W,M.Widigdo & Rekan	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X (Konsultan-Legal Opinion)
		50.000.000				50.000.000	Sugeng W,M.Widigdo & Rekan	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan-Legal Opinion)
		12.364.000				12.364.000	PT. Alfriz Auliatama	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Terminal, Gedung Sudinhub Jakarta Barat, Gedung Knator Penerbitan Sudinhub Jakarta Timur (Konsultam Pengawasan)
		24.519.000				24.519.000	CV. Galuh	Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks Kanwil, Ruang Aula Dishub (Konsultan Pengawasan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
		12.364.000				12.364.000	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Gedung kantor Dishub Gedung 1 (eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan)
		29.305.500				29.305.500	CV. Cipta Sukses Raya	Suku Cadang Dan Pemeliharaan Kendaraan
		49.890.500		49.890.500		-	PT. Putra Galunggung	Kajian Kelembagaan Pengelolaan Terminal Bus Pulo Gebang
		37.180.000		37.180.000		-	PT. Qorina Konsultan Indonesia	Perawatan Tanah Sarana Umum Dermaga Pelabuhan Muara Angke (Konsultan Pengawasan)
		82.252.500		82.252.500		-	PT. Komsha Akur Consult	Pengerukan Kolam Pelabuhan Muara Angke (Konsultan Pengawasan)
10	Sudin Kesehatan - Jakpus		2.894.796.015			2.894.796.015	PT. Andi Syam Putra Perkasa	Rehab Total Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar (Rawat Inap)
			68.455.380			68.455.380	PT. Tata Guna Pratama	Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur Batu)
			76.771.200			76.771.200	CV. Guna Rogate Indah	Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur
			74.950.000			74.950.000	PT. Simanindo Bintang Semesta	Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar baru III
			75.760.900			75.760.900	PT. Catur Eka Cipta	Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Sawah Besar (Rawat Inap)
			1.352.000			1.352.000	PT. Pola Intikonsulindo	Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur Batu
			1.556.387			1.556.387	PT. Komsha Akur Consult	Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Galur
			2.108.253			2.108.253	PT. Andalusia Konsulindo	Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Johar Baru III
			34.420.000			34.420.000	PT. Adhikara Mitra Cipta	Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
			35.354.375			35.354.375	PT. Gubahreka Consultant	Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Sawah Besar (Rawat Inap)
11	Sudin Kesehatan - Jaksel		1.894.684.700			1.894.684.700	CV. Agusyamin Persada	Pembangunan/Pengembangan Puskesmas Rawat Inap selain RB dan Alat-alat Ruang Perawatan untuk Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan
12	UPT. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan	97.212.500		97.212.500		-	PT. Aldonial Putra Perkasa	Pengadaan Peralatan Digital (Kamer dan Ipad)
13	Dinas Pendidikan	-	8.753.046			8.753.046	PD. PAL JAYA	Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012
			8.912.083			8.912.083	PD. PAL JAYA	Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012
			36.000.000			36.000.000	PT. Eldenair Pratama	Lanjutan Penyelesaian Rehab Total Gedung SDN Kayu Putih 09
14	Pusat Pendidikan Pelatihan Kejuruan (Pusdiklatjur Pulogadung)	-	254.982.800		-	254.982.800	CV.Itoku	Perbaikan Plafon Ruang Bengkel Otomotif
15	Dinas Pelayanan Pajak	1.409.997.942		1.409.997.942		-	PT. Pertamina	Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bulan November s.d Desember 2009 ke PT. Pertamina
		3.450.995				3.450.995	PT.AKR Corporindo	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009
		2.197.283				2.197.283	PT. Medco Sarana Kalibaru	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
		2.211.709				2.211.709	PT. Patra Niaga	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009
		1.954.736				1.954.736	PT. Petronas Siaga Indonesia	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009
		95.284.486				95.284.486	PT.Shell Indonesia	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009
		968.977				968.977	PT. Solar Premium Central	Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009
		2.667.109.851	-	2.667.109.851		-	PT.PLN	Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bulan November s.d Desember 2009 ke PT. PLN
			15.624.376.723			15.624.376.723	PT. Seaworld Indonesia	Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
16	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.900.000	16.600.235	1.900.000		16.600.235	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan tunjangan jabatan danKekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
		124.300.319		124.300.319		-	PT. Paharas Mitra Utama	Pekerjaan Cleaning Service Gedung Arsip Bulan Juli 2009
		78.963.000		78.963.000		-	CV. Cakra Nasional	Pekerjaan Cleaning Service Gedung Mitra Praja Bulan Juli 2009
		142.002.000		142.002.000		-	CV. Yosit Anugrah Nasional	Pekerjaan Cleaning Service Gedung PTA Bulan Juli s.d September 2009
		99.696.378		99.696.378		-	PT. Rasatama Wulan Persada	Pekerjaan Cleaning Service Gedung PKK Bulan Juli 2009
		122.701.810		122.701.810		-	CV. Dana Simba	Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran Bulan Januari s.d Juli 2009
		115.068.723		115.068.723		-	CV. Charles Marpa Prima	Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran Bulan Agustus s.d Desember 2009
		35.600.000		35.600.000		-	PD. Chandra Kirana	Pekerjaan Cleaning Service Villa Cipanas bulan Juli s.d Desember 2009
		48.632.200		48.632.200		-	PT. Sayidinah Utama	Pekerjaan Cleaning Service Gedung Villa Mega Mendung Bulan Juli s.d Desember 2009
17	Dinas Komunikasi dan Informasi	99.650.000		-	-	99.650.000	An. Arif RahmanP,CS	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pengembangan Sistem E-TKD,
		48.163.335		48.163.335		-	PT. Montex Buana Selaras	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames
		45.823.800		45.823.800		-	PT. Socio Komunikasi Indonesia	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames
		49.022.600		49.022.600		-	Expressa Putra Gemilang	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames
		440.185.460		440.185.460		-	PT. Stars Yudhatama	Paket Pekerjaan TV. Magaine (Jakarta untuk Semua)
18	Dinas Perumahan		4.726.324.275			4.726.324.275	PT. Jaya Konstruksi MP	Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A1 dan A2 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik
			90.632.400			90.632.400	PT. Eneste	Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A1 dan A2 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Pengawasan
			2.207.489.018			2.207.489.018	PT. Jaya Konstruksi MP	Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A3 dan A4 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik
			46.426.600			46.426.600	PT. Wahana Cipta Bangun Wisma	Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A3 dan A4 (Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Pengawasan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
19	Sudin Perumahan Jakarta Utara		129.346.250			129.346.250	PT. Sabila Trancana Cipta	Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel. Kelapa Gading Barat
			129.112.500			129.112.500	PT. Aditia Ridho Gumilang	Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel. Pegangsaan Dua
20	Dinas Koperasi dan UKM	-	6.691.650	-		6.691.650	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
21	Dinas Olahraga dan Pemuda	75.130.000	2.849.200	52.717.668	22.412.332	2.849.200	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
22	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	152.553.793			1	152.553.792	PT. Tota Karya Givanni	Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
23	Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan		367.125.772			367.125.772	PT. Berkah Taruli Jaya	Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.782.500		20.782.500		-	PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati	Pengadaan Peralatan Tata Suara Gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat
		47.916.000		47.916.000		-	PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati	Pengadaan Alat Pendingin AC Gedung Kesenian
25	Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur	113.375.000		113.375.000		-	CV. Bahana Nusantara	Jasa Konsultasi Perencanaan Lingkungan
26	Sudin Kebudayaan Kota Adm. Jaksel		149.743.000			149.743.000	PT. Permata Elang Sakti	Pemeliharaan Kantor Pengelola PBB
27	Sudin Perijinan Bangunan Kota Adm. Jakarta Utara		48.757.500			48.757.500	PT. Invarr Indonesia	Audit Sistem Manajemen Mutu
28	Dinas Perindustrian dan energi	-	74.173.500			74.173.500	CV. Catur Tunggal	Evaluasi Penurunan Tanah Sumur Dalam di Wilayah Jakarta
29	Kota Administrasi Jakarta Barat	112.353.881		112.353.881		-	PT. Theolive Marganda	Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 1 s.d 5
		101.401.080		101.401.080		-	CV. Cakrawala Mada Mombu	Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 6 s.d 11
		78.748.186		78.748.186		-	CV. Karya Mavoli	Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 1 s.d 4
		47.320.310		47.320.310		-	PT. Marlin Ekatama	Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 5 s.d 7
		59.382.038		59.382.038		-	CV. Sanggar Jaya	Pekerjaan Cleaning Service Gedung Parkir
		30.593.640		30.593.640		-	CV. Sigma Chittra Pratama	Pekerjaan Cleaning Service Kantor Walikota JB, Jl. S. Parman
		46.508.440		46.508.440		-	CV. Dana Simba	Pekerjaan Cleaning Service Masjid dan Ruang Serbaguna
		33.614.196		33.614.196		-	CV. Dharma Pratama	Pekerjaan Cleaning Service Pedestrian
		34.127.500		34.127.500		-	PT. Indocare Pasifik	Jasa Pengharum Ruangan Blok A
		6.274.400		6.274.400		-	PT. Dwi Mitra Cempaka	Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok A
		15.345.000		15.345.000		-	PT. Bonny Laksana Prima	Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan Blok B
		2.802.800			2.802.800	-	CV. Tiara Putri Persada	Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok B

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
		22.898.700		22.898.700		-	CV. Gitta Bally Indah	Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Dalam
		13.454.000		13.454.000		-	PT. Nuansa Arga Surya	Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Luar
		17.924.940		17.924.940		-	CV. Karya Bima Abadi	Pekerjaan Cleaning Service Gedung Sudin Penda I
		9.130.000		9.130.000		-	CV. Hati Mulia	Pekerjaan Pengharum Telepon
		12.617.000			12.617.000	-	PT. Cahaya Situ Alam	Pekerjaan Cleaning Service Aquarium
		65.708.538		65.708.538		-	PT. Bangkit Nitya Murni	Pekerjaan ME I
		101.753.400		101.753.400		-	CV. Azra Putri Persada	Pekerjaan ME II
		17.001.248		17.001.248		-	CV. Eka Intan Mandiri	Pekerjaan ME III
		84.617.242		84.617.242		-	CV. Nata Lambera Sejahtera	Pekerjaan ME IV
		27.134.140		27.134.140		-	CV. Rangindo Lestari	Pekerjaan ME Ktr Lama
		14.348.400		14.348.400		-	CV. Kidung Rahayu	PekerjaanME Masjid
		101.774.600		101.756.600	18.000	-	CV. Dwi Karya	Pekerjaan ME LIFT
		6.479.000		6.479.000		-	CV. Supinro Maju	Pekerjaan ME Gondola
		17.689.056		17.689.056		-	CV. Nuri Citra Utama	Pekerjaan ME Plumbing Blok A, B dan C
		3.967.700		3.967.700		-	CV. Damar Kesita	Pekerjaan ME Plumbing Ktr Lama
		2.976.700		2.976.600	100	-	CV. Manunggal Teguh Mandiri	Pekerjaan ME Plumbing Masjid
		23.362.768		23.362.768		-	CV. Dintam	Pekerjaan Perawatan Taman Depan Kantor Walikota
		15.732.904		15.732.904		-	CV. Monika Putri Sejati	Pekerjaan Perawatan Taman Belakang Kantor Walikota
		9.176.420		9.176.420		-	CV. Wigati Wicaksono	Pekerjaan Perawatan Taman Dalam (Pot)
		5.244.470		5.244.470		-	PT. Pancur Cahaya Rekeji	Pekerjaan Perawatan Taman Pendestrian
		8.268.520		8.268.250	270	-	CV. Baja Perkasa	Pekerjaan Perawatan Taman Kantor Lama
			9.172.200			9.172.200	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah dan Gaji Pegawai
30	Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	25.453.500			25.453.500	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah dan Gaji Pegawai
		119.792.921			119.792.921	-	PT. Marpan Jaya Abadi	Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2011	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012			UTANG PER 31 DESEMBER 2012	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	9	
		173.096.000		173.096.000		-	CV. Rosfer Indah	Pemeliharaan CCTV Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan
			68.447.487			68.447.487	CV. Mutiara Cemerlang	Pengadaan Seragam Petugas Pelayanan PTSP
			135.630.000			135.630.000	PT. Inti Konsultan Indonesia	Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
			144.595.000			144.595.000	PT. Cinipta Triutama Jaya	Pelaksanaan Audit/Pemeliharaan ISO 9001
			98.196.560			98.196.560	PT. Adian Raja Perdana	Pembuatan Partisi Ruangan
			143.071.500			143.071.500	CV. Andal Pagar Alam	Pengadaan Meja Kerja Untuk PTSP
			113.025.000			113.025.000	CV. Andal Pagar Alam	Penngadaan Kursi Untuk PTSP
			41.250.000			41.250.000	PT. Adian Raja Perdana	Pengadaan Hiasan Untuk PTSP
			125.840.000			125.840.000	CV. Ganesha Putra Metro	Pengadaan Meubleir Meja Rapat Untuk Kecamatan dan Kelurahan
			629.351.500			629.351.500	PT. Triple Eratama	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Pancoran
			579.977.000			579.977.000	CV. Sopinro Maju	Pembangunan Rumah Dinas Lurah Grogol Utara
			582.331.408			582.331.408	PT. Gita Tamsia	Pembangunan Rumah Dinas Lurah Pejaten Timur
31	RSUD Duren Sawit	54.804.206		32.000.000	-	22.804.206	PNS Pemprov DKI Jakarta	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
JUMLAH A		39.645.760.836	154.145.369.179	38.847.163.925	173.995.227	154.769.970.863		
B	Utang Pajak Pusat							
1	Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo	100.591.407.536		62.307.448.512		38.283.959.024	Kantor Pelayanan Pajak	Kekurangan Pembayaran PPh Akibat Likuidasi PT. Jakarta Tourisindo
JUMLAH B		100.591.407.536	-	62.307.448.512	-	38.283.959.024		
SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (Jumlah A+B)		140.237.168.372	154.145.369.179	101.154.612.437	173.995.227	193.053.929.887		

**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2012**

(Dalam Ribuan Rupiah)																		Kepemilikan Daerah		
No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah		Cost Method	Equity Method	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19 (16 X 17)	20 (18 + 19)
1	Bidang Perbankan																			
1.	PT Bank DKI	Audited 2012	26.239.952.000	97.637.000	282.037.000	26.619.626.000	22.687.871.000	1.995.346.000	24.683.217.000	-	1.131.159.000	1.000	(1.342.000)	806.591.000	1.936.409.000	99,91%			1.934.697.120	1.934.697.120
	Sub Total 1		26.239.952.000	97.637.000	282.037.000	26.619.626.000	22.687.871.000	1.995.346.000	24.683.217.000	-	1.131.159.000	1.000	(1.342.000)	806.591.000	1.936.409.000			-	1.934.697.120	1.934.697.120
2	Bidang Asuransi																			
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2012	1.294.977.334	60.085.165		1.355.062.499	942.761.721	57.963.570	1.000.725.290		194.690.000	1.430.000	1.264.985	150.620.656	348.005.641	5,99%		8.680.000		8.680.000
	Sub Total 2		1.294.977.334	60.085.165	-	1.355.062.499	942.761.721	57.963.570	1.000.725.290	-	194.690.000	1.430.000	1.264.985	150.620.656	348.005.641			8.680.000	-	8.680.000
3	Bidang Konstruksi																			
1.	PT Jakarta Proptindo	Audited 2012	1.021.902.488	357.287.747	23.749.520	1.402.939.755	500.048.412	87.271.621	587.320.033		529.995.757	50.000.000	-	235.623.965	815.619.722	99,93%			815.081.101	815.081.101
	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2011	27.564.000	483.260.000	2.736.000	513.560.000	70.263.000	7.835.000	78.098.000	-	3.117.000	131.653.737	1.273.090.466	1.669.646.961	3.077.508.164	38,80%			1.194.073.168	1.194.073.168
2.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2012	174.908.349	119.588.696	3.312.315	297.809.360	27.565.223	168.550.525	196.115.747	835.352	66.002.771	-	-	34.855.490	100.858.261	100,00%			100.858.261	100.858.261
	Sub Total 3		1.224.374.837	960.136.443	29.797.835	2.214.309.115	597.876.635	263.657.146	861.533.780	835.352	599.115.528	181.653.737	1.273.090.466	1.940.126.416	3.993.986.147			-	2.110.012.529	2.110.012.529
4	Bidang Jasa Lainnya																			
1.	PT Jakarta International Expc	Audited 2007	19.597.963	1.317.961.793	-	1.337.559.756	43.977.931	1.003.234.399	1.047.212.329		300.000.000	-	-	(9.652.573)	290.347.427	13,14%		39.375.000		39.375.000
2.	PDAM Jaya	Audited 2012	452.758.106	173.744.592	-	626.502.697	1.057.944.323	417.080.065	1.475.024.389		288.364.100.11	-	-	(1.136.885.791,36)	(848.521.691,25)	100,00%			-	-
3.	PD PAL Jaya	Audited 2012	57.573.496	90.208.160	-	147.781.657	15.865.097	6.894.798	22.759.895		94.752.402	-	-	30.269.360	125.021.761	100,00%			125.021.761	125.021.761
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2012	623.597.345	1.554.097.349	-	2.177.694.694	228.217.226	1.573.341.711	1.801.558.937		18.319.098	315.240.404	-	42.576.255	376.135.757	100,00%			376.135.757	376.135.757
	Sub Total 4		1.153.526.910	3.136.011.895	-	4.289.538.804	1.346.004.577	3.000.550.974	4.346.555.551	-	701.435.600	315.240.404	-	(1.073.692.750)	(57.016.746)			39.375.000	501.157.518	540.532.518
5	Bidang Perdagangan																			
1.	PT Food Station Tipinang	Audited 2012	9.496.160	39.273.259	-	48.769.419	10.023.343	20.943.505	30.966.848		300.000	-	-	17.502.571	17.802.571,41	74,67%			13.292.587	13.292.587
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2012	16.905.253	53.384.071	-	70.289.324	23.725.844	13.414.583	37.140.427		33.918.096,68	-	18.373.233,47	(19.142.432,68)	33.148.897,47	100,00%			33.148.897	33.148.897
	Sub Total 5		26.401.413	92.657.330	-	119.058.743	33.749.187	34.358.088	68.107.275	-	34.218.097	-	18.373.233	(1.639.861)	50.951.469			-	46.441.484	46.441.484
6	Bidang Pariwisata																			
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2012	720.587.964	1.667.675.315	-	2.388.263.279	460.380.547	617.806.340	1.078.186.887	54.216.383	400.000.000	36.709.233	-	819.150.776	1.255.860.009	72,00%			904.219.207	904.219.207
2.	PT Jakarta Tourindo	Audited 2012	53.371.187	515.144.555	-	568.515.741	34.128.404	54.691.012	88.819.416		462.011.000	-	(16.990.392)	34.675.717	479.696.325	99,35%			476.581.488	476.581.488
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited/2009	14.523.495	359.294.759	-	373.818.254	99.631.056	56.275.707	155.906.763		48.870.000	592.242.796	-	(423.201.305)	217.911.491	8,08%		3.951.000		3.951.000
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	820.579	37.187.456	3.149.640	41.157.675	374.485	1.923.279	2.297.764		50.000.000	236.600	2.039.534	(13.416.224)	38.859.910	2,69%		1.345.900		1.345.900
	Sub Total 6		789.303.225	2.579.302.085	3.149.640	3.371.754.949	594.514.493	730.696.338	1.325.210.830	54.216.383	960.881.000	629.188.629	(14.950.857)	417.208.964	1.992.327.735			5.296.900	1.380.800.695	1.386.097.595
7	Bidang Kawasan Industri																			
1.	PT Jakarta Industrial Estate Puloagung	Audited 2012	168.351.651	97.048.260	-	265.399.911	39.536.052	1.550.525	41.086.576		80.000.000	-	3.122	144.310.213	224.313.335	50,00%			112.156.667	112.156.667
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2012	269.306.433	527.696.684	-	797.003.117	139.108.612	35.442.229	174.550.841		363.945.000	111.967.695	84.930.000	146.454.651	707.297.346	26,85%		209.692.695		209.692.695
	Sub Total 7		437.658.085	624.744.944	-	1.062.403.028	178.644.664	36.992.753	215.637.417	-	443.945.000	111.967.695	84.933.122	290.764.864	931.610.681			209.692.695	112.156.667	321.849.362
8	Bidang Angkutan Darat																			
1.	PT Ratax Armada	Audited 2012	652.236	3.430.000	-	4.082.236	2.620.406	161.475	2.781.881		5.500.000	-	-	(4.199.645)	1.300.355	28,00%		-	364.099	364.099
2.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2012	141.761.777	28.964.646	-	170.726.423	6.082.971	2.798.750	8.881.721		165.013.000	65.245.611	-	(68.413.909)	161.844.702	99,70%			161.354.302	161.354.302
	Sub Total 8		142.414.013	32.394.646	-	174.808.659	8.703.377	2.960.225	11.663.601	-	170.513.000	65.245.611	-	(72.613.554)	163.145.057			-	161.718.402	161.718.402
9	Bidang Aneka Industri																			
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2012	631.333.221	113.973.614	-	745.306.835	119.919.552	27.175.770	147.095.322	11.621.208	16.013.181	19.015.656	-	551.561.468	586.590.305	26,25%			154.000.249	154.000.249
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk																			
3.	PT Cemani Toka	Audited 2012	290.365.947	74.699.915	-	365.065.861	227.849.004	109.348.964	337.197.968		112.968.859	-	(2.869.839)	(82.231.127)	27.967.893	27,42%		27.059.360		27.059.360
	Sub Total 9		921.699.168	188.673.529	-	1.110.372.696	347.768.556	136.524.734	484.293.290	11.621.208	128.982.040	19.015.656	(2.869.839)	469.330.341	614.458.198			27.059.360	154.000.249	181.059.609
10	Bidang Rumah Sakit																			
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2012	51.463.960	80.133.808	3.078.587	134.676.356	12.204.980	15.764.311	27.969.290		100.308.278	-	-	6.398.787	106.707.065	51,00%		51.157.222		51.157.222
	Sub Total 10		51.463.960	80.133.808	3.078.587	134.676.356	12.204.980	15.764.311	27.969.290	-	100.308.278	-	-	6.398.787	106.707.065			51.157.222	51.157.222	51.157.222
	Total Seluruh Bidang Industri		32.281.770.944	7.851.776.844	318.063.062	40.451.610.850	26.750.099.188	6.274.814.138	33.024.913.325	66.672.943	4.465.247.542	1.323.742.732	1.358.499.110	2.933.094.864	10.080.584.247	-		341.261.177	6.452.141.886	6.742.245.841

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Lab a (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Lab a (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI	Audited 2012	1.432.009.000	(992.562.000)	439.447.000	9.108.000	-	(110.759.000)	337.796.000
	Sub Total 1		1.432.009.000	(992.562.000)	439.447.000	9.108.000	-	(110.759.000)	337.796.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2012	886.284.712	(611.241.895)	275.042.817	(157.482.647)		(22.740.126)	94.820.044
	Sub Total 2		886.284.712	(611.241.895)	275.042.817	(157.482.647)	-	(22.740.126)	94.820.044
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Propertindo	Audited 2012	210.298.241	(122.208.253)	88.089.988	35.192.695		(21.386.411)	101.896.271
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2010	107.592.000	23.679.000	83.913.000	46.941.000	(882.000)	(6.845.000)	123.127.000
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2012	38.269.337	(21.300.131)	16.969.207	13.856.661	(2.325.877)	(439.160)	28.060.830
	Sub Total 3		356.159.578	(119.829.384)	188.972.194	95.990.355	(3.207.877)	(28.670.571)	253.084.101
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)		1.000.832
2.	PD AM Jaya	Audited 2012	2.267.827.594	(2.120.097.890)	147.729.704	37.667.824	(124.625.806)	(12.078.713)	48.693.009
3.	PD PAL Jaya	Audited 2012	38.272.048	(23.227.614)	15.044.434	3.324.483	(487.605)	(3.942.355)	13.938.957
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2012	354.850.268	(262.074.026)	92.776.242	19.808.144	(11.305.726)	(35.113.925)	66.164.734
	Sub Total 4		2.797.640.837	(2.532.847.619)	264.793.218	61.059.932	(144.920.626)	(51.134.993)	129.797.531
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Audited 2012	145.633.208	(135.523.684)	10.109.524	14.556		(1.692.691)	8.431.390
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2012	6.175.902	(9.101.916)	(2.926.014)	248.239	(792.613)	973.437	(2.496.951)
	Sub Total 5		151.809.110	(144.625.600)	7.183.510	262.795	(792.613)	(719.254)	5.934.438
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2012	1.053.738.348	(596.651.021)	457.087.327	25.415.217	(243.356.364)	(61.296.939)	177.849.242
2.	PT Jakarta Tourindo	Audited 2012	144.526.916	(124.287.096)	20.239.819	1.553.250	(1.700.580)	(5.024.393)	15.068.097
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2009	54.289.392	(67.118.462)	(12.829.070)	-	(4.363.938)	(3.231.988)	(20.424.996)
4.	PT Pakuan	Audited 2010	3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)	-	(1.528.851)
	Sub Total 6		1.256.228.834	(793.300.239)	462.928.595	27.066.205	(249.477.988)	(69.553.320)	170.963.492
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2012	89.763.868	(28.044.492)	61.719.376	6.753.317	(27.327.474)	(7.860.968)	33.284.251
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2012	308.120.634	(239.246.836)	68.873.797		(35.729.960)	(19.580.157)	13.563.680
	Sub Total 7		397.884.502	(267.291.328)	130.593.174	6.753.317	(63.057.435)	(27.441.125)	46.847.931
	Jumlah dipindahkan		7.278.016.572	(5.461.698.065)	1.768.960.508	42.757.957	(461.456.539)	(311.018.389)	1.039.243.538

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
	Jumlah pindahan		7.278.016.572	(5.461.698.065)	1.768.960.508	42.757.957	(461.456.539)	(311.018.389)	1.039.243.538
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ratax Armada	Audited 2012	2.529.668	(1.060.525)	1.469.143	12.881	(1.806.824)	-	(324.799)
2	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2012	-	(27.164.671)	(27.164.671)	4.906.119	-	-	(22.258.552)
	Sub Total 8		2.529.668	(28.225.195)	(25.695.527)	4.919.000	(1.806.824)	-	(22.583.351)
9	Bidang Aneka Industri								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2012	719.951.793	(202.564.206)	517.387.587	9.888.518	(239.771.035)	(74.083.993)	213.421.077
2.	PT Alakasa Industrindo, Tbk.				<i>divestasi 2012</i>				
3.	PT Cemani Toka	Audited 2012	478.345.953	(417.693.502)	60.652.451	16.695.371	(33.904.137)	(11.139.488)	32.304.197
4.	PT Determinan Indah				<i>divestasi 2011</i>				
	Sub Total 9		1.198.297.746	(620.257.708)	578.040.038	26.583.889	(273.675.172)	(85.223.481)	245.725.274
10	Bidang Rumah Sakit								
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2012	143.767.578	(147.538.308)	(3.770.729)	1.961.196	(399.115)	(588.735)	(2.797.383)
	Sub Total 10		143.767.578	(147.538.308)	(3.770.729)	1.961.196	(399.115)	(588.735)	(2.797.383)
	Total Seluruh Bidang Industri		8.622.611.565	(6.257.719.276)	2.317.534.289	76.222.043	(737.337.649)	(396.830.605)	1.259.588.078

